

**TANTANGAN PERENCANAAN SEKOLAH
PADA TINGKAT *COMMUNE* DI PERANCIS
(STUDI DI *COMMUNE* LYON DAN VAULX-EN-VELIN)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

**ANGGA NUGRAHA HAFIIZ
L4D 006 041**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2008**

**TANTANGAN PERENCANAAN SEKOLAH PADA TINGKAT *COMMUNE*
DI PERANCIS: STUDI DI *COMMUNE* LYON DAN VAULX-EN-VELIN**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

**ANGGA NUGRAHA HAFIIZ
L4D 006 041**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 30 Desember 2008

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Desember 2008

Tim Pembimbing:

Laurette Wittner (Laboratorium RIVES – ENTPE)
Jawoto Sih Setyono (Universitas Diponegoro)

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

DR. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain atau institusi lain, maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, Desember 2008

ANGGA NUGRAHA HAFIIZ
L4D 006 041

ABSTRAK

Di Perancis, sejak hampir satu setengah abad yang lalu, Negara menjamin pendidikan publik yang wajib, gratis, dan sekular secara adil dan merata bagi semua anak usia sekolah yang tinggal di wilayahnya. Pada tingkat pendidikan dasar, pemerintah pusat membagi tanggung jawab dan wewenangnya kepada commune (wilayah administratif terkecil di Perancis) sebagai perencana, pemilik, dan pengelola sekolah. Kini, commune menjadi aktor kunci pendidikan dasar yang terlibat tidak hanya dalam pendidikan formal di sekolah. Melalui kajian pustaka, tinjauan pers, stage (kerja praktik), dan wawancara, studi ini mengangkat seluk beluk perencanaan sekolah pada tingkat wilayah administratif tersebut.

Lyon dan Vaulx-en-Velin adalah dua commune “muda” dengan karakteristik yang berbeda: sebagai commune sentral dan sebagai banlieu (periferi kota besar) yang dinilai “sulit”. Pada tingkat nasional, seluruh wilayah Vaulx-en-Velin ditetapkan sebagai Zona pendidikan prioritas (ZEP) sehingga semua sekolah di commune ini memperoleh hak prioritas, sementara hanya 23% sekolah publik di Lyon yang mendapat perlakuan serupa. Pada kenyataannya, “diskriminasi positif” tersebut justru sedikit banyak membentuk citra “negatif” yang mempengaruhi preferensi orang tua murid. Karena aturan périmètre scolaire (sektor sekolah), pilihan lokasi hunian juga menentukan sekolah anak. Hal ini yang dinilai memicu segregasi wilayah dan sosial dalam dunia pendidikan.

Sistem sektor sekolah merupakan metode yang transparan dan tegas untuk membagi populasi murid secara geografis, namun lebih dari itu, ia sekaligus dapat berfungsi sebagai “penjaga” keberlangsungan sekolah dan mixité sociale (pembauran sosial) di lingkungan pendidikan. Kendati banyak dikritik tajam yang berakibat pada penghapusan kebijakan serupa pada pendidikan menengah, sistem ini bertahan pada pendidikan dasar karena kebutuhan yang berbeda.

Perbedaan karakteristik antara kedua commune mempengaruhi pilihan kebijakan pendidikan mereka. Lyon memiliki sendiri standar bangunan sekolah yang lebih tinggi dibandingkan standar nasional. Namun berbeda dengan Vaulx-en-Velin, isu pembauran sosial belum menjadi perhatian otoritas pendidikan di Lyon. Vaulx-en-Velin memilih menyekolahkan anak lebih dini, mulai usia 2 tahun, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Selain perbedaan tersebut, kedua commune ini menghadapi tantangan serupa: pertumbuhan populasi murid dan permasalahan distribusi kelas yang kurang merata.

Perencanaan sekolah tidaklah sebatas masalah matematis. Ia adalah isu politik, sosial, sekaligus teknis, yang melibatkan sejumlah aktor dengan interest berbeda. Tantangannya beragam: dari evolusi demografi, kondisi penduduk, karakteristik wilayah, hingga perkembangan sistem pendidikan dan teknologi. Kebijakan yang spesifik dan adaptif diperlukan untuk merespon itu semua.

Kata Kunci: perencanaan sekolah, pendidikan dasar, commune, sektor sekolah.

Lokasi: Lyon, Vaulx-en-Velin, Grand Lyon, Rhône, Perancis.

ABSTRACT

In France, for almost one and a half century, Nation guarantees public education that is compulsory, free of charge and secular for all children resides in its territory in equal manner. For primary education, the central government share its responsibilities and competences to the “commune” (the smallest administrative territory in France) as the school planner, owner and organizer. Nowadays, commune becomes the key actor in education who involves not only in formal education at school. Through bibliographical study, review of the press, “stage” (field work), and interviews, this work concerns school planning and management in the French smallest administrative division.

Lyon and Vaulx-en-Velin are two “young” communes with different characteristics: a central commune and a “banlieue” (suburb) considered as “in difficulty”. At national level, all area of Vaulx-en-Velin is classified into Priority education zone (ZEP) so that all schools located in this commune receives some privileges, while only 23% of public schools in Lyon benefit the same treatment. In reality, this “positive discrimination”, more or less, has created “negative” image to the schools that influences parents’ preferences. Due to the school perimeter regulation, the choice of residential location automatically determines the school for children. This is believed as a trigger of regional and social segregation in French education.

The school perimeter is a transparent, fair yet strict system to divide student population geographically. Beyond that, it can also “sustain” the school and promote social mixture in education. Despite having been criticized for more than 20 years that caused the elimination of identic policy for second degree, this system remains for premier degree education based on some different necessities.

Distinct characteristics between the two communes affect the choice of their education policy. Lyon has its own school building standard that is higher than national standard. But different from Vaulx-en-Velin, Lyon has not taken into account the issue of social mixture at their schools. Vaulx-en-Velin chose to send the infants to schools earlier, at the age of 2, considering the needs of his inhabitants. Besides those differences, these communes face the same challenges: the development of student population and the problem of class distribution.

School planning is not just a mathematical problem. It is a politic, social and technical issue that involves several actors with their own interests. The stakes are varied: from demographic evolution, social circumstances, local characteristics, to the development of education system and technology. Specific and adaptive policies are required in order to respond all those questions.

Keywords: *school planning, primary education, commune, school perimeter.*

Location: *Lyon, Vaulx-en-Velin, Grand Lyon, Rhône, France.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Penguasa alam semesta... Hanya dengan ridha dan kasih sayang-Nya tesis ini dapat terealisasi dengan baik.

Tesis ini merupakan tugas akhir dari Program Double Degree Indonesia-Perancis yang saya tempuh sejak Agustus 2006 hingga Desember 2008. Studi ini dilakukan dan disusun di Perancis di bawah bimbingan Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat sebagai pengembangan dari ide yang lahir dan didiskusikan selama saya menempuh studi pada satu tahun pertama di Universitas Diponegoro.

Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam merealisasikan tesis ini.

- Kepada **Prof. DR. Ir. Sugiono Seotomo, CES, DEA**, dan **DR. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc.**, Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, serta **DR. A.B. Susanto, M.Sc.**, Koordinator Beasiswa Unggulan Depdiknas, terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai mahasiswa Program Double Degree Undip-ENTPE. Program ini memberikan begitu banyak pelajaran kepada saya sebagai pelajar sekaligus sebagai pribadi.
- **DR.rer.nat. Ir. Imam Buchori**, sebagai pembimbing pra-tesis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, koreksi, dan saran yang Bapak berikan dengan penuh kesabaran.
- Kepada **semua Bapak dan Ibu pengajar, Pak Jawoto, Pak Ragil, Ibu Ita, Pak Jusup, Ibu Ambar, Cécile, Ibu Vivi, Pak Suluh**, serta **teman-teman di Universitas Diponegoro**, terima kasih banyak atas segala ilmu, nasihat, semangat, dan semua pengalaman berharga.
- *Mme. Laurette WITTNER pour sa patience, son suivi, et ses conseils en tant que maître de TFE à l'ENTPE;*
- *Je remercie M. Yves PERRODIN et Mme. Géraldine GEOFFROY pour leur participation et leurs conseils à la soutenance;*
- *M. Emmanuel MARTINAIS, le Responsable de VA Aménagement et Politique Urbains, Mme. Françoise LAFAYE et Mme. Odile MINARY, que je remercie pour leur accueil, leur aide et leurs conseils depuis mon arrivée en France;*
- *Mon ami, Laurent de PETRICONI, pour sa patience dans la correction du texte français;*
- *Je tiens à remercier aussi toutes les personnes à l'IA du Rhône, à la DE de Lyon et à la DE de Vaulx-en-Velin, qui ont consacré un peu de leur temps à la réalisation du stage et des entretiens, et sans qui ce travail n'aurait jamais vu le jour.*
- *Mes amis en France... Merci et bonne continuation à vous tous!*
- Kepada **Ibu, Ayah, Galih**, dan **Dinda**, *happiness IS REAL when shared... This is for you!*

Semarang, Desember 2008
Angga Nugraha Hafiz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR RINGKASAN ISTILAH.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Lokasi Studi	3
1.3. Tujuan Studi	4
1.4. Metodologi	5
1.5. Sumber Data dan Informasi	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II SISTEM PENDIDIKAN DI PERANCIS.....	11
2.1. Prinsip Dasar	11
2.1.1. Kebebasan dalam Pendidikan	11
2.1.2. Kewajiban Belajar.....	12
2.1.3. Keadilan, Netralitas, dan Sekularitas	13
2.1.4. Pendidikan Publik Gratis	14
2.2. Aktor Pendidikan	15
2.2.1. Pemerintah Pusat.....	15
2.2.2. <i>Rectorat</i> dan <i>Inspection Académique</i>	16
2.2.3. Pemerintah Lokal	19
2.2.4. Sekolah.....	20
2.2.5. Orang Tua Murid	21
2.3. Jenjang Pendidikan.....	22
2.4. Kebijakan Pendidikan	24
2.4.1. <i>Carte Scolaire</i>	24
2.4.2. Proyeksi Jumlah Murid	28
2.4.3. Zona Pendidikan Prioritas.....	29
BAB III PENDIDIKAN DASAR	32
3.1. Peran dan Tujuan.....	32
3.2. Organisasi Pendidikan.....	33

3.3. Organisasi Administratif	34
3.3.1. Jaringan Prasarana.....	34
3.3.2. Sekolah Publik dan Sekolah Privat	36
3.3.3. Sekolah “Standar” dan Sekolah “Prioritas”	38
BAB IV LYON DAN VAULX-EN-VELIN: COMMUNE SENTRAL	
DAN BANLIEUE.....	43
4. 1. Populasi Penduduk	43
4.1.1. Evolusi Demografi: <i>Commune</i> “Muda”	44
4.1.2. Evolusi Jumlah Murid: Sekolah Publik dan Sekolah Privat	48
4.1.3. Aspek Sosial Ekonomi	50
4.1.4. Aspek Sosial Budaya	54
4.2. Sekolah di Wilayah <i>Commune</i>	56
4.2.1. Lyon: Standar Tinggi, Pilihan Beragam.....	58
4.2.2. Vaulx-en-Velin: Sekolah-sekolah ”Prioritas”	60
4.3. Jaringan Pendidikan Prioritas: Sebuah Diskriminasi Positif?	63
4.4. Sekolah Privat: Sebuah Pilihan	66
4.5. Program Pendidikan Tingkat Lokal	68
4.6. Sekolah, Masyarakat, dan <i>Commune</i>	70
BAB V SEKTORISASI SEKOLAH: LEBIH DARI SEKEDAR	
PEMBAGIAN POPULASI MURID.....	75
5.1. Distribusi Jumlah Kelas: Kapasitas Besar, Sebaran Kurang Merata	75
5.2. Sekolah Berkualitas ”Baik” dan ”Buruk”	81
5.2.1. Memilih Lingkungan Tempat Tinggal, Memilih Sekolah.....	81
5.2.2. Permohonan Pindah Sektor Sekolah	85
5.3. Pembauran Sosial: Sebuah Pilihan Otoritas <i>commune</i>	88
5.3.1. Lyon: Sektor Sekolah Tanpa Pembauran Sosial	89
5.3.2. Vaulx-En-Velin: Pembauran Sosial di <i>Commune</i> “Sulit”	91
5.4. Pro dan Kontra Sektorisasi Sekolah.....	93
5.4.1. Antara Harapan dan Kenyataan	93
5.4.2. Penghapusan Sistem Sektor Sekolah Menengah	95
5.4.3. Sektorisasi Sekolah Dasar: Perbedaan Kebutuhan.....	98
5.5. Perencanaan Sekolah: Tantangan Selanjutnya.....	100
BAB VI KESIMPULAN	106
6.1. Kesimpulan	106
6.2. Pelajaran yang Diperoleh	109
DAFTAR PUSTAKA	xiv
LAMPIRAN.....	xvii

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Rekapitulasi Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lokal di Bidang Pendidikan.....	20
TABEL III.1 Jumlah Murid Tingkat Dasar di Académie Lyon (Tahun Ajaran 2007)	35
TABEL IV.1 Evolusi Jumlah Penduduk Sejak Tahun 1962.....	45
TABEL IV.2 Kepadatan Penduduk.....	46
TABEL IV.3 Evolusi Jumlah Murid Institusi Pendidikan Dasar Sejak Tahun 1998	48
TABEL IV.4 Hunian Utama: Jumlah Penghuni dan Status Hunian	50
TABEL IV.5 Populasi Penduduk Usia Aktif dan Standar Hidup	53
TABEL IV.6 Kondisi dan Asal-Usul Rumah Tangga	55
TABEL IV.7 Institusi Pendidikan Dasar Publik	57

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Commune Lyon dan Vaulx-En-Velin dalam Aglomerasi Grand Lyon	6
GAMBAR 2.1 Académie Lyon dalam Région Rhone-Alpes	18
GAMBAR 2.2 Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Per Usia serta Periode Wajib Belajar.....	24
GAMBAR 2.3 Sektor Sekolah Dasar (<i>Ecole Elémentaire</i>) di Vaulx-en-Velin ...	26
GAMBAR 3.1 Siklus Belajar di Institusi Pendidikan Dasar.....	34
GAMBAR 4.1 Grafik Evolusi Jumlah Penduduk Sejak Tahun 1962	46
GAMBAR 4.2 Piramida Penduduk Lyon, Vaulx-En-Velin, dan Rhone.....	48
GAMBAR 4.3 Grafik Evolusi Jumlah Murid Sejak Tahun 1998	49
GAMBAR 4.4 Diagram Hunian Utama Menurut Status Hunian.....	52
GAMBAR 4.5 Diagram Asal-Usul Penduduk	56
GAMBAR 4.6 Diagram Klasifikasi Institusi Pendidikan Dasar Publik.....	58
GAMBAR 4.7 Grafik Evolusi Jumlah Murid di Lyon Sejak Tahun 1998.....	68
GAMBAR 5.1 Aglomerasi Grand Lyon di Région Rhône-Alpes.....	101

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Daftar Pertanyaan Wawancara	xvii
LAMPIRAN B Tesis Versi Bahasa Perancis	xxii
LAMPIRAN C Presentasi Sidang Tesis dalam Bahasa Perancis	xxiii
LAMPIRAN D Lembar Evaluasi Tesis	xxiv

DAFTAR RINGKASAN ISTILAH

Académie:	Pembagian wilayah kerja Pendidikan Nasional, secara umum berkorespondensi dengan wilayah sebuah <i>région</i> . Terdapat 30 <i>académie</i> di seluruh wilayah Perancis.
Arrondissement:	Pembagian subwilayah <i>commune</i> tertentu yang memiliki populasi penduduk yang tinggi. Karena alasan ukurannya, Commune Paris, Lyon, dan Marseille masing-masing dibagi atas 20, 9, dan 16 <i>arrondissement</i> .
Banlieue:	Periferi sebuah kota besar.
Collège:	Jenjang pendidikan setingkat sekolah menengah tingkat pertama.
Commune:	Wilayah administratif terkecil di Perancis, secara umum berkorespondensi dengan wilayah sebuah kota atau desa, dipimpin oleh seorang <i>Maire</i> . Luas wilayah dan terutama populasinya sangat bervariasi. Pada 1 Maret 2008, terdapat 36.783 <i>commune</i> di Perancis.
DE:	<i>Direction de l'Éducation</i> . Otoritas pendidikan dalam struktur organisasi sebuah <i>commune</i> , dipimpin oleh seorang <i>Directeur de l'éducation</i> di bawah <i>Maire</i> .
Département:	Wilayah administratif di Perancis yang merupakan konsentrasi dari sejumlah <i>commune</i> . Perancis terbagi atas 100 <i>département</i> .
Dérogation:	Hak pengecualian dari aturan sektor sekolah yang "mengikat" setiap anak dengan sebuah sekolah publik dalam satu sektor dengan tempat tinggalnya. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak tersebut.
Ecole:	<i>Ecole primaire</i> . Jenjang pendidikan yang terdiri atas <i>école maternelle</i> (setingkat taman kanak-kanak) dan <i>école élémentaire</i> (setingkat sekolah dasar). Berkorespondensi juga dengan sebutan sebuah bangunan sekolah.
IA:	<i>Inspection Académique</i> . Badan Pengawas Pendidikan sebagai perwakilan Departemen Pendidikan Nasional di tingkat <i>département</i> , dipimpin oleh seorang <i>Inspecteur</i> di bawah <i>Recteur</i> .
INSEE:	<i>Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques</i> . Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional.
Lycée:	Jenjang pendidikan setingkat sekolah menengah atas.

Mairie:	Otoritas sebuah <i>commune</i> , berkorespondensi juga dengan sebutan kantor otoritas <i>commune</i> .
MEN:	<i>Ministère de l'Éducation Nationale</i> . Kementerian Pendidikan Nasional.
Périmètre scolaire:	Pembagian wilayah sebuah <i>commune</i> atas beberapa sektor berdasarkan lokasi sekolah publik. Sebuah sektor mencakup satu sekolah beserta wilayah di sekitarnya yang merupakan area pelayanan sekolah tersebut.
Quartier:	Pembagian administratif atau geografis sebuah kota. Juga berarti bagian wilayah kota dari sudut pandang <i>voisinage</i> (hubungan bertetangga), ditentukan oleh area permukiman yang berdekatan.
Rectorat:	Perwakilan Departemen Pendidikan Nasional di tingkat <i>académie</i> , dipimpin oleh seorang <i>Recteur</i> yang ditunjuk oleh Presiden. Berkorespondensi juga dengan sebutan kantor <i>académie</i> .
Région:	Pembagian wilayah administratif tertinggi di Perancis yang terbagi atas beberapa <i>département</i> . Perancis terdiri atas 26 <i>région</i> .
ZEP:	<i>Zone d'Éducation Prioritaire</i> . Zona Pendidikan Prioritas adalah kawasan yang dinilai rentan terhadap dampak ketimpangan sosial, ekonomi, dan budaya yang berakibat pada tingkat <i>échec scolaire</i> (ketidakkulusan sekolah) yang tinggi sehingga pemerintah memperkuat program pendidikan di kawasan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Perancis, pendidikan adalah sebuah “*affaire d’Etat*” (tugas Negara) sejak awal abad ke-19 (Toulemonde, 2003). Alinea ke-13 Pembukaan Konstitusi Perancis yang diterbitkan pada 27 Oktober 1946 menyatakan, “*La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la culture et à la formation professionnelle. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État*” (Negara menjamin kesetaraan akses bagi anak-anak dan orang dewasa dalam pengajaran, kebudayaan, dan pendidikan profesional. Institusi pendidikan publik yang gratis dan sekular pada semua jenjang adalah kewajiban Negara). Konstitusi ini menegaskan bahwa Negara bertanggung jawab menyediakan layanan pendidikan gratis dan sekular untuk semua anak, baik warga negara Perancis maupun warga negara asing yang tinggal di wilayah Perancis, secara adil dan merata. Perancis menerapkan sistem pendidikan terpusat. Artinya, menurut Bernard Toulemonde (2003) dalam *Vers un pilotage partagé du système éducatif?*, pemerintah pusat mengendalikan kebijakan pendidikan dan program pengajaran pada tingkat nasional.

“Di semua negara, pemerintah pusat berperan sebagai *tutélaire* (pelindung dan pengawas) yang dibutuhkan untuk menjamin dan menjaga keberlangsungan program wajib belajar. Namun, intervensi pemerintah beragam dalam hal bentuk dan intensitasnya”, menurut Pierre-Louis Gauthier (2006) dalam Jurnal

Internasional Pendidikan, *L'école priMaire en question*. Terkait dengan pendidikan dasar di Perancis, pemerintah pusat membagi sebagian wewenang dan tanggung jawabnya kepada otoritas *commune* (wilayah administratif terkecil di Perancis). Begitu pula untuk pendidikan menengah kepada otoritas *département* (wilayah administratif di atas *commune*) dan *région* (wilayah administratif tertinggi di Perancis) dalam hal prasarana pendidikan. Sementara untuk penyediaan layanan pendidikan tinggi, pemerintah pusat bekerja sama dengan otoritas *région* (Dreyfus, 2005).

“Pemerintah pusat tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam pendidikan nasional. Pemerintah lokal semakin banyak terlibat dalam sistem pendidikan dan peran para aktor lokal itu tampaknya akan semakin besar dalam puluhan tahun mendatang... Sekolah publik kini berada di tangan otoritas lokal” (Toulemonde, 2003). Institusi pendidikan dasar adalah layanan publik yang harus terjamin. “Dia berperan, di mana pun di seluruh dunia, sebagai fondasi tempat dibangunnya suatu sistem pendidikan” (Gauthier, 2006). Perubahan populasi penduduk yang dinamis serta perkembangan sistem pendidikan terus berlangsung dan tidak dapat dihindari. Bagaimana otoritas lokal di Perancis memainkan perannya sebagai “aktor kunci pendidikan” (Pugin dan Panassier, 2006)? Bagaimana *commune* merencanakan dan mengelola sekolah di wilayahnya? Apakah karakteristik sebuah *commune* mempengaruhi perencanaan sekolah? Apabila ia berpengaruh, dalam hal apa?

Dari kaca mata awam, pendidikan dasar di Perancis mungkin tampak nyaris sempurna. Sebagai salah satu negara maju, Perancis memiliki sejarah dan

pengalaman panjang dalam pelayanan pendidikan publik. Pendidikan dasar publik merupakan suatu kewajiban dan gratis bahkan sejak hampir satu setengah abad yang lalu. Ia juga bersifat sekular, terbuka bagi semua anak dengan latar belakang keluarga yang beragam. Sekolah dasar direncanakan pada lokasi yang dapat ditempuh anak dengan berjalan kaki dengan standar bangunan dan fasilitas pelengkap yang baik. Kegiatan intra dan ekstrasekolah bervariasi dan didukung penuh oleh otoritas pendidikan. Lalu, apa (lagi) tantangan yang dihadapi Perancis dalam perencanaan sekolah?

1.2. Lokasi Studi

Lahir pada tahun 1969, Grand Lyon adalah salah satu aglomerasi pertama di Perancis selain Aglomerasi Lille, Bordeaux, dan Strasbourg, yang mulai dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah yang diterbitkan pada bulan Desember 1966. Batas wilayah Grand Lyon tidak berubah selama hampir 40 tahun, hingga Januari 2007, saat bergabungnya Commune Givors dan Grigny. Setelah penggabungan 2 *commune* ini, anggota aglomerasi bertambah menjadi 57 *commune* yang kesemuanya terletak di Département Rhône. Kemitraan antar-*commune* ini menyatukan Lyon dan sejumlah *commune* disekitarnya (lihat gambar 1.1) dengan maksud merealisasikan pembangunan dan pengoperasian prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama (Genay, 2008).

Studi ini membahas perencanaan dan pengelolaan sekolah pada tingkat *commune* dengan mengambil ruang lingkup wilayah studi di dua *commune* yang dipilih berdasarkan karakteristik mereka yang berbeda: perannya sebagai sebuah *commune* sentral dan sebuah *banlieue* (periferi kota besar), struktur dan kondisi

penduduk yang berbeda, serta tata guna lahan yang berbeda pula. Mengambil studi kasus di dua *commune* yang cukup banyak memiliki perbedaan bertujuan untuk memahami apakah dan bagaimana perbedaan karakteristik tersebut berperan dalam perencanaan sekolah.

Ruang lingkup wilayah studi mencakup dua *commune* yang berlokasi di aglomerasi Grand Lyon yang terletak di tenggara Perancis (lihat gambar 1.1):

- Commune Lyon sebagai *commune* sentral dari 57 *commune* dalam aglomerasi, sebagai pusat kegiatan di wilayah Grand Lyon;
- Commune Vaulx-en-Velin sebagai sebuah *banlieue* (periferi kota) Lyon, juga tercakup dalam aglomerasi.

1.3. Tujuan Studi

Karya tulis ini diharapkan dapat mempresentasikan sistem pendidikan di Perancis secara ringkas dan padat; bagaimana prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Negara diterjemahkan ke dalam sejumlah kebijakan pendidikan berikut metode/alatnya dan bagaimana mereka berfungsi. Di samping itu, tugas akhir ini juga bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai peran, hubungan, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab antara aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem pendidikan di Perancis.

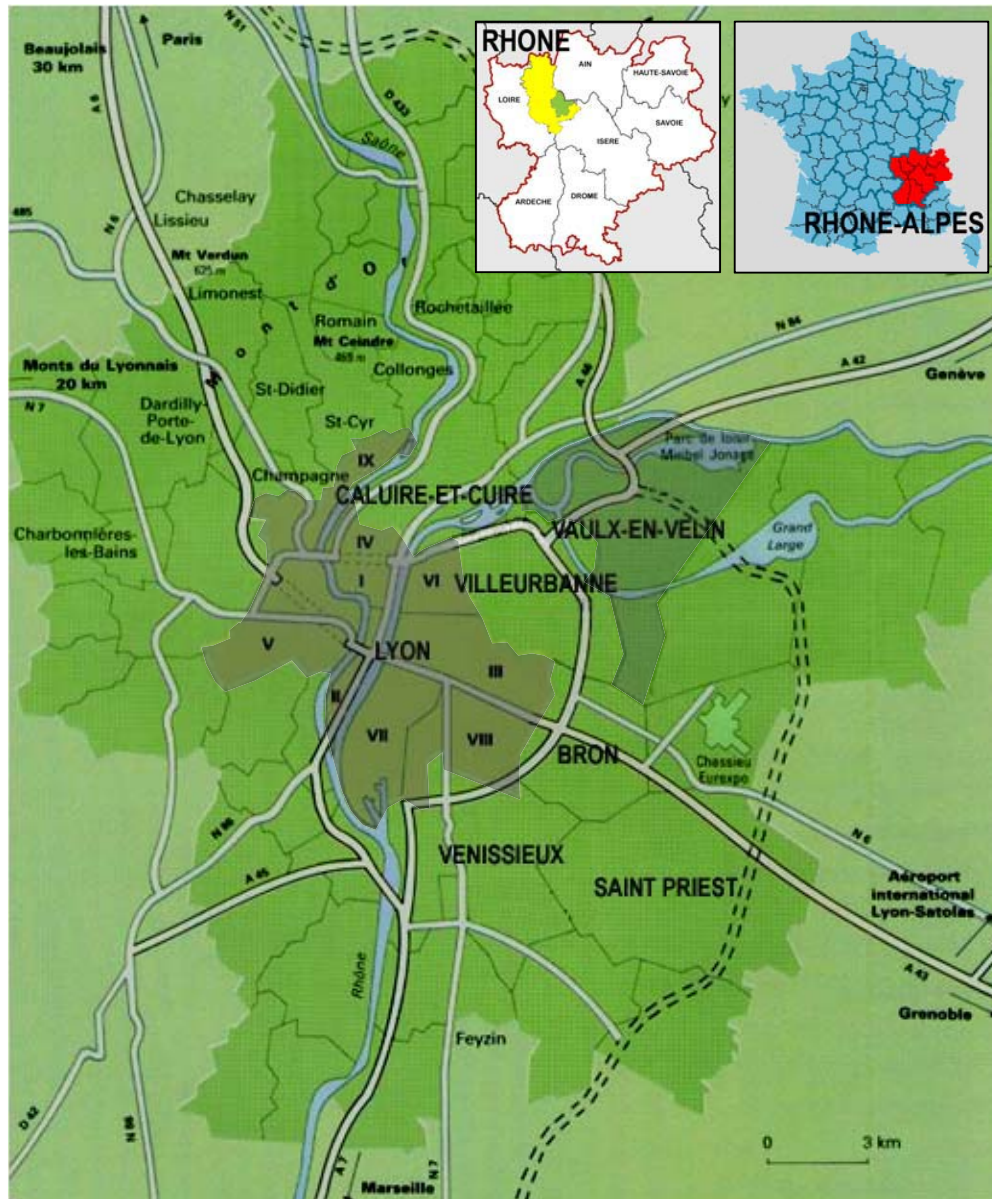
Ruang lingkup studi difokuskan pada tingkat *commune* untuk memahami bagaimana peran dan fungsi otoritas wilayah administratif terkecil di Perancis ini, yang kini bahkan disebut sebagai “aktor kunci pendidikan”, khususnya dalam perencanaan sekolah. Untuk memperkaya sekaligus mempertajam pembahasan pada tingkat *commune*, ruang lingkup wilayah studi mencakup dua *commune* yang

memiliki sejumlah perbedaan mendasar. Tujuannya adalah agar studi ini dapat memberi gambaran apakah dan bagaimana karakteristik suatu *commune* berpengaruh dalam perencanaan dan pengelolaan sekolah.

Selain tujuan-tujuan di atas, tugas akhir ini juga bermaksud untuk mengemukakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Perancis, khususnya pada tingkat *commune*, dalam perencanaan sekolah. Pada akhirnya, melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh pelajaran dari pengalaman panjang Perancis dalam merencanakan dan mengelola sekolah-sekolah mereka.

1.4. Metodologi

Studi ini disusun berdasarkan pada kajian literatur dan sejumlah wawancara. Proses penyusunan karya tulis dimulai dengan studi pustaka dan tinjauan pers yang terutama bertujuan untuk mengenal dan memahami sistem pendidikan di Perancis, pendidikan dasar, dan *commune*. Istilah-istilah dan kosa kata khusus dalam bahasa Perancis yang terkait dengan studi ini juga harus dipahami pada awal proses studi. Tinjauan pers disusun dalam bentuk kumpulan artikel serta analisis dari empat media massa nasional dan keterangan pers Kementerian Pendidikan Nasional Perancis dalam periode observasi antara Mei 2007 hingga April 2008, serta beberapa hasil studi yang mendukung tema karya tulis ini. Kedua tahap awal tersebut sangat penting untuk membuat sebuah kerangka penulisan, mengajukan dan menyusun sejumlah pertanyaan dalam wawancara, serta "menyelami" problematika yang diangkat.



Sumber: *Grand Lyon, 2008.*

GAMBAR 1.1
COMMUNE LYON DAN VAULX-EN-VELIN
DALAM AGLOMERASI GRAND LYON

Untuk mengenal lebih baik peran yang dipegang oleh *commune* dalam perencanaan sekolah, mengetahui apakah *commune* merupakan aktor penting dalam pendidikan dasar, dan hubungan antara *commune* dengan aktor-aktor

pendidikan lainnya, dilakukan sejumlah wawancara dengan beberapa aktor pendidikan terkait.

Commune, salah satu fokus dalam studi ini, merencanakan dan mengelola sekolah serta kegiatan pendidikan di wilayahnya terutama di bawah tanggung jawab *Direction de l'Education* (otoritas pendidikan dalam struktur organisasi *commune*). Oleh karena itu, dilakukan wawancara dengan para praktisi di *Direction de l'Education* di kedua *commune* yang ditinjau. Di dalam struktur organisasi *Direction de l'Education, commune* memiliki sebuah *Service Logistique Scolaire* (Bagian Logistik Pendidikan) yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan perawatan sekolah serta perencanaan, penerapan, dan penyesuaian sistem sektor sekolah. Guna memahami tugas-tugas *service* ini serta metode dan alat yang digunakan dalam perencanaan sekolah dan bagaimana mereka berfungsi, dilakukan *stage* (kerja praktik) selama satu bulan di *Service Logistique Scolaires* di *Commune Vaulx-en-Velin*.

Perencanaan sekolah untuk tingkat pendidikan dasar melibatkan peran *Inspection Académique* (Badan Pengawas Pendidikan) yang juga merupakan perwakilan wilayah pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan Nasional) di tingkat *département* (wilayah administratif di atas *commune* dan di bawah *région*). Wawancara dengan para praktisi IA bertujuan untuk memahami pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan *commune*, juga untuk dapat “melihat” dari luar kedua *commune* yang berbeda tersebut dan dalam konteks yang lebih luas, *Département Rhône* secara keseluruhan.

1.5. Sumber Data dan Informasi

Informasi dikumpulkan dan disusun dari beragam referensi bibliografi dalam bentuk buku, jurnal, laporan, *mémoire* (tesis), materi konferensi, media massa, baik berbentuk cetak maupun elektronik. Untuk tujuan ini, penulis mendatangi sejumlah perpustakaan dan pusat sumber informasi yang mencakup: perpustakaan universitas, pusat dokumentasi *Agence d'urbanisme* (Kantor Tata Kota) Lyon, pusat dokumentasi Aglomerasi Grand Lyon, Perpustakaan Kota Lyon, dan internet.

Data dan informasi juga diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah aktor pendidikan yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan sekolah di *Inspection Académique* di tingkat *département* dan *Direction de l'Éducation* di tingkat *commune*, yang terdiri atas:

Inspection Académique Rhône

- Kepala Divisi Manajemen Pendidikan
- Kepala Bagian Pendidikan Dasar (Publik dan Privat)
- Kepala Bagian Statistik (Proyeksi).

Commune Lyon

- Direktur Pendidikan;
- Kepala Prasarana Pendidikan.

Commune Vaulx-en-Velin

- Direktur Pendidikan;
- Kepala Logistik Pendidikan;
- Koordinator Proyeksi Pendidikan;

- Koordinator Manajemen Sektor Sekolah;
- Koordinator Logistik Sektor Sekolah.

1.6. Sistematika Penulisan

Studi ini mengangkat perencanaan dan pengelolaan sekolah pada tingkat *commune* di Perancis. Bab pertama mempresentasikan latar belakang, lokasi studi, tujuan studi, metodologi yang digunakan untuk menjawab problematika, serta sumber data dan informasi. Pada bab kedua, disajikan presentasi umum mengenai sistem pendidikan di Perancis, mencakup prinsip-prinsip dasar, aktor-aktor yang terlibat mulai dari level nasional hingga level sekolah, serta jenjang pendidikan dan sejumlah kebijakan yang terkait dengan manajemen sekolah. Bab ketiga studi ini mengetengahkan pendidikan dasar: peran dan tujuan, organisasi pendidikan, dan organisasi administratifnya.

Pada dua bab terakhir, didiskusikan problematika di lokasi studi, Commune Lyon dan Commune Vaulx-en-Velin. Bab keempat dimulai dengan tinjauan mengenai kondisi penduduk dan sekolah di kedua *commune*. Selanjutnya, masih pada bab yang sama, dibahas Jaringan pendidikan prioritas (REP) dari sudut pandang aktor-aktor yang berbeda, sekolah privat sebagai sebuah alternatif, program pendidikan lokal, serta hubungan antara sekolah, masyarakat, dan *commune*. Bab terakhir terutama menyoroti salah satu kebijakan dalam perencanaan sekolah, yaitu sistem sektor sekolah. Bab ini mendiskusikan peran dan penerapan sistem tersebut terkait dengan permasalahan distribusi kelas, ketimpangan antarsekolah, isu pembauran sosial, serta debat yang mengemuka menyangkut kebijakan pendidikan tersebut. Kemudian, ditinjau tantangan yang

harus dihadapi oleh *commune* selanjutnya dalam merencanakan sekolah di wilayahnya. Pada akhir karya tulis ini, terlampir susunan pertanyaan sebagai pijakan dibangunnya problematika studi. Selain itu, terdapat juga tesis versi bahasa Perancis berjudul « *Les enjeux de la gestion des établissements scolaires au niveau de la commune: Etude dans les communes de Lyon et de Vaulx-en-Velin* » berikut presentasi tugas akhir tersebut (dalam bahasa Perancis) pada sidang tesis di ENTPE, Lyon, Perancis.

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN DI PERANCIS

2.1. Prinsip Dasar

2.1.1. Kebebasan dalam Pendidikan

Dalam *Code de l'éducation*, kumpulan peraturan yang menyangkut pendidikan di Perancis, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan kebebasan dalam pengajaran. “*Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être public ou privé*” (Lembaga pendidikan dasar dan menengah dapat berupa institusi publik atau privat) (Pasal L.151-3). Pasal L.151-1 merumuskan bahwa “*L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et garantit l'exercice*” (Negara mengakui dan menghormati kebebasan dalam pendidikan serta menjamin pelaksanaannya). Menurut Pasal L. 111-2, “*Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation (...) en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles*” (Semua anak berhak atas pendidikan formal sebagai pelengkap pembinaan dalam keluarga ... sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing, pada jenis atau jenjang pendidikan yang berbeda. Negara menjamin penghormatan kepada pribadi setiap anak dan pembinaan yang dilakukan oleh keluarga).

“Kebebasan dalam pendidikan mencakup kebebasan mengelola dan memberikan pengajaran” (Durand-Prinborgne, 2003). Sebagai institusi pendidikan, sekolah privat diakui oleh Negara dan ia bahkan dapat menerima bantuan pemerintah jika sekolah tersebut memiliki kontrak khusus dengan Negara. Sekolah-sekolah privat berada di bawah kontrol pemerintah dan hanya Negara yang berhak mengeluarkan ijazah dan kelulusan dari universitas. Bagian lain dari *Code de l'éducation* menjamin kemerdekaan berpendapat. Peraturan tersebut mendukung hak setiap orang tua untuk memilih pendidikan yang sesuai dengan filosofi atau agama mereka.

2.1.2. Kewajiban Belajar

Di Perancis, kewajiban belajar telah dimulai sejak abad ke-19. Hukum Jules Ferry yang diterbitkan pada 28 Maret 1882 menyatakan bahwa “*l'instruction est obligatoire*” (pendidikan merupakan kewajiban). Aturan tersebut mencakup setiap anak usia 6 hingga 13 tahun warga negara Perancis atau warga negara asing yang tinggal di Perancis. Selanjutnya, periode wajib belajar bertambah seiring waktu. Pada 9 Agustus 1936, aturan wajib belajar diperpanjang hingga usia 14 tahun dan sejak tahun 1959, pendidikan dari usia 6 hingga 16 tahun merupakan kewajiban di seluruh Perancis berkat peraturan pemerintah n°59-45 yang dikeluarkan pada 6 Januari 1959.

Peraturan tersebut menggariskan kewajiban belajar dengan memberi kebebasan kepada keluarga untuk memilih antara menyekolahkan anak mereka di lembaga pendidikan, publik atau privat, atau menjamin sendiri pendidikan anak mereka dalam keluarga. Oleh karena itu, pengelola pendidikan nasional harus

memastikan kapasitas yang memadai dan aksesibilitas sekolah. Selain itu, sekolah juga dilarang bertindak diskriminatif: setiap lembaga pendidikan harus berlaku adil dalam memberikan akses dan dalam proses belajar-mengajar (Durand-Prinborgne, 2003).

2.1.3. Keadilan, Netralitas, dan Sekularitas

Code de l'éducation mengamanahkan bahwa “*le service public contribue à l'égalité des chances*” (pelayanan publik mendukung kesetaraan hak dalam mendapatkan peluang) (Pasal L.111-1). Sebagai suatu bentuk layanan publik, pendidikan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, mulai dari penerimaan hingga proses belajar, baik bagi para murid maupun keluarga mereka. Pasal 6 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara serta alinea ke-3 dan ke-13 Pembukaan Konstitusi 1946 untuk Keadilan Gender menyatakan bahwa “*la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction (...)*” (Negara menjamin kesetaraan akses bagi anak-anak dan orang dewasa dalam pengajaran ...). Lebih dari itu, *Code de l'éducation* melarang diskriminasi atas dasar asal-usul sosial, budaya, atau geografis (Pasal L.111-1) dan segala bentuk ketidakadilan kepada murid (Pasal L.311-1).

“Prinsip keadilan, yang mencakup keadilan dalam akses pada layanan publik dan keadilan dalam proses belajar-mengajar, membawa dua konsekuensi: netralitas politik dan netralitas agama atau dengan kata lain sekularitas” (Durand-Prinborgne, 2003). Kewajiban menjunjung tinggi netralitas politik dan agama diaplikasikan dalam penerimaan murid, program, dan materi belajar. *Code de l'éducation* mengharuskan lembaga pendidikan menerima “*tous les enfants sans*

distinction (...) de croyance” (setiap anak tanpa membedakan... kepercayaan) serta berkewajiban “*donner un enseignement dans le respect total de la liberté de conscience*” (memberi pengajaran dengan menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat) (Pasal L.442-1) dan dengan “*le respect du pluralisme et du principe de neutralité*” (menghormati keberagaman dan prinsip netralitas) (Pasal L.511-2).

2.1.4. Pendidikan Publik Gratis

Pendidikan dasar gratis di sekolah publik telah ditegaskan sejak akhir abad ke-19 di Perancis, bahkan sebelum lahirnya aturan wajib belajar, oleh peraturan pemerintah 16 Juni 1881. Lebih dari setengah abad setelah itu, peraturan pemerintah 31 Mei 1933 mengamanahkan pendidikan menengah yang juga bebas biaya. Selanjutnya, Alinea ke-13 Pembukaan Konstitusi 1946 menjamin bahwa “*l’organisation de l’enseignement public gratuit (...) est un devoir de l’Etat*” (penyelenggaraan pendidikan publik gratis ... adalah tugas Negara).

Pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan publik bebas dari biaya. Materi pengajaran diberikan cuma-cuma hingga kelas *troisième* (tahun ke-4 pendidikan menengah). Di sekolah dasar dan taman kanak-kanak, pengadaan materi pengajaran dan sarana belajar di sekolah merupakan tanggung jawab *commune*. “Pendidikan gratis merupakan aturan yang ketat. Aturan ini melarang segala bentuk permintaan partisipasi dalam pembiayaan kepada keluarga murid, baik yang tinggal di dalam maupun di luar wilayah suatu *commune* (tempat sekolah itu berada)” (Durand-Prinborgne, 2003).

2.2. Aktor Pendidikan

2.2.1. Pemerintah Pusat

Di Perancis, terdapat pemisahan organisasi pendidikan nasional pada tingkat menteri. Menurut Dekrit 18 Mei 2007 yang mengatur komposisi pemerintahan, pemerintah Perancis membentuk dua struktur otonom:

- Kementerian Pendidikan Nasional yang lebih khusus bertanggung jawab atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi dan pengorganisasian riset publik.

Peraturan mengenai desentralisasi pada tahun 1982 menyatakan bahwa Negara memegang tanggung jawab pelayanan publik di bidang pendidikan. Kementerian Diknas bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan administrasi sistem pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga *baccalauréat* (lihat gambar 2.2). Tugas kementerian ini antara lain mencakup (MEN, 2008):

- penentuan sistem dan program pendidikan nasional serta organisasi dan isi materi pengajaran;
- pemutusan dan penerbitan ijazah nasional, lulusan, dan gelar yang dikeluarkan oleh universitas;
- perekrutan dan pengaturan pegawai sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;
- pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya guna menjamin kesetaraan akses dalam layanan publik bagi masyarakat;

- pengontrolan dan pengevaluasian kebijakan untuk menjamin koherensi sistem pendidikan secara keseluruhan.

2.2.2. Rectorat dan Inspection Académique

Wewenang dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional secara geografis terbagi menjadi 30 *académie* (satuan wilayah kerja Diknas). Kantor *académie* atau disebut juga *Rectorat* berlokasi di ibu kota *région* dan dipimpin oleh seorang *Recteur* (Kepala *Académie*) yang diangkat oleh Presiden. *Recteur* sendiri membawahi beberapa *Inspecteur* (Kepala Badan Pengawas Pendidikan) yang masing-masing memimpin sebuah *Inspection Académique* (Badan Pengawas Pendidikan) di tingkat *département*.

Rectorat dan *Inspection Académique* bisa dikatakan sebagai kantor perwakilan Kementerian Diknas di tingkat lokal. Mereka juga memainkan peran penting dalam pendidikan nasional berkolaborasi dengan pemerintah lokal: bersama *commune* untuk tingkat *école* (pendidikan setingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar), *département* untuk *collège* (pendidikan setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama), dan bersama pemerintah *région* untuk *lycée* (pendidikan setingkat sekolah menengah atas).

Rectorat

Rectorat adalah perpanjangan tangan Diknas di tingkat *académie* dan seorang *Recteur* merupakan representasi Menteri Diknas di level tersebut. *Rectorat* mengimplementasikan, di tingkat *académie*, kebijakan pendidikan yang dirumuskan di tingkat nasional. *Rectorat* memiliki otoritas dalam pendidikan dasar serta pendidikan menengah. *Recteur* juga berperan menjaga harmonisasi

dan keberlanjutan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam perannya sebagai *chancelier des universités* (ketua penanggung jawab universitas) (MEN, 2008).

Pada umumnya, wilayah sebuah *académie* mencakup atau identik dengan wilayah sebuah *région*, namun terdapat beberapa pengecualian seperti halnya Région Rhône-Alpes yang terbagi atas dua *académie* (lihat gambar 2.1):

- Académie Lyon (mencakup Département Ain, Loire dan Rhône)
- Académie Grenoble (mencakup Département Ardèche, Drôme, Isère, Savoie dan Haute-Savoie).

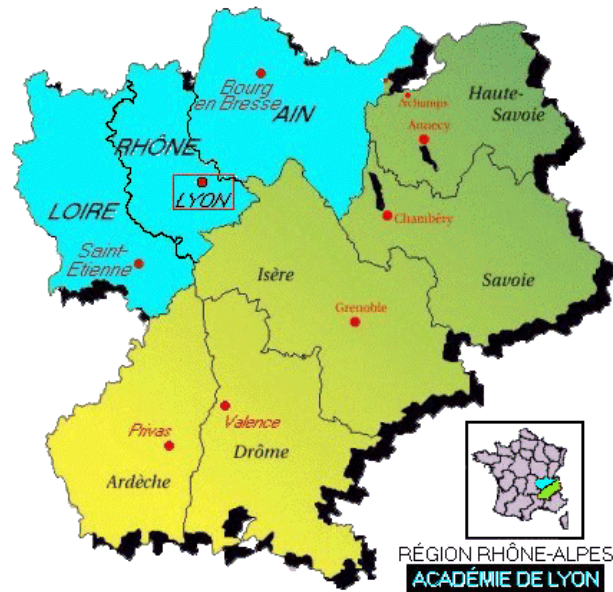
Académie Lyon adalah penanggung jawab terselenggaranya layanan publik di bidang pendidikan di ketiga *département* tersebut, mulai tingkat taman kanak-kanak hingga universitas, termasuk juga memegang peran dalam pendidikan privat yang memiliki kontrak dengan Negara. Seorang *Recteur* memiliki tugas antara lain (MEN, 2008):

- mengawasi pelaksanaan semua keputusan dan peraturan yang terkait dengan pendidikan nasional;
- menentukan tujuan kebijakan *académie*, khususnya terkait dengan jenis pendidikan dan situasi sebaran murid;
- memiliki hak dalam pengelolaan tenaga pendidik dan sekolah;
- sebagai penghubung antara Diknas dengan lingkungan politik, ekonomi, sosioprofesional, dan khususnya dengan pemerintah lokal.

Inspection Académique

Inspection Académique (IA) adalah perwakilan Diknas di tingkat *département*. Kantor ini menangani organisasi sekolah dan guru di tingkat

wilayah kerjanya, khususnya yang terkait dengan pendidikan dasar. Ia juga mengelola proses belajar-mengajar dan aktivitas sekolah serta menyelenggarakan ujian dan kompetisi antarsekolah (MEN, 2008).



Sumber: www.ac-lyon.com

GAMBAR 2.1
ACADÉMIE LYON DALAM RÉGION RHÔNE-ALPES

Sebuah IA dikepalai oleh seorang *Inspecteur d'académie*, diangkat melalui keputusan Presiden dengan usulan dari Kementerian Diknas dan merupakan representasi *Recteur* di tingkat *département*. Ia mengawasi tata kelola dan pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Seorang *Inspecteur d'académie*, antara lain (MEN, 2008):

- berwenang menetapkan pembukaan dan penutupan kelas dan sekolah serta menentukan penempatan guru dan tenaga pendidik lainnya;

- menyetujui (atau tidak) rancangan program pendidikan di sekolah;
- bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikan serta tenaga administratif, teknis, dan kesehatan di *collège*;
- menentukan sektor (area cakupan pelayanan) *collège* dan bersama *Recteur*, menentukan sektor *lycée*.

2.2.3. Pemerintah Lokal

Sejak penerapan desentralisasi di Perancis pada 2 Maret 1982, tanggung jawab dan wewenang di bidang pendidikan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal.

Di tingkat pusat, Negara bertanggung jawab merumuskan program, struktur, dan jalur pendidikan, mengorganisasi dan membiayai tenaga pendidik, mencetak dan mendidik para guru, membuka kelas baru atau menutup kelas, menyediakan materi pengajaran, serta bertindak sebagai penanggung jawab pendidikan tinggi.

Pemerintah lokal bertugas mengevaluasi kebutuhan, membangun, merawat, dan merenovasi prasarana pendidikan, merumuskan tujuan dan mengajukan rancangan program pendidikan, serta mengelola transportasi dan kantin sekolah. Pemerintah *région* bertanggung jawab atas *lycée*, *département* untuk tingkat *collège*, dan *commune* memiliki lingkup kerja untuk tingkat *école* (sekolah dasar dan taman kanak-kanak). Pemerintah lokal juga merupakan penanggung jawab penyediaan perlengkapan teknis; mereka diharuskan terlibat dalam pembiayaan kegiatan pendidikan di sekolah, menjamin gaji tenaga pengajar

pendukung (selain guru yang digaji oleh Negara) untuk bidang studi seni, olah raga, dan bahasa pada tingkat pendidikan dasar.

TABEL II.1
REKAPITULASI TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH LOKAL
DI BIDANG PENDIDIKAN

Tanggung jawab dan wewenang	<i>École</i>	<i>Collège</i>	<i>Lycée</i>	Universitas
Investasi (konstruksi, rekonstruksi, dan pemanfaatan prasarana belajar)	<i>commune</i>	<i>département</i>	<i>région</i>	pemerintah pusat dan rekan kerja
Penyediaan dan pemanfaatan sarana belajar (teknologi informasi dll.)	<i>commune</i>	pemerintah pusat	pemerintah pusat	pemerintah pusat dan rekan kerja
Guru (perekrutan, pendidikan, gaji)	pemerintah pusat	pemerintah pusat	pemerintah pusat	pemerintah pusat
Tenaga administratif, teknis, kesehatan	pemerintah pusat	pemerintah pusat	<i>région</i>	pemerintah pusat
Tenaga pengajar pendukung	<i>commune</i>	<i>département</i>	<i>région</i>	pemerintah pusat
Program pengajaran	pemerintah pusat	pemerintah pusat	pemerintah pusat	pemerintah pusat
Validasi kelulusan	-	pemerintah pusat	pemerintah pusat	pemerintah pusat

Sumber: MEN, 2008.

2.2.4. Sekolah

Kepala Sekolah

Seorang kepala sekolah dipilih dari para guru atau pengajar di sekolah oleh *Inspecteur d'académie* untuk sekolah dengan jumlah kelas dua atau lebih. Tanggung jawabnya mencakup bidang administrasi dan pengajaran yang antara lain (Safra, 2003):

- melanjutkan proses penerimaan murid, setelah pendaftaran oleh *Maire* (otoritas *commune*), kemudian membagi mereka ke dalam beberapa kelas dan kelompok, serta menjamin kehadiran murid di sekolah;

- berkewajiban menerima murid yang terdaftar pada sektor sekolahnya, mengawasi murid, dan menjamin akses tenaga pendukung pendidikan dari luar sekolah;
- melaksanakan kebijakan otoritas pendidikan dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Dalam hal hubungan eksternal, kepala sekolah mewakili institusi di hadapan *commune*, orang tua, dewan perwakilan dan pihak-pihak lain.

Pengajar

“Guru *école* (TK atau SD) adalah seorang pendidik dengan kemampuan adaptasi yang baik, dapat mengajarkan ilmu pengetahuan dasar secara keseluruhan, serta mampu melatih dan mendidik anak mulai tingkat *petite section* di *école maternelle* (TK) hingga CM2 di *école élémentaire* (SD). Pengajar direkrut melalui ujian eksternal (oleh *académie*), ujian internal (oleh *département*), dan mekanisme pendaftaran berdasarkan peringkat kemampuan” (MEN, 2008). Pemerintah pusat menangani pendidikan, pembiayaan, dan jenjang karir para guru.

Pendidikan dasar di *école* juga melibatkan tenaga nonpengajar yang mencakup para tenaga administratif, teknis, kesehatan, dan karyawan sekolah.

2.2.5. Orang Tua Murid

Negara menghormati hak orang tua, baik hak individual maupun hak kolektif (Warzee, 2006). Pasal L.111-2 *Code de l'éducation* mengisyaratkan bahwa pendidikan anak merupakan peran utama dari keluarga: “*La formation scolaire complète est l'action de la famille. (...) L'Etat garantit le respect de*

l'action éducative de la famille” (Pendidikan yang komprehensif adalah peran keluarga ... Negara menjamin penghormatan terhadap pembinaan yang dilakukan oleh keluarga). Sebagai bentuk penjelmaan dari prinsip dasar pendidikan, Negara memfasilitasi orang tua untuk memilih dan memperoleh pendidikan “terbaik” bagi anak mereka sesuai dengan preferensi tiap keluarga. Di sekolah, orang tua berhak mengetahui semua informasi dari pengajar mengenai pendidikan sang anak.

Pasal L.111-4 menunjukkan bahwa *“Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et au dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe”*. (Orang tua murid adalah anggota komunitas pendidikan. Partisipasi mereka dalam kehidupan sekolah serta dalam dialog dengan pengajar dan aktor pendidikan lainnya dijamin di setiap sekolah dan setiap lembaga pendidikan. Melalui perwakilan mereka, orang tua murid berpartisipasi dalam musyawarah administrasi sekolah dan musyawarah kelas). Asosiasi orang tua murid mempunyai hak dan peran penting dalam sistem pendidikan: mulai dari hak memperoleh informasi, hak berpendapat, hingga hak intervensi dalam musyawarah dewan pendidikan nasional tingkat *département*.

2.3. Jenjang Pendidikan

Jenjang dalam sistem pendidikan di Perancis meliputi:

- **Pendidikan dasar**, terdiri atas tiga atau empat tahun pengajaran di *école maternelle* (setingkat taman kanak-kanak) dari usia 2 hingga 5 tahun serta lima

tahun pendidikan di *école élémentaire* (setingkat sekolah dasar) antara usia 6 dan 10 tahun.

- **Pendidikan menengah.** Murid menempuh empat tahun pendidikan di *collège* (setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama) antara usia 11 dan 14 tahun kemudian melanjutkan pendidikan di *lycée* (setingkat sekolah menengah atas) selama tiga tahun mulai usia 15 hingga 18 tahun.
- **Pendidikan tinggi.** Setelah memperoleh *baccalauréat* sebagai syarat melanjutkan pendidikan di universitas, universitas menawarkan berbagai bidang studi yang terdiri atas tiga jenjang pendidikan sesuai dengan jumlah tahun masa studi: *licence* (Bac+3), *master* (Bac+5) atau *doctorat* (Bac+8).
- **Pendidikan profesional,** merupakan bentuk pendidikan yang lahir dari kerja sama dengan perusahaan dan para ahli untuk memperoleh *Certificat d'aptitude professionnelle/CAP* (Sertifikat keahlian profesional), *Brevet d'études professionnelles/BEP* (Ijazah pendidikan profesional), *Brevet de technicien supérieur/BTS* (Ijazah teknisi ahli), atau *Baccalauréat professionnel/Bac pro* (*Baccalauréat* profesional).
- **Pendidikan melalui praktik kerja,** merupakan pendidikan di perusahaan yang juga memiliki hubungan dengan *Centre de formation d'apprentis/CFA* (Pusat pendidikan magang) guna meraih CAP, BEP, atau Bac pro.
- **Pendidikan lanjut,** berlangsung di *Groupement des établissements publics locaux d'enseignement/Greta* (Perhimpunan lembaga pendidikan publik).

Usia	Kelas						Institusi	
18	Bac. Pro.	Terminale Bac. professionnelle						Lycée (SMA)
		Première Bac. professionnelle				Bac. Gén.	Terminale BG	
16	CAP	Terminale CAP	BEP	Terminale BEP	Bac. Gén.	Première BG	Bac. Tech.	Première BT
15		Seconde CAP	BEP	Seconde BEP	Seconde générale et technologie			
Ijazah nasional Brevet								
14	Troisième						Collège (SLTP)	
13	Quatrième							
12	Cinquième							
11	Sixième							
10	Cours moyen 2/CM2						Ecole élémentaire (SD)	
9	Cours moyen 1/CM1							
8	Cours <i>élémentaire</i> niveau 2/CE2							
7	Cours <i>élémentaire</i> niveau 1/CE1							
6	Cours préparatoire/CP							
5	Grand section						Ecole maternelle (TK)	
4	Moyenne section							
3	Petite section							

Sumber: MEN, 2008.

GAMBAR 2.2
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENGAH PER USIA
SERTA PERIODE WAJIB BELAJAR

2.4. Kebijakan Pendidikan

2.4.1. Carte Scolaire

Definisi *carte scolaire* (peta sekolah) menurut kamus tata kota dan perencanaan wilayah adalah “sebuah program penyediaan prasarana pendidikan multitarif, berdasarkan proyeksi demografis (perubahan struktur usia penduduk) dan kecenderungan urbanisasi” (Merlin et Choay, 1984).

Dengan berpegang pada analisis jumlah anak usia sekolah, *Inspection Académique* membagi pos tenaga pengajar per *commune* dan memutuskan jumlah

kelas yang harus disediakan. Pembukaan kelas baru, penutupan kelas, ataupun pengelompokkan sekolah merupakan hasil dari analisis *carte scolaire*, yang merupakan wewenang bersama antara pemerintah pusat (dalam hal ini *Inspection Académique*) dan masing-masing *commune*. Namun, apabila keputusan pembukaan kelas baru atau penutupan kelas mengakibatkan pembangunan atau penutupan sekolah, adalah *Conseil Municipal* (Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat *Commune*) yang berhak mengambil keputusan, termasuk menyetujui perencanaan konstruksi dan lokasi *école priMaire* (TK dan/atau SD).

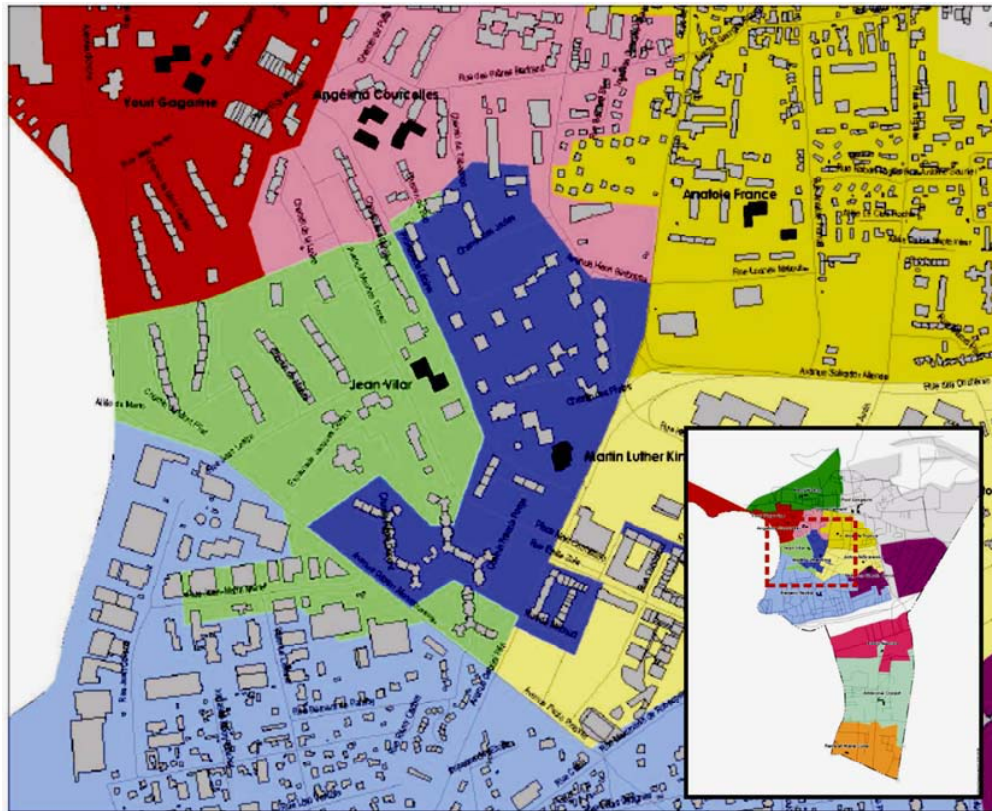
Di tengah masyarakat, *carte scolaire* lebih dikenal sebagai pembagian populasi murid per zona atau yang biasa disebut sebagai “*périmètres scolaires*” (sektor sekolah). Perencanaan ini berupa pemilahan wilayah suatu *commune* atau *département* secara geografis menjadi sejumlah sektor (Encyclopédie éducation, 2008). Sektor sekolah menunjukkan dua hal:

- pembagian pos tenaga pengajar secara geografis;
- pembagian populasi murid per sektor.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, setiap *école*, *collège*, dan *lycée* terikat pada satu sektor geografis yang telah ditentukan dengan jelas dan baku. Sektorisasi sekolah ini dirancang untuk dipatuhi oleh semua murid; mereka wajib menempuh pendidikan di sekolah yang berlokasi di sektor yang sama dengan tempat tinggal mereka (lihat gambar 2.3), kecuali tentu saja bagi murid yang berhak menerima *dérogation* (hak pengecualian dari aturan sektor sekolah).

Sistem sektor ini memudahkan Diknas untuk merencanakan pembukaan atau penutupan kelas secara lebih tepat sesuai pergerakan jumlah populasi anak

usia sekolah tiap tahun per satuan wilayah yang lebih kecil, per sektor. Kecenderungan pergerakan populasi murid bervariasi di *département* tertentu. Oleh karena itu, *carte scolaire* diubah dari tahun ke tahun guna menyesuaikan jumlah kelas dan pos pengajar yang harus disediakan.



Sumber: DE Vaux-en-Velin, 2008.

GAMBAR 2.3
SEKTOR SEKOLAH DASAR (ECOLE ELEMENTAIRE)
DI VAUX-EN-VELIN

Untuk *école priMaire*, *Mairie* (pemerintah *commune*) menetapkan di sektor mana seorang anak harus bersekolah. Hal ini berbeda untuk *collège* dan *lycée*. Otoritas pendidikan lah (dalam hal ini *Inspection Académique* dan *Rectorat*) yang berwenang menentukan batas sektor setiap sekolah menengah.

Carte scolaire untuk setiap jenjang pendidikan diputuskan oleh pihak yang berbeda:

- *Carte scolaire* untuk *école priMaire* ditetapkan oleh *Conseil Municipal* (DPR Tingkat *Commune*) apabila suatu *commune* memiliki lebih dari satu *école*;
- *Carte scolaire* untuk *collège* diputuskan oleh *Conseil Général* (DPR Tingkat *Département*)
- Untuk *lycée*, *carte scolaire* berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. *Conseil Régional* (DPR Tingkat *Région*) hanya mengintervensi dalam hal perencanaan dan pengelolaan prasarana pendidikan.

Carte scolaire tetap memberi kelonggaran kepada murid untuk bebas dari kebijakan sektorisasi sekolah dengan peraturan yang jelas. Menurut Pasal L.212-8 *Code de l'éducation*, hanya murid dengan motif tertentu yang diizinkan mengajukan permintaan *dérogation* kepada *Inspecteur d'académie*, yaitu:

- Orang tua murid tersebut bekerja, sementara di *commune* tempat tinggalnya tidak terdapat tempat penitipan anak dan *Mairie* tidak menyediakan layanan serupa;
- Saudara kandung murid tersebut tengah belajar di sekolah di luar sektor tempat tinggal mereka;
- Murid tersebut memiliki hambatan kesehatan, misalnya ia harus selalu dekat dengan fasilitas kesehatan yang memadai.

Sejak lahirnya kebijakan sektor sekolah pada tahun 1963 yang mengatur sistem penerimaan murid di sekolah publik, telah terdapat berbagai penolakan dari orang tua atas kewajiban menyekolahkan anak mereka ke sekolah yang telah

ditentukan. Dengan pelanggaran aturan sektor sekolah yang dimulai tahun 1984, sebagian orang tua berusaha mendaftarkan anak mereka di sekolah yang berlokasi di *quartier* (kawasan permukiman) yang dianggap ”berkualitas baik” (Vasconcellos, 2001).

Karena sekolah privat tidak termasuk dalam aturan sektor sekolah, setiap keluarga dapat memilih sekolah privat ”terbaik” untuk anak mereka tanpa satu pun batasan sektoral. Orang tua juga memiliki satu alternatif lain: menyediakan sendiri pendidikan bagi anak mereka atau dikenal sebagai *instruction à la maison* (pengajaran di rumah).

Sesuai dengan prinsip dasarnya, layanan pendidikan publik di Perancis adalah wajib, gratis, dan sekular. Oleh karena itu, setiap sekolah publik harus menerima semua murid yang bertempat tinggal di sektor sekolah tersebut. Kementerian Diknas menegaskan bahwa murid-murid dari dalam sektor sebuah sekolah adalah prioritas dibandingkan murid yang tinggal di luar sektor atau murid yang mengajukan hak pengecualian dari aturan sektor sekolah.

2.4.2. Proyeksi Jumlah Murid

Dalam proyeksi jumlah murid setiap tahun ajaran, dianalisis sekolah per sekolah dan terdapat dua proyeksi: analisis yang dilakukan oleh *Inspecteur de l'Education Nationale*/IEN (Pengawas dari Diknas) dan analisis yang dilakukan oleh kepala sekolah itu sendiri. Perhitungan oleh Diknas dilakukan berdasarkan atas proyeksi demografis tahunan suatu *commune* dan proyeksi penduduk per usia sekolah dengan mempertimbangkan variasi populasi yang pindah dan datang ke *commune* tersebut. Kepala sekolah memahami dengan lebih baik evolusi jumlah

murid di sekolah yang mereka pimpin. Selain jumlah murid pada tahun yang berjalan, analisis mereka mencakup jumlah murid yang berencana pindah sekolah dan total pendaftaran. Pada praktiknya, IEN juga berkonsultasi kepada para kepala sekolah sehingga tidak (banyak) terdapat perbedaan hasil analisis di antara keduanya. Pada tingkat *département*, data hasil analisis tersebut dikumpulkan dan diproses oleh *Inspection Académique* sebagai dasar pembagian pos tenaga pengajar dan jumlah kelas yang harus disediakan per *commune*.

Sistem sektor sekolah berperan di dalam proses proyeksi murid. Karena perkiraan jumlah murid dilakukan sekolah per sekolah dan setiap sekolah terkait dengan sektor mereka masing-masing, kalkulasi oleh IEN memperhitungkan evolusi dari setiap sektor, salah satunya pembangunan permukiman. *Commune* tidak mempertimbangkan preferensi orang tua murid dalam proyeksi ini. *Mairie* menganggap bahwa semua anak usia sekolah dalam suatu sektor akan belajar di sekolah publik dalam sektor tersebut. Apabila terdapat perbedaan jumlah murid akibat orang tua memilih untuk keluar dari sektor sekolah, hal tersebut diatur melalui *dérogation*.

2.4.3. Zona Pendidikan Prioritas

“Pendidikan dasar (di Perancis) belum memberikan peluang yang sama (bagi masyarakat) dalam menerima pendidikan di sekolah, tapi justru menunjukkan ketimpangan dalam proses dan hasil belajar yang terkait pada status sosial peserta didik. Ketimpangan ini terindikasi oleh fakta bahwa tidak semua murid mampu menyerap ilmu dan keterampilan dalam ritme yang sama

sebagaimana dituntut oleh institusi pendidikan” (INED, 1970 Isambert Jamati, 1984 Prost, 1986 Forquin, 1990 dalam Vasconcellos, 2001).

Diterapkan pada tahun 1981, “*Education prioritaire* (pendidikan prioritas) dimaksudkan untuk memperbaiki dampak ketimpangan sosial, ekonomi, dan budaya (terhadap pendidikan) dengan memperkuat program pendidikan di wilayah yang memiliki tingkat *échec scolaire* (ketidاكلulusan sekolah) tertinggi” (MEN, 2008). Kebijakan ini membatasi suatu kawasan secara geografis, yang disebut sebagai *Zones d'éducation prioritaires/ZEP* (Zona pendidikan prioritas), dimana Negara bersama aktor pendidikan lainnya menerapkan metode pengajaran khusus untuk lebih menjamin keberhasilan murid di sekolah-sekolah yang berlokasi di zona prioritas tersebut.

Pada tahun 1997, lahirlah *Réseaux d'éducation prioritaire/REP* (Jaringan pendidikan prioritas). ZEP yang pada awalnya berupa batasan-batasan wilayah penerapan kebijakan pendidikan prioritas berkembang menjadi suatu jaringan sekolah. *Ecole* yang termasuk dalam pendidikan prioritas terhubung dengan *collège* di sektornya walaupun *collège* tersebut tidak termasuk dalam kriteria ZEP. Hubungan kerjasama ini membantu sekolah-sekolah untuk dapat saling berbagi sumber daya pendidikan dan informasi guna mengurangi kegagalan murid di sekolah (MEN, 2008).

Sebagai kelanjutan dari REP, para penanggung jawab tiap Jaringan pendidikan prioritas bersama para otoritas pendidikan menandatangani kontrak *réussite scolaire* (kelulusan sekolah) mulai tahun 2003. Dalam kontrak ini, ditetapkan tujuan pengajaran di suatu jaringan sekolah serta prosedur dan kriteria

evaluasi sebagai elemen kebijakan pendidikan prioritas. Penanggung jawab tiap *Réseaux réussite scolaire/RRS* (Jaringan program kelulusan) bersama rekan kerja mereka yang terkait menentukan metode pendidikan terbaik dan yang paling sesuai untuk diterapkan di jaringan sekolah mereka guna mencapai tujuan pendidikan prioritas tersebut.

Tiga tahun berikutnya, pada tahun 2006, kontrak *réussite scolaire* berubah menjadi *Réseaux ambition réussite/RAR* (Jaringan tekad menuju sukses) yang mengikutsertakan *collège* dan juga *école* yang berlokasi di sektor *collège* tersebut. Institusi pendidikan yang termasuk dalam kriteria RAR menerapkan program pendidikan dan metode pengajaran khusus yang diperkuat oleh lebih banyak tenaga pengajar dan relawan pendidikan. Selain itu, Negara juga memberikan perhatian lebih dalam bentuk pembinaan kepada tenaga pengajar dan relawan pendidikan, pemberian tenaga pendamping, evaluasi yang ketat, serta pengembangan tujuan sekaligus praktik pengajaran yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan (MEN, 2008).

BAB III

PENDIDIKAN DASAR

3.1. Peran dan Tujuan

Institusi pendidikan dasar adalah fondasi dari sistem pendidikan di suatu negara, sebagaimana berlaku di seluruh dunia (Gauthier, 2006). Di Perancis, *école priMaire* merupakan institusi pendidikan dasar (antara usia 3 dan 10 tahun), dilanjutkan oleh *collège* (setingkat SLTP) dan *lycée* (setingkat SMA) (antara usia 11 dan 18 tahun). Pendidikan enam tahun di *école priMaire* meliputi *école maternelle* (setingkat TK) dan *école élémentaire* (setingkat SD) yang pada periode tersebut dimulailah kewajiban belajar bagi anak usia 6 hingga 16 tahun.

“Di semua negara Eropa, sekolah dinilai sebagai satu bentuk integrasi yang penting. Di Perancis, sekolah memikul suatu tujuan politik dan budaya: penguatan daya pikir logis dan rasional serta penanaman moral sekular guna mengintegrasikan warga negara kepada tanah air dan Republik” (Prost, 1968 Raynaud dan Thibaud, 1987 dalam Vasconcellos, 2001). *Ecole priMaire* tidak hanya merupakan institusi pendidikan pertama bagi anak-anak untuk mampu membaca, menulis dan berhitung, namun yang kerap terabaikan, merupakan pengalaman pertama hidup bermasyarakat bagi mereka (Safra, 2003).

Dalam buku *L'école priMaire*, Safra (2003) menjelaskan bahwa pendidikan di *école maternelle* bertujuan untuk memicu aktivitas psikomotorik, sosial, dan budaya anak-anak usia dini. Selanjutnya, anak-anak mulai mengenal tulisan dan pelajaran melalui ekspresi grafis dan verbal. Pada tahap berikutnya, di

école élémentaire, institusi pendidikan mengajarkan kemampuan dasar (membaca, menulis, berhitung) dan kemahiran bekerja mandiri, juga mengembangkan daya pikir logis.

3.2. Organisasi Pendidikan

Sejak bulan September 1990, pendidikan dasar menetapkan tujuan pembelajaran dengan organisasi pendidikan yang baru melalui *cycles d'apprentissage* (siklus belajar). *Ecole priMaire* dibagi atas tiga siklus (lihat gambar 3.1) (Vancocelos, 2001):

- Siklus 1 atau *cycle des apprentissages premiers* (siklus pendidikan pertama) di *école maternelle*: TPS, PS, MS dan GS.
- Siklus 2 atau *cycle des apprentissages fondamentaux* (siklus pendidikan dasar) yang dimulai pada *Grande Section* di *maternelle* dan berlanjut selama dua tahun pertama di *école élémentaire*: CP dan CE1.
- Siklus 3 atau *cycle des approfondissements* (siklus pendalaman) yang berlangsung pada 3 tahun terakhir di *école élémentaire*: CE2, CM1 dan CM2 serta permulaan *collège*.

Organisasi baru ini, menurut Vasconcelos (2001), memiliki tujuan utama untuk memperhitungkan dan menyesuaikan ritme kemampuan belajar setiap individu anak. Masing-masing siklus tidak dimulai dan tidak berakhir pada waktu yang sama untuk semua murid karena siklus tersebut mempertimbangkan kemajuan pembelajaran setiap individu.

Usia	Kelas	Siklus	Institusi
11	<i>Sixième</i>	Siklus 3	<i>Collège</i>
10	<i>Cours moyen 2 (CM2)</i>		
9	<i>Cours moyen 1 (CM1)</i>		
8	<i>Cours élémentaire niveau 2 (CE2)</i>	Siklus 2	<i>Ecole élémentaire</i>
7	<i>Cours élémentaire niveau 1 (CE1)</i>		
6	<i>Cours préparatoire (CP)</i>		
5	<i>Grand section</i>	Siklus 1	<i>Ecole maternelle</i>
4	<i>Moyenne section</i>		
3	<i>Petite section</i>		

Sumber: Vasconcelos, 2001.

GAMBAR 3.1
SIKLUS BELAJAR DI INSTITUSI PENDIDIKAN DASAR

3.3. Organisasi Administratif

3.3.1. Jaringan Prasarana

Pada tahun 2006-2007, total jumlah pelajar di institusi pendidikan dasar baik publik maupun privat di Perancis mencapai 6.644.100 murid (DEPP, 2007). Berdasarkan angka pendaftaran tahun ajaran 2007, Académie Lyon, salah satu di antara 30 *académie* di Perancis, melayani 324.406 murid *école priMaire* atau 4,88% dari total nasional, dan 56,08% dari total murid di *académie* ini (181.931 anak) berada di Département Rhône (lihat tabel III.1).

Perancis memiliki 56.658 institusi pendidikan dasar, mencakup 51.155 *école maternelle* dan *élémentaire* publik (atau 90,34 % dari jumlah total) dan 5.473 *école* privat (9,66%) pada tahun 2007 (DEPP, 2007). Sekitar 5% atau 1 dari 20 murid yang bersekolah di Perancis berada di Académie Lyon. *Academie* ini dihuni oleh 40 anak usia 2 hingga 16 tahun per km² wilayah, dua kali kepadatan

rata-rata nasional. Di Académie Lyon, terdapat 2.356 *école* publik dan privat (Académie Lyon, 2008), atau 4,16% dari jumlah nasional.

TABEL III.1
JUMLAH MURID TINGKAT DASAR DI ACADEMIE LYON
(TAHUN AJARAN 2007)

Ecole	Maternelle	Elémentaire	Khusus*	Total
Ain				
Total	24.765	40.155	302	65.222
Publik	22.603	35.802	291	58.696
Privat dalam kontrak	2.162	4.323	11	6.496
Privat di luar kontrak	0	30	0	30
Loire				
Total	30.765	45.945	543	77.253
Publik	24.410	35.369	496	60.275
Privat dalam kontrak	6.335	10.486	47	16.868
Privat di luar kontrak	20	90	0	110
Rhône				
Total	72.759	108.052	1.120	181.931
Publik	61.721	87.551	1.003	150.275
Privat dalam kontrak	10.598	20.071	117	30.786
Privat di luar kontrak	440	430	0	870
Académie				
Total	128.289	194.152	1.965	324.406
Publik	108.734	158.722	1.790	269.246
Privat dalam kontrak	19.095	34.880	175	54.150
Privat di luar kontrak	460	550	0	1.010

*) Pendidikan khusus, mencakup kelas inisiasi dan adaptasi sebelum kelas umum.

Sumber: Académie Lyon, 2008

Wilayah kerja Académie Lyon mencakup wilayah tiga *département* (lihat gambar 2.1):

- Ain, dengan kepadatan penduduk 82 jiwa/km²
- Loire, 156 jiwa/km²
- Rhône, 464 jiwa/km² (Académie Lyon, 2008).

Dalam hal kepadatan populasi, Académie Lyon sangat terkonsentrasi di wilayah aglomerasi Lyon dan sekitarnya. Pada tahun ajaran 2007, *Inspection Académique* (IA) Rhône sendiri mengelola 1.092 *école* yang terdiri atas (IA du Rhône, 2008):

- 922 *école* publik (84,43%), mencakup 348 *école maternelle*, 574 *école élémentaire*.
- 170 *école* privat (15,57%), mencakup 155 *école maternelle* dan *élémentaire* serta 15 sekolah khusus.

Dalam konteks umum, jumlah rata-rata murid per *école* di tingkat nasional menunjukkan angka 117 murid/*école*. Di Académie Lyon angka ini meningkat hingga 138 murid/*école* dan Département Rhône menunjukkan angka yang lebih tinggi lagi, mencapai 167 murid/*école*.

3.3.2. Sekolah Publik dan Sekolah Privat

Perancis adalah salah satu negara Eropa yang pendidikan dasar publiknya memiliki proporsi yang besar: lebih dari 90% institusi pendidikan dasar pada tahun 2007 (DEPP, 2007). Walaupun demikian, Negara menghormati kebebasan pengajaran yang dikelola oleh institusi-institusi lain, di bawah pengawasannya.

Peraturan Debré tahun 1959 menawarkan pilihan kepada institusi privat di antara beberapa kemungkinan (Durand-Prinborgne, 2003):

- Berintegrasi dengan pelayanan publik (sebagai sekolah publik);
- Membuat kontrak sederhana dengan Pemerintah, terbatas untuk pendidikan dasar: kontrak ini memungkinkan Negara menanggung gaji para asisten pengajar yang disetujui kedua belah pihak;

- Memiliki kontrak kerja sama penuh dengan Pemerintah, terbatas untuk pendidikan menengah;
- Tetap berada di luar kontrak.

Ecole priMaire publik dibiayai oleh Negara dan *commune*. Para pengajar digaji oleh pemerintah pusat sementara prasarana pendidikan termasuk perawatannya dibiayai oleh pemerintah *commune*. Sekolah publik gratis dan sekular bagi semua anak di Perancis. Selain itu, sekolah publik tertentu menyediakan kelas khusus untuk membina semua anak yang memerlukan bantuan dalam beradaptasi dan berintegrasi (misalnya anak-anak dari keluarga imigran atau berkewarganegaraan asing) atau anak-anak dengan keterbatasan fisik agar mereka mampu mengikuti kelas umum secara total ataupun secara parsial.

Seperti halnya sekolah publik, para pengajar di sekolah privat yang memiliki kontrak dengan pemerintah juga digaji oleh Negara. Keluarga murid di sekolah privat ikut berkontribusi membantu sekolah menyediakan peralatan belajar dan menggaji tenaga nonpengajar. Dalam kasus tertentu, sekolah privat juga menerima kontribusi pembiayaan operasional dari pemerintah lokal menurut proporsi jumlah murid. Sebagian besar dari sekolah privat adalah sekolah yang dikelola oleh kelompok agama tertentu (khususnya Katolik).

Sekolah privat di luar kontrak sangatlah jarang. Sekolah jenis ini merupakan sekolah privat yang tidak memiliki hubungan yuridis dengan Negara. Ia biasanya menarik bayaran, kerap bukan merupakan sekolah keagamaan, dan beberapa di antaranya menerapkan metode belajar yang inovatif. Karena tidak

menerima subsidi dari Negara dan *commune*, seluruh biaya pendidikan di sekolah ini umumnya dibebankan kepada orang tua murid (MEN, 2008).

Guru-guru sekolah privat juga direkrut dan dididik oleh Diknas dan kemudian ditempatkan di sekolah privat yang memiliki kontrak dengan Negara. Dalam kasus ini, sistem penggajian dan jenjang karir para guru tersebut serupa dengan sistem yang berjalan di sekolah publik.

3.3.3. Sekolah “Standar” dan Sekolah “Prioritas”

Melanjutkan diskusi mengenai pendidikan prioritas pada bagian 2.4.3, bagian ini membahas tata kelola sekolah-sekolah yang berada di Zona pendidikan prioritas (ZEP) tersebut, yaitu sekolah dalam RAR/*Réseaux ambition réussite* (Jaringan tekad menuju sukses) dan dalam RRS/*Réseaux réussite scolaire* (Jaringan kelulusan), serta sekolah yang berlokasi di *environnement "difficile"* (lingkungan yang "sulit"), atau disebut juga sekolah DIF.

"ZEP dibentuk atas dasar 'diskriminasi positif' bagi masyarakat yang paling rentan mengalami kegagalan di sekolah" (Vasconcellos, 2001). Dalam buku *Le système éducatif*, Vasconcellos menjelaskan bahwa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sekolah yang terletak di suatu ZEP berhak memperoleh prioritas dalam hal dukungan dan pengawasan dari pemerintah (pembinaan dan tenaga pendamping bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar) serta sistem rekrutmen yang menjaga stabilitas para pengajar guna memfasilitasi mereka dalam merencanakan dan melaksanakan program intra dan ektrasekolah yang inovatif.

Namun demikian, tidak mudah untuk menjabarkan kriteria apa yang digunakan untuk menilai "sulit" atau tidaknya suatu lingkungan sehingga murid di lingkungan tersebut dinilai akan menghadapi "hambatan" yang besar dan membutuhkan perlakuan yang istimewa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Manajemen Pendidikan di IA Rhône. Beliau mengatakan, keputusan bahwa suatu lingkungan dianggap "sulit" dilakukan di tingkat menteri dan berstandar nasional. Ketentuan ini antara lain mempertimbangkan dampak dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk suatu kawasan yang berdasarkan studi akan memberi hambatan berarti bagi kemampuan belajar murid di sekolah. *Inspection Académique* mengelola semua sekolah secara adil dan merata untuk menjamin "keseimbangan" di antara institusi-institusi pendidikan tersebut. Sekolah-sekolah dalam RAR, RRS, dan DIF dinilai lebih rentan terhadap kesulitan dalam belajar dibandingkan sekolah-sekolah lain.

Secara historis, sebelum lahir RAR dan RRS, dicetuskan dulu klasifikasi sekolah dalam REP/*Réseaux d'éducation prioritaire* (Jaringan pendidikan prioritas) yang sekaligus menaungi sejumlah *école* dan *collège* dalam satu sektor yang terletak di ZEP. RAR adalah klasifikasi sekolah bagian dari REP yang dibentuk pada tahun 2006. Sekolah-sekolah RAR memiliki populasi murid yang berasal dari lingkungan paling "sulit" di antara sektor-sektor dalam REP, sebagaimana dikatakan oleh Kadiv Manajemen Pendidikan IA Rhône. RRS juga merupakan bagian dari REP. Namun, klasifikasi sekolah ini mencakup sejumlah *école* (dan *collège*) dengan populasi murid dari lingkungan dengan "kesulitan"

yang lebih rendah dibandingkan RAR. Sebagaimana RAR, klasifikasi RRS bagi suatu sekolah ditentukan pada tingkat nasional, Kementerian Diknas.

DIF merupakan penggolongan sekolah yang dicetuskan dan hanya diterapkan di Département Rhône. Sekolah-sekolah dalam REP diusulkan pada tingkat *département* oleh *Inspection Académique*, namun untuk menggabungkan suatu sekolah ke dalam klasifikasi REP, dibutuhkan keputusan setingkat menteri. Kepala Bagian Pendidikan Dasar IA Rhône menegaskan, "Karena klasifikasi sekolah REP merupakan keputusan tingkat nasional, beberapa sekolah tertentu yang diusulkan oleh *département* 'gagal' masuk ke dalam REP. Pada tingkat Rhône, *Inspection Académique* memutuskan untuk membuat klasifikasi baru untuk membantu sekolah-sekolah yang tidak bisa digolongkan sebagai sekolah standar namun tidak masuk juga ke dalam golongan jaringan pendidikan prioritas. Klasifikasi tengah ini disebut sekolah dalam *environnement 'difficile'* (lingkungan yang 'sulit') atau sekolah DIF". Terdapat 88 sekolah DIF dan 183 sekolah dalam klasifikasi REP di wilayah Rhône.

Program dari kebijakan ini di antaranya memperbaiki suasana belajar dan kehidupan sehari-hari di sekolah serta mengurangi ketimpangan antarsekolah: sekolah "standar" dan sekolah "prioritas" (RAR, RRS, dan DIF). Sekolah-sekolah "prioritas" tersebut memperoleh hak khusus dibandingkan sekolah "standar" dalam hal (IA Rhône, 2008):

- Tingkat pembimbingan yang lebih tinggi (lebih banyak tenaga pengajar) atau kelas yang lebih kecil;
- Pengadaan asisten pengajar.

Salah satu contoh aplikasi program ini adalah perbedaan jumlah murid per kelas untuk kedua kategori sekolah tersebut. IA Rhône menerapkan standar ganda dalam hal tingkat pembimbingan ini. Untuk sekolah-sekolah "standar", batas maksimalnya adalah 31 murid per kelas *maternelle* dan 26 murid per kelas *élémentaire*. Angka tersebut diturunkan untuk sekolah-sekolah "prioritas": 25 dan 24 murid masing-masing per kelas *maternelle* dan *élémentaire*.

Menurut Kadiv Manajemen Pendidikan IA Rhône, ada pemikiran mengenai evolusi sekolah-sekolah dalam REP. Idanya adalah bahwa sejak diciptakan tahun 1981, suatu lingkungan yang masuk ke dalam ZEP telah berevolusi secara demografis. Dengan demikian, terdapat sejumlah *commune* yang memang tetap membutuhkan perhatian dan bantuan lebih banyak daripada *commune* lainnya, dan sebaliknya, saat ini juga terdapat beberapa *commune* yang memiliki sekolah-sekolah "prioritas" namun telah memiliki karakteristik yang sama dengan sekolah "standar". Dalam hal ini, ada tiga tingkat klasifikasi sekolah dalam *Education prioritaire/EP* (Pendidikan prioritas) yang diterapkan mulai tahun 2006 (IA Rhône, 2006):

- Sekolah EP1: termasuk klasifikasi RAR, berada di lingkungan paling "sulit", dan menerima tambahan bantuan pendidikan;
- Sekolah EP2: dicirikan dengan pembauran sosial yang lebih baik dan tetap menerima bantuan pendidikan seperti sebelumnya, sekolah RRS masuk dalam tingkat ini;
- Sekolah EP3: sekolah ini keluar dari klasifikasi sekolah "prioritas" terhitung tiga tahun setelah karakteristik sebagai sekolah "standar" terpenuhi. Bantuan

pendidikan tetap diterima sesuai jumlah murid yang masih menghadapi "kesulitan".

Akan tetapi, sampai saat ini, kebijakan di atas belum diterapkan di Département Rhône. Tidak tampak keinginan dari otoritas pendidikan tingkat lokal untuk mengurangi bantuan untuk lebih mendukung proses belajar di sekolah-sekolah yang dinilai menghadapi "kesulitan".

BAB IV

LYON DAN VAULX-EN-VELIN: COMMUNE SENTRAL DAN BANLIEUE

4. 1. Populasi Penduduk

Rhône menempati urutan ke-4 sebagai *département* berpenduduk terbesar di Perancis. *Département* ini memiliki lebih dari seperempat populasi di Région Rhône-Alpes yang mencakup 8 *département*: Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, dan Haute-Savoie.

Sebagai sebuah *département* dengan wilayah urban yang luas, Rhône memiliki karakteristik (IA Rhône, 2008):

- populasi penduduk berusia muda dengan kecenderungan yang tetap, terutama di aglomerasi Lyon;
- populasi warga negara asing yang tinggi;
- populasi yang terpusat di *communauté urbaine*¹ Lyon (pada tahun 2005, 73% dari total penduduk di 293 *commune* yang terdapat di Département Rhône bermukim di 57 *commune* yang tergabung dalam Grand Lyon).

Untuk memberikan gambaran situasi yang lebih global, studi ini tidak hanya membandingkan elemen-elemen statistik Lyon dan Vaulx-en-Velin, tetapi juga beberapa *commune* besar di Département Rhône (lihat gambar 1.1). Ketujuh

¹ *Communauté urbaine* adalah sebuah pengelompokan beberapa *commune* yang bergabung dalam satu lingkup solidaritas dan bersinergi mewujudkan suatu program bersama untuk membangun dan mengelola wilayah mereka. Bentuk kemitraan yang diciptakan sejak 12 Juli 1999 melalui peraturan pemerintah ini harus mencakup lebih dari satu *commune* dan tiap anggotanya tidak berpenduduk melebihi 500.000 jiwa (INSEE, 2008).

commune yang dibandingkan merupakan *commune* terbesar di *département* dalam hal jumlah penduduk. Walaupun total luas wilayah ketujuh *commune* ini (149,13 km²) hanya mencakup 4,6% luas wilayah Rhône, namun hampir setengah (49,6%) populasi *département* tinggal di ketujuh *commune* tersebut, 819.400 jiwa dari total 1.654.052 jiwa (INSEE, 2005). Seperti halnya Vaulx-en-Verin, kelima *commune* lainnya berlokasi juga merupakan *banlieue* (periferi kota) Lyon dan tergabung dalam aglomerasi Lyon.

4.1.1. Evolusi Demografi: *Commune* “Muda”

Evolusi populasi ketujuh *commune* yang ditinjau sejak sensus penduduk tahun 1962 hingga angket penduduk terakhir tahun 2005 cukup bervariasi (lihat tabel IV.1 dan gambar 4.1). Sejak tahun 1999, peningkatan angka demografi tampak di aglomerasi Lyon. Jumlah rumah tangga mengalami progres dua kali lebih cepat antara tahun 1999 dan 2005 dibandingkan periode tahun 1990 hingga 1999 (Genay, 2008). “Rhône masih memiliki daya tarik yang tinggi”, tegas Mossant (2005) yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah rumah tangga berdampak pada pemukiman penduduk yang perlahan mengalami perubahan: tempat tinggal utama lebih umum berbentuk apartemen daripada rumah tinggal dan kini lebih banyak jumlah unit hunian per bangunan.

Pada tahun 2005, ketujuh *commune* mengalami penambahan populasi dibandingkan angka sensus penduduk tahun 1999, kecuali populasi Saint-Priest berkurang sangat tipis, -0,2%. Sejak tahun 1990, populasi Lyon mulai kembali bertambah setelah mengalami pengurangan sejak tahun 1962 hingga 1982. Jumlah penduduk di *commune* sentral tersebut meningkat 4,9% antara tahun 1999 dan

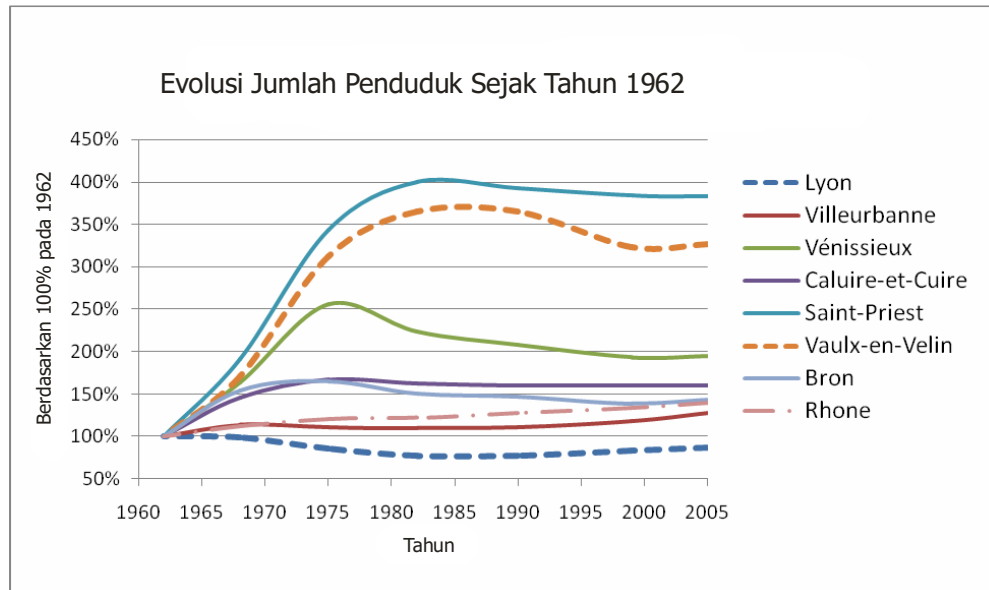
2005. Di Vaulx-en-Velin, terjadi penurunan jumlah penduduk secara drastis antara tahun 1990 dan 1999 sebesar -11,4%, tapi sejak 1999 hingga 2005, jumlah penduduk meningkat sebesar 1,1%. Pada level *département*, jumlah penduduk Rhône terus mengalami peningkatan sejak tahun 1962. Dari 1999 hingga 2005, pertambahan penduduk Rhône mencapai 4,8%.

TABEL IV.1
EVOLUSI JUMLAH PENDUDUK SEJAK TAHUN 1962

<i>Commune</i>	Jumlah penduduk per sensus						
	1962	1968	1975	1982	1990	1999	2005
Lyon	535 746	527 800	456 716	413 095	415 487	445 452	467 400
Villeurbanne	105 416	119 879	116 535	115 960	116 872	124 215	134 800
Vénissieux	29 040	47 613	74 347	64 804	60 444	56 061	56 700
Caluire-et-Cuire	25 754	37 603	43 041	41 931	41 311	41 233	41 300
Saint-Priest	10 681	20 419	36 734	42 677	41 876	40 974	40 900
Vaulx-en-Velin	12 118	20 726	37 866	44 160	44 174	39 154	39 600
Bron	26 959	41 619	44 563	40 638	39 683	37 369	38 700
Rhône	1 181 812	1 326 383	1 429 647	1 445 208	1 508 966	1 578 869	1 654 052

Sumber: INSEE – Sensus penduduk tahun 1962-1999, Angket penduduk 2005.

Lyon dan *banlieue*-nya adalah *commune* yang cenderung tetap “muda”: penduduk berusia kurang dari 20 tahun hampir 40% lebih banyak daripada penduduk berusia 60 tahun atau lebih. “Département Rhône lebih atraktif bagi usia 20-39 tahun daripada bagi penduduk usia pensiun yang secara tradisi lebih tertarik kepada wilayah selatan Perancis” (Mossant, 2005). Genay (2008) mengindikasikan bahwa daya tarik *commune* bagi para pelajar dan pekerja muda ditunjukkan oleh fluks migrasi positif untuk pelajar dan mahasiswa serta untuk usia dibawah 30 tahun. Ia menyatakan bahwa “penduduk terus datang dan tinggal di Aglomerasi Lyon, apapun kategori sosial mereka”.



Sumber: INSEE – Sensus penduduk tahun 1962-1999, Angket penduduk 2005.

GAMBAR 4.1
GRAFIK EVOLUSI JUMLAH PENDUDUK SEJAK TAHUN 1962

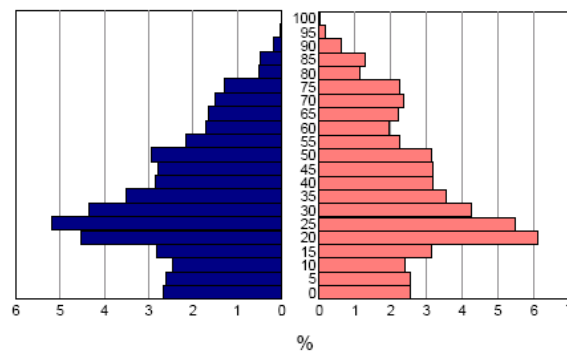
TABEL IV.2
KEPADATAN PENDUDUK

<i>Commune</i>	Luas km ²	Populasi total	Kepadatan jiwa/km ²	Populasi berusia dibawah 10 tahun	
Lyon	47.87	445,452	9,305	46,084	10.35%
Villeurbanne	14.52	124,215	8,555	14,306	11.52%
Vénissieux	15.33	56,061	3,657	7,706	13.75%
Caluire-et-Cuire	10.45	41,233	3,946	4,553	11.04%
Saint-Priest	29.71	40,974	1,379	5,367	13.10%
Vaulx-en-Velin	20.95	39,154	1,869	5,866	14.98%
Bron	10.30	37,369	3,628	4,930	13.19%
Rhône	3,249.12	1,578,869	486	189,220	11.98%

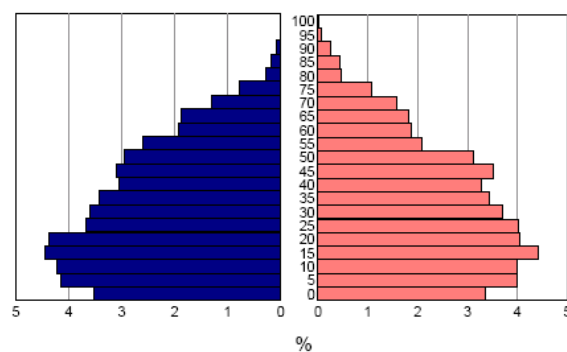
Sumber: INSEE, Sensus penduduk 1999

“Lyon identik dengan pusat aktivitas di Rhône” (Genay, 2008). Dari 293 *commune* dalam wilayah Département Rhône, Commune Lyon meliputi 28% populasi total *département* (lihat tabel IV.2). *Commune* sentral ini dan Commune Villeurbanne memiliki kepadatan penduduk tertinggi di *département*. Lyon 5 kali

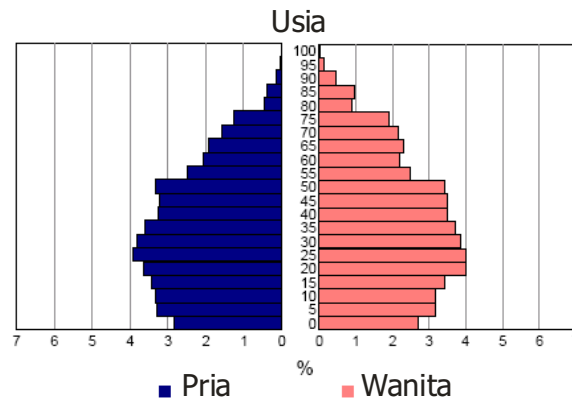
lipat lebih padat daripada Vaulx-en-Velin walaupun kepadatan penduduk *banlieue* ini sudah 4 kali kepadatan rata-rata *département*. Hampir 15% dari total populasi Vaulx-en-Velin berusia kurang dari 10 tahun, proporsi yang paling tinggi di antara ketujuh *commune*. Di Lyon, persentasi penduduk berusia di bawah 10 tahun lebih rendah daripada persentasi *département*, 10,35% berbanding 11,98%. Piramida penduduk menunjukkan bahwa populasi Vaulx-en-Velin lebih “muda” dibandingkan Lyon atau Rhône (lihat gambar 4.2). Pada tahun 1999, penduduk berusia dibawah 20 tahun di Lyon dan di Rhône masing-masing menempati proporsi 21,2% dan 26,6%, sementara di Vaulx-en-Velin, mencapai 32,0%.



Lyon



Vaulx-en-Velin



Rhône

Sumber: INSEE, Sensus penduduk 1999

GAMBAR 4.2
PIRAMIDA PENDUDUK LYON, VAULX-EN-VELIN, DAN RHÔNE

4.1.2. Evolusi Jumlah Murid: Sekolah Publik dan Sekolah Privat

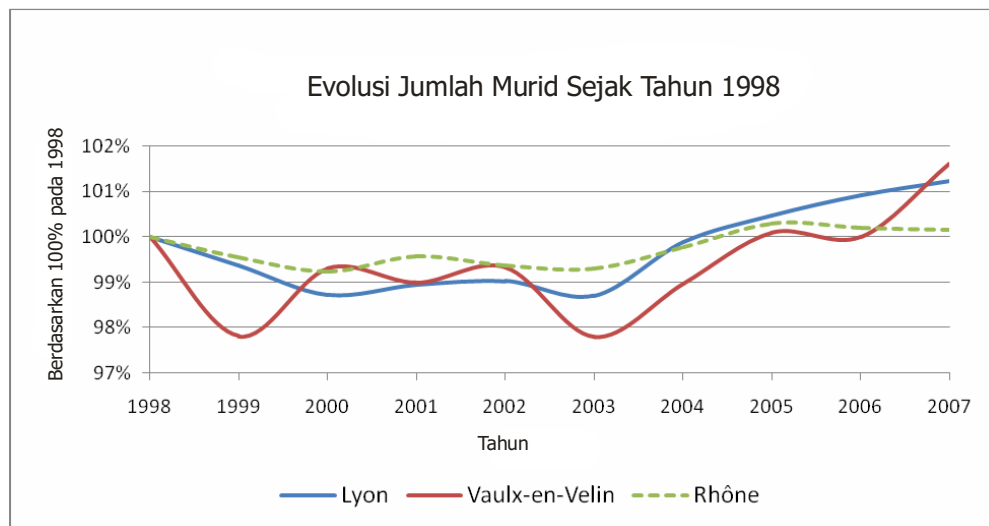
TABEL IV.3
EVOLUSI JUMLAH MURID DI INSTITUSI PENDIDIKAN DASAR
SEJAK TAHUN 1998

Tahun Ajaran	Lyon			Vaulx-en-Velin			Rhône		
	Publik	Privat	Total	Publik	Privat	Total	Publik	Privat	Total
1998	32,681	9,950	42,631	5,407	0	5,407	148,649	31,888	180,537
1999	32,351	10,013	42,364	5,289	0	5,289	147,947	31,785	179,732
2000	31,873	10,216	42,089	5,369	0	5,369	147,068	32,096	179,164
2001	31,861	10,320	42,181	5,352	0	5,352	147,607	32,165	179,772
2002	31,896	10,319	42,215	5,371	0	5,371	147,472	31,916	179,388
2003	31,878	10,202	42,080	5,288	0	5,288	147,354	31,907	179,261
2004	32,360	10,221	42,581	5,351	0	5,351	148,324	31,801	180,125
2005	32,687	10,145	42,832	5,412	0	5,412	149,499	31,568	181,067
2006	32,782	10,241	43,023	5,407	0	5,407	149,270	31,640	180,910
2007	32,742	10,412	43,154	5,494	0	5,494	149,272	31,539	180,811

Sumber: Inspection Académique Rhône, 2008

Sepanjang sepuluh tahun terakhir, jumlah murid di institusi pendidikan dasar di Rhône bisa dikatakan stabil atau hanya sedikit meningkat: 0,02% per

tahun. Evolusi jumlah murid di Lyon lebih dinamis daripada di tingkat *département* tetapi kurang dinamis jika dibandingkan dengan Vaulx-en-Velin (lihat tabel IV.3 dan gambar 4.7). Peningkatan rata-rata jumlah murid di Lyon hanya 0,14% dan peningkatan ini berlangsung secara berkesinambungan sejak tahun 2003. Setelah mengalami penurunan sebesar -1,55% antara tahun 2002 dan 2003, jumlah anak yang bersekolah di Vaulx-en-Velin cenderung meningkat lebih cepat dibandingkan Lyon dan Département Rhône: jumlah murid di *commune* ini meningkat 3,90% dalam 4 tahun, sejak 2003 hingga 2007.



Sumber: *Inspection Académique Rhône, 2008*

GAMBAR 4.3
GRAFIK EVOLUSI JUMLAH MURID SEJAK TAHUN 1998

Apabila kita perhatikan secara terpisah antara sekolah publik dan privat, evolusi jumlah murid menunjukkan kecenderungan yang berbeda (lihat tabel IV.3 dan gambar 4.7). Dalam 10 tahun terakhir, peningkatan rata-rata jumlah murid sekolah publik di Lyon (0,02%) lebih rendah dibandingkan di Rhône (0,05%) dan

di Vaulx-en-Verin (0,19%, yang juga menunjukkan peningkatan total jumlah murid sekolah karena tidak terdapat sekolah privat di *commune* ini). Akan tetapi, progres jumlah murid sekolah privat menunjukkan kecenderungan yang lain: di Lyon, jumlah anak yang bersekolah di institusi privat meningkat jauh lebih cepat (0,51% per tahun) dibandingkan di institusi publik (0,02%), sedangkan di *département*, angka ini cenderung menurun (-0,12% per tahun).

4.1.3. Aspek Sosial Ekonomi

Penurunan rata-rata jumlah orang per rumah tangga meningkatkan permintaan jumlah hunian. “Pada tahun 1999, proporsi hunian utama (88,8%) terhadap total jumlah hunian bertambah lebih cepat di Département Rhône dibandingkan dengan kategori hunian lainnya: hunian sekunder (2,0%), hunian yang ditinggali sewaktu-waktu (1,2%), atau hunian yang tidak ditinggali (8,1%)” (Mossant, 2005).

TABEL IV.4
HUNIAN UTAMA: JUMLAH PENGHUNI DAN STATUS HUNIAN

<i>Commune</i>	Hunian utama	Jumlah penghuni	Rata-rata jumlah penghuni	Jumlah hunian utama status hak milik		Jumlah hunian utama status sewa (termasuk HLM)		Jumlah hunian utama status sewa HLM		Jumlah hunian utama status menumpang	
Lyon	216,275	430,903	1.99	68,103	31.51%	140,298	64.91%	39,071	18.08%	7,756	3.59%
Villeurbanne	55,166	118,977	2.16	20,742	37.62%	32,622	59.17%	12,867	23.34%	1,772	3.21%
Vénissieux	20,691	54,561	2.64	7,114	34.39%	13,113	63.39%	10,252	49.56%	459	2.22%
Caluire-et-Cuire	17,933	40,485	2.26	9,212	51.46%	8,147	45.51%	2,776	15.51%	544	3.04%
Saint-Priest	14,849	40,398	2.72	7,088	47.80%	7,391	49.84%	4,931	33.25%	350	2.36%
Vaulx-en-Verin	13,194	38,319	2.90	4,402	33.32%	8,512	64.42%	6,700	50.71%	299	2.26%
Bron	14,986	36,168	2.41	6,848	45.76%	7,295	48.75%	4,169	27.86%	821	5.49%
Rhône	647,190	1,537,775	2.38	299,213	46.27%	324,140	50.13%	128,283	19.84%	23,266	3.60%

Sumber: INSEE, Sensus penduduk 1999.

“Hunian utama adalah tempat tinggal yang dihuni secara tetap dan dijadikan tempat tinggal utama oleh sebuah rumah tangga” (INSEE, 2008). Menurut sensus penduduk terakhir tahun 1999, rata-rata jumlah penghuni satu hunian utama di Rhône adalah 2,4 jiwa per hunian (lihat tabel IV.4). Di Lyon, secara rata-rata, setiap hunian ditinggali oleh 2 jiwa, angka yang paling rendah di antara ketujuh *commune*. Di Vaulx-en-Verin, rata-rata 3 jiwa menempati satu hunian yang sama, jumlah tertinggi di antara *commune* yang dibandingkan.

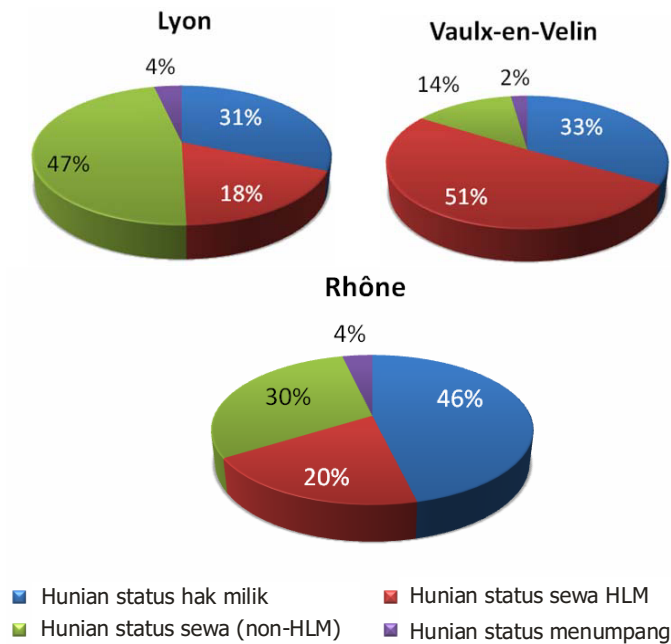
Menurut INSEE, status penghuni terdiri atas:

- Status pemilik hunian, mencakup berbagai bentuk kepemilikan suatu tempat tinggal;
- Status penyewa atau subpenyewa, berupa hunian sewa kosong ataupun lengkap, termasuk kamar hotel apabila dijadikan hunian utama oleh individu atau rumah tangga;
- Status penghuni menumpang, contohnya, orang yang tinggal di hunian orang tuanya, teman, atau tempat bekerja.

Salah satu jenis hunian utama dengan status sewa adalah HLM. “*Habitation à loyer modéré* (Rumah susun sederhana sewa), yang merupakan bentuk pokok dari permukiman sosial di Perancis, dibangun dengan bantuan Negara dan berbagai macam komunitas” (Merlin et Choay, 1988). Dijelaskan di dalam Kamus tata kota dan perencanaan wilayah bahwa hunian yang dibangun dalam konsep HLM memiliki tiga karakteristik umum:

- Ditujukan untuk rumah tangga yang dianggap berhak dari sudut pandang sosial, yang harus memenuhi kriteria dan mematuhi aturan sebagai penghuni;

- Memenuhi persyaratan luas hunian, harga sewa, dan fasilitas pendukung;
- Harga sewa hunian dibatasi oleh otoritas.



Sumber: INSEE, Sensus penduduk 1999

GAMBAR 4.4
DIAGRAM HUNIAN UTAMA MENURUT STATUS HUNIAN

Status hunian dapat mencerminkan kondisi ekonomi suatu rumah tangga. Terdapat juga persamaan antara jumlah unit hunian utama dan jumlah kepala rumah tangga (INSEE, 2008). Proporsi hunian utama berstatus hak milik, baik di Lyon (31%) maupun di Vaulx-en-Velin (33%), lebih rendah daripada di tingkat *département* (46%) (lihat gambar 4.4). Vaulx-en-Velin ditandai dengan proporsi permukiman sosial yang besar: lebih dari setengah (51%) hunian utama merupakan rumah susun sederhana sewa (HLM), persentasi tertinggi di antara ketujuh *commune*. Sebaliknya, Lyon memiliki persentasi permukiman sosial

terendah di antara tujuh *commune* tersebut dengan hanya 18% dari jumlah hunian utama.

Dalam hal populasi penduduk usia aktif, Lyon, yang memiliki 47,10% penduduk aktif, adalah *commune* yang paling “aktif” dibandingkan dengan ketujuh *commune* lainnya (lihat tabel IV.5). Dengan 42,02% penduduk aktif, Vaulx-en-Verin memiliki proporsi penduduk usia aktif terendah, dibawah persentasi yang dimiliki Rhône (46,21%). Di *commune* ini, hampir 1 diantara 4 penduduk usia aktif (23,41%) menganggur, tingkat pengangguran ini merupakan yang tertinggi di antara *commune* lainnya, dan bahkan lebih dari dua kali lipat tingkat pengangguran pada level *département* (11,40%).

TABEL IV.5
POPULASI PENDUDUK USIA AKTIF DAN STANDAR HIDUP

<i>Commune</i>	Penduduk aktif	Proporsi pend. aktif thd total penduduk	Aktif, memiliki pekerjaan		Aktif, menganggur		Pendapatan/UK
Lyon	209,826	47,10%	183,490	87.45%	26,336	12.55%	18,570 €
Villeurbanne	57,144	46,00%	48,657	85.15%	8,487	14.85%	15,719 €
Vénissieux	24,436	43,59%	19,657	80.44%	4,779	19.56%	12,308 €
Caluire-et-Cuire	18,997	46,07%	17,241	90.76%	1,756	9.24%	20,597 €
Saint-Priest	18,936	46,21%	16,449	86.87%	2,487	13.13%	15,396 €
Vaulx-en-Verin	16,452	42,02%	12,600	76.59%	3,852	23.41%	10,339 €
Bron	16,179	43,30%	13,835	85.51%	2,344	14.49%	16,120 €
Rhône	729,623	46,21%	644,257	88.30%	83,177	11.40%	17,611 €

Populasi penduduk usia aktif mencakup penduduk aktif bekerja, pengangguran, dan anggota militer.

Sumber: INSEE, Sensus penduduk 1999

Menurut definisi INSEE, standar hidup sama dengan total pendapatan tahunan per rumah tangga dibagi jumlah unit konsumsi (UK). Dengan demikian, standar hidup setiap individu dalam satu rumah tangga adalah sama. “Unit konsumsi secara umum dihitung sesuai skala ekuivalen menurut OCDE yang telah

dimodifikasi, yaitu: 1,0 UK untuk anggota rumah tangga dewasa pertama, 0,5 UK untuk anggota rumah tangga lainnya yang berusia 14 tahun atau lebih, dan 0,3 UK untuk anak-anak berusia di bawah 14 tahun” (INSEE, 2008).

Dengan pendapatan tahunan per unit konsumsi sebesar 18.570 €, standar hidup rata-rata penduduk Lyon adalah yang tertinggi di antara *commune* terbesar di Rhône setelah Commune Caluire-et-Cuire (lihat tabel IV.5). Di Vaulx-en-Velin, rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar 10.339 € per UK, yang berarti kurang dari 60% Rhône (17.611 €) dan hanya 56% dari standar hidup di Lyon.

4.1.4. Aspek Sosial Budaya

Menurut definisi INSEE (2008), “Rumah tangga (atau ‘rumah tangga normal’) menunjukkan sekelompok orang yang berbagi hunian yang sama tanpa keharusan bahwa orang-orang tersebut dipersatukan oleh ikatan keluarga. Orang-orang yang tinggal di hunian bergerak atau hunian bersama (wisma pensiunan, asrama mahasiswa dan sebagainya) dianggap hidup ‘di luar rumah tangga normal’”.

Penurunan jumlah rata-rata penduduk per rumah tangga, sebuah kecenderungan yang sudah sekian lama berlangsung, berlanjut hingga tahun 2004 di Rhône (Mossant, 2005). Rata-rata, di *département* ini terdapat 2,4 jiwa per rumah tangga. Angka tersebut di Vaulx-en-Velin tertinggi di antara ketujuh *commune*, hampir 3 jiwa per rumah tangga, dibandingkan 2 jiwa per rumah tangga di Lyon.

Di Rhône, 112.249 penduduk, atau 7,30% dari populasi total, berasal dari keluarga monoparental dengan seorang atau beberapa anak berusia kurang dari 25

tahun (lihat tabel IV.6). “Sebuah keluarga monoparental terdiri atas satu orang tua tanpa pasangan dan satu atau lebih anak yang belum menikah (tidak memiliki keturunan)” (INSEE, 2008). Angka ini sedikit lebih tinggi di Lyon dimana 7,95% penduduk berasal dari keluarga monoparental. Di antara *commune-commune* besar di Rhône, angka tertinggi terdapat di Vaulx-en-Velin dengan 11,09% dari populasi total *commune* itu.

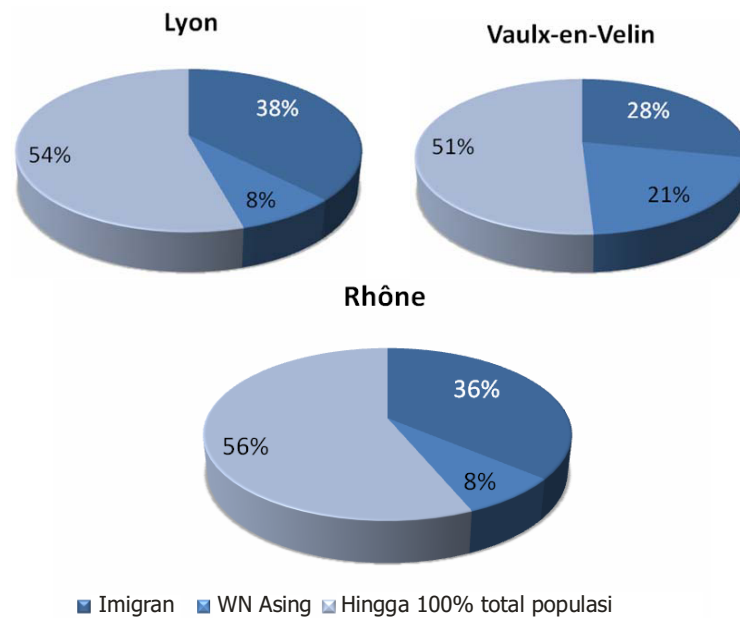
TABEL IV.6
KONDISI DAN ASAL-USUL RUMAH TANGGA

<i>Commune</i>	Jumlah jiwa per RT	Populasi total	Jumlah pend. dari kel. monoparental		Imigran		Warga negara asing	
Lyon	1.99	445,452	34,235	7.95%	168,108	37.74%	35,583	7.99%
Villeurbanne	2.16	124,215	10,425	8.77%	46,751	37.64%	13,202	10.63%
Vénissieux	2.64	56,061	5,684	10.43%	15,025	26.80%	8,095	14.44%
Caluire-et-Cuire	2.26	41,233	2,912	7.19%	15,037	36.47%	1,965	4.77%
Saint-Priest	2.72	40,974	3,556	8.81%	10,667	26.03%	4,829	11.79%
Vaulx-en-Velin	2.90	39,154	4,256	11.09%	11,081	28.30%	8,144	20.80%
Bron	2.42	37,369	2,896	8.01%	13,174	35.25%	4,996	13.37%
Rhône	2.38	1,578,869	112,249	7.30%	570,973	36.16%	118,954	7.53%

Sumber: INSEE, Sensus penduduk 1999

Dengan 118.954 penduduk berkebangsaan asing (7,5% dari total penduduk), Département Rhône menunjukkan populasi penduduk asing yang besar dibandingkan tingkat nasional dimana 5,6% dari total penduduk berkewarganegaraan non-Perancis (INSEE, 1999). Di Lyon, persentasi ini lebih tinggi: hampir 8% penduduk adalah warga negara asing dan proporsi besar lain dari penduduk *commune* ini (38%) merupakan imigran (lihat gambar 4.5). Di antara ketujuh *commune* terbesar di Rhône, Vaulx-en-Velin adalah *commune* yang paling “beragam”: seperlima penduduk *commune* ini merupakan warga negara

asing. Namun demikian, proporsi imigran di *commune* ini (28%) lebih rendah dibandingkan Lyon dan *département*.



Sumber: INSEE, Sensus penduduk 1999

GAMBAR 4.5
DIAGRAM ASAL-USUL PENDUDUK

4.2. Sekolah di Wilayah *Commune*

Dalam tata kelola sekolah pada tingkat *commune* dan *Inspection Académique*, definisi satu “sekolah” menunjukkan satu manajemen sekolah (seorang kepala sekolah), bukan satu bangunan sekolah. Dengan kata lain, sebuah bangunan sekolah dapat terdiri atas satu atau lebih “sekolah” dan sebuah “sekolah” mungkin saja mencakup satu atau lebih bangunan sekolah. Sebuah *école priMaire* pada tabel di atas menunjukkan satu kelompok sekolah yang

terdiri atas *école maternelle* (setingkat TK) dan *école élémentaire* (setingkat SD) yang dikelola dalam satu manajemen.

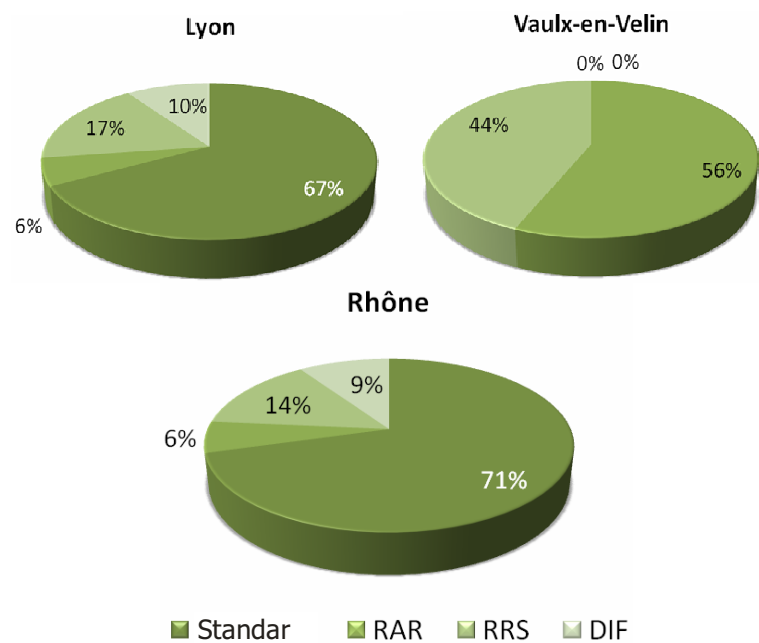
TABEL IV.7
INSTITUSI PENDIDIKAN DASAR PUBLIK

Ecole	Sekolah standar	Sekolah prioritas		Sekolah DIF	Total
		RAR	RRS		
Maternelles (TK)					
Lyon	59	5	15	9	88
Vaulx-en-Velin	0	10	7	0	17
Rhône	220	25	59	44	348
PriMaires (TK dan SD)					
Lyon	14	1	4	1	20
Vaulx-en-Velin	0	0	1	0	1
Rhône	225	8	16	7	256
Elémentaires (SD)					
Lyon	45	4	12	7	68
Vaulx-en-Velin	0	8	6	0	14
Rhône	206	21	54	37	318
Total					
Lyon	118	10	31	17	176
Vaulx-en-Velin	0	18	14	0	32
Rhône	651	54	129	88	922

Sumber: *Inspection Académique Rhône, 2008*

Dari 922 sekolah di *département*, 651 sekolah atau 71% merupakan sekolah “standar” (lihat tabel IV.7 dan gambar 4.6). 29% institusi pendidikan dasar publik lainnya ditempatkan dalam kategori “sulit” di Rhône, baik itu sekolah dalam REP (Jaringan pendidikan prioritas) (20%) maupun sekolah DIF atau berada di lingkungan “sulit” (9%). Di Lyon, *commune* sentral di *département*, persentasi sekolah yang terletak di lingkungan “sulit” lebih tinggi daripada Rhône, 33% dari total 176 institusi pendidikan dasar publik. 23% sekolah publik di Lyon diklasifikasikan dalam REP pada tingkat nasional dan 10% lainnya dikelompokkan “sulit” pada tingkat *département*. Semua institusi

pendidikan dasar publik di Vaulx-en-Velin dinilai berada di lingkungan yang “sulit” pada tingkat menteri. Bahkan, sebagian besar di antara sekolah-sekolah tersebut (56%) dikategorikan sebagai sekolah dalam RAR (Jaringan tekad menuju sukses) yang menurut *Inspection Académique*, dianggap berada di lingkungan yang paling “sulit” di antara sektor-sektor wilayah dalam REP.



Sumber: *Inspection Académique Rhône, 2008*

GAMBAR 4.6
DIAGRAM KLASIFIKASI INSTITUSI PENDIDIKAN DASAR PUBLIK

4.2.1. Lyon: Standar Tinggi, Pilihan Beragam

Standar Sekolah yang Tinggi

Senada dengan *commune* lainnya, tujuan Lyon dalam mengelola sekolah di wilayahnya adalah “membuka” sekolah bagi lingkungan sekitar. Sekolah bukan hanya tempat dimana anak belajar, tetapi ia juga sebuah tempat terbuka di luar jam sekolah, misalnya sebagai pusat bermain dan aktivitas kelompok masyarakat

yang menciptakan ikatan sosial. “*Mairie* yakin bahwa sekolah ikut memfasilitasi *citoyennetés* (kebersamaan) antara anak dan juga orang dewasa untuk menciptakan masyarakat yang lebih solid”, ungkap Direktur Pendidikan Lyon.

Yang membedakan Lyon dengan sejumlah *commune* lain adalah ketika pemerintah *commune* mendirikan suatu sekolah, ia tidak hanya membangun kelas dan ruang makan sekolah. Tetapi setiap sekolah di Lyon dilengkapi juga dengan gymnasium, ruang informatika, perpustakaan, ruang tidur untuk balita, dan fasilitas pertemuan orang tua. Kepala Prasarana Pendidikan Lyon mengatakan, “Fasilitas-fasilitas ini bersifat fakultatif menurut standar sekolah nasional dan tidak mesti semua *commune* melakukannya”. Kemungkinan suatu *commune* untuk menerapkan hal yang serupa tentu saja tergantung pada kapasitas finansial *commune* tersebut.

Menyangkut sekolah-sekolah dalam REP, Duchère, kawasan di barat laut Lyon, adalah satu-satunya sudut kota dimana 10 sekolah di lingkungan tersebut (6% dari total sekolah publik di Lyon) diklasifikasikan ke dalam RAR. Terdapat empat *quartier* dalam RRS di Lyon: Vaise, Pentès de la Croix Rousses, États-Unis, dan Mermoz. Keempat lingkungan tersebut memiliki 31 sekolah RRS (17% dari total jumlah sekolah).

Pilihan Sekolah Privat yang Beragam

Akses menuju sekolah privat terbuka lebar di Lyon. Lyon adalah sebuah kota yang memiliki banyak sekolah privat: 40 sekolah privat diantara 176 sekolah publik (18,5% dari total institusi pendidikan dasar). Selain itu, menurut Direktur Pendidikan, ”walaupun sekolah-sekolah privat memungut bayaran, biaya tidak

terlalu menjadi hambatan karena merupakan kewajiban *commune* untuk memberikan subsidi ke sekolah privat berdasarkan jumlah murid penduduk Lyon yang belajar di setiap sekolah privat (di wilayah Lyon). Tapi, ada juga sekolah privat yang memang benar-benar mahal”.

Pada tahun ajaran 2007, pemerintah *commune* mencatat 10.412 pendaftar di sekolah privat, yang 25% diantaranya merupakan penduduk di luar Lyon (terutama berasal dari beberapa *commune* sekitar Lyon). Ini berarti, hampir 20% murid yang tinggal di Lyon, atau 7.809 anak, belajar di sekolah privat. Kecenderungan ini cukup stabil dan sedikit mengalami pertumbuhan sejak 10 tahun terakhir (0,51% per tahun).

Tergantung pada tiap *commune*, kondisi sekolah privat bisa sangat berbeda. Ada kota tidak memiliki sekolah privat, seperti Vaulx-en-Velin, tapi di *commune* lain, sekolah privat sama banyaknya dengan sekolah publik. Direktur Pendidikan Lyon mengungkapkan, ”ini terkait sejarah Perancis, ada wilayah dengan sejarah katolik yang panjang, seperti Lyon, namun di Grenoble, sekolah privat sangat sedikit berkembang, bahkan di Marseille, hampir tidak ada sama sekali...”. Institusi pendidikan dasar privat di Perancis memang umumnya berafiliasi dengan kelompok keagamaan, terutama katolik.

4.2.2. Vaulx-en-Velin: Sekolah-sekolah ”Prioritas”...

Jika sejumlah orang tua berusaha memilah antara sekolah ”standar” dengan sekolah di lingkungan ”sulit” (dalam REP atau DIF), apa yang terjadi apabila semua sekolah publik di suatu *commune* tempat mereka tinggal diklasifikasikan sebagai sekolah REP dan tidak ada satu pun sekolah privat?

Vaulx-en-Velin adalah salah satu contoh kasus. Semua 32 sekolah di *commune* ini dikategorikan ke dalam REP (lihat tabel IV.7 dan gambar 4.6). Angka ini jauh di atas persentasi di tingkat Rhône dimana sekolah dalam REP hanya mencakup 20% sekolah publik.

Ketimpangan dalam Jaringan Pendidikan Prioritas (REP)

Apakah para orang tua murid di Vaulx-en-Velin, seperti halnya sejumlah orang tua murid lainnya, memiliki kecenderungan membeda-bedakan antara sekolah "standar" dan sekolah dalam REP? Keinginan pemerintah *commune* adalah memberi perlakuan yang sama kepada semua sekolah. Namun *Mairie* memang melihat bahwa terdapat banyak permohonan orang tua murid untuk menyekolahkan anak mereka diluar sektor tempat tinggal mereka dan memilih sekolah di lingkungan Vaulx-en-Velin Village. Fenomena yang sama muncul juga di Sekolah Mistral di pusat kota yang merupakan sekolah tertua kedua di *commune* ini, dibangun pada tahun 1932-1934. Namun, tegas Direktur Pendidikan Vaulx-en-Velin, "hal ini tidak menimbulkan banyak masalah karena hingga saat ini, sekolah-sekolah di Vaulx-en-Velin memiliki kapasitas lebih untuk menyerap permohonan *dérogation* (pembebasan dari aturan sektor sekolah)".

Ketika orang tua mengajukan permohonan *dérogation*, sering kali disebabkan oleh alasan pengasuhan anak, baik oleh keluarga maupun oleh tempat penitipan anak yang berlokasi di dekat sekolah yang diinginkan. Tetapi, agar permohonan *dérogation* mereka diterima oleh otoritas *commune*, orang tua harus benar-benar memiliki alasan yang kuat. Faktanya, *dérogation* juga diajukan dengan alasan representasi (positif atau negatif) suatu sekolah. Sebagian orang tua

berpikir bahwa suatu sekolah lebih baik daripada sekolah dalam sektor tempat tinggal mereka. Otoritas pendidikan di Vaulx-en-Velin menegaskan, "Ini sebuah kekeliruan. Sekolah-sekolah di Vaulx-en-Velin, semua memiliki kualitas yang sama dalam menerima dan mendidik anak-anak. Walaupun beberapa sekolah tertentu sudah tua dan membutuhkan banyak perbaikan, tapi apa yang terjadi di sekolah, ada tim pengajar dan tenaga pendukung dari *commune* yang solid agar anak-anak mendapat pendidikan yang baik".

Reputasi yang Berbeda

Lalu, mengapa sekolah-sekolah di suatu lingkungan tertentu, Village misalnya, dianggap lebih baik daripada sekolah lainnya? Direktur Pendidikan Vaulx-en-Velin menjelaskan bahwa sejak dulu, Village merupakan lingkungan *privilégié* (pilihan) dan paling tua di Vaulx-en-Velin. Kawasan kota pertama Vaulx-en-Velin adalah Village, sebelum diciptakannya ZUP² dan baru kemudian, dibangunlah pusat kota yang baru. Menurutnya, "Ada citra Village yang terus terjaga... Dalam pikiran masyarakat, anak-anak lebih 'terlindungi' karena lingkungan ini masih berupa 'desa' yang asri, yang tidak terganggu oleh hiruk-pikuk sebuah ZUP".

² *Zones à urbaniser par priorité*/ZUP (Zona pembangunan kota prioritas) adalah sebuah program pembangunan yang diciptakan melalui sebuah dekrit pada 31 Desember 1958. Saat ini, ZUP telah dihapus setelah sebelumnya menerima sejumlah kritik tajam (program terakhir direalisasikan pada tahun 1969). Mayoritas proyek konstruksi di dalamnya mencakup hunian berupa gedung-gedung tinggi menjulang atau memanjang yang dilengkapi fasilitas umum, serta proyek superstruktur dan infrastruktur lainnya. Secara kuantitatif, hasil yang diperoleh selama program ini berjalan tidak bisa dipandang sebelah mata: 803.000 hunian tercipta di 195 ZUP di Perancis, terutama berupa permukiman baru dan umumnya berlokasi di periferi kota besar yang sudah ada (Merlin dan Choay, 1988).

Di lingkungan Village dan pusat kota, latar belakang penduduk tidaklah seragam dan juga tengah mengalami perubahan yang dipicu oleh pembangunan proyek-proyek konstruksi baru. Apabila kita meninjau permukiman sosial dan permukiman berstatus hak milik yang ada, kita juga melihat bahwa terjadi pembauran sosial di lingkungan tersebut. Sebaliknya, di dalam ZUP hanya terdapat permukiman sosial. Direktur Pendidikan Vaulx-en-Velin mengatakan, “Pembauran sosial tidak berlangsung baik di sekolah-sekolah dalam zona tersebut dibandingkan di sekolah-sekolah di Village atau pusat kota. Sejumlah keluarga tidak berkeinginan menyekolahkan anak mereka bersama anak-anak dari keluarga yang tinggal di ZUP. Benar, di *commune* ini, terdapat sejumlah keluarga yang memiliki permasalahan sosial yang besar akibat pengangguran, pekerjaan yang tidak menentu...”.

4.3. Jaringan Pendidikan Prioritas: Sebuah Diskriminasi Positif?

Diskriminasi Positif Menurut Otoritas Pendidikan

Sekolah-sekolah dalam REP atau DIF merupakan sekolah yang memperoleh perhatian lebih dari *Inspection Académique* dan *Mairie* dalam bentuk tenaga pendamping dan tambahan jam sekolah. “Keutamaan REP adalah memfasilitasi pengajar dari Diknas untuk bekerja sama dengan mitra lain di sekolah yang tidak memiliki fungsi mengajar”, Direktur Pendidikan Lyon memberi penjelasan. Terdapat juga seorang koordinator REP yang menangani penuh suatu jaringan sekolah sehingga, menurut beliau, mampu menggerakkan kemitraan antara sekolah dan *commune* serta memotivasi rekan-rekannya sesama pengajar.

Tempat tinggal orang tua menentukan sekolah si anak. Menurut pendapat Kadiv. Pengelolaan Sekolah IA Rhône, saat orang tua mengetahui bahwa satu sekolah tertentu sudah ditentukan bagi anak mereka sesuai lokasi tempat mereka tinggal, umumnya mereka tidak lagi mempertanyakan apakah sekolah tersebut (dan sektor dimana mereka tinggal) dikategorikan sebagai lingkungan yang "sulit" oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat dan *commune* mengelola semua sekolah secara adil dan merata, kita tidak dapat (benar-benar) membedakan "status" dari tiap sekolah. Jadi, variasi status suatu sekolah lebih merupakan sebuah terminologi administratif, pada tingkat *académie*, daripada sebuah status yang memasyarakat. Selain itu, Kepala Bagian Pendidikan Dasar IA Rhône menegaskan, "Berdasarkan kinerja sekolah, terlihat dari tingkat ketidakkulusan murid, tidak benar bahwa sekolah-sekolah dalam RAR, RRS atau DIF lebih buruk daripada sekolah 'standar'". Walaupun sejumlah orang tua memilih untuk tidak menyekolahkan anak mereka di sekolah di sektor tempat tinggal mereka, pilihan ini didasarkan pada pendapat pribadi mereka mengenai suatu sekolah atau lingkungan yang mereka anggap "sulit". "Benar bahwa ada keluarga yang memilih mengajukan *dérogation* atau bahkan memilih sekolah privat untuk menghindari lingkungan seperti ini...", beliau menambahkan.

Sudut Pandang Orang Tua

Para orang tua mencoba mencari sekolah terbaik dalam memilih sekolah bagi anak mereka, tapi di Perancis, pilihan ini dibatasi oleh sistem sektor sekolah. Kepala Bagian Prasarana Pendidikan Lyon mengatakan, "Keluarga yang lebih sejahtera dan *culturellement avancée* (berpendidikan lebih tinggi) memilih

sekolah terbaik, namun keluarga lainnya masuk ke sekolah di lingkungan tempat tinggal mereka”. Menurut Direktur Pendidikan Lyon, sekolah-sekolah di Lyon umumnya memiliki reputasi yang baik, walaupun terdapat ketimpangan antarsekolah, hal ini dimulai pada tingkat *collège*. Ia menambahkan, “Menyangkut sektorisasi sekolah, para orang tua tunduk kepada sistem yang diatur oleh *commune*, jadi ‘status’ sekolah tidak banyak mempengaruhi preferensi orang tua”. Di Vaulx-en-Verin, dimana hanya terdapat sekolah REP, bukan berarti bahwa para orang tua tidak menentukan pilihan. Walaupun persentasinya tidak setinggi di Lyon, yang ditunjukkan oleh jumlah permohonan *dérogation*, sejumlah orang tua memilih sekolah di lingkungan ”terbaik”. Jadi bagi mereka, bukanlah status ”standar” atau ”prioritas” sebuah sekolah yang mempengaruhi pilihan mereka, namun lebih kepada representasi suatu lingkungan sesuai pendapat pribadi mereka.

Terdapat juga kasus dimana orang tua tidak dapat memilih selain menyekolahkan anak mereka di sebuah sekolah REP karena tempat tinggal mereka berada di sektor sekolah tersebut. Padahal, tempat tinggal mereka tidak berada di lingkungan yang dikatakan “sulit”. Contohnya, sejumlah keluarga yang tinggal di *quartier* Etats-Unis (Lyon 8^{ème}) dimana sebagian besar sekolah di lingkungan ini tergolong dalam RRS. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Batas wilayah sektor sebuah sekolah tidak terkait dengan batas Zona pendidikan prioritas (ZEP) karena *commune* tidak memperhitungkan zona ini dalam menentukan sektor sekolah. Wilayah sebuah ZEP bisa mencakup beberapa sekolah publik dan masing-masing sekolah tersebut memiliki sektor mereka

sendiri yang bisa saja melewati batas wilayah ZEP. Tidak ada sekolah "standar" dan sekolah REP yang berada di sektor yang sama.

4.4. Sekolah Privat: Sebuah Pilihan

Di Perancis, institusi pendidikan dasar publik memiliki proporsi yang besar: 90% dari total sekolah pada tahun 2007 (DEPP, 2007). Sekolah publik juga gratis dan sekular. Alasan apa yang membuat sejumlah orang tua murid memilih sekolah privat?

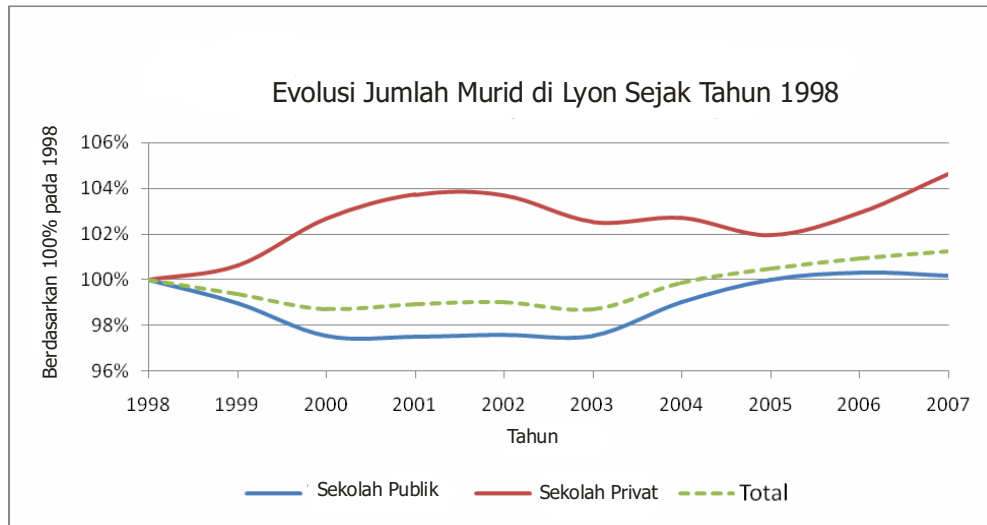
Kadiv Manajemen Pendidikan IA Rhône menjelaskan bahwa secara historis, sebagian besar sekolah privat berhubungan erat dengan agama Katolik, dengan gereja. Sebagaimana yang terjadi terutama di barat Perancis, para orang tua menginginkan agar anak mereka mendapatkan pendidikan agama yang lebih di sekolah sehingga mereka "harus" memilih mendidik anak mereka di sekolah privat karena prinsip sekular yang dipegang oleh sekolah publik. Di Lyon, ia mengatakan, "Terdapat banyak sekolah privat yang berhubungan erat dengan gereja mengingat bahwa Lyon merupakan salah satu *commune* dimana Katolik memegang peran yang penting dalam sejarah".

"Preferensi orang tua terhadap sekolah privat dapat dijelaskan dari sudut pandang budaya dan sosial", tegas salah satu Kepala Divisi di IA Rhône tersebut. Menurutnya, alasan agama adalah motif utama orang tua memilih sekolah privat; baik sekolah Katolik, Yahudi, maupun Islam, walaupun jumlahnya tidak banyak. Dari sudut pandang sosial, sering kali orang tua tidak menginginkan anak mereka bersekolah di lingkungan yang dianggap "sulit" yang berada di sektor yang sama dengan tempat tinggal mereka. Sebagai alternatif terakhir setelah mengajukan

dérogation, orang tua menyekolahkan anak mereka di sekolah privat sesuai pilihannya. Selain itu, berkat kontribusi Negara menggaji para pengajar, menyekolahkan anak di sekolah privat relatif tidak begitu mahal, sehingga solusi ini terbuka bagi para keluarga.

Pada kasus Lyon, *commune* berupaya menciptakan “*des école de quartier*” (sekolah kawasan), artinya sekolah dibuat untuk semua anak di lingkungan tersebut, namun ini tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan... *Mairie* berusaha agar sekolah publik untuk semuanya, namun menurut Kabag Prasarana Pendidikan Lyon, ada sejumlah penduduk yang tidak ingin belajar di sekolah publik, bahkan Lyon sekalipun yang sekolah-sekolahnya dianggap “baik”. Dia mencatat, “Sejumlah orang tua beranggapan bahwa sekolah publik tidak begitu baik untuk anak mereka karena mereka akan bertemu orang asing, bersama dengan anak-anak dari keluarga miskin, dari keluarga berpendidikan rendah...”.

Walaupun hanya 20% murid di Lyon yang belajar di sekolah privat pada tahun ajaran 2007, persentasi peningkatan jumlah murid terdaftar di sekolah privat lebih tinggi daripada sekolah publik (lihat gambar 4.7). Sepanjang 10 tahun terakhir, jumlah murid di sekolah privat selalu lebih banyak daripada tahun 1998, bahkan sejak tahun 2005, jumlahnya tidak berhenti meningkat (sebesar 2,63% dalam waktu 2 tahun). Di sekolah publik, mulai tahun 1999 hingga 2005, jumlah murid kurang dari angka pada tahun 1998. Namun antara tahun 2003 dan 2006, terjadi peningkatan jumlah murid dan kemudian pada tahun 2007, jumlahnya sedikit menurun sebesar -1,0% dibandingkan tahun sebelumnya.



GAMBAR 4.7
GRAFIK EVOLUSI JUMLAH MURID DI LYON SEJAK TAHUN 1998

4.5. Program Pendidikan Tingkat Lokal

Lyon: Program Pendidikan Lyon

Selain dalam operasional sekolah, *commune* semakin terlibat dalam pendidikan di sekolah berdampingan dengan Diknas. Menurut Direktur Pendidikan Lyon, "Penerapan Program Pendidikan Lyon menempatkan anak-anak sebagai fokus dari langkah-langkah yang diambil". Kebutuhan anak-anak dan keluarga berevolusi sehingga sedikit demi sedikit keterlibatan *commune* tidak hanya terbatas pada jam sekolah. Didasari oleh kebutuhan mereka, para keluarga meminta layanan bagi anak mereka mulai pukul 07.30 hingga pukul 17.45 setiap hari sekolah. Di luar jam belajar di sekolah (24 jam per pekan), *commune* lah yang menangani kegiatan para murid: 1 jam pada pagi hari, 2 jam pada tengah hari, 1,5 jam pada sore hari, dan 6 jam pada hari Rabu (Rabu merupakan hari libur sekolah untuk pendidikan dasar selain Sabtu dan Minggu). Dengan demikian, selama

sepekan, sebagian besar murid menghabiskan waktu yang sama banyaknya bersama para guru dan para aparat yang dibiayai oleh *commune*. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab semua pihak: para pengajar dan *commune*.

Direktur Pendidikan Lyon mengatakan, ”Yang menjadi perhatian *Mairie* adalah implementasi koherensi pendidikan: di satu sisi, *commune* mendampingi anak-anak untuk meraih hasil belajar yang baik karena tujuannya adalah agar semua anak berhasil, dan di sisi lain, *commune* harus merespon kebutuhan pengasuhan, makan di sekolah, pelayanan, dan *loisirs* (aktivitas di waktu senggang) untuk semua anak di Lyon”.

Vaulx-en-Velin: Program Pendidikan Global

Pada level *commune*, ada kemauan politis yang kuat bahwa pendidikan harus menjadi poros prioritas dari kebijakan pemerintah kota. Dan walaupun terjadi penurunan total anggaran *commune*, menurut Direktur Pendidikan Vaulx-en-Velin, pendidikan tetap menjadi komponen anggaran terbesar bagi *commune* ini. Di Vaulx-en-Velin, *Mairie* memiliki sebuah dokumen referensi untuk semua komponen pemerintahan *commune* yang terkait pada bidang pendidikan, *Projet Educatif Global/PEG* (Program Pendidikan Global).

”PEG merumuskan prioritas di bidang pendidikan beserta nilai-nilai edukatif. Selanjutnya, pada setiap komponen pemerintahan *commune*, kita menurunkannya ke dalam program pelayanan dan program pembangunan”, jelas Direktur Pendidikan. Nilai-nilai edukatif PEG Vaulx-en-Velin mencakup emansipasi, hidup bermasyarakat, solidaritas sebagai nilai bersama, penghargaan

terhadap peran orang tua dan pembagian peran dalam pendidikan, serta rasa saling percaya.

4.6. Sekolah, Masyarakat, dan *Commune*

Peran Sekolah

Selain sebagai tempat belajar, "Sekolah juga merupakan wahana sosial dan *civil* (bermasyarakat)", kata Kabag Pendidikan Dasar IA Rhône. Menurutnya, sekolah adalah pemersatu komunitas orang tua karena di sekolah lah awalnya mereka bertemu, berdiskusi, dan bertukar pikiran mengenai permasalahan yang tidak selalu menyangkut sekolah. Sekolah juga sebagai pusat kegiatan karena ia memfasilitasi aktivitas olah raga dan seni untuk anak-anak di lingkungannya. Sebagai prasarana yang dimiliki oleh *commune*, fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar pendidikan. Misalnya dalam periode pemilihan umum, sekolah menjadi tempat pemungutan suara. Bahkan sekolah-sekolah tertentu dilengkapi juga dengan pusat bermain dan hiburan serta perpustakaan lingkungan.

Jam belajar di sekolah berlangsung 24 jam per pekan dan tidak sepanjang tahun karena lamanya periode libur sekolah. Jadi, di luar periode belajar, sekolah-sekolah di Lyon menerima kegiatan asosiasi masyarakat dan olah raga karena mereka memiliki ruang pertemuan dan gymnasium untuk penduduk sekitar. Pada dasarnya, sekolah sangat terbuka bagi beragam aktivitas.

Sebagai bagian dari Program Pendidikan Global di Vaulx-en-Velin, dibentuk sebuah organisasi yang terdapat di setiap *quartier*, disebut komisi teritorial. Komisi ini menyatukan semua aktor yang peduli terhadap pendidikan dalam suatu kemitraan yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan

kegiatan sekolah formal. Komisi tersebut merangkul para guru, relawan, *animateur* (kordinator kegiatan masyarakat, bagian dari aparat *commune*), ketua lingkungan, orang tua... yang dipimpin oleh *élu* (anggota DPR) bidang pendidikan dan difasilitasi dalam urusan teknis oleh *commune*.

Komisi teritorial berkumpul per triwulan untuk mendiskusikan perkembangan lingkungan dan untuk mengorganisasi kegiatan kolektif guna merespon kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut, yang mungkin saja spesifik antara suatu lingkungan dengan lainnya. Misalnya, komisi menjalankan program agar semua orang tua memperoleh informasi dan akrab dengan fungsi berbagai fasilitas yang tersedia di lingkungannya dan komisi ini kerap menyelenggarakan acara di tengah masyarakat, baik di sekolah maupun di tempat lain dalam lingkungan mereka.

Ketika Sebuah Kelas Atau Sekolah (Harus) Ditutup...

Inspection Académique Rhône memiliki standar baku untuk menetapkan jumlah sekolah atau jumlah kelas yang harus tersedia di suatu *commune* yang berlaku di semua *commune*. Namun ia tidak hanya mempertimbangkan rasio murid per kelas dan murid per guru dalam mengambil keputusan. Sering kali IA perlu mempertimbangkan kebutuhan tiap *commune* dengan kriteria yang lebih subyektif, sekolah demi sekolah, sebelum memutuskan penutupan kelas dan terlebih lagi sebuah sekolah. Sebagai contoh, Kabag Pendidikan Dasar menjelaskan, "Kami mengizinkan *commune* mempertahankan sebuah kelas ketika rasio murid per kelas hanya sedikit di bawah rasio minimal, terutama apabila sekolah tersebut tergolong 'dalam kesulitan' atau sekolah itu menerima murid

dengan keterbatasan fisik. Pada kasus-kasus tertentu, kita menunggu... Kita lihat perkembangan jumlah murid pada tahun berikutnya”.

Penutupan sebuah sekolah adalah kasus yang berbeda. Ini harus merupakan keputusan bersama semua aktor pendidikan telah diinformasikan. Keputusan ini adalah pembagian wewenang antara pemerintah pusat, *commune*, dan *Conseil Municipal* (DPR tingkat *commune*). Kabag Pendidikan Dasar IA Rhône menegaskan, ”Ini juga bukanlah keputusan yang tiba-tiba. Kita menunggu perkembangan dalam beberapa tahun dan kita melihat kemungkinan bahwa anak-anak dapat diterima di sekolah-sekolah lain atau kemungkinan membuat grup sekolah dengan *commune* lain, seperti yang terjadi di *commune-commune* rural”. Menurut Kabag Statistik IA Rhône, satu hal yang penting diperhatikan adalah bahwa penurunan jumlah sekolah tidak serta merta menunjukkan penutupan sekolah tapi merupakan bentuk penggabungan sekolah karena alasan rasionalisasi ekonomi, contohnya penyatuan manajemen antara sebuah *école maternelle* dan sebuah *école élémentaire*. Penutupan sekolah yang ’sebenarnya’ merupakan kasus yang sangat jarang terjadi.

Penutupan *école priMaire* Jean Jaurès di *quartier* Pré de l’Herpe, Vaulx-en-Velin pada tahun 1996 adalah sebuah contoh. Di *quartier* tersebut, terjadi penurunan tetap angka kelahiran mulai tahun 1990 hingga 1995 defisit jumlah murid lebih dari 400 anak, sebanding dengan 16 kelas TK dan SD. Pada tahun ajaran 1996, Ecole Jean Jaurès memiliki 5 kelas saja, bahkan hanya akan tersisa 4 kelas. Sebelum keputusan penutupan sekolah akhirnya diambil atas suara

terbanyak, *Mairie* mengajukan tiga solusi yang mungkin (Ville de Vaulx-en-Velin, 2005):

- Membiarkan situasi berkembang apa adanya, yang berarti membiarkan sekolah Jean Jaurès “hilang” perlahan-lahan;
- Memodifikasi batas sektor sekolah King dan Vilar, dua sekolah yang berdekatan, guna memasukkan murid-murid dari kedua sekolah tersebut ke Jean Jaurès;
- Menutup sekolah Jean Jaurès mempersiapkan adaptasi anak-anak bersama orang tua dan guru ke sekolah baru mereka (menyesuaikan batas sektor lima sekolah yang dekat dengan lingkungan tersebut).

Opsi kedua mungkin saja mampu menstabilkan kondisi sekolah Jean Jaurès sehingga mampu memiliki murid sejumlah 6 atau 7 kelas, akan tetapi itu berarti sejumlah orang tua murid sekolah King dan Vilar harus menerima perubahan batas sektor sekolah sehingga anak-anak mereka masuk ke dalam sektor sekolah Jaurès. Sebuah keputusan yang sama sekali tidak mudah...

Di Lyon, “sekolah-sekolah tertentu sangat kecil dengan 2 kelas, 40 murid... sangat mahal untuk dikelola”, ungkap Kepala Prasarana Pendidikan Lyon. Karena alasan itu lah *commune* berusaha menutup beberapa sekolah dan mengirim murid-murid ke sekolah lain yang lebih besar, yang memiliki kapasitas untuk menerima. Beliau menjelaskan bahwa hal ini dilatarbelakangi oleh evolusi demografis Perancis sejak tahun 1960 ketika banyak sekolah yang dibangun, termasuk dalam konteks Zona pembangunan kota prioritas (ZUP). Misalnya, di

Duchère, *Mairie* telah menutup 2 sekolah pada tahun 2004 dan 2006 karena memang jumlah murid tidak mencukupi.

Masyarakat tidak begitu setuju ketika *commune* menutup sebuah sekolah. Namun dalam kasus di Lyon, terdapat banyak sekolah yang saling berdekatan. *Mairie* berupaya untuk mengganti aktivitas di sebuah sekolah yang ditutup dengan aktivitas lain yang juga terkait dengan kehidupan sosial di lingkungan tersebut: sebuah *crèche* (tempat penitipan anak) atau pusat kegiatan sosial misalnya, tergantung pada kondisi lingkungan. Dengan demikian, bagi masyarakat di lingkungan tersebut, menurut Kepala Prasarana Pendidikan, perubahan itu tidak begitu dirasakan.

Sudah sejak dua puluh tahunan, Vaulx-en-Velin memanfaatkan sejumlah kelas yang ditutup untuk kebutuhan masyarakat yang lebih aktual dan penting, sesuai yang dikatakan Kepala Logistik Pendidikan Vaulx-en-Velin. Misalnya, pada tahun 1987, Ecole Maternelle George Sand diubah menjadi *Centre de la Petite Enfance* (Pusat kegiatan Batita), terobosan penting bagi pendidikan prasekolah. Sebagian dari sekolah Jean Vilar di *quartier* Mas du Taureau dimodifikasi menjadi sebuah *ludothèque* (perpustakaan dan taman bermain) pada tahun 1990. Pada tahun yang sama, 3 kelas di sekolah Makarenko diubah menjadi perpustakaan *quartier* Verchères.

BAB V

SEKTORISASI SEKOLAH: LEBIH DARI SEKEDAR PEMBAGIAN POPULASI MURID

5.1. Distribusi Jumlah Kelas: Kapasitas Besar, Sebaran Kurang Merata

Kapasitas yang Jauh Lebih Besar

”Kapasitas total sekolah jauh melebihi kebutuhan, tetapi masalahnya adalah kapasitas tersebut tidak terlatak di lokasi yang tepat”, menurut Kepala Prasarana Pendidikan Lyon. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa di *quartier* dimana terdapat permukiman sosial, sekolah-sekolah jauh lebih besar. Sebaliknya, pada lingkungan dimana saat ini dibangun permukiman baru, tidak terdapat jumlah kelas yang mencukupi. Bahkan *quartier* tertentu di Lyon, yang dulunya merupakan kawasan industri, tidak terdapat sekolah sama sekali. Berdasarkan pertimbangan itulah, *commune* merencanakan di lingkungan mana sekolah seharusnya dibangun.

Di Lyon, terdapat *secteurs en tension* (sektor padat), yaitu sektor-sektor yang kekurangan kapasitas sekolah di *arrondissement* 7, 3, dan 8. Misalnya, di bekas *quartier* industri Etats-Unis (arr. 8), hanya terdapat dua sekolah sementara *commune* tidak dapat menempatkan semua anak di sekolah-sekolah di sektor tersebut. Untuk mengatasinya, saat ini *commune* menyewa bangunan modular sebagai kelas sementara sampai lingkungan tersebut memiliki sekolah baru atau sekolah yang diperluas.

Vaulx-en-Velin menghadapi fenomena yang hampir sama. Di sekolah-sekolah di Zona pembangunan kota prioritas (ZUP), terutama *école élémentaire*, kapasitas kelas hingga dua kali lebih banyak dibandingkan kebutuhan saat ini, namun bukan berarti kelebihan kelas tersebut tidak digunakan. Sekolah menggunakan kelas-kelas yang "tersisa" untuk aktivitas lain yang dulu, saat sekolah-sekolah itu dibangun, tidak direncanakan: ruang informatika, kesenian plastik dan lainnya. Contohnya, di sekolah Lorca di *quartier* Thibaude, terdapat total 20 kelas namun hanya 9 di antaranya yang digunakan sebagai kelas "sebenarnya". Sebaliknya, di *quartier* Village dan pusat kota, *Mairie* tengah memperluas sekolah-sekolah untuk memenuhi perkiraan peningkatan jumlah murid di lingkungan tersebut akibat munculnya konstruksi-konstruksi baru.

Distribusi Murid dan Sekolah Per *Quartier*

Di *quartier* tertentu, terdapat banyak anak namun *commune* tidak memiliki sekolah yang memadai, jumlah kelas yang mencukupi. Sebaliknya, terdapat sekolah-sekolah yang berkapasitas besar, namun hanya memiliki sedikit murid...

Mairie berupaya menyeimbangkan pembagian jumlah murid per sektor wilayah sesuai kapasitas sekolah dan kedekatan jarak. Kepada Prasarana Pendidikan Lyon mengatakan, "Terdapat banyak sekolah di Lyon. Contohnya di *arrondissement* 2 dan 6, ada sekolah-sekolah yang hanya berjarak 100 meter satu sama lain. Namun di *quartier* di tenggara kota, sekolah-sekolah berjauhan, berjarak sekitar 800 meter. Jadi, kondisi ini menjadi masalah karena seharusnya, kita menuju ke TK atau SD dengan berjalan kaki...". *Mairie* tidak akan mengirim anak-anak ke sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka sehingga sedikit demi

sedikit, tahun demi tahun, *Mairie* menyesuaikan batas wilayah sektor-sektor sekolah.

Di Vaulx-en-Velin, yang memiliki rasio luas wilayah per jumlah sekolah kurang dari setengah rasio di Lyon, terdapat juga beberapa sekolah yang saling berdekatan. Kasus ini terutama terjadi di ZUP, contohnya sekolah Vienot dan Vilar di *quartier* Mas du Taureau serta sekolah Makarenko dan Lorca di *quartier* Verchères et Thibaud, yang sangat berdekatan satu sama lain, berjarak sekitar 100 meter. Direktur Pendidikan Vaulx-en-Velin menegaskan, “Ini terkait dengan kondisi pada awal diciptakannya zona tersebut. Terdapat populasi usia sekolah yang besar yang memerlukan banyak sekolah”.

Pada tahun 1980, yang oleh *Mairie* disebut sebagai “puncak jumlah murid di Vaulx-en-Velin”, *commune* ini memiliki sekitar 8.600 murid di tingkat *élémentaire* dan *maternelle* (DE Vaulx-en-Velin, 1996). Menurut data *Inspection Académique* Rhône, pada tahun ajaran 2007, hanya terdapat 5.500 anak yang bersekolah di Vaulx-en-Velin, yang berarti mengalami penurunan sebesar 3.100 murid (-36%) dalam 25 tahun. *Direction de l'Éducation commune* ini percaya bahwa penurunan ini terutama disebabkan oleh:

- *Rééquilibrage* (penyeimbangan) piramida penduduk pada tingkat *commune* (piramida penduduk Vaulx-en-Velin berbentuk botol);
- Penurunan angka kelahiran sebagaimana terjadi di seluruh Perancis (lihat gambar 4.1).

“Hal ini memberi peluang kepada kami, tentu saja, untuk menerima para murid di sekolah dalam kondisi yang lebih baik (dengan penurunan jumlah murid per

kelas). Terlebih lagi dengan diterapkannya ZEP (pada tahun 1981) oleh pemerintah pusat yang menurunkan secara drastis aturan jumlah murid per kelas” (DE Vaulx-en-Velin, 1996). Direktur Pendidikan menjelaskan bahwa hingga tahun 1980, mayoritas kelas *élémentaire* (SD) memiliki lebih dari 30 murid, bahkan satu kelas *maternelle* (TK) menampung hingga lebih dari 40 murid. Saat ini, dalam bingkai Jaringan pendidikan prioritas (REP), *Inspection Académique* Rhône membatasi rasio jumlah murid per kelas di semua sekolah publik di Vaulx-en-Velin maksimal hanya 24 murid per kelas *élémentaire* dan 25 murid untuk kelas *maternelle*. Itu juga salah satu alasan mengapa, menurut beliau, penyusutan jumlah murid, ditambah penurunan rasio murid per kelas, memungkinkan *commune* untuk tetap mempertahankan fungsi sebagian besar bangunan sekolah.

Lalu bagaimana aturan sektor sekolah berfungsi di sekolah-sekolah yang saling berdekatan? Masing-masing sekolah yang berdekatan memiliki sektor wilayah mereka sendiri di kedua *commune* yang ditinjau dalam studi ini. Luas sektor tergantung pada kapasitas bangunan sekolah. Di sebuah *quartier*, sekolah dengan ukuran kecil memiliki sektor wilayah yang kecil pula dan sebaliknya, sekolah yang besar memiliki sektor yang lebih luas. Di Lyon, sekolah terkecil hanya memiliki 2 kelas sedangkan yang terbesar mempunyai hingga 25 kelas. Di Vaulx-en-Velin, sekolah yang paling kecil dan paling besar masing-masing terdiri atas 4 dan 14 kelas. Sekolah Makarenko dan sekolah Lorca di *quartier* Verchères et Thibaud di Vaulx-en-Velin adalah contoh dua sekolah yang berdekatan. “Makarenko adalah sekolah yang padat, yang tidak lagi memiliki tempat dan bangunannya sangat terbatas. Jadi saat ini, kami sedang meninjau ulang sektor

wilayah sekolah tersebut karena masih terdapat tempat di Sekolah Lorca”, Kepala Logistik Pendidikan Vaulx-en-Velin memberi penjelasan. Untuk lebih sedikit “melonggarkan” Makarenko dan mengisi Lorca, *commune* mempelajari kemungkinan memodifikasi sektor sekolah agar sejumlah permukiman di jalan tertentu masuk ke dalam sektor wilayah Lorca.

Dalam hal distribusi sekolah privat, “jumlah tawaran bangku sekolah di institusi privat tidak terbagi rata di wilayah Lyon” (DAU Lyon, 2006). Di sejumlah *arrondissement*, seperti arr. 9, hanya terdapat 1 sekolah privat dibandingkan 16 sekolah publik yang mencakup 94% dari total jumlah murid di *arrondissement* ini. Lain halnya dengan kondisi yang terjadi di arr. 6. Terdapat 11 sekolah privat di antara 9 sekolah publik yang “hanya” menerima 56% murid yang tinggal di lingkungan ini.

Sektorisasi wilayah sekolah tidak mempertimbangkan kapasitas atau lokasi sekolah privat. Sekolah-sekolah privat dapat menerima murid sejumlah yang diinginkannya dan sesuai kemampuannya yang datang terutama karena alasan religius... jadi ini merupakan suatu kriteria lain, menurut Direktur Pendidikan Lyon. Commune Lyon menyediakan sekolah publik untuk semua anak tanpa terkecuali di setiap *quartier*. ”Memang benar bahwa menyekolahkan anak di institusi privat juga merupakan cara untuk tidak menyekolahkannya di sekolah publik yang terikat oleh sektorisasi wilayah. Namun masalahnya di Lyon, tidak ada juga tempat yang tersisa di sekolah-sekolah privat; kapasitas mereka sudah maksimal dan penuh”, beliau menambahkan.

Membangun Sekolah Baru

Pembangunan sekolah baru membutuhkan keputusan tingkat *commune*. Bisa dikatakan bahwa keputusan tersebut merupakan kesepakatan antara *commune* dan pemerintah pusat karena sebuah sekolah baru juga berarti juga membutuhkan pos pengajar yang baru. Kadiv Manajemen Pendidikan IA Rhône mengatakan, “*Mairie* paham betul pembangunan kotanya, permukiman yang baru, melalui izin mendirikan bangunan dan evolusi demografis. Jadi, pemerintah lokal dapat mengantisipasi kebutuhan (jumlah kursi) pada tahun ajaran mendatang atau dalam 2-4 tahun”.

Mendirikan sekolah baru bukan lah alternatif tunggal untuk menjawab pertumbuhan jumlah murid karena itu jauh lebih kompleks dan tentu saja jauh lebih mahal. Pada titik inilah sektor wilayah sekolah berperan sebagai “alat” bagi *commune* untuk merekayasa atau untuk mengoptimalkan kapasitas sekolah-sekolah publik. Alat ini dapat dimodifikasi ulang setiap tahun apabila itu diperlukan. Rekayasa ulang sektor sekolah juga merupakan sebuah solusi ketika *commune* tidak dapat menyediakan unit kelas tambahan. Namun, menurut Kabag Statistik IA Rhône, “Penyesuaian sektor wilayah sekolah merupakan suatu peluang yang mungkin diterapkan di kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhan tempat di sekolah publik, tetapi cara ini tidak bisa atau sangat sulit diterapkan di pedesaan yang hanya memiliki sekolah-sekolah kecil dengan jumlah kelas yang sangat terbatas”.

5.2. Sekolah Berkualitas "Baik" dan "Buruk"

5.2.1. Memilih Lingkungan Tempat Tinggal, Memilih Sekolah

Pendidikan Menentukan Lokasi Hunian?

"Di Perancis, semakin lama pendidikan semakin menjadi salah satu faktor penentu bagi orang tua dalam memutuskan lokasi untuk bermukim" (Halls, 1967). Menurut Kadiv Manajemen Pendidikan IA Rhône, kriteria tersebut memang ada namun hanya sebagian kecil. Tidak ada elemen statistik yang menunjukkan pilihan lokasi tempat tinggal sesuai fungsi lokasi *école priMaire*. "Mayoritas masyarakat Perancis tidak memiliki kebebasan dalam memilih tempat tinggal. Itu merupakan pilihan yang ditentukan oleh pekerjaan dan besarnya penghasilan. Memang benar ada juga orang tua yang menanyakan dimana mereka seharusnya membeli sebuah unit *apartement* agar anak mereka dapat masuk ke sekolah tertentu", jelas beliau.

Direktur Pendidikan Lyon menegaskan hal senada, "Karena adanya aturan sektor wilayah sekolah, jika sebuah sekolah memiliki reputasi yang buruk, para orang tua tidak membeli hunian di lingkungan sekolah itu walaupun hal ini jarang untuk tingkat *école priMaire*. Strategi ini lebih umum digunakan pada tingkat *collège* dan *lycée*". Tapi sejak setahun lalu, pemerintah pusat telah menghapus aturan sektor wilayah *collège* dan *lycée* sehingga kini orang tua dapat tinggal di sebuah *commune* dan mengajukan permintaan untuk menyekolahkan anak mereka di *commune* lain. Kesulitannya, jelas Direktur, adalah bahwa *collège* yang berkualitas "baik" memiliki tempat yang tentu terbatas dan bagaimana pun juga harus memberi prioritas kepada calon murid dengan dua kriteria: mereka yang

tinggal di lingkungan sekolah dan mereka yang mendapat beasiswa dari Negara. Sektor wilayah *collège* berbeda dan tidak dipengaruhi/mempengaruhi sektor *école priMaire*. “Kerja sama pendidikan antara *école* dan *collège* hanya terjadi dalam kerangka Jaringan pendidikan prioritas (REP), di luar itu tidak ada hubungan pengajaran khusus”, tambah beliau.

Kabag Prasarana Pendidikan Lyon membenarkan bahwa banyak warga masyarakat yang memilih untuk tidak tinggal di kota-kota tertentu karena alasan pendidikan bagi anak mereka. Dia mengungkapkan, “Oleh karena itulah kota-kota yang memiliki sekolah dengan kualitas yang ‘buruk’ terus menjadi kota yang ‘sulit’”.

Dalam harian *Libération* 28 Mei 2007, Soule mensinyalir bahwa keluarga-keluarga yang tidak dapat masuk ke dalam kriteria ketat untuk memperoleh *dérogation* (hak pembebasan dari aturan sektor sekolah) sering kali menempuh berbagai cara untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah yang “baik”:

- Mereka berpura-pura tinggal di sebuah keluarga yang beralamat di dalam sektor sekolah yang diinginkan untuk mendapat surat keterangan domisili;
- Orang tua melakukan pendekatan kepada otoritas pendidikan, misalnya untuk memperoleh informasi mengenai pilihan sekolah yang kemungkinan besar bisa menerima *dérogation*
- Yang lebih ekstrim, orang tua yang mampu secara finansial berpindah tempat tinggal sebelum masa pendaftaran sekolah sementara mereka yang kurang mampu bahkan menyewa kamar pelayan demi mendapatkan alamat di *quartier* yang “baik”

- Karena sekolah privat tidak masuk dalam aturan sektor sekolah, keluarga juga dapat memilih sekolah privat “terbaik” bagi anak mereka tanpa batasan sektor.

Pada kenyataannya, sesuai yang disampaikan oleh Kabag Prasarana Pendidikan Lyon, data statistik mengindikasikan bahwa bukan “kualitas” sekolah yang menentukan keberhasilan pendidikan seorang anak, tetapi justru kategori sosioprofesional orang tua, tingkat pendidikan orang tua lah yang banyak berpengaruh. Jumlah orang tua yang memiliki pemahaman demikian tidak banyak. Beliau mengatakan, ”Sejumlah orang tua ingin agar anak mereka masuk ke sekolah yang mereka anggap ‘baik’, yang menurut mereka bisa berarti tidak banyak anak dari keluarga asing misalnya...”.

Ada juga keluarga yang menentukan pilihan untuk tinggal di Vaulx-en-Velin, menurut Direktur Pendidikan *commune* tersebut, karena mereka tahu bahwa otoritas kota mampu menyediakan berbagai fasilitas, terutama dalam hal akses untuk belajar dan bermain anak. Namun memang tidak ada data statistik yang menunjukkan fenomena ini. Beliau menegaskan, ”Tentu saja orang tua sangat peduli terhadap pendidikan anak mereka. Apa pun kondisi sosial dan ekonomi para orang tua, mereka memiliki kepedulian supaya anak mereka berhasil”.

Sekolah Pilihan di *Quartier* Pilihan

Dalam hal tingkat keberhasilan belajar, *Inspection Académique* menyatakan bahwa tidaklah mudah mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara *commune* sentral, *banlieue*, dan desa, apalagi perbedaan antara *quartier*, karena tidak ada banyak standar evaluasi untuk institusi pendidikan dasar. Hal ini berbeda

dengan *collège* atau *lycée*, karena tidak ada ujian untuk mengukur “kualitas” *école*. Itu juga merupakan salah satu alasan mengapa tidak begitu tampak ketimpangan antar sekolah pada tingkat pendidikan dasar. Lebih lagi, pemerintah pusat dan *commune* menghormati kesamarataan dalam mengelola semua sekolah, tanpa ada dikotomi antara kota dan desa serta antara status sekolah. Sekolah “dalam lingkungan sulit” tidak hanya terdapat di *banlieue* atau di desa, tapi juga di *commune* sentral karena, menurut Kadiv Manajemen Pendidikan IA Rhône, “Status sekolah ‘dalam lingkungan sulit’ terkait pada skala wilayah yang lebih kecil bagi *commune*: sebuah komunitas masyarakat dan ‘sosiologi’ suatu *quartier*”.

“Apabila terdapat perbedaan antara sekolah di wilayah perkotaan dan di pedesaan, itu hanya dalam hal jumlah, kepadatan penduduk”, tegas Kabag Statistik IA Rhône. Lebih banyak sekolah di kota daripada di desa, itu jelas. Sekolah-sekolah di kota umumnya lebih besar dengan lebih banyak kelas. Sebaliknya, karena tidak terdapat banyak murid di desa, sekolah-sekolah disana lebih kecil, beberapa di antaranya hanya memiliki sedikit sekali kelas. Selain itu, sekolah-sekolah memiliki struktur yang berbeda. “Di kota, akan ada seorang *maître* (pendamping belajar) untuk setiap tingkat tetapi di desa, hanya ada seorang pendamping belajar untuk semua tingkat, tergantung pada jumlah murid”, jelasnya.

Otoritas pendidikan *commune* berkeinginan agar semua sekolah berkualitas baik dan aksesibel sehingga tidak ada perlakuan berbeda kepada sekolah-sekolah, termasuk dalam menentukan batas sektor sekolah; tidak ada

pembedaan antara status sekolah. Akan tetapi, Kepala Prasarana Pendidikan Lyon menyatakan bahwa keterbatasan justru kerap berasal dari kondisi geografis. Contohnya di satu-satunya *quartier* di Lyon yang termasuk dalam wilayah Jaringan tekad menuju keberhasilan (RAR), Duchère. *Quartier* ini terletak di kaki bukit sehingga *commune* tidak dapat menyekolahkan anak-anak keluar wilayah karena batasan jarak. Untuk *école priMaire*, dia menekankan kembali, “Anak-anak ke sekolah dengan berjalan kaki sehingga sekolah tidak boleh berjarak terlalu jauh”.

Memang terdapat sekolah tertentu yang lebih diminati oleh masyarakat, yang diminta lebih banyak melalui permohonan *dérogation*. Menurut Kabag Logistik Pendidikan Vaulx-en-Velin, sebenarnya, citra sebuah sekolah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri... “Sering kali masyarakat menilai sebuah sekolah itu ‘baik’ karena terletak di lingkungan yang ‘baik’ pula, bukan di sebuah ZUP, tapi di antara rumah-rumah bagus, apartement yang indah, tempat para dokter dan para *professeur* (pendidik) menyekolahkan anak mereka...”, ungkap beliau.

5.2.2. Permohonan Pindah Sektor Sekolah

Angka Permohonan *Dérogation* Rendah

“Tingkat rata-rata permohonan *dérogation* rendah”, ungkap Direktur Pendidikan Lyon, sekitar 5% dari total jumlah murid di *commune* itu. Kecenderungannya stabil dari tahun ke tahun. Jadi, bagi Lyon, menurut beliau, sektorisasi wilayah sekolah tidak banyak menimbulkan masalah. Dalam hal pengajaran di sekolah, *commune* juga menjalin hubungan dengan *collège* (secara struktural, tanggung jawab pengelolaan *collège* dipegang oleh departement).

Otoritas pendidikan *commune* memperhatikan bahwa di lingkungan yang "sulit", banyak murid (dalam kasus tertentu hingga mencapai 75%) yang tidak masuk ke *collège* di sektor tersebut selepasnya dari pendidikan dasar, namun mereka bersekolah di sektor lain terutama di *collège* privat. Sebenarnya, ia menjelaskan, "Pada level inilah semua permasalahan terkait reputasi sekolah yang buruk dimulai dan bukanlah *école* yang memiliki reputasi buruk tetapi justru *collège*".

Pada penerimaan murid tahun 2007, Vaulx-en-Velin mengabulkan 271 permohonan *dérogation* atau sekitar 5% dari total murid *école priMaire*, tingkat yang sama dengan yang terjadi di Lyon. Angka ini mencakup *dérogation* internal, yang berarti keluar dan masuk antarsektor dalam wilayah *commune*, serta *dérogation* masuk dan *dérogation* keluar antar-*commune*. *Dérogation* tipe pertama mendominasi dengan persentasi 70% dari total permohonan, diikuti oleh *dérogation* keluar dari *commune* yang berjumlah 18%, atau 6% melebihi jumlah *dérogation* masuk ke Commune Vaulx-en-Velin.

Ketimpangan Antara *Quartier*

Di sejumlah *quartier*, terdapat banyak permohonan keluar dari sektor sekolah tertentu dan begitu juga sebaliknya, terdapat sekolah-sekolah lain yang menerima banyak permohonan masuk yang berasal dari luar sektor wilayah sekolah tersebut. Namun di sektor-sektor sekolah tertentu, ada juga masyarakat baik yang mengajukan permohonan keluar maupun masuk dari dan ke sektor tersebut. Jadi, jumlah *dérogation* cukup seimbang di Lyon dan juga di Vaulx-en-Velin.

Memang benar bahwa di sekolah-sekolah yang berada di *quartier* yang dianggap “sulit” di Lyon, seperti di Etats-Unis, Mermoz (arr. 8), dan Pentes de la Croix Rousses (arr. 4), permohonan keluar sektor lebih banyak daripada sektor wilayah sekolah lainnya, lebih dari 30% dari total jumlah murid di sektor-sektor sekolah tersebut (DAU Lyon, 2006). Namun, kita juga dapat melihat fenomena serupa di sektor-sektor sekolah di *quartier* ”standar” lainnya di *arrondissement* 3 dan 1. Dengan demikian, apakah ketimpangan antar*quartier* menyangkut ”kualitas” sekolah dasar benar-benar ada? Karena bisa jadi permohonan pindah sektor sekolah memang benar hanya dilatarbelakangi oleh alasan keluarga, teknis pengasuhan anak selama orang tuanya bekerja.

Sekolah Albert Camus di *quartier* “standar” Saint Just (arr. 9) adalah salah satu sekolah yang paling banyak diminta melalui permohonan *dérogation* masuk, lebih dari 30% dari jumlah murid yang berada di sektor sekolah tersebut. Pada kenyataannya, dua sekolah lain yang paling banyak diminta berlokasi di *quartier* yang dinilai ”sulit”, Etats-Unis. Di *quartier* ini, sementara lebih dari 30% murid dari sektor Sekolah Jean Giono dan Charles Péguy ingin keluar sektor, dua sekolah di sektor tetangga, John Kennedy dan Louis Pergaud, diminta oleh anak-anak dari luar sektor mereka sejumlah lebih dari 30% dari total murid di sektor mereka sendiri. Jadi, yang sebenarnya terjadi disini adalah “*dérogation* internal *quartier*” antarsekolah.

Di Vaulx-en-Velin, dimana semua *quartiernya* dianggap “sulit”, variasi tingkat permohonan *dérogation* antar-*quartier* lebih rendah daripada di Lyon. Sekolah-sekolah di *quartier* Vernay, Ecoin, dan Thibaude memiliki tingkat

permohonan keluar sektor tertinggi, sekitar 5% dari jumlah murid di sektor sekolah mereka (DE Vaulx-en-Velin, 2008). Sementara sekolah-sekolah di pusat kota adalah tujuan utama para pemohon *dérogation*, lebih dari 4% dari total murid di sektor itu sendiri. Sebenarnya, *quartier* Vernay dan Ecoin sangat dekat dengan pusat kota. Jika kita menganalisis arah *dérogation*, 35% *dérogation* keluar dari dua *quartier* tersebut menuju sekolah di pusat kota dan 35% lainnya menginginkan sekolah di sektor berbeda namun tetap di *quartier* yang sama. Di sekolah-sekolah di pusat kota, sebagian besar permohonan *dérogation* masuk (42%) berasal dari *quartier* Vernay dan Thibaude, diikuti oleh *quartier-quartier* di Zona pembangunan kota prioritas (ZUP), yaitu Mas du Taureau dan Herpe, yang berjumlah 21% dari total *dérogation* masuk ke sektor-sektor sekolah di pusat kota Vaulx-en-Velin.

Pada tahun 2008 ini, untuk pertama kalinya, *Mairie* Vaulx-en-Velin harus sangat berhati-hati dalam mengabulkan permohonan *dérogation* menuju sekolah-sekolah di Village dan pusat kota karena di kedua *quartier* ini akan muncul kebutuhan jumlah kursi yang besar akibat pembangunan permukiman baru. Jadi sekarang, Direktur Pendidikan *commune* ini menegaskan, "Mairie harus membatasi atau menghentikan permohonan *dérogation* menuju sekolah-sekolah di kedua *quartier* tersebut karena kami memberi prioritas bagi anak-anak yang tinggal di sektor sekolah itu".

5.3. Pembauran Sosial: Sebuah Pilihan Otoritas *commune*

"*Périmètres scolaires* (sektor sekolah), yang pada awalnya diciptakan sebagai alat mengelola dan membagi *moyens* (sumber daya) pendidikan serta

penawaran dan permintaan sekolah secara geografis, seiring perjalanan waktu, telah menjadi *mesure* (tolak ukur) utama yang seharusnya menjamin *mixité sociale* (pembauran sosial) di sekolah” (Oberti, 2007). Lalu, bagaimana sektorisasi sekolah ini memainkan perannya sebagai sarana pembauran sosial di Lyon dan Vaulx-en-Velin?

Secara umum, *commune* mengukur kapasitas sekolah, jumlah kelas yang bisa disediakan, dan total murid yang bisa diterima. Kemudian, *commune* menentukan luas dan batas wilayah yang masuk dalam sektor sekolah tersebut berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah di wilayah itu. Setelah itu, adalah sebuah pilihan bagi *Mairie* (pemerintah *commune*) untuk memasukkan atau tidak aspek pembauran sosial ke dalam sektorisasi sekolah. Kota mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena pembangunan sehingga *commune* juga perlu sedikit memodifikasi sektor-sektor sekolahnya mengikuti perubahan demografis.

5.3.1. Lyon: Sektor Sekolah Tanpa Pembauran Sosial

Menurut Direktur Pendidikan Lyon, *commune* ini hanya sedikit memanfaatkan sektor sekolah untuk tujuan sosial. ”Hingga saat ini, *Mairie* tidak menetapkan suatu sektor sekolah dengan mempertimbangkan pembauran sosial dan pembauran sosial belum menjadi tujuan dari sektorisasi sekolah”, tegasnya. Sebagai contoh, *commune* tidak pernah menyekolahkan anak-anak yang tinggal di *logements sociaux* (permukiman sosial) ke *quartier* lain yang dianggap tidak ”sesulit” lingkungan tempat tinggal mereka. ”Hal ini lebih merupakan sebuah pilihan politik. Commune Lyon tidak mengembangkan debat politik dalam sektorisasi sekolah. Saat ini, yang ada hanyalah debat teknik, misalnya

menyangkut jumlah murid serta jarak antara sekolah dan tempat tinggal, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak”, Direktur Pendidikan Lyon memberi penjelasan mengapa pembauran sosial tidak menjadi salah satu elemen dalam sektor sekolah di *commune* sentral ini.

Memang benar, untuk Commune Lyon, pembauran sosial di sekolah bukan hanya suatu masalah politik tapi juga merupakan masalah teknis. Kepala Prasarana Pendidikan Lyon mengatakan, ”Kawasan permukiman sosial tidak tersebar rata di wilayah perkotaan di Perancis. Sebagai contoh, Vaulx-en-Velin adalah sebuah ’kawasan’ permukiman sosial yang luas, namun di sisi lain, terdapat sejumlah kota di barat Lyon yang sama sekali tidak memiliki permukiman sosial. Di Lyon sendiri, hanya ada empat permukiman sosial di seluruh *commune*” (persentasi jumlah rumah susun sederhana sewa atau HLM hanya sebesar 18% dari total jumlah hunian di *commune* ini, lihat tabel IV.4 dan gambar 4.4).

Walaupun menghadapi kendala teknis, niat politik pemerintah *commune* lah yang merupakan alasan utama mengapa sektor sekolah tidak menjadi salah satu sarana menciptakan pembauran sosial. Di Lyon, menurut Kepala Prasarana Pendidikan, “Sektor sekolah hadir semata-mata untuk menempatkan anak-anak di lokasi sekolah yang tepat, itu saja. Ini sebuah masalah matematis”. Tanpa alat ini, *commune* akan menghadapi permasalahan: akan terdapat sekolah-sekolah yang terlalu penuh sementara sekolah-sekolah lain tidak cukup terisi karena kebebasan memilih, gratis, dan sekularnya sekolah publik. Karena itulah sektor sekolah dibuat untuk satu tujuan: membagi jumlah murid secara matematis...

Lalu, bagaimana, di Lyon, kita sampai pada kondisi terwujudnya pembauran sosial di sekolah? “*Commune* mewujudkan pembauran sosial dengan menempatkan permukiman-permukiman sosial secara merata”, tegas Kepala Prasarana Pendidikan Lyon. Yang *Mairie* putuskan saat ini adalah merobohkan beberapa bagian dari *grands ensembles* (komplek rumah susun sederhana sewa) dan menempatkan *logements en copropriété* (hunian berstatus hak milik) di lingkungan tersebut. “*Commune* membangun permukiman sosial dengan jumlah unit sedikit, 20-50 unit hunian, dan menyebarnya di wilayah kota. Tidak akan ada lagi megakompleks permukiman sosial yang memiliki 2.000-3.000 unit hunian seperti sedia kala. Pembauran sosial diwujudkan oleh permukiman, bukan sekolah”, beliau menegaskan. Tampaknya otoritas pendidikan di Lyon lebih memilih untuk “menunggu” hingga pembauran sosial tercipta di sekolah publik melalui perencanaan permukiman (sosial) ketimbang memasukkan isu ini dalam perencanaan sektor sekolah.

5.3.2. Vaulx-En-Velin: Pembauran Sosial di *Commune* “Sulit”

Apabila pemerintah Lyon, sebuah *commune* yang hanya memiliki proporsi kecil permukiman sosial, tidak menyentuh pembauran sosial dalam sektorisasi sekolah-sekolahnya, bagaimana hal ini berjalan di Vaulx-en-Velin yang 51% dari total jumlah hunian di wilayahnya merupakan Rusunawa (HLM)?

Direktur Pendidikan Vaulx-en-Velin menegaskan, “Setiap sekolah di Vaulx-en-Velin memiliki sektornya sendiri yang masing-masing telah mempertimbangkan unsur pembauran sosial”. Sebagai gambaran, ketika pertama kali sebuah permukiman baru dibangun di pusat kota Vaulx-en-Velin, *commune*

dihadapkan kepada dua pilihan: menyekolahkan anak-anak yang akan tinggal di permukiman itu di Sekolah Makarenko (di *quartier* Verchères), atau di Sekolah Mistral (di pusat kota). Setelah *Mairie* mempelajari populasi macam apa yang telah hadir di masing-masing sekolah, mereka memilih untuk menyekolahkan anak-anak itu ke Makarenko untuk memperbaiki kondisi pembauran sosial di sekolah tersebut, walaupun jaraknya sedikit lebih jauh daripada Mistral. Beliau mengatakan, “Keputusan itu diambil melihat fakta bahwa di pusat kota, terdapat banyak permukiman berstatus hak milik sedangkan di sektor sekolah Makarenko, sebagian besar hunian berupa permukiman sosial”. Namun, pusat kota Vaulx-en-Velin kemudian kemudian berkembang. Kini *commune* tidak dapat lagi menyekolahkan semua anak dari *quartier* ini di Sekolah Makarenko karena ketidakterediaan tempat. Selain itu, “Kini sedang berjalan proyek pembangunan permukiman yang akan ‘mengirim’ anak-anak ke Sekolah Mistral. Sementara sekolah di pusat kota ini tengah diperluas dan direhabilitasi besar-besaran”, jelas beliau. Jadi, pertanyaannya kini berkembang menjadi pembagian jumlah murid antara Sekolah Makarenko, Mistral dan Lorca, tiga sekolah yang berdekatan.

Ada satu kasus lain di Vaulx-en-Velin yang bisa dijadikan gambaran. Beberapa tahun lalu, *commune* sempat mempertimbangkan kemungkinan membangun sekolah baru di pusat kota karena banyaknya permukiman yang sedang didirikan di *quartier* tersebut. Keputusan politik yang akhirnya diambil adalah tidak membangun sekolah di pusat kota. Langkah ini diambil semata-mata untuk menghindari hadirnya, apa yang Direktur Pendidikan *commune* ini sebut “sekolah para elit” di antara sekolah-sekolah lain di pinggir kota Vaulx-en-Velin...

Pemerintah *commune* Vaulx-en-Velin wajib menjamin ketersediaan pendidikan dasar bagi semua anak yang tinggal atau akan tinggal di wilayahnya. Di satu sisi, *commune* memiliki pekerjaan besar untuk memperkirakan bagaimana suatu lingkungan berevolusi dan untuk memperhatikan, sekolah demi sekolah, jikalau ia perlu memperluas sekolah tertentu atau bahkan membangun sekolah baru. Namun di sisi lain, *Mairie* telah memutuskan bahwa ia tidak akan membangun sekolah di pusat kota karena, menurut Direktur Pendidikan *commune* ini, "Ada kekhawatiran bahwa nantinya sekolah ini dianggap seperti sejak sekian lama kita menganggap sekolah di Village sebagai sekolah yang 'baik' dan sekolah-sekolah lainnya adalah sekolah yang 'buruk'". Beliau menambahkan, "Memang cukup kompleks permasalahan sektor sekolah ini, sebuah topik yang memerlukan diskusi teknik sekaligus politik".

5.4. Pro dan Kontra Sektorisasi Sekolah

5.4.1. Antara Harapan dan Kenyataan

Sektor sekolah merupakan masalah yang cukup rumit, lalu mengapa *commune* tetap membutuhkan sektor sekolah? Sektorisasi sekolah mempermudah pembagian jumlah murid sesuai jumlah sekolah publik yang tersedia. Ini juga merupakan sarana untuk "melestarikan" sekolah-sekolah di *commune*. *Mairie* tidak ingin membiarkan sebuah sekolah kosong terabaikan sementara sekolah lainnya melebihi kapasitas menuruti pilihan para orang tua murid. Selain itu, "Sektor sekolah diciptakan pada tahun 1963 berdasarkan ide bahwa cara terbaik untuk menjamin *égalité des chances* (kesempatan yang sama) adalah dengan

menstandarkan *école*, juga *collège* dan *lycée*. Selanjutnya, murid-murid ditempatkan di sekolah-sekolah tersebut dengan aturan yang ketat guna menciptakan pembauran sosial” (Oberti, 2008). Untuk tujuan-tujuan tersebut, penempatan murid di sekolah-sekolah dilakukan secara adil, transparan, sekaligus ”otoriter” yang mewajibkan, secara teori, orang tua untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah di lingkungan mereka.

Di Commune Vaulx-en-Velin, *Mairie* tengah merevisi sektor sekolah secara keseluruhan untuk kebutuhan mendatang sesuai rencana pembangunan wilayah *commune*. Direktur Pendidikan kota ini mengatakan, ”Pentingnya sektor sekolah adalah bahwa ia memang mendukung pembauran sosial di kalangan murid karena tujuan *commune* adalah kita dapat memperbaiki permasalahan pembauran sosial ini di sekolah”. Sektor sekolah juga memperhitungkan kedekatan jarak berdasarkan alamat murid dan tingkat keamanan lalu lintas, terutama bagi anak-anak. *Commune* juga tidak menginginkan sebuah sekolah yang sangat besar sementara di sudut lain kota terdapat sekolah yang berukuran sangat kecil. Mereka menganggap perlu keseimbangan dalam hal dimensi fisik sekolah. Jadi, sektor sekolah adalah sebuah alat yang ditetapkan dan dapat disesukan secara berkala untuk mengakomodasi semua elemen tersebut.

Meskipun fenomena ini memerlukan studi lebih lanjut dan lebih akurat pada tingkat sekolah dasar, menurut Alain Madelin (1999), ”Hasil dari sektorisasi sekolah yang pada awalnya bertujuan untuk mendukung pembauran sosial, malah sebaliknya, telah menciptakan *’ghettoïsation scolaire’* (’pengasingan sekolah’) yang merupakan cermin dari *urbanisme ségréatif* (segregasi dalam penataan

kota)". Karena menurutnya, "Hanya anak-anak dari golongan sosial teratas saja yang memiliki jalan lain untuk menghindari aturan sektor sekolah".

Baudry, dalam *Le Monde* 12 September 2006, mengungkapkan bahwa ketimpangan antara masyarakat miskin dan kaya kian jelas, "Sektor sekolah menguntungkan golongan-golongan yang sudah paling beruntung. Lebih banyak pilihan yang terbuka bagi mereka: membeli hunian di lingkungan yang 'baik', kesempatan terbaik berkat relasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem pendidikan...". Menurut pendapatnya, keluarga-keluarga dari kelas sosial atas bahkan dapat "menolak" memasukkan anak mereka ke sekolah di lingkungan tempat tinggalnya hanya untuk menghindari bercampur dengan keluarga-keluarga dari kelompok tertentu atau untuk menghindari sekolah bereputasi buruk. Namun, dalam artikel yang sama di harian *Le Monde*, Baudry menyatakan bahwa sebenarnya, salah satu alasan mengapa sistem sektor sekolah ini dibutuhkan adalah sederhana: di setiap wilayah, kita memiliki sekolah-sekolah yang sangat diminati, dengan daya tampung yang sangat terbatas. Jadi, kita memang membutuhkan suatu sistem "seleksi" murid...

5.4.2. Penghapusan Sistem Sektor Sekolah Menengah

Kebebasan Baru bagi *Collège* dan *Lycée*

Sektor sekolah sudah diterapkan lebih dari empat puluh tahun di Perancis. Xavier Darcos, Menteri Pendidikan Nasional, menegaskan dalam *Libération* 28 Mei 2007, "Mengelola Perancis menggunakan sebuah sistem tahun 1963 adalah tidak mungkin. Alat perencanaan sekolah ini tidak lagi menjamin peluang yang sama dan tidak lagi menjawab harapan para orang tua yang kerap mengelak dari

sistem”. Menghadapi situasi ini, Mendiknas menjanjikan sebuah aturan yang lebih jelas dan lebih adil bagi semua keluarga. Dalam *dossier de presse* (keterangan pers) Diknas 4 Juni 2007, pemerintah menegaskan bahwa peraturan sekolah yang baru akan memberikan kebebasan bagi keluarga sekaligus menghormati keragaman sosial dan geografis di setiap sekolah.

Pada bulan Mei 2007, setelah melalui debat selama puluhan tahun, Mendiknas menegaskan bahwa sistem sektor sekolah untuk *collège* dan *lycée* akan dihapus mulai saat itu hingga masuk tahun ajaran 2010. Penghapusan ini akan diterapkan secara progresif mulai tahun ajaran 2007-2008. Untuk tahap pertama, *assouplissement* (pelonggaran aturan) sektor sekolah mengizinkan 10% hingga 20% orang tua untuk memilih sekolah tanpa batasan sektor. Transisi ini direncanakan akan berlangsung selama satu atau dua tahun sebelum nantinya sistem sektor sekolah dihapus total untuk menciptakan sekolah yang lebih ”adil” (*Libération* 28 Mei 2007).

Pengalaman Sukses

Pada bulan Desember 2007, Mendiknas kembali mengkonfirmasi penghapusan sektor sekolah. Beliau menyatakan keputusan ini dengan optimis melihat keberhasilan penerapan pelonggaran aturan yang dilakukan pada awal masa pendaftaran sekolah tahun 2007. Kesuksesan ini ditunjukkan oleh bertambahnya tingkat kepuasan orang tua murid.

Dalam keterangan pers Diknas 4 Juni 2007 dikatakan, ”Hasil dari pelonggaran aturan sektor sekolah tahap pertama sangat menjanjikan. Tingkat kepuasan orang tua murid *collège* dan *lycée* masing-masing meningkat menjadi

77% dan 67%, lebih tinggi 10% dan 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari 13.500 permohonan pendaftaran sekolah dari luar sektor dipenuhi, sepertiganya merupakan pendaftaran masuk *collège* dan duapertiganya untuk *lycée*”.

Tampaknya kebijakan pendidikan ini disambut baik oleh masyarakat. Menurut jajak pendapat oleh CSA-Cisco, 72% masyarakat setuju atas penghapusan sistem sektor sekolah tingkat menengah secara progresif. Bahkan, proporsi murid yang telah memanfaatkan kebebasan baru ini melampaui angka perkiraan, 10%-20% di *commune-commune* tertentu. Di Paris, 40% murid sekolah menengah akan belajar di sekolah di luar sektor tempat tinggal mereka menurut harian *Le Parisien (Libération 29 Mei 2007)*.

Setelah Sistem Dihapus...

Berkat pelonggaran aturan sektor sekolah, pemerintah membuka kesempatan bersekolah seluas-luasnya dengan hanya satu batasan: ketersediaan tempat di suatu sekolah, tanpa hambatan geografis dan sosial. Sebagaimana ditulis di *Libération* 29 Mei 2007, penghapusan sektor sekolah dapat memicu meningkatnya permintaan kursi di *lycée* paling populer. Lalu, bagaimana hal ini diatur? Nantinya akan ada penyeleksian calon murid. Hanya anak-anak yang memiliki nilai terbaik yang akan diterima. Menurut artikel ini, kondisi yang demikian akan mengakibatkan kesenjangan yang lebih jauh antara sekolah yang bereputasi “baik” dan “buruk”. Namun, Diknas menolak, dalam artikel yang sama, bahwa keputusan ini menimbulkan “*un grand marché libéral*” (“persaingan pasar liberal”) di sekolah.

Selama masa transisi, untuk alasan pembauran sosial, para murid penerima beasiswa diprioritaskan untuk mendaftar di sekolah di luar sektor tempat tinggal mereka. Untuk alasan medis, anak-anak dengan keterbatasan fisik juga memilih sekolah dengan lokasi terbaik menurut kebutuhan perawatan medis (Encyclopédie de l'éducation, 2008).

Guna memperbaiki perencanaan sekolah dan peka terhadap kondisi saat ini, Kementerian Diknas akan mengganti sistem sektor sekolah dengan sebuah “instrumen pembauran sosial” yang baru (Keterangan pers Diknas 4 Juni 2007). “Aturan umum yang memfasilitasi keluarga untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal mereka tidak akan hilang sama sekali namun akan disubsitisi...”, menurut keterangan pers tersebut.

5.4.3. Sektorisasi Sekolah Dasar: Perbedaan Kebutuhan

Di media masa, “respon negatif” terhadap sistem sektor sekolah untuk *collège* dan untuk *lycée* lebih kuat daripada untuk *école*. Bahkan, berbeda dari sekolah menengah, tidak ada penghapusan ataupun pelanggaran aturan sektor sekolah untuk pendidikan dasar. Lalu, karakteristik apa yang membedakan sistem sektor sekolah antara pendidikan dasar dan menengah?

Menurut *Inspection Académique*, tuntutan para orang tua murid untuk dapat memilih sekolah terbaik bagi anak mereka semakin besar dan itu adalah hal yang wajar. Tapi dalam memilih sebuah *école*, kedekatan jarak dengan tempat tinggal memiliki pengaruh besar. Kabag Pendidikan Dasar IA Rhône menjelaskan, “Para orang tua mementingkan jarak. Untuk tingkat *collège* atau *lycée*, ketika anak-anak sudah menjadi remaja dan dapat bepergian sendiri, keluarga memiliki

pilihan sekolah yang lebih banyak sesuai preferensi mereka”. Tampaknya, bagi kebanyakan keluarga, kebutuhan akan sistem sektor sekolah untuk pendidikan dasar lebih besar daripada untuk pendidikan menengah. Dengan sektorisasi sekolah, *commune* dapat lebih ”menjamin” agar semua anak di wilayahnya memperoleh satu kursi di sekolah publik terdekat, supaya mereka dapat pergi ke sekolah dengan aman, dan agar orang tua tidak menghadapi kesulitan dalam menjaga anak mereka pada jam kerja...

Hal lain yang membedakan pendidikan dasar dan menengah adalah adanya klasemen *collège* dan *lycée* berdasarkan ujian sekolah menengah yang tidak terdapat di sekolah dasar. Apabila sejumlah orang tua memilih *école* terbaik atas dasar citra sekolah menurut ”evaluasi” mereka sendiri, pada sekolah menengah, mereka dapat dengan lebih mudah melakukan perbandingan, yaitu melihat tingkat kelulusan atau kriteria penilaian lainnya. Menurut Kabag Pendidikan Dasar IA Rhône, ”Tidak terlalu tampak perbedaan antara sekolah dasar. Lagipula, pada tingkat *collège* lah para orang tua mulai memilih sekolah terbaik untuk anak mereka”.

Tentu saja penghapusan sistem sektor sekolah akan mendorong semakin banyak anak untuk mendaftar di sekolah terbaik, walaupun hal ini mungkin kurang dirasakan di *école* dibandingkan di *collège* atau di *lycée*. Kepala Sekolah Dasar Makarenko dan Kepala Sekolah Dasar Lorca di Vaulx-en-Velin memprediksikan bahwa kerumitan akan terjadi akibat penghapusan sektor sekolah dan ketimpangan antara sekolah akan semakin besar. Sementara sekolah favorit harus ”menolak” sebagian calon murid, sekolah yang tidak populer akan

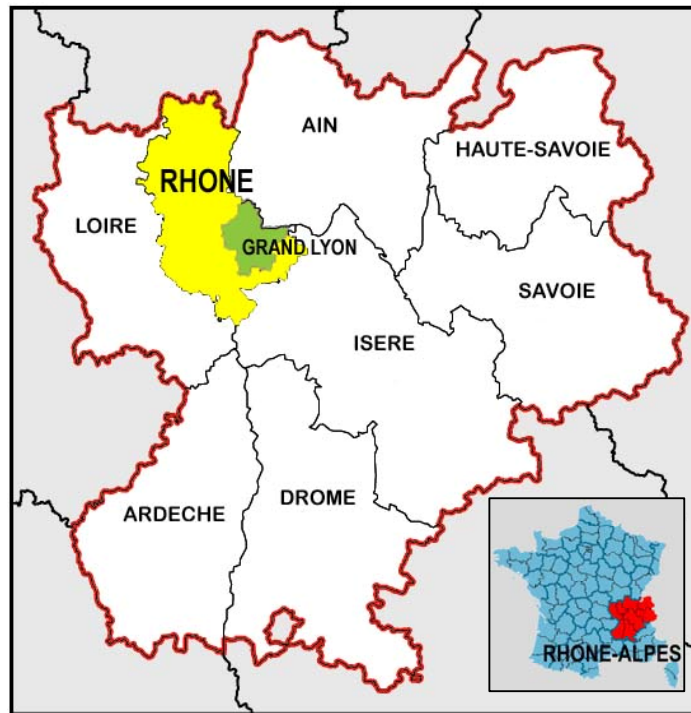
kehilangan murid-murid mereka. Soule, dalam *Libération* 28 Mei 2007 menulis, "Masalah besar yang timbul adalah apa yang harus diperbuat terhadap *école ghetto* (sekolah-sekolah 'terasing') di tengah kota, di periferi kota besar... Bayangkan, ketika sistem sektor sekolah dihapus, bagaimana sekolah-sekolah itu mampu menarik calon murid dari luar sektor mereka? 10% murid-murid terbaik dari sekolah-sekolah *ghetto* pindah ke sekolah yang lebih baik. Bersama murid-murid yang tersisa, sekolah-sekolah ini terus berjalan, semakin 'terasing'...".

Bagi *commune* sendiri, sistem sektor sekolah memfasilitasi mereka dalam merencanakan dan mengelola sekolah. Sebagaimana dikatakan Kepala Proyeksi Sekolah Vaulx-en-Velin, "Tentu saja, tanpa sektorisasi, proses pendaftaran sekolah dan proyeksi jumlah murid akan semakin rumit daripada sekarang".

5.5. Perencanaan Sekolah: Tantangan Selanjutnya

Sebagian tantangan perencanaan sekolah datang dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya serta demografi penduduk, namun sebagian lain justru berasal dari regulasi. Menyangkut pembangunan dan perkembangan *département*, menurut Kabag Statistik IA Rhône, demografi penduduk Rhône relatif stabil. Sejak tahun 1962, populasi Rhône terus bertambah dan mulai tahun 1999 hingga 2005, pertumbuhan populasi mencapai 4,8% (INSEE, 2005). Beliau menjelaskan, "Di Département Rhône, terdapat zona ekonomi yang atraktif, Lyon dan aglomerasinya. Pada kasus Rhône, daya tarik ekonomi mendorong pembangunan *commune-commune* yang terpusat di wilayah tenggara Rhône, di Département Isère, Ain, dan Loire (lihat gambar 5.1). Kita perhatikan bahwa penduduk yang

bekerja di wilayah Rhône tinggal di *département-département* sekitarnya karena alasan tingginya harga hunian”.



Sumber: www.grandlyon.com

GAMBAR 5.1
AGLOMERASI GRAND LYON DI RÉGION RHÔNE-ALPES

Kabag Pendidikan Dasar IA Rhône menegaskan bahwa regulasi menuntut perbaikan tingkat keselamatan di sekolah dan kebijakan pendidikan meminta akses lebih di sekolah publik bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan gerak. Beliau menjelaskan, ”Kita memiliki sekolah-sekolah khusus bagi anak-anak dengan keterbatasan fisik, namun kebijakan mengisyaratkan agar sekolah-sekolah publik (standar) harus mampu menerima murid-murid yang memiliki kekurangan tersebut bersama murid-murid normal lainnya”. Regulasi ini berarti menuntut *commune* sebagai penanggung jawab bangunan sekolah untuk menyesuaikan

prasarana yang mereka miliki agar lebih aksesibel. Tantangan serupa juga muncul dari segi budaya, misalnya perkembangan teknologi yang menuntut semua sekolah memiliki sebuah ruang informatika.

Bagi Commune Lyon, tantangan menyangkut pembangunan dan perkembangan kota lebih kepada kebutuhan akan sekolah-sekolah baru di lingkungan yang sedang berkembang. Kepala Prasarana Pendidikan *commune* ini mengatakan, "Lyon memiliki sebuah rencana pembangunan sejumlah sekolah baru dalam 10 tahun mendatang karena banyak permukiman baru yang sedang didirikan sehingga beberapa *quartier* akan kekurangan sekolah". Proyeksi pertumbuhan jumlah murid di Lyon mencapai lebih dari 4.000 anak pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2005 (DAU Lyon, 2006). Sementara itu, tambahnya, "Di beberapa *quartier*, *commune* justru akan menyusutkan sedikit sekolah-sekolah yang berukuran terlampau besar".

Tidak jauh berbeda dengan Lyon, tantangan yang dihadapi oleh Vaulx-en-Velin terutama menyangkut pertumbuhan jumlah murid, menurut Direktur Pendidikan *commune* ini. Tiap tahun, *Mairie* harus menyediakan 2 hingga 6 kelas baru tergantung pada realisasi proyek pembangunan permukiman. Selama ini, sektor sekolah (hanya sedikit) disesuaikan dengan rehabilitasi suatu *quartier* yang mengakibatkan perubahan dan/atau penambahan jalan dan beberapa hunian. "Sekarang, *Mairie* harus melangkah lebih jauh dalam penyesuaian sektor sekolah karena kota telah berevolusi dengan banyaknya permukiman baru...", tambah beliau. *Commune*, bekerjasama dengan konsultan swasta, tengah mengerjakan proyeksi murid jangka panjang dan rancang ulang sektor-sektor sekolah. Setiap

tahun, mereka melakukan verifikasi kesesuaian realitas di lapangan dengan proyeksi untuk memutuskan apakah mereka perlu menyesuaikan sektor sekolah secara berkala.

”Proyeksi benar-benar merupakan pekerjaan berdasarkan hipotesis; *commune* tidak tahu tipe keluarga yang akan datang menghuni permukiman (yang baru), jadi harus diketahui betul apa yang pada kenyataannya terjadi”, jelas Direktur Pendidikan Vaulx-en-Velin. Mengenai pekerjaan yang telah dilakukan lima tahun terakhir di *commune*-nya, menurut Direktur, kuota kursi sekolah yang pemerintah *commune* sediakan hingga saat ini terlalu tinggi. Artinya, dulu *Mairie* memproyeksikan terlalu banyak jumlah anak usia sekolah yang akan datang dibandingkan realita di lapangan dan kerap kuota tersebut berada di lokasi yang kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian ulang terhadap perkembangan yang terjadi sekarang dan akan datang.

Ciri khas lain dari Vaulx-en-Velin adalah pilihan politis dewan perwakilan rakyat lokal yang menginginkan agar *commune* dapat menerima anak-anak berusia 2 hingga 3 tahun di sekolah-sekolah publik. Program dari kebijakan ini adalah menyekolahkan anak-anak sedini mungkin di *école maternelle*, tentu saja dengan inisiatif dan sesuai keinginan orang tua mereka. ”Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa pendidikan sekolah sedini mungkin berkorespondensi erat dengan tingkat keberhasilan murid di sekolah, terutama dalam pendidikan bahasa, sosialisasi dan sebagainya”, Direktur Pendidikan menjelaskan tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu, *commune* juga melihat tingginya kebutuhan orang tua akan pengasuhan anak pada jam kerja sementara fasilitas itu tidak tersedia

merata di *commune* dan walaupun ada, tempat penitipan anak yang dikelola privat relatif mahal bagi masyarakat Vaulx-en-Velin. Dia kemudian menambahkan, "Di kebanyakan *commune* tetangga, anak-anak tidak diterima di sekolah sebelum mereka berusia 3 tahun, sejumlah *commune* bahkan baru memulai sekolah untuk anak-anak berusia 3,5 atau 4 tahun".

Untuk itu, *Maire* Vaulx-en-Velin mengharapkan bahwa jajarannya menangani pendaftaran sekolah yang sedianya dilakukan oleh para kepala sekolah. Direktur Pendidikan menyadari, "Untuk menyekolahkan anak-anak berusia 2 hingga 3 tahun, proses pendaftaran merupakan satu titik yang sangat sensitif karena kepala-kepala sekolah akan memutuskan sekehendak mereka". Artinya, apabila sekolah kekurangan murid, mereka akan menerima anak-anak tersebut untuk mnghindari penutupan kelas namun jika jumlah murid sudah mencukupi, mereka tidak akan menerima para Batita tersebut. Direktur Pendidikan kemudian menyatakan, "Kebijakan (pendaftaran oleh *commune*) ini juga untuk mengetahui secara akurat tingkat permintaan sekolah bagi anak berusia 2 hingga 3 tahun dan mendorong Diknas untuk juga mau menerima mereka". Saat ini, sudah terdapat sekolah di Vaulx-en-Velin yang dengan suka rela melakukannya, seperti *Petite Ecole Maternelle* (TK Kecil) Vienot yang memiliki sebuah kelas yang semua muridnya adalah "bayi". Tapi ia juga mencatat bahwa ada juga sekolah-sekolah yang berpikir bahwa sekolah bukanlah tempat yang tepat bagi anak-anak yang terlalu kecil itu, mereka lebih baik bersama ibu mereka atau di *creche* (tempat penitipan anak), sehingga sejumlah sekolah menolak mereka. Jadi, mulai tahun 2009, otoritas pendidikan Vaulx-en-Velin harus siap mengorganisasi sendiri

pendaftaran sekolah. Namun bagi *commune*, ia menambahkan, “Masalah ini tidak hanya sampai disitu karena akan rumit juga pada tingkat Diknas menyangkut batasan jumlah pos pengajar dan tentunya biaya”.

BAB VI KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Keterlibatan *commune* dalam pendidikan nasional di Perancis tidak terbatas pada pengajaran di sekolah (pendidikan formal), yang mencakup pengelolaan, pengoperasian, dan perawatan sekolah, tetapi dalam konteks yang lebih luas, *commune* juga berperan dalam pendidikan nonformal dan pendidikan informal³. Melalui program pendidikan lokal, *Mairie* menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas kebijakan *commune* dalam upaya menjadikannya sebagai sebuah “*ville éducatrice*”⁴ (kota pendidik) bagi semua penduduk.

Bagi *commune*, sekolah bukan hanya tempat anak-anak menuntut ilmu. “Sekolah adalah fasilitas milik bersama yang menghidupkan sebuah *quartier* (kawasan)” (Merlin dan Choay, 1988). Sekolah merupakan sebuah pusat aktivitas

³ Tiga kategori pendidikan yang didefinisikan di tingkat Eropa mencakup pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal berkorespondensi dengan kegiatan belajar di sekolah, pendidikan nonformal berhubungan dengan aktivitas terorganisasi yang diselenggarakan oleh struktur otoritas kota atau oleh asosiasi, sedangkan pendidikan informal dilakukan di dalam lingkungan keluarga atau di suatu komunitas masyarakat (*quartier, commune* dll). (Pugin dan Panassier, 2006).

⁴ “Sebuah ‘kota pendidik’ adalah sebuah kota yang sadar bahwa dirinya merupakan sebuah sumber belajar sehingga tampak dari berbagai bidang/aktivitas yang melibatkannya (rencana tata kota, aktivitas olah raga dan seni, kebijakan pemerintah kota dll) dan sebuah kota yang memasukkan aspek pendidikan ke dalam program-programnya. Ia adalah sebuah *commune* yang berkomitmen untuk ‘memperkaya’ kehidupan masyarakatnya, memberi mereka informasi, menyediakan pendidikan di sepanjang hidup mereka, berkonsultasi dengan mereka, dan memberi mereka pra/sarana agar masyarakat tergugah dan berpartisipasi membangun masa depan bersama” (Fournel, 2006 dalam *Quand la ville devient un acteur clé de l’éducation*).

untuk anak-anak, tempat bertemunya para orang tua, dan sarana berdiskusi bagi aktor-aktor yang peduli terhadap pendidikan. Bahkan sejak puluhan tahun, ”pendidikan semakin menjadi salah satu faktor penentu bagi orang tua dalam memutuskan lokasi untuk ditinggali ” (Halls, 1967). Oleh karena itu, *commune*, begitu pula masyarakatnya, mempunyai rasa memiliki yang besar terhadap sekolah dan berkepentingan untuk menjaga keberlangsungan sekolah, bahkan sebuah kelas, di wilayah mereka.

Pendidikan dasar melibatkan sejumlah aktor yang masing-masing memiliki kepentingan. Mempertimbangkan pemerataan dan keterbatasan jumlah guru, pemerintah pusat (dalam hal ini *Inspection Académique*) menerapkan standar yang sama untuk menentukan pos pengajar dan ukuran kelas sesuai kebutuhan (atau ”status”) suatu *quartier*. *Commune* memerlukan sekolah. Ia ingin agar *quartier-quartier* di wilayahnya senantiasa hidup dan ”menarik” sehingga *commune* melengkapinya dengan berbagai fasilitas umum dan ia juga mendukung aktivitas kultural masyarakat. Kebutuhan para orang tua murid mengalami evolusi dan mereka menuntut hak untuk memilih dan mendapatkan pendidikan terbaik bagi anak mereka. Konsekuensi dari perkembangan tersebut, *commune* harus berperan semakin besar dalam bidang pendidikan, tanpa batasan lingkup waktu atau area sekolah.

Lyon dan Vaulx-en-Velin adalah potret dari sebuah *commune* sentral dan sebuah *banlieue* (periferi kota besar) yang ”muda” (Mossant, 2005). Berdasarkan data sosial ekonomi, Vaulx-en-Velin menunjukkan proporsi jumlah permukiman sosial yang besar, tingkat pengangguran yang hampir dua kali lipat dari Lyon, dan

standar hidup penduduk yang hanya sebesar 56% dari standar di Lyon. Secara kultur, rumah tangga di Vaulx-en-Velin lebih beragam dengan 21% warga asing dan 28% keluarga imigran. Terkait dengan kondisi masing-masing *commune*, melalui kebijakan nasional, semua sekolah publik di Vaulx-en-Velin diklasifikasikan "sulit" dan dinilai perlu memperoleh prioritas, sementara klasifikasi yang sama dimiliki 23% sekolah publik di Lyon. Setelah mengalami jumlah penduduk usia sekolah yang besar pada tahun 1980-an, kapasitas total sekolah dasar publik di kedua *commune* yang berbeda karakter ini jauh lebih besar daripada kebutuhan, namun yang menjadi masalah, kapasitas ini kurang tersebar merata di wilayah *commune*.

Tidak ada perbedaan antara *commune* dalam perencanaan dan pengelolaan pendidikan pada tingkat nasional ataupun *académique* (tingkat *département*). *Commune* itu sendiri yang ingin membuat sekolah di wilayah mereka "berbeda" dibandingkan sekolah-sekolah pada umumnya. Hal ini tergantung pada pilihan politis, karakteristik *commune*, dan tentu saja kapasitas finansial otoritas lokal. Lyon memiliki standar sendiri agar setiap sekolah di wilayahnya memiliki fasilitas yang lengkap, sebuah standar yang lebih tinggi daripada kebanyakan *commune*. Vaulx-en-Velin memilih untuk menyediakan layanan sekolah publik bagi "bayi" mulai usia 2 tahun, lebih awal daripada pendidikan dasar di *commune* pada umumnya yang dimulai diatas usia 3 tahun. Di Vaulx-en-Velin, sistem sektor sekolah juga dijadikan sebagai alat pembauran sosial di sekolah namun bagi Commune Lyon, pembauran sosial belum menjadi salah satu tujuan dari kebijakan pendidikan ini.

Sistem sektor sekolah dan proyeksi tahunan jumlah murid per sektor adalah metode dan alat untuk merencanakan dan mengelola sekolah pada tingkat *commune*. Sektor sekolah merupakan sebuah sistem pembagian geografis yang jelas, adil, namun sekaligus tegas. Ia menentukan sekaligus menjamin sekolah publik bagi setiap anak berdasarkan lokasi dan jarak tempat tinggal serta kapasitas sekolah. Fungsi inilah yang menjadikan sistem sektorisasi ini penting bagi pendidikan dasar.

Memang benar bahwa sistem sektor sekolah publik membatasi kebebasan keluarga untuk memilih sekolah "terbaik" karena *commune* tidak mengizinkan permohonan keluar sektor yang hanya berdasarkan preferensi pribadi. Inilah yang dinilai menjadi pemicu segregasi wilayah dan sosial dalam pendidikan di Perancis. Kawasan dan sekolah yang "baik" akan semakin menarik sementara kawasan yang "buruk" akan terus berusaha ditinggalkan. Otoritas pendidikan berupaya untuk berlaku adil dalam mengelola sekolah dan berupaya membuat semua sekolah publik menjadi "baik", namun sejumlah orang tua ternyata memiliki definisi sendiri mengenai sebuah sekolah yang "baik". Selain itu, bukanlah status sekolah "standar" atau sekolah "dalam lingkungan sulit" yang benar-benar menentukan arah pindah sektor. Bagaimana pun juga, meskipun (jika benar) tidak ada ketimpangan di antara sekolah publik di kedua *commune* tersebut, sejumlah orang tua akan selalu berkeinginan untuk memilih...

6.2. Pelajaran yang Diperoleh

Sekolah di Perancis bukan hanya tempat kegiatan belajar-mengajar. Sekolah merupakan prasarana kolektif publik yang menghidupkan suatu kawasan

permukiman. Ia merupakan pusat aktivitas bagi anak-anak di lingkungan sekitar sekolah, baik di dalam maupun di luar jam belajar, sarana bagi para orang tua murid untuk berkumpul dan saling berbagi, serta sebuah tempat berdiskusi bagi para aktor yang peduli terhadap pendidikan di tingkat lokal. Terdapat hubungan yang erat antara sekolah, masyarakat, dan *commune*. Sekolah merupakan bagian yang terintegrasi dari sebuah lingkungan dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan, sekolah semakin menjadi salah satu faktor penentu lokasi tempat tinggal bagi sebuah keluarga. Oleh karena itu, telah menjadi semangat setiap *commune* agar semua sekolah di wilayahnya memiliki kualitas dan citra yang “baik”.

Dalam merencanakan dan mengelola sekolah-sekolahnya, *commune* di Perancis memiliki sistem sektor sekolah dan proyeksi populasi murid yang cukup detail (sekolah per sekolah), jelas (memiliki standar nasional dan *applicable*), adil (berlaku untuk semua penduduk), sekaligus “otoriter” yang memfasilitasi *Mairie* untuk menjamin tempat di sekolah bagi setiap anak di wilayahnya. Penerimaan kebijakan pendidikan ini didukung oleh kondisi sekolah publik di Perancis yang jumlahnya mendominasi total sekolah dasar (lebih dari 90% pada tahun 2007) di negara ini.

Ketika tidak ada lagi hambatan biaya dalam pendidikan formal (karena semua sekolah publik di Perancis adalah gratis), faktor apalagi yang mempengaruhi orang tua murid dalam memilih sekolah? Tidakkah hanya faktor fisik: bangunan yang mewah, fasilitas yang lengkap, dan jarak tempuh yang menentukan preferensi orang tua. Namun di Perancis, hal ini lebih dipengaruhi oleh citra suatu kawasan permukiman tempat sekolah itu berada karena “reputasi”

suatu kawasan permukiman menentukan masyarakat yang ada di dalam lingkungan sebuah sekolah. Pada titik inilah dirasakan kelemahan sistem sektor sekolah yang dianggap memicu terjadinya segregasi sosial dan wilayah dalam dunia pendidikan.

Perubahan dinamis populasi penduduk juga perkembangan sistem pendidikan merupakan hal yang aktual dan tidak dapat dihindari. Kedua hal tersebut dapat berkembang lebih pesat dibandingkan dengan usia guna sebuah bangunan sekolah sebagaimana yang terjadi pada sejumlah sekolah di Zona pembangunan kota prioritas (ZUP) di Perancis. Berdasarkan pengalaman tersebut, prasarana pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang dan penetapan lokasi sekolah membawa satu paket konsekuensi teknis, pembiayaan, dan juga sosial yang mungkin muncul puluhan tahun kemudian.

Sekali lagi, perencanaan sekolah tidak sebatas masalah matematis, yang berkuat seputar bagaimana menyediakan layanan pendidikan yang memadai dalam hal kapasitas, rasio jumlah murid per pengajar dan per kelas, dan jarak tempuh dari tempat tinggal (area pelayanan sekolah). Ketika kondisi ideal tersebut relatif telah terpenuhi sebagaimana yang terjadi di Lyon dan Vaulx-en-Velin, justru tantangan-tantangan *intangibile* yang kini lebih dominan dihadapi oleh dunia pendidikan di Perancis. Bagaimana memberikan kesempatan yang sama bagi semua masyarakat dalam mengakses pendidikan yang terbaik, bagaimana sekolah dapat mendukung terciptanya pembauran sosial di tengah masyarakat, dan bagaimana kebijakan pendidikan mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan berbagai aktor yang terlibat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Académie Lyon. 2008. *Beberapa karakteristik Académie Lyon* (dalam bahasa Perancis). Terdapat dalam: <http://www.ac-lyon.fr/specificites-academie-lyon.html> (diakses pada 9 Maret 2008).
- Baudry, Constance. 12 September 2006. *Haruskah sektor sekolah dihapus?* (dalam bahasa Perancis). Le Monde. Terdapat dalam: http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3226,50-815579,0.html (diakses pada 3 April 2008).
- Berthelot, Alain. 2007. *Area urban Lyon: Densifikasi di pusat dan daya tarik di periferi* (dalam bahasa Perancis). La Lettre - Résultats. No. 79. Agustus 2007. Lyon: INSEE Rhône-Alpes, 4 p. (ISSN 1165-5534).
- Bottin, Yves, et al. 2007. *Pendidikan dasar, evaluasi sekolah* (dalam bahasa Perancis). Paris: Haut Conseil de L'éducation, 39 p.
- Bouvier, Alain. 2007. *Manajemen sistem pendidikan* (dalam bahasa Perancis). Paris: Presses universitaires de France, 352 p. (ISBN 978-2-13-956570-3)
- Carte Scolaire*. 2008. Ensiklopedi Pendidikan (dalam bahasa Perancis). Terdapat dalam: <http://www.e-tud.com/encyclopedie-education/?201-carte-scolaire> (diakses pada 12 Maret 2008).
- Coquil, Thierry dan Christophe Lauriol. 1995. *Elemen-elemen revisi sistem sektor sekolah di Vaulx-en-Velin* (dalam bahasa Perancis). Tesis. Vaulx-en-Velin: Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat, 119 p.
- DEPP. Oktober 2007. *Kondisi sekolah* (dalam bahasa Perancis). No.17. Paris: DEPP/Département de la valorisation et de l'édition, 82 p. (ISBN 978-2-11-095418-3)
- Direction de l'Aménagement Urbain – Observatoire Urbain. November 2006. *Studi prospektif demografi pendidikan* (dalam bahasa Perancis). Lyon: Ville de Lyon, 16 p.
- Direction de l'Education de Lyon. 2007. *Program pendidikan Lyon 2001-2008* (dalam bahasa Perancis). Lyon: Ville de Lyon, 20 p.
- Direction de l'Education de Vaulx-en-Velin. Juni 2004. *Program pendidikan global Vaulx-en-Velin* (dalam bahasa Perancis). Vaulx-en-Velin: Ville de Vaulx-en-Velin, 13 p.

-
1996. *Penyesuaian sektor sekolah: Usulan penutupan Sekolah Jean JAURES di Mas du Taureaux* (dalam bahasa Perancis). Vaulx-en-Velin: Ville de Vaulx-en-Velin, 5 p.
- Dreyfus, Bernard. 10 Januari 2005. *Vade mecum pemerintah lokal* (dalam bahasa Perancis). 5^e édition. Pulnoy: Arnaud Franel Edition, 226 p. (ISBN 2-896-030-12-3)
- Durand-Prinborgne, Claude. 2003. *Prinsip-prinsip dasar sistem pendidikan Perancis*. Sistem Pendidikan di Perancis (dalam bahasa Perancis). Notice 2. Paris: La documentation française, p.13-19. (ISBN 2-11-005380-1)
- Gauthier, Pierre-Louis. 2006. *Pendidikan dasar dalam perdebatan* (dalam bahasa Perancis). *Revue Internationale d'Education*, no. 41. Sèvres: Centre International d'Etudes Pédagogiques, p. 17-23. (ISSN 1254-4590)
- Genay, Valérie. Maret 2008. *Potret Grand Lyon. hingga Juli 2006* (dalam bahasa Perancis). Lyon: INSEE Rhône-Alpes, 9 p.
- Inspection Académique du Rhône. 2008. *Pendidikan nasional di Rhône* (dalam bahasa Perancis). Terdapat dalam: <http://www.ia69.ac-lyon.fr/07docpdf/chiffresensei.pdf> (diakses pada 9 Maret 2008).
- Kota dan sekolah* (dalam bahasa Perancis). Review. Les cahiers du DSU No.7. 1 Juni 1995.
- Lamrani, Yamina. 1998. *Kegagalan pendidikan sekolah dan banlieue: dari sebuah pencitraan hingga sebuah diskriminasi implisit* (dalam bahasa Perancis). Tesis. Vaulx-en-Velin: Ecole Nationale des Travaux Publics, 102 p.
- Louis, François. 2002. *Arah dan evaluasi kebijakan publik guna memenuhi kebutuhan prasarana pendidikan* (dalam bahasa Perancis). 24-27 Februari 2002, Guadalajara, Meksiko. Programme de l'OCDE pour la construction et l'équipement de l'éducation (PEB), 6 p.
- Madelin, Alain. 9 Oktober 1999. *Sistem sektor sekolah menciptakan "pengucilan"* (dalam bahasa Perancis). *Démocratique Libéral*. Editorial. Terdapat dalam: <http://www.demlib.com/editorial/mad/discours/081099.html> (diakses pada 27 Maret 2008).
- Merlin, Pierre dan Françoise Choay. 1988. *Kamus tata kota dan perencanaan wilayah* (dalam bahasa Perancis). 1^{ère} édition. Paris: Presses Universitaires de France, 723 p. (ISBN 2-13-041374-9)
- Ministère de l'Education Nationale. 2008. *Sistem pendidikan* (dalam bahasa Perancis). Terdapat dalam: <http://www.education.gouv.fr/pid8/le-systeme-educatif.html> (diakses pada 9 Januari 2008).

- Mossant, Philippe. Juli 2005. *Rhône-Alpes, sebuah région muda dan atraktif* (dalam bahasa Perancis). La Lettre - Résultats. No. 40. Lyon: INSEE Rhône-Alpes, 2005, 4 p. (ISSN 1165-5534).
- Oberti, Marco. 2007. *Sekolah di perkotaan: Segregasi-Pembauran-Sektor sekolah* (dalam bahasa Perancis). Paris: Presses de Sciences Po, 299 p. (ISBN 978-2-7246-1016-1)
- Pendidikan bagi anak: Sebuah panduan hukum* (dalam bahasa Perancis). Paris: Direction des journaux officiels, 2001, 123 p. (ISBN 2-11-075046-4)
- Pugin, Valérie dan Catherine Panassier. 2006. *Ketika kota menjadi aktor kunci pendidikan* (dalam bahasa Perancis). Revue. L'Agenda Métropolitain. p. 82-86.
- Safra, Martine. 2003. *Institusi pendidikan dasar*. Sistem Pendidikan di Perancis (dalam bahasa Perancis). Notice 10. Paris: La documentation française, p. 84-93. (ISBN 2-11-005380-1)
- Soule, Véronique. 28 Mei 2007. *Sistem sektor sekolah dievaluasi oleh Darcos sebelum musim panas* (dalam bahasa Perancis). Libération Terdapat dalam: <http://www.liberation.fr/actualite/societe/256474.FR.php> (diakses pada 27 Maret 2008).
- _____ 28 Mei 2007. *Ribuan cara beralih dari sektor sekolah* (dalam bahasa Perancis). Libération. Terdapat dalam: <http://www.liberation.fr/actualite/societe/256473.FR.php> (diakses pada 27 Maret 2008).
- Tiga tahun ajaran hingga sektor sekolah dihapuskan* (dalam bahasa Perancis). Libération 29 Mei 2007. Terdapat dalam: <http://www.liberation.fr/actualite/politiques/256746.FR.php> (diakses pada 3 April 2008).
- Toulemonde, Bernard. 2003. *Menuju tata kelola bersama sistem pendidikan?*. Sistem Pendidikan di Perancis (dalam bahasa Perancis). Notice 5. Paris: La documentation française, p. 41-46 (ISBN 2-11-005380-1)
- Vasconcellos, Maria. 2001. *Sistem pendidikan* (dalam bahasa Perancis). 3^{ème} édition. Paris: La Découverte, 128 p. (ISBN 2-7071-35554-2)
- Warzee, Alain, et al. 2006. *Posisi dan peran orang tua di sekolah* (dalam bahasa Perancis). Laporan kepada Menteri Pendidikan Nasional serta Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset, No. 2006-057. Paris: IGEN, IGAENER, 87 p.
- Xavier Darcos melonggarkan sistem sektor sekolah* (dalam bahasa Perancis). Kementerian Pendidikan Nasional. Informasi 4 Juni 2007. Terdapat dalam: <http://www.education.gouv.fr/cid5170/xavier-darcos-assouplit-la-carte-scolaire.html> (diakses pada 3 April 2008).

LAMPIRAN A DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber A

Direction de l'Education Commune Lyon

- Sebagai *commune* sentral, apa saja karakteristik khusus Lyon yang mempengaruhi perencanaan dan pengelolaan sekolah pada tingkat *commune*?
- Dalam perencanaan sekolah, apa saja permasalahan dan tantangan berbeda yang dihadapi *commune* sentral, *banlieue*, dan *commune* rural?
- Apakah *Commune Lyon* memiliki kebijakan khusus di bidang pendidikan?
- Bagaimana sistem sektor sekolah berfungsi di Lyon? Apakah setiap sektor mencakup area dengan jangkauan yang hampir sama?
- Terdapat sekolah dasar publik dengan "status" yang berbeda: sekolah standar, sekolah dalam RAR, RRS, atau DIF. Bagaimana perbedaan manajemen terhadap sekolah-sekolah tersebut oleh *commune*?

Bagaimana status sekolah "prioritas" tersebut mempengaruhi preferensi para orang tua?

- Berapa proporsi jumlah murid di sekolah privat? Bagaimana kecenderungannya?
- Dalam sistem sektor sekolah, bagaimana pembauran sosial dievaluasi?

Mengapa *commune* ini tidak mempertimbangkan pembauran sosial dalam sistem sektor sekolah? Karena terpusatnya permukiman sosial pada suatu wilayah?

Bagaimana kita bisa menciptakan pembauran sosial di sekolah?

- Apakah terdapat pertimbangan lain dalam menentukan sebuah sektor sekolah? (Citra sekolah, status "prioritas", sekolah privat). Bagaimana sistem tersebut dievaluasi?
- *Commune Lyon* berupaya agar sekolah publik untuk semua kalangan. Apa maksudnya?
- Berapa proporsi jumlah orang tua yang meminta pindah sektor sekolah? Bagaimana kecenderungannya?

- Diantara *quartier* di wilayah Lyon, apakah terdapat ketimpangan dalam hal:
 - Preferensi orang tua?
 - Tingkat okupansi kelas?
 - Jumlah sekolah privat?

Bagaimana sistem sektor sekolah dapat mengatasi ketimpangan antar-*quartier*?

- Di Perancis, ”pendidikan semakin menjadi salah satu faktor penentu bagi orang tua dalam memutuskan lokasi untuk ditinggali ” (Halls, 1967). Bagaimana pandangan *commune*?
- Apakah dan bagaimana sektor sekolah dasar terkait dengan sektor sekolah menengah?
- ”Sekolah adalah fasilitas milik bersama yang menghidupkan sebuah *quartier*” (Merlin dan Choay, 1988). Apa saja peran sekolah bagi sebuah *quartier*?
Peran sekolah sangat penting di luar peran pengajaran. Bagaimana penutupan sebuah sekolah berlangsung?
- Dalam perencanaan sekolah, apa saja tantangan yang dihadapi *commune* terkait dengan pembangunan dan perkembangan kota?
- Saat ini, bagaimana kapasitas total sekolah di Lyon dibandingkan dengan kebutuhannya?
Apa yang dilakukan di *quartier* yang mengalami kekurangan kelas saat ini?

Narasumber B

Direction de l’Education Commune Vaulx-en-Velin

- Apa saja karakteristik khusus Vaulx-en-Velin yang mempengaruhi perencanaan dan pengelolaan sekolah pada tingkat *commune*?
- Dalam perencanaan sekolah, apa saja permasalahan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh wilayah yang berbeda dalam *commune* (pusat kota dan periferi)?
- Mengapa sekolah di *quartier* tertentu memiliki reputasi yang lebih baik?
Bagaimana *commune* mengantisipasi ketimpangan antara sekolah di *quartier* yang berbeda?
- Apa yang dimaksud dengan *carte scolaire* (peta sekolah)? Apa saja elemen di dalamnya? (sektor sekolah, proyeksi jumlah murid...).

Apa perbedaan *carte scolaire* untuk sekolah tingkat menengah?

- Bagaimana sistem sektor sekolah dirancang kemudian diputuskan? Apakah citra sebuah sekolah, "status" sekolah, dan preferensi orang tua dipertimbangkan dalam sistem tersebut?

Sektor sekolah ditinjau ulang secara berkala. Kapan sebuah sektor dinilai membutuhkan peninjauan ulang? Apa saja parameternya?

- Apa yang dimaksud dengan proyeksi demografi murid? Apa saja elemen di dalamnya?
- Apa pentingnya sistem sektor sekolah terutama bagi *commune*? Apakah sistem tersebut memiliki fungsi lain selain sektorisasi sekolah? Misalnya pembagian wilayah kerja dan tanggung jawab aparat *commune* dll.
- Berapa proporsi orang tua murid yang mematuhi sistem sektor sekolah? Bagaimana kecenderungannya?

Secara umum, apa alasan sejumlah orang tua mengajukan permohonan pindah sektor sekolah?

- Di media massa, "respon negatif" terhadap sistem sektor sekolah untuk pendidikan menengah lebih kuat daripada pendidikan dasar. Bagaimana *commune* melihat ini?
- Apakah terdapat kepentingan yang berbeda antara penerapan sistem sektor sekolah untuk pendidikan dasar dan untuk pendidikan menengah? Mengapa?
- Apakah *Commune Lyon* memiliki kebijakan khusus di bidang pendidikan? Bagaimana kebijakan tersebut berfungsi?
- Di Perancis, "pendidikan semakin menjadi salah satu faktor penentu bagi orang tua dalam memutuskan lokasi untuk ditinggali" (Halls, 1967). Bagaimana hal tersebut terjadi di Vaulx-en-Velin?
- "Sekolah adalah fasilitas milik bersama yang menghidupkan sebuah *quartier*" (Merlin dan Choay, 1988). Apa saja peran sekolah bagi sebuah *quartier* dan *commune*?
- Di Vaulx-en-Velin terdapat sejumlah lokasi sekolah yang saling berdekatan seperti Sekolah Makarenko dan Lorca. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Bagaimana sistem sektor sekolah berfungsi di sekolah-sekolah yang begitu berdekatan?

Apakah pernah ada percampuran atau pertimbangan untuk menggabungkan sektor dua sekolah terutama untuk memperbaiki pembauran sosial di sekolah-sekolah yang berdekatan?

- Dalam perencanaan sekolah, apa saja tantangan yang dihadapi *commune* terkait dengan pembangunan dan perkembangan kota?

Narasumber C

Inspection Académique Département Rhône

- Terdapat sekolah dasar publik dengan "status" yang berbeda: sekolah standar, sekolah dalam RAR, RRS, atau DIF. Apakah perbedaan antara status-status tersebut? Siapa yang menentukan?

Bagaimana perbedaan manajemen terhadap sekolah-sekolah tersebut oleh IA? Apakah ada perbedaan standar?

- Bagaimana tiga tipe sekolah di zona pendidikan prioritas (EP1, EP2, dan EP3) berfungsi?
- Di Perancis, institusi pendidikan dasar publik mendominasi dengan lebih dari 90% jumlah total sekolah (DEPP, 2007), terlebih lagi, sekolah publik gratis dan sekular. Mengapa sejumlah orang tua memilih sekolah privat?
- Bagaimana status sekolah publik "prioritas" mempengaruhi preferensi para orang tua?
- Dalam perencanaan sekolah, apa saja permasalahan dan tantangan berbeda yang dihadapi *commune* sentral, *banlieue*, dan *commune* rural?
- Apa saja elemen yang diperhitungkan dalam proyeksi demografi murid selain evolusi demografi département itu sendiri tentunya?
- Secara umum, apa saja karakteristik khusus yang dimiliki *commune* sentral, *banlieue*, dan *commune* rural dalam hal jumlah dan evolusi demografi murid?
- Kapan kita memutuskan untuk membangun sekolah baru?
- Semua pihak setuju terhadap pembukaan kelas baru, tapi tidak terhadap penutupan kelas, apalagi sekolah. Apakah ada pertimbangan lain (selain jumlah murid per kelas) dalam menentukan pembukaan atau penutupan kelas? Misalkan dampaknya bagi suatu *quartier* atau *commune*...
- Mengapa kita membutuhkan suatu sistem sektorisasi sekolah?
- Di media massa, "respon negatif" terhadap sistem sektor sekolah untuk pendidikan menengah lebih kuat daripada pendidikan dasar. Bagaimana pandangan IA?

- Kementerian Diknas melonggarkan aturan sektor sekolah mulai tahun ajaran 2007. Apakah sektor sekolah dasar juga termasuk? Bagaimana pelanggaran tersebut berjalan?
- Di Perancis, ”pendidikan semakin menjadi salah satu faktor penentu bagi orang tua dalam memutuskan lokasi untuk ditinggali ” (Halls, 1967). Bagaimana IA melihat fenomena tersebut?
- ”Sekolah adalah fasilitas milik bersama yang menghidupkan sebuah *quartier*” (Merlin dan Choay, 1988). Apa saja peran sekolah bagi sebuah *commune* menurut pandangan IA?
- Dalam perencanaan sekolah, apa saja tantangan yang dihadapi *commune* terkait dengan pembangunan dan perkembangan *département*?

LAMPIRAN B
TESIS VERSI BAHASA PERANCIS



Les enjeux de la gestion des établissements scolaires au niveau de la commune

Etude dans les communes de Lyon et de Vaulx-en-Velin

Angga Nugraha HAFIIZ

VA APU

Promotion 53

Le 4 septembre 2008

Président du jury : Yves PERRODIN, Directeur du LSE
Maître de TFE : Laurette WITTNER, Laboratoire RIVES
Expert : Géraldine GEOFFROY, CERTU

Notice Analytique

Auteur	Nom HAFIIZ	Prénom Angga Nugraha
Titre du TFE	Les enjeux de la gestion des établissements scolaires au niveau de la commune : Etude dans les communes de Lyon et de Vaulx-en-Velin	
Maître de TFE	Organisme d’Affiliation ENTPE - RIVES	Nom Prénom WITTNER Laurette
Collation	77 pages	35 réf. bibliographiques
Mots clés	gestion des établissements scolaires, école primaire, commune, périmètres scolaires	
Termes géographiques	Lyon, Vaulx-en-Velin, Rhône	
Résumé	<p>L’Etat garantit l’enseignement public gratuit et laïc de manière égale. Au niveau de l’éducation primaire, l’Etat partage ses compétences avec la commune qui est propriétaire et gère les établissements. La gestion des établissements scolaires est un problème politique, social et également technique, qui implique plusieurs acteurs ayant des besoins spécifiques. Elle doit répondre à l’évolution de la population, aux spécificités de la commune et aux intérêts des acteurs. Lyon et Vaulx-en-Velin sont des communes « jeunes » avec des caractères différents : la ville centrale et la banlieue considérée comme « difficile ». Les deux communes font face à l’augmentation du nombre d’élèves et aussi au problème de la distribution de classes. Au delà la répartition des élèves, les périmètres scolaires sont un moyen de « garder » les écoles et pour soutenir la mixité sociale. L’outil de la politique éducative locale fonctionne assez différemment selon les objectifs et les conditions de chaque commune.</p>	

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce Travail de Fin d'Etudes.

Mme. Laurette WITTNER pour sa patience, son suivi, et ses conseils en tant que maître de TFE ;

Je remercie M. Yves PERRODIN et Mme. Géraldine GEOFFROY pour leur participation et leurs conseils à la soutenance ;

M. Emmanuel MARTINAIS, le Responsable de VA Aménagement et Politique Urbains, Mme. Françoise LAFAYE et Mme. Odile MINARY, que je remercie pour leur accueil, leur aide et leurs conseils depuis mon arrivée en France ;

Mon ami, Laurent de PETRICONI, pour sa patience dans la correction du texte français ;

Je remercie également ma famille en Indonésie et mes amis, pour leur soutien et leur aide pendant mes études ;

Je tiens à remercier aussi toutes les personnes ayant consacré un peu de leur temps à la réalisation du stage et des entretiens, et sans qui ce travail n'aurait jamais vu le jour.

Sommaire

Introduction	6
1. Présentation de l'étude et la méthodologie	
1.1. Le terrain d'étude	8
1.2. La méthodologie	8
1.3. Les sources	10
2. Le système éducatif en France	
2.1. Les principes fondamentaux	12
2.1.1. La liberté de l'enseignement	12
2.1.2. L'obligation scolaire	12
2.1.3. L'égalité, la laïcité et la neutralité	13
2.1.4. La gratuité	13
2.2. Les acteurs	14
2.2.1. L'Etat	14
2.2.2. Le Rectorat et l'Inspection Académique	15
2.2.3. Les collectivités territoriales	16
2.2.4. L'école	17
2.2.5. Les parents d'élèves	18
2.3. Les niveaux d'enseignement	18
2.3.1. De l'école maternelle à l'enseignement supérieur	18
2.4. Les politiques scolaires	20
2.4.1. La carte scolaire : définition, dérogation, réajustement	20
2.4.2. La prévision d'élèves	22
2.4.3. La zone d'éducation prioritaire	22
3. L'école primaire	
3.1. Les rôles et les objectifs	24
3.2. L'organisation de la scolarité	24
3.3. L'organisation administrative	25
3.3.1. Le réseau	25
3.3.2. L'école publique et l'école privée	27
3.3.3. L'école ordinaire et l'école en RAR, RRS, et DIF	28

4. Lyon et Vaulx-en-Velin : La commune centrale et la banlieue	
4.1. La population	30
4.1.1. L'évolution démographique : Les communes « jeunes »	30
4.1.2. L'évolution des effectifs : L'école publique et l'école privée	33
4.1.3. La socio économie : Logement, chômage, niveau de vie	34
4.1.4. La socioculturelle : Situation et origine de ménages	37
4.2. Les écoles des communes	39
4.2.1. Les écoles de Lyon : Grand standard, grand choix	40
4.2.2. Les écoles de Vaulx-en-Velin : Ecoles des REP...	41
4.3. Les Réseaux Education Prioritaires : Une discrimination positive ?	43
4.4. Les écoles privées : Le choix	45
4.5. Le projet éducatif local	46
4.6. L'école, le quartier et la commune	47
5. Périmètre scolaire : Plus qu'une répartition des élèves	
5.1. La distribution de classes : Grande capacité mais pas très bien distribuée	51
5.2. Les « bonnes » écoles et les « mauvaises » écoles	54
5.2.1. Choisir un quartier, choisir une école	54
5.2.2. La dérogation sortante et arrivante	57
5.3. La mixité sociale : Un choix politique de la Mairie	59
5.3.1. Lyon : Périmètres scolaires sans mixité sociale	59
5.3.2. Vaulx-en-Velin : Mixité sociale dans une commune « difficile »	60
5.4. Les débats	61
5.4.1. L'importance des périmètres scolaires	61
5.4.2. La suppression des périmètres du secondaire	62
5.4.3. Les périmètres du primaire : Les différents intérêts	64
5.5. Les défis dans la gestion des établissements scolaires	65
Conclusion	69
Bibliographie	71
Annexe	74

Introduction

En France, l'éducation est une « *affaire d'Etat* » dès le début du XIX^e siècle [Toulemonde, 2003]. L'alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris dans le bloc de constitutionnalité de la Cinquième République, prévoit que « *La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la culture et à la formation professionnelle. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État* ». Cette constitution souligne que l'Etat a la responsabilité de fournir un service d'éducation gratuit et laïque pour tous les enfants français ou étrangers résidant en France, de manière égale. La France conserve un système d'enseignement centralisé. C'est-à-dire que, selon Bernard Toulemonde dans *Vers un pilotage partagé du système éducatif?* [2003], l'Etat contrôle la politique éducative et des programmes nationaux d'enseignement.

« *Dans tous les pays, l'Etat joue le rôle tutélaire nécessaire pour assurer et pérenniser le fonctionnement de la scolarité obligatoire. Mais son intervention est diverse dans la forme et l'intensité* », affirme Pierre-Louis Gauthier [2006] dans le Revue Internationale d'Education, *L'école primaire en question*. Pour l'éducation au premier degré, l'Etat partage une partie de ses compétences avec la collectivité territoriale (la commune). En ce qui concerne l'éducation du deuxième degré, il y a une prise en charge du département et la région pour les bâtiments scolaires, ainsi que pour l'éducation supérieure, l'Etat partage ses compétences avec la région [Dreyfus, 2005].

« *L'Etat n'est plus seul maître à bord de l'Education nationale ; les collectivités sont désormais fortement impliquées dans le fonctionnement du système éducatif, et il est probable que ce mouvement se poursuivre au cours des prochaines décennies (...) L'école de la République est maintenant aux mains des collectivités* » [Toulemonde, 2003]. L'école primaire est un service public qu'il faut assurer. « *Elle se présente, partout dans le monde, comme le fondement sur lequel se bâtissent les systèmes éducatifs* » [Gauthier, 2006]. Les changements dynamiques de population ainsi que les changements dans le système éducatif sont à présent continus et inévitables. Comment la ville joue-t-elle son rôle en tant qu'« *acteur clé de l'éducation* »¹ ? Comment la commune française gère-t-elle les

¹ PUGIN Valérie, PANASSIER Catherine. *Quand la ville devient un acteur clé de l'éducation*, 2006.

établissements scolaires sur son territoire ? Les spécificités d'une commune influencent-elles la gestion des écoles primaires ? Et si oui, dans quelle mesure ?

Cette étude tâchera de définir quelle est la gestion des établissements scolaires au niveau de la commune. Dans une première partie, nous aborderons le terrain d'étude, la méthodologie utilisée pour répondre aux problématiques, et les sources d'informations. Dans la deuxième partie, j'effectuerai une présentation générale du système éducatif en France, de principes fondamentaux et des acteurs impliqués du niveau national jusqu'à l'école, les niveaux d'enseignement et quelques politiques liés à la gestion des établissements scolaires. Dans la troisième partie, évoquerons l'école primaire : ses rôles et objectifs, l'organisation de la scolarité et l'organisation administrative.

Dans les deux dernières parties, nous verrons les problématiques des terrains d'étude à la ville de Lyon et la ville de Vaulx-en-Velin. La quatrième partie est commencée par une discussion au sujet de la population et des écoles des communes. Ensuite, dans la même partie, nous discuterons des Réseaux Education Prioritaire du point de vue des différents acteurs, les écoles privées en tant qu'alternatif, le projet éducatif local et la relation parmi l'école, le quartier et la commune. La dernière partie examine notamment l'outil de la gestion des établissements scolaires : les périmètres scolaires. Nous parlerons de ses rôles et application par rapport aux problèmes de la distribution de classes, de l'écart parmi les écoles et de la mixité sociale, et aussi des débats autour de la politique scolaire. Puis, nous verrons les défis aux quels la commune doit faire face en gérant des écoles sur son territoire. À la fin de ce travail, figure une grille d'entretien sur laquelle je me suis appuyée pour construire des problématiques.

Présentation de l'étude et la méthodologie

1.1. Le terrain d'étude

Né en 1969, le Grand Lyon est l'une des premières communautés urbaines créées en France par la loi de décembre 1966, avec celles de Lille, Bordeaux et Strasbourg. Son périmètre est resté inchangé pendant une quarantaine d'années, jusqu'en janvier 2007, date d'adhésion de Givors et de Grigny. Il est alors passé de 55 à 57 communes, toutes situées dans le département du Rhône. La communauté urbaine regroupe Lyon et plusieurs communes voisines (voir l'illustration 1.1) en vue d'assurer la construction et le fonctionnement d'équipement destinés à satisfaire leurs besoins communs [Genay, 2008].

L'étude portant sur la gestion des établissements scolaires a été effectuée dans deux communes différentes choisies en fonction de leur diversité : ville centrale et banlieue, structures de population différentes et d'une utilisation différente de l'espace. Prendre deux communes si différentes a pour objectif de comprendre si et comment les différentes caractéristiques jouent sur la gestion des écoles primaires.

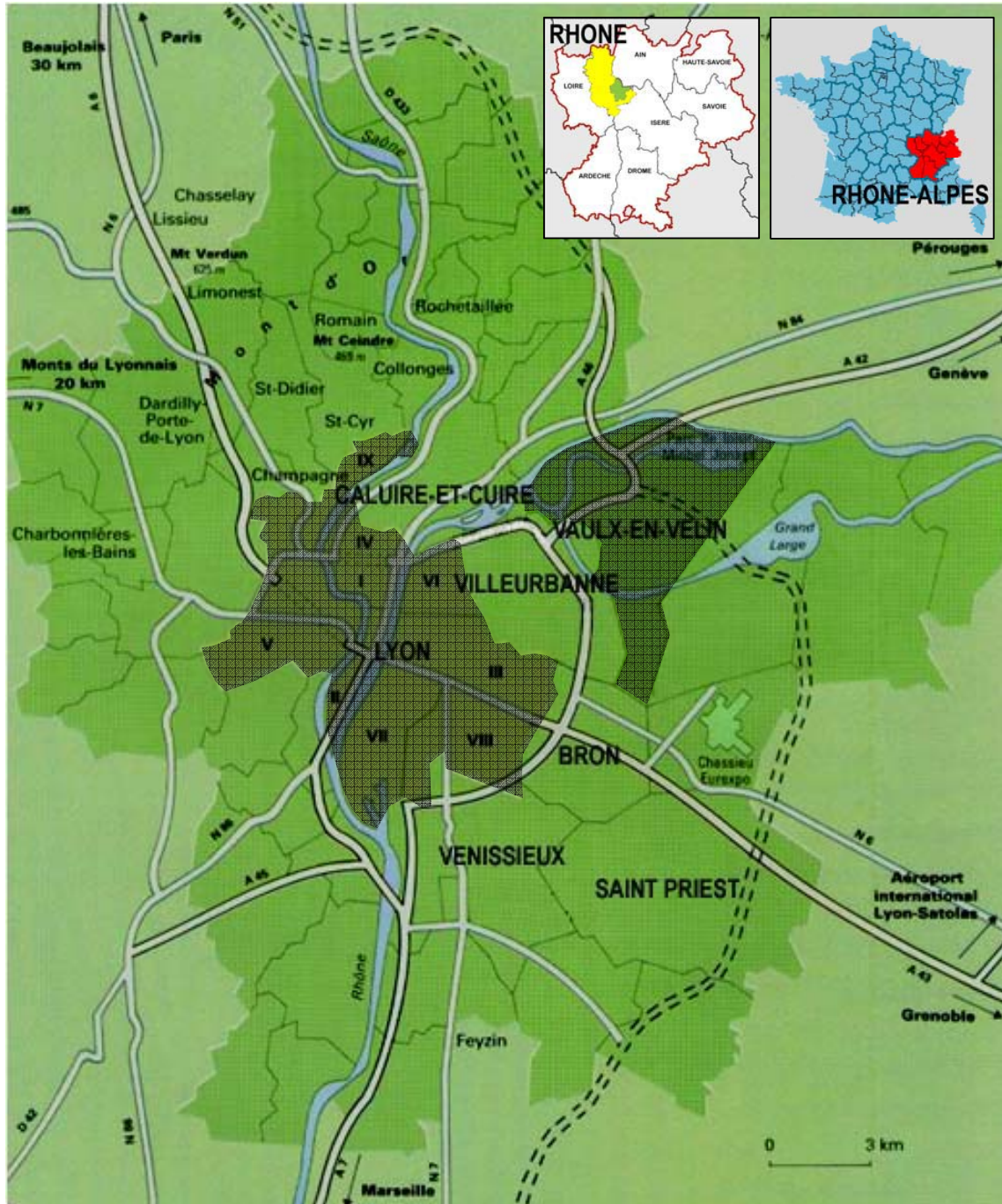
Nous prenons l'exemple de deux communes situées dans l'agglomération du Grand Lyon (voir l'illustration 1.1) :

- La Commune de Lyon en tant que ville centrale de l'agglomération lyonnaise ;
- La Commune de Vaulx-en-Velin comme commune banlieue de l'agglomération.

1.2. La méthodologie

Le travail se base sur l'étude bibliographique et plusieurs entretiens. Il a débuté par une étude bibliographique et une revue de presse qui ont pour objectif de comprendre le système éducatif en France, l'école primaire et la commune... J'ai du aussi me familiariser avec le Français et le vocabulaire spécifique de mon travail. Cette partie est importante pour être capable de préparer un plan, de poser des questions aux entretiens et de « se plonger » dans la problématique.

Illustration 1.1 Lyon et Vaulx-en-Velin en Grand Lyon



Afin de mieux connaître la position en tenant la commune dans la gestion des établissements scolaires, et savoir si elle est un acteur privilégié de l'éducation primaire, ainsi que ses rapports avec les autres acteurs, j'ai réalisé des entretiens semi-directifs avec certains acteurs. J'ai utilisé une grille d'entretien en annexe.

La commune, centre d'intérêt de cette étude, gère les établissements scolaires et les actions éducatives sur son territoire, notamment au sein de la responsabilité de sa Direction de l'Education. J'ai donc effectué des entretiens avec des agents de cette direction des deux communes concernées. Dans l'organisation de la Direction de l'Education, les communes disposent d'un service logistique scolaire qui est en charge du fonctionnement et de l'entretien des écoles et également de la carte scolaire. Pour comprendre les tâches du service, les outils de la gestion des écoles et de quelle façon ils fonctionnent, j'ai effectué un stage au Service Logistique Scolaires de la ville de Vaulx-en-Velin.

La gestion des établissements scolaires de l'éducation primaire implique l'action de l'Inspection Académique qui est également la représentative de l'Etat (le Ministère de l'Education Nationale) au niveau départemental. Les entretiens avec des acteurs de l'IA ont eu pour but de comprendre la partition des compétences entre l'Etat et la commune pour d'être capable de « voir » les différentes communes de l'extérieur et dans le contexte plus vaste, l'ensemble du département du Rhône.

1.3. Les sources

Les informations ont été recueillies au cœur de diverses références bibliographiques sous forme d'ouvrages, de revues, rapports, mémoires, conférences, medias... aussi bien sur support papier qu'électronique. A cette fin, j'ai consulté plusieurs bibliothèques et centres de ressources, y compris : la bibliothèque universitaire, le centre de documentation à l'Agence d'urbanisme de Lyon, la communauté urbaine du Grand Lyon, la bibliothèque municipale de Lyon, et internet.

J'ai aussi réalisé des entretiens auprès de quelques acteurs intervenant dans la gestion des établissements scolaires à l'Inspection Académique et dans les directions municipales :

L'Inspection Académique du Rhône

- Le Responsable de la Division de l'Organisation Scolaire ;
- Le Chef du Bureau Moyen Premier Degré (public et privé) ;
- Le Chef du Bureau Statistique (prévision).

La Ville de Lyon

- Le Directeur de l'Education ;
- Le Responsable du Service Travaux de la Direction de l'Education.

La Ville de Vaulx-en-Velin

- La Directrice de l'Education ;
- Le Chef du Service Logistique Scolaire ;
- Le Responsable du Secteur Logistique des Ecoles ;
- Le Responsable de la Gestionnaire Prospectives Scolaires ;
- Le Responsable de l'Accueil Public Dérogation Scolaires.

Le système éducatif en France

2.1. Les principes fondamentaux

2.1.1. La liberté de l'enseignement

Dans le Code de l'éducation, l'ensemble des textes réglementaires concernant l'éducation française, il existe quelques articles qui précisent la liberté de l'enseignement. « *Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être public ou privé* » [Article L.151-3]. L'article L.151-1 indique que « *L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et garantit l'exercice* ». Selon l'article L. 111-2, « *Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation (...) en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles* ».

« *La liberté de l'enseignement inclut la liberté d'organiser et de dispenser un enseignement* » [Durand-Prinborgne, 2003]. En tant qu'institution scolaire, l'établissement privé est reconnu par l'Etat et il peut même bénéficier d'aides étatiques s'il est sous contrat particulier avec l'Etat. Cependant, l'Etat contrôle les établissements privés et lui seul a le droit de délivrer diplômes et grades universitaires. L'autre partie du Code affirme la liberté de pensée ; elle soutient le droit des parents de choisir un enseignement adapté à leurs propres engagements philosophiques ou religieux.

2.1.2. L'obligation scolaire

En France, l'obligation scolaire a commencé au XIX^e siècle. La loi Jules Ferry du 28 mars 1882 a affirmé que « *l'instruction est obligatoire* ». Cette loi a concerné tous les enfants français ou étrangers résidant en France à partir de 6 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, la période d'obligation scolaire a évolué. Depuis la loi du 9 août 1936, elle a été prolongée jusqu'à l'âge de 14 ans. Appliquée depuis 1959, la loi prescrivant l'instruction à partir de 6

ans jusqu'à l'âge de 16 ans est obligatoire dans toute la France en vertu de l'ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959.

La loi impose une obligation d'instruction en laissant à la famille le choix entre scolariser l'enfant dans un établissement scolaire, public ou privé, ou assurer elle-même l'instruction pour ses enfants. Par conséquent, l'organisation de système éducatif doit assurer les capacités d'accueil dans les établissements scolaires et leur accessibilité. En outre, les écoles ne peuvent pas avoir une conduite discriminatoire : elles doivent être égalitaires dans leur accès et dans le déroulement de la scolarité [Durand-Prinborgne, 2003].

2.1.3. L'égalité, la neutralité et la laïcité

Le Code de l'éducation stipule que « *le service public contribue à l'égalité des chances* » [Article L.111-1]. En tant que service public, l'éducation doit respecter le principe d'égalité dans son fonctionnement, c'est-à-dire dans l'accueil et le traitement en cours d'études des élèves et de leurs familles. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'alinéa 3 et 13 du Préambule de la Constitution de 1946 pour l'égalité des sexes dispose que « *la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction (...)* ». De plus, le Code de l'éducation précise qu'il y a prohibition des discriminations d'origine sociale, culturelle ou géographique [Article L.111-1] et son souci d'assurer l'égalité des élèves [Article L.311-1].

« *Le principe d'égalité, qui définit une égalité d'accès au service public et l'égalité de traitement, emporte deux conséquences : la neutralité politique et la neutralité religieuse, qui est la laïcité* » [Durand-Prinborgne, 2003]. L'obligation de neutralité politique et de laïcité concerne l'accueil des élèves, les programmes et les manuels scolaires. Le Code de l'éducation indique que les établissements scolaires doivent accueillir « *tous les enfants sans distinction (...) de croyance* » et doivent « *donner un enseignement dans le respect total de la liberté de conscience* » [Article L.442-1] et dans « *le respect du pluralisme et du principe de neutralité* » [Article L.511-2].

2.1.4. La gratuité

Le principe de gratuité de l'enseignement primaire public a été posé depuis la fin du XIX^e siècle en France, même avant l'obligation d'instruction, par la loi du 16 juin 1881. Plus d'un demi-siècle après, la loi du 31 mai 1933 a instauré la gratuité de l'enseignement

secondaire. Ensuite, l'alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946 assure que « *l'organisation de l'enseignement public gratuit (...) est un devoir de l'Etat* ».

L'enseignement dispensé dans les écoles et les établissements publics est gratuit. Les manuels scolaires sont gratuits jusqu'en classe de troisième. Dans les écoles primaires, les matériels et fournitures d'usage collectif sont à la charge et une obligation des communes. « *Le principe de gratuité est strict ; il annule pour illégalité toute demande de participation financière aux familles, domiciliée ou non dans la commune* » [Durand-Prinborgne, 2003].

2.2. Les acteurs

2.2.1. L'Etat

En France, il existe une distinction au niveau de l'organisation de l'enseignement au niveau interministériel. Selon le Décret du 18 mai 2007 relatif à la composition du Gouvernement, le gouvernement français a créé deux structures autonomes :

- Le Ministère de l'Éducation Nationale qui est plus spécifiquement chargé de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire;
- Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche qui est chargé de l'enseignement supérieur et de l'organisation de la recherche publique.

Les lois de décentralisation de 1982 affirment que l'État conserve la responsabilité du service public de l'enseignement. Le ministère de l'Éducation nationale a la responsabilité de l'organisation et de l'administration du système éducatif, de l'école maternelle au baccalauréat. Il a pour mission [MEN, 2008]:

- la définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;
- la définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;
- le recrutement et la gestion des personnels qui dépendent de sa responsabilité ;
- la répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;
- le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.

2.2.2. Le Rectorat et l'Inspection Académique

Le Ministère de l'Éducation Nationale est géographiquement divisé en 30 académies dont 26 en métropole. L'Académie ou le Rectorat se localise dans la capitale régionale et elle est dirigée par un Recteur, nommé en Conseil des Ministres par le Président de la République. Il est assisté par des Inspecteurs qui gèrent l'Inspection Académique dans chaque département.

Le Rectorat et l'Inspection Académique sont les services déconcentrés du Ministère de l'Éducation Nationale au niveau local. Ils jouent un rôle dans l'éducation nationale en collaborant avec les collectivités territoriales : les communes pour l'enseignement primaire, les départements pour les collèges, et les régions pour les lycées.

Le Rectorat

Le Rectorat est la direction des services de l'Éducation Nationale à l'échelon de l'académie. Il met en œuvre dans cet échelon la politique éducative définie au niveau national. Il a autorité sur le premier degré (écoles maternelles et élémentaires) et le second degré (collèges et lycées). Le recteur est aussi chargé de l'harmonisation et du suivi des établissements d'enseignement supérieur en tant que chancelier des Universités [MEN, 2008].

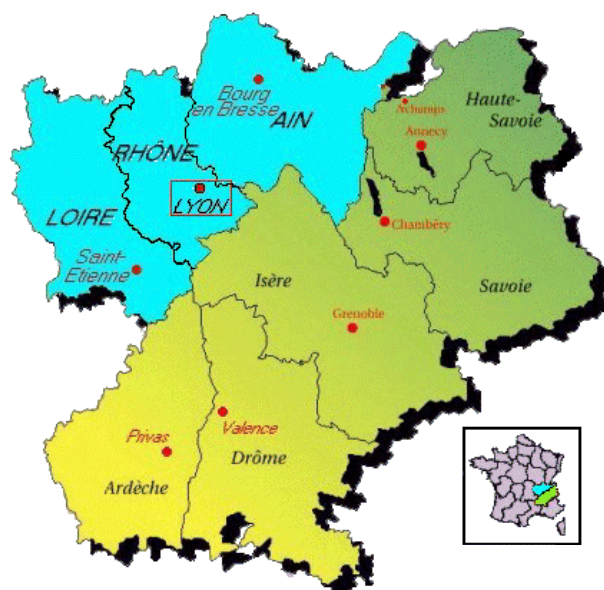
Le recteur représente le ministre de l'Éducation nationale au niveau de l'académie. Généralement, les académies correspondent aux régions mais il existe quelques exceptions. Par exemple, la région Rhône-Alpes est divisée en deux académies (voir l'illustration 2.1) :

- Lyon (Ain, Loire et Rhône)
- Grenoble (Ardèche, Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie).

L'académie de Lyon est responsable de la totalité du service public de l'éducation dans les trois départements, de la maternelle à l'université, et exerce aussi des compétences dans le domaine de l'enseignement privé sous contrat. Parmi ses responsabilités, le recteur [MEN, 2008] :

- veille à l'application de toutes les dispositions législatives et réglementaires se rapportant à l'éducation nationale ;
- définit les objectifs de la politique académique, en particulier la nature des formations et les conditions d'affectation des élèves ;
- a compétence sur la gestion des personnels et des établissements ;
- est responsable des relations avec les milieux politiques, économiques, socioprofessionnels et notamment avec les collectivités territoriales.

Illustration 2.1 L'académie de Lyon dans la région Rhône-Alpes



Source : www.ac-lyon.com

L'Inspection Académique

L'Inspection Académique est la direction des services départementaux de l'Education Nationale. Elle gère l'organisation scolaire, les personnels, essentiellement ceux de l'enseignement primaire, la scolarité et la vie scolaire, l'organisation des examens et concours [MEN, 2008].

L'inspecteur d'académie, nommé par décret du président de la République sur proposition du Ministre de l'Éducation Nationale, représente le recteur au niveau départemental. Il veille à l'organisation et au fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés. L'Inspecteur d'Académie, entre autres [MEN, 2008]:

- a pouvoir de décision pour l'ouverture et la fermeture des classes et des écoles et pour l'implantation des emplois d'instituteurs et de professeurs des écoles ;
- est compétent en matière de gestion des personnels des écoles ;
- approuve les programmes pédagogiques de construction des écoles ;
- est responsable des moyens d'enseignement et des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé (ATOS) des collèges ;
- définit les secteurs des collèges et des lycées en liaison avec le recteur.

2.2.3. Les collectivités territoriales

Depuis la loi de décentralisation du 2 mars 1982, les compétences en matière d'éducation sont réparties entre l'Etat et les collectivités locales.

L'Etat a la charge de l'élaboration des programmes, des structures et de parcours de formation, de la gestion et rémunération des personnels, de la création de postes, de l'ouverture ou fermeture de classes, des attributions de matériels pédagogiques et il est responsable de l'enseignement supérieur.

Les collectivités locales sont chargées d'évaluer les besoins, de construire, d'entretenir et de rénover les établissements scolaires ; de déterminer les objectifs et de proposer un schéma prévisionnel de formations préparées par le conseil régional ; d'organiser les transports et les cantines scolaires. La région a la responsabilité des lycées ; le département celle des collèges ; et la commune, celle des écoles. Les collectivités locales sont également responsables de l'achat d'équipements techniques, elles doivent participer financièrement aux projets d'action éducative des établissements, assurer la rémunération des enseignants vacataires pour les enseignements artistiques, sportifs ou de langues au niveau primaire.

Table 2.1 Récapitulatif des compétences entre l'Etat et les collectivités locales

Compétences	École	Collège	Lycée	Université
Investissement (construction, reconstruction et fonctionnement matériel)	commune	département	région	Etat et partenariat
Fonctionnement pédagogique (microinformatique...)	commune	Etat	Etat	Etat et partenariat
Personnels enseignants (recrutement, formation, rémunération)	Etat	Etat	Etat	Etat
Personnels administratifs, techniques, de santé	Etat	Etat	région	Etat
Personnels ouvriers	commune	département	région	Etat
Programmes d'enseignement	Etat	Etat	Etat	Etat
Validation des diplômes	-	Etat	Etat	Etat

Source : MEN, 2008.

2.2.4. L'école

Les directeurs d'école

Un directeur d'école est nommé parmi les instituteurs ou professeurs des écoles par l'inspecteur d'académie dans les écoles de deux classes et plus. Ses tâches incluent les responsabilités administratives et pédagogiques, entre autres [Safra, 2003] :

- Il procède à l'admission des élèves, après inscription par le maire, les répartit en classes et en groupes, s'assure de leur fréquentation régulière de l'école ;

- Il est responsable de l'accueil des élèves, organise leur surveillance, leur assure l'accès des locaux du service public d'éducation ;
- Il rend compte aux autorités académiques et leur donne les informations demandées.

Dans la relation extérieure de l'école, un directeur représente l'institution auprès de la commune, des parents d'élèves, des élus locaux etc.

Les enseignants

« Le professeur des écoles est un maître polyvalent, capable d'enseigner l'ensemble des disciplines dispensées à l'école primaire, il a mission à instruire et à éduquer de la petite section de maternelle au CM2. Les enseignants sont recrutés par concours externes (par académie), concours internes (par département) et par voie d'inscription sur les listes d'aptitude » [MEN, 2008]. C'est l'Etat qui gère leurs formations, leurs rémunérations et le déroulement de leur carrière.

L'enseignement primaire à l'école implique aussi les personnels non enseignants, qui exercent des emplois de direction, d'administration, d'éducation, ainsi que les personnels d'inspection, les personnels de santé et les personnels techniques, ouvriers de service.

2.2.5. Les parents d'élèves

L'Etat respecte les droits des parents, aussi bien les droits individuels que les droits collectifs [Warzee, 2006]. L'article L. 111-2 du Code de l'Education montre que l'éducation des enfants est un rôle majeur de la famille : *« La formation scolaire complète est l'action de la famille. (...) L'Etat garantit le respect de l'action éducative de la famille »*. S'appuyant sur ces principes fondamentaux, l'Etat facilite les parents à choisir et à obtenir la « meilleure » éducation pour leur enfant selon leur préférence. Dans les établissements scolaires, les parents ont le droit à toute l'information sur la scolarité de leur enfant de la part des personnels enseignants.

L'article L. 111-4 indique que *« Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et au dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe »*. Les associations de parents d'élèves ont les droits et rôles importants dans le système éducatif : du droit

d'informer, de communiquer jusqu'au droit d'intervenir au conseil académique et au conseil départemental de l'Education Nationale.

2.3. Les niveaux d'enseignement

Image 2.1 Les niveaux d'enseignant primaire et secondaire par âges et l'obligation scolaire

Age	Classe						Etablissement		
18	Bac. Pro.	Terminale Bac. professionnelle					Lycée	Enseignement secondaire	
		Première Bac. professionnelle				Terminale BG			Terminale BT
16	CAP	Terminale CAP	BEP	Terminale BEP	Bac. Gén.	Première BG	Bac. Tech.		Première BT
		Seconde CAP		Seconde BEP		Seconde générale et technologie			
Diplome national du Brevet									
14	Troisième						Collège		
13	Quatrième								
12	Cinquième								
11	Sixième								
10	Cours moyen 2 (CM2)						Ecole élémentaire		
9	Cours moyen 1 (CM1)								
8	Cours élémentaire niveau 2 (CE2)								
7	Cours élémentaire niveau 1 (CE1)								
6	Cours préparatoire (CP)								
5	Grand section						Ecole maternelle		
	Moyenne section								
	Petite section								

Source : MEN, 2008.

Les niveaux dans le système éducatif français sont :

- L'enseignement primaire. Il se compose de trois ou quatre ans d'enseignement à l'école maternelle (de 2 jusqu'à 5 ans) et de cinq ans de scolarisation à l'école élémentaire (de 6 jusqu'à 10 ans).
- L'enseignement secondaire. Les élèves passent quatre ans au collège (entre 11 ans et 14 ans) et continuent au lycée pendant trois ans (entre 15 ans et 18 ans).
- L'enseignement supérieur. Après le baccalauréat, diplôme qui permet l'accès aux études universitaires, l'université offre des formations dans plusieurs domaines : licence (Bac+3), master (Bac+5) ou doctorat (Bac+8).

- L'enseignement professionnel. C'est un enseignement en relation avec l'entreprise et ses métiers pour obtenir un Certificat d'aptitude professionnelle (CAP), un Brevet d'études professionnelles (BEP), un Brevet de technicien supérieur (BTS) ou un Baccalauréat professionnel (Bac pro).
- L'enseignement par apprentissage. C'est l'éducation chez un employeur mais a également lien dans un CFA (Centre de formation d'apprentis) afin d'obtenir un CAP, un BEP ou un Bac pro.
- La formation continue. Elle se déroule dans un groupement des établissements publics locaux d'enseignement (Greta) ou s'obtient par une Validation des acquis de l'expérience (VAE).

2.4. Les politiques scolaires

2.4.1. La carte scolaire

La définition de la carte scolaire selon le dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement est « *une programmation pluriannuelle des équipements scolaires à réaliser, fondée sur les projections démographiques (modification des structures par âge) et sur les tendances de l'urbanisation* » [Merlin et Choay, 1984].

S'appuyant sur l'analyse du nombre d'élèves, l'inspection académique répartit les postes d'enseignants par commune et décide du nombre de classes. L'ouverture ou la fermeture de classe ainsi que le regroupement d'écoles sont des résultent de l'analyse de la carte scolaire. Il s'agit d'une compétence partagée entre l'État (l'inspection académique) et les communes. Mais, si l'ouverture ou la fermeture de classe cause la création ou la fermeture d'écoles, c'est le conseil municipal qui prend la décision, et décide de la localisation, de la construction et de l'aménagement de locaux d'école primaire.

Finalement, dans le langage courant, la « carte scolaire » désigne surtout la répartition des élèves par zones qu'on appelle « les périmètres scolaires ». Cette programmation montre le découpage géographique d'une ville ou d'un département en plusieurs secteurs d'affectation [Encyclopédie éducation, 2008]. Elle représente deux choses :

- la répartition géographique des postes d'enseignants ;
- la répartition des élèves en secteurs d'affectation.

Par conséquent, chaque école primaire, collège et lycée correspond à un secteur géographique précisément défini. La sectorisation est planifiée pour que tous élèves la respectent ; ils doivent être scolarisés dans un établissement scolaire du secteur dans lequel leur famille est domiciliée sauf bien entendu s'ils bénéficient d'une dérogation.

Ce système de répartition permet à l'Education Nationale de planifier les ouvertures et les fermetures de classes en fonction des mouvements de population scolarisable chaque année. La tendance varie dans certains départements. C'est pour cela que la carte change d'année en année afin de décider du nombre de postes de classes et aussi du nombre d'enseignants.

Pour l'école primaire, c'est la mairie qui indique dans quelle école inscrire les enfants. Le fonctionnement est différent pour le collège et le lycée. Ce sont les autorités académiques qui ont compétence pour définir le périmètre de recrutement de chaque établissement. Les élèves devraient donc être inscrits dans un établissement par rapport à leur lieu de résidence. Il faut distinguer trois choses :

- la carte scolaire des écoles maternelles et élémentaires qui est déterminée par les Conseils Municipaux lorsque les communes comportent plusieurs écoles ;
- la carte scolaire des collèges qui est déterminée par le Conseil Général ;
- la carte scolaire établie pour les lycées est toujours sous le contrôle de l'État. Les Conseils Régionaux n'interviennent dans les lycées que pour la gestion de l'équipement et de l'aménagement.

La carte scolaire donne la possibilité aux élèves de contourner cette dernière avec une régulation claire. Selon l'article L212-8 du Code de l'éducation, il est nécessaire de demander une dérogation à l'Inspecteur d'Académie seulement pour certains motifs. A savoir :

- L'obligation professionnelle des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;
- L'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement de la même commune ;
- Des raisons médicales.

Depuis l'instauration de la carte scolaire (1963) qui attribue aux établissements scolaires une aire de recrutement des élèves, les parents sont contraints d'envoyer leurs enfants dans des établissements précis en fonction de leur lieu de résidence. Avec l'assouplissement de la carte scolaire, depuis 1984, les parents essaient d'inscrire leurs enfants

dans des établissements situés dans des quartiers considérés « de meilleure qualité » [Vasconcellos, 2001].

Puisque les établissements privés ne sont pas concernés par la carte scolaire, une famille peut choisir « la meilleure » école privée pour ses enfants sans aucune restriction de secteur. Les parents ont également une autre possibilité : assurer eux-mêmes l'instruction des enfants (l'instruction à la maison).

Comme l'enseignement public en France est obligatoire, gratuit et laïc, l'administration d'un secteur doit accueillir tous les élèves résidants dans ce secteur. Le Ministère de l'Education Nationale affirme que ces élèves sont prioritaires par rapport à ceux résidants en dehors du secteur et aux élèves qui demandent des dérogations.

2.4.2. La prévision d'élèves

Dans la prévision d'élèves à chaque rentrée scolaire, on analyse école par école et il existe deux prévisions : celle de l'Inspecteur de l'Education Nationale et celle du directeur de l'école lui-même. Les calculs de l'IEN sont basés sur la prévision démographique annuelle de la commune et la projection par âge scolarisable en prenant en compte la variation de la population déménagée et arrivante. Les directeurs d'école connaissent mieux l'évolution des élèves dans leur établissement. A part le nombre d'élèves de l'année actuelle, leur analyse inclut le nombre d'élèves qui vont déménager et le total des inscriptions. En pratique, l'IEN consulte aussi l'analyse du directeur d'école ainsi il n'y a pas (beaucoup) de différences entre les deux analyses. Au niveau du département, les données sont compilées et utilisées par l'Inspection Académique comme les bases de la partition des enseignants et du nombre de classes par commune.

Les périmètres scolaires jouent un rôle à l'intérieur de la prévision. Comme la projection d'élèves est mise en place école par école et chaque école correspond à son propre secteur défini par les périmètres scolaires, les calculs de l'IEN considèrent l'évolution de chaque secteur, les bâtiments construits par exemple. La commune ne prend pas en compte la préférence des parents d'élèves dans la prévision. Elle suppose que tous les enfants scolarisables dans un secteur vont aller à l'école publique dans ce secteur. S'il y a des différences à cause de la préférence des parents, cela est géré par la dérogation.

2.4.3. La zone d'éducation prioritaire

« A l'école primaire, il ne s'agit pas d'une inégalité des chances d'accès à l'école, mais d'une inégalité des parcours et des résultats scolaires qui est liée à l'origine sociale des enfants. Elle est indiquée par le fait que tous les élèves ne peuvent pas à acquérir au même rythme les savoirs et les savoir-faire demandés par l'institution » [INED, 1970 ; Isambert Jamati, 1984 ; Prost, 1986 ; Forquin, 1990]².

Mise en place en 1981, *« l'éducation prioritaire vise à corriger les effets des inégalités sociales, économiques et culturelles en renforçant l'action éducative là où l'échec scolaire est le plus élevé »* [MEN, 2008]. Cette politique scolaire délimite les zones géographiques, que l'on appelle les zones d'éducation prioritaires (ZEP), où l'Etat avec les autres acteurs éducatifs mettent en application un moyen d'enseignement spécifique pour assurer la réussite scolaire des élèves.

En 1997, sont nés les réseaux d'éducation prioritaire (REP). L'action éducative en fonction de la limitation territoriale des établissements scolaires évolue jusqu'à constituer des réseaux d'établissements. Les écoles dans l'éducation prioritaire sont liées à un collège de secteur même s'il ne correspond pas aux critères des ZEP. Cette liaison aide les établissements à partager leurs ressources pédagogiques et éducatives avec l'objectif de réduire l'échec scolaire [MEN, 2008].

Etape suivante des REP, les responsables de chaque réseau avec les autorités académiques ont signé des contrats de réussite scolaire à partir de 2003. Dans ces contrats, sont déterminés les objectifs pédagogiques du réseau ainsi que ses procédures et ses critères d'évaluation en tant qu'élément de l'éducation prioritaire. Ce sont aussi les responsables du réseau avec les partenaires concernés qui fixent la meilleure méthode d'éducation à appliquer pour le réseau afin d'obtenir ces objectifs.

Trois années après, en 2006, les contrats de réussite scolaire deviennent les réseaux ambition réussite (RAR) qui incluent les collèges ainsi que les écoles de leur secteur. Les deux établissements mettent en œuvre l'action pédagogique et les moyens renforcés par plus de personnels d'éducation et d'assistantes sociales, l'organisation simplifiée, la contractualisation, la mise en cohérence des actions engagées, l'accompagnement des équipes, les évaluations strictes, le développement de l'ambition et des pratiques pédagogiques mieux adaptées aux besoins [MEN, 2008].

² VASCONCELLOS Maria. *Le système éducatif*. 2001.

L'école primaire

3.1. Les rôles et les objectifs

L'école primaire est le fondement du système éducatif comme il a lieu partout dans le monde [Gauthier, 2006]. En France, l'école primaire est le premier degré de l'enseignement (entre 3 ans et 10 ans), suivi par le second degré aux collèges et lycée (entre 11 ans et 18 ans). Elle se compose de l'école maternelle et de l'école élémentaire dans laquelle l'instruction est obligatoire pour les enfants entre 6 ans et 16 ans.

« L'école a été considérée, dans tous les pays européens, comme un important moyen d'intégration. En France, elle est porteuse d'un projet politique et culturel : l'affirmation d'une pensée logique et rationnelle, d'une morale laïque visant à former un citoyen attaché à la patrie et à la République » [Prost, 1968 ; Raynaud et Thibaud, 1987]³. Elle n'est pas que le premier apprentissage de « lire, écrire et compter », mais ce dont on ne se rend pas assez compte, la première expérience de la vie en collectivité [Safra, 2003].

Dans *L'école primaire*, Safra [2003] explique que l'enseignement à l'école maternelle a l'objectif d'éveiller l'activité psychomotrice, sociale, et culturelle des petits enfants. Ensuite, les enfants commencent à découvrir l'écriture et la lecture à travers l'expression graphique et verbale. A l'étape suivante, l'école élémentaire, l'enseignement assure les apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, calcul) et l'acquisition de méthodes de travail, ainsi que le développement de la pensée logique.

3.2. L'organisation de la scolarité

Depuis septembre 1990, l'enseignement primaire se fixe de nouveaux objectifs avec son organisation par cycles d'apprentissage. L'école primaire est divisée en trois cycles (voir l'image 3.1) [Vancocelos, 2001] :

³ VASCONCELLOS Maria. *Le système éducatif*. 2001.

- Le cycle 1 ou cycle des apprentissages premiers à l'école maternelle : TPS, PS, MS et GS.
- Le cycle 2 ou cycle des apprentissages fondamentaux qui commence à la Grande Section de la maternelle et élémentaire continue durant les deux premières années de l'école élémentaire : CP et CE1.
- Le cycle 3 ou cycle des approfondissements qui se déroulent au cours des trois dernières années de l'école élémentaire : CE2, CM1 et CM2 et débouche sur le collège.

Image 3.1 Les cycles pédagogiques de l'école primaire

Age	Classe	Cycles	Etablissement
11	Sixième	Cycle 3	Collège
10	Cours moyen 2 (CM2)		Ecole élémentaire
9	Cours moyen 1 (CM1)		
8	Cours élémentaire niveau 2 (CE2)		
7	Cours élémentaire niveau 1 (CE1)		
6	Cours préparatoire (CP)		
5	Grand section	Cycle 1	Ecole maternelle
4	Moyenne section		
3	Petite section		

Source : Vasconcelos, 2001.

Cette nouvelle organisation, selon Vasconcelos [2001], a pour but principal la prise en compte des rythmes d'apprentissage individuels des enfants. Les cycles pédagogiques ne commencent pas et ne se terminent pas au même moment pour tous les élèves puisqu'ils tiennent compte de la progression individuelle de chacun.

3.3. L'organisation administrative

3.3.1. Le réseau

En 2006-2007, les effectifs totaux du premier degré des secteurs public et privé de France métropolitaine et des départements d'outre-mer (DOM) sont de 6.644.100 [DEPP, 2007]. Basé sur les chiffres de la rentrée scolaire 2007, l'académie de Lyon scolarise 324.406 élèves de premier degré, soit 4,88% du total national, et 56,08% des effectifs totaux de l'académie (181.931 élèves) sont dans le département du Rhône (voir le tableau 3.1).

La France compte 56.658 établissements scolaires du premier degré, dont 51.155 écoles maternelles ou élémentaires publiques (soit 90,34 % du total) et 5.473 écoles privées (9,66%) en 2007 [DEPP, 2007]. Environ 5% des élèves scolarisés en France le sont dans

l'académie de Lyon, soit 1 élève sur 20. L'académie de Lyon compte 40 jeunes de 2 à 16 ans par km², deux fois la densité moyenne nationale. Sur l'académie du Lyon, il existe 2.356 écoles publiques et privées [L'Académie de Lyon, 2008], soit 4,16% du total national.

Tableau 3.1 Le nombre d'élèves du premier degré à l'académie de Lyon (La rentrée 2007)

Ecole	Pre-élémentaire	Elémentaire	Spécialisé*	Total
Ain				
Total	24 765	40 155	302	65 222
Public	22 603	35 802	291	58 696
Privé Sous Contrat	2 162	4 323	11	6 496
Privé Hors Contrat	0	30	0	30
Loire				
Total	30 765	45 945	543	77 253
Public	24 410	35 369	496	60 275
Privé SC	6 335	10 486	47	16 868
Privé HC	20	90	0	110
Rhône				
Total	72 759	108 052	1 120	181 931
Public	61 721	87 551	1 003	150 275
Privé SC	10 598	20 071	117	30 786
Privé HC	440	430	0	870
Académie				
Total	128 289	194 152	1 965	324 406
Public	108 734	158 722	1 790	269 246
Privé SC	19 095	34 880	175	54 150
Privé HC	460	550	0	1 010

*) Enseignement spécial, initiation et adaptation

Source : Académie de Lyon, 2008

L'académie de Lyon est composée de trois départements (voir l'illustration 2.1) :

- l'Ain : 82 habitants/km² ;
- la Loire : 156 habitants/km² ;
- le Rhône : 464 habitants/km² [Académie de Lyon, 2008].

En raison de la densité de la population, l'académie de Lyon est très concentrée autour de l'agglomération lyonnaise. A la rentrée scolaire 2007, l'Inspection académique du Rhône elle-même gérait 1.092 écoles du premier degré qui consistent en [IA du Rhône, 2008] :

- 922 écoles publiques (84,43%), dont 348 écoles maternelles, 574 écoles primaires et élémentaires.
- 170 écoles privées (15,57%), dont 155 écoles maternelles et primaires privées et 15 établissements privés spécialisés.

Dans un contexte général, le nombre national moyen d'élèves par école en rentrée 2007 dans l'enseignement primaire est de 117 élèves/école. A l'académie de Lyon, ce nombre passe à 138 élèves/école et le département du Rhône montre un nombre moyen plus élevé, de 167 élèves/école.

3.3.2. L'école publique et l'école privée

La France est l'un des pays européens où l'enseignement primaire public occupe une large place : plus de 90% des établissements scolaires en 2007 [DEPP, 2007]. Cependant, l'Etat respecte la liberté de l'enseignement organisé par les autres institutions, sous son contrôle.

La loi Debré de 1959 a offert aux établissements privés le choix entre plusieurs possibilités [Durand-Prinborgne, 2003] :

- L'intégration au service public ;
- La passation d'un contrat simple avec l'Etat, possibilité limitée aux écoles primaires : elle permet la prise en charge par l'Etat des rémunérations des maîtres agrées ;
- La conclusion avec l'Etat d'un contrat d'association, seule possibilité pour l'enseignement secondaire ;
- Le choix de rester hors contrat.

Les écoles primaires publiques sont financées par l'Etat et les communes. Les enseignants sont payés par l'État, et le bâtiment ainsi que son entretien est pris en charge par la commune. Elles sont gratuites et laïques. Par ailleurs, certaines d'entre elles fournissent des classes d'intégration scolaire afin de scolariser tous les élèves et de permettre aux élèves handicapés de suivre totalement ou partiellement une classe ordinaire.

Comme pour les écoles publiques, les enseignants des écoles primaires privés sous contrat sont payés par l'État. Les familles d'élèves contribuent aussi à aider les écoles à acquérir des outils pédagogiques et à rémunérer les personnels non enseignants. Dans certains cas, l'école reçoit également une contribution de la collectivité locale selon le nombre d'élèves accueillis. La plupart de ces écoles sont confessionnel (les essentiellement catholique).

Les écoles privées hors contrat sont rares. Ce sont des écoles privées qui n'ont pas de relations juridiques avec l'État. Elles sont généralement payantes et souvent non confessionnelles. Certaines d'entre elles appliquent des méthodes pédagogiques innovantes. N'ayant aucune subvention, le coût de l'éducation est intégralement pris en charge par les parents d'élèves [MEN, 2008].

Les professeurs de l'enseignement privé peuvent être recrutés par l'Education Nationale et ensuite envoyés dans les établissements privés sous contrat avec l'Etat. Dans ce cas, les rémunérations et le déroulement de carrière sont similaires à ceux de l'enseignement public.

3.3.3. L'école ordinaire et l'école en RAR, RRS et DIF

Faisant suite à la discussion sur les zones d'éducation prioritaire dans la partie 2.4.3, cette partie traite de l'organisation des écoles englobées dans les ZEP, les écoles en RAR (les réseaux ambition réussite) et RRS (les réseaux réussite scolaire), et les écoles situées dans un environnement « difficile », l'école DIF.

*« Les ZEP est fondées sur une notion de 'discrimination positive' des publics les plus touchés par l'échec scolaire » [Vasconcellos, 2001]. Dans *Le système éducatif*, Vasconcellos explique que les établissements scolaires qui se trouvent dans une ZEP bénéficient, à l'intérieur du système éducatif, d'une priorité en matière de moyens d'encadrement (soutien, accompagnement, tutorat des enfants en difficultés scolaire, d'un recrutement favorisant la stabilité des personnels de façon à leur permettre d'engager des actions scolaires et extrascolaires innovantes.*

L'Inspection Académique gère les écoles de manière égale pour garantir l'équité parmi elles. Les écoles en RAR, RRS et DIF ont une population scolaire plus difficile que les autres écoles. Historiquement, Il y avait d'abord des créations d'écoles en REP (réseaux d'éducation prioritaire) qui englobait à la fois des écoles et des collèges dans le même secteur se trouvant dans les ZEP.

Les RAR sont le classement des écoles instauré en 2006. Les écoles en RAR ont la population scolaire la plus « difficile » des secteurs en REP selon le Responsable de la Division de l'Organisation Scolaire de l'IA du Rhône. Les RRS font aussi partie des REP. Ils englobent des écoles (et des collèges) avec une population scolaire moins « difficile » que les RAR. Comme les RAR, ils sont définis au niveau ministériel. Le DIF est un classement spécifique au département du Rhône. Les écoles en REP sont proposées au niveau local par l'Inspection Académique, mais pour faire intégrer un établissement dans le classement « en REP », il faut obtenir une décision ministérielle. Le Chef du Bureau Moyen Premier Degré souligne, *« Comme c'est une décision au niveau national, certains établissements proposés par le département avaient échappé du classement en REP. Au niveau du Rhône, l'Inspection Académique a décidé de faire un deuxième classement spécifique pour accorder un barème*

préférentiel à certaines écoles qui n'avaient pas le barème de l'école ordinaire, ni le barème de l'école en REP, mais qui est intermédiaire : l'école dans 'l'environnement difficile' (l'école DIF) ». Il existe 88 écoles en DIF contre 183 écoles en REP dans le Rhône.

Les projets d'application de cette politique sont entre autres l'amélioration de l'ambiance et la vie scolaire et la réduction des écarts entre les établissements : les établissements « ambition réussite » et les établissements « ordinaires » (hors ambition réussite). Les écoles dans ce classement obtiennent la priorité par rapport aux écoles ordinaires au niveau de [IA du Rhône, 2008] :

- Le taux d'encadrement plus élevé (plus de poste d'enseignant) ou la classe plus petite ;
- L'assistant pédagogique.

Un des exemples des moyens mis en œuvre est la distinction de la taille d'une classe pour les deux catégories d'établissement. L'Inspection Académique du Rhône met en application un double standard au niveau des taux d'encadrement pour les créations et les retraites de postes dans les écoles. Pour des écoles ordinaires, les taux sont de 31 élèves par classe maternelle et 26 élèves par classe élémentaire. Ils baissent pour les écoles en RAR et RRS : 25 élèves par classe maternelle et 24 élèves par classe élémentaire.

D'après le Responsable de la Division de l'Organisation Scolaire du Rhône, il y a une réflexion sur l'évolution des écoles en REP. L'idée est que depuis sa création en 1981, un quartier qui est rattaché aux ZEP évolue démographiquement. Il y a donc des communes qui continuent d'avoir plus de besoins que d'autres et au contraire, il y a aussi maintenant des communes avec des établissements qui ont la même caractéristique que les établissements « ordinaires ». Il existe trois types des établissements d'éducation prioritaire mis en place en 2006 [IA du Rhône] :

- les établissements EP1 : ils font partie des RAR, concentrent les plus grandes difficultés et disposent de moyens supplémentaires ;
- les établissements EP2 : ils se caractérisent par une plus grande mixité sociale et continuent à recevoir les mêmes aides qu'auparavant, les RRS y compris ;
- les établissements EP3 : ils sortiront progressivement du dispositif dans un délai de trois ans à partir de la décision si les conditions sont remplies. Les moyens seront adaptés en fonction du nombre d'élèves restant en difficulté.

Mais le planning de développement n'est pas effectivement mis en place dans le Rhône à l'heure actuelle.

Lyon et Vaulx-en-Velin : La commune centrale et la banlieue

4. 1. La population

Le Rhône est le 4^{ème} département français par son importance démographique. Il regroupe plus du quart de la population de la Région Rhône-Alpes qui comprend l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Département urbain par excellence, le Rhône présente [IA du Rhône, 2008] :

- une population jeune avec un rajeunissement qui se poursuit, notamment dans l'agglomération lyonnaise,
- une population étrangère importante,
- une population concentrée au niveau de la communauté urbaine⁴ de Lyon (en 2005, 73% de la population était concentrée dans les 57 communes du Grand Lyon).

Pour se faire une idée plus globale de la situation, il ne faut pas uniquement comparer les éléments statistiques de Lyon et de Vaulx-en-Velin, mais les autres grandes communes du département du Rhône (voir l'illustration 1.1). Les sept communes sont les communes les plus grandes du département au niveau démographique. Même si le total de la superficie des communes (149,13 km²) inclut seulement 4,6% de la superficie du Rhône, presque la moitié (49,6%) de la population du département habitent dans ces communes, 819.400 habitants du total 1.654.052 habitants [INSEE, 2005]. Comme Vaulx-en-Velin, les autres communes sont situées en banlieue de Lyon et englobées dans l'agglomération lyonnaise.

4.1.1. L'évolution démographique : Les communes « jeunes »

L'évolution de la population des communes depuis le recensement 1962 jusqu'aux enquêtes de recensement de 2005 est assez variée (voir le tableau 4.1 et le graphique 4.1).

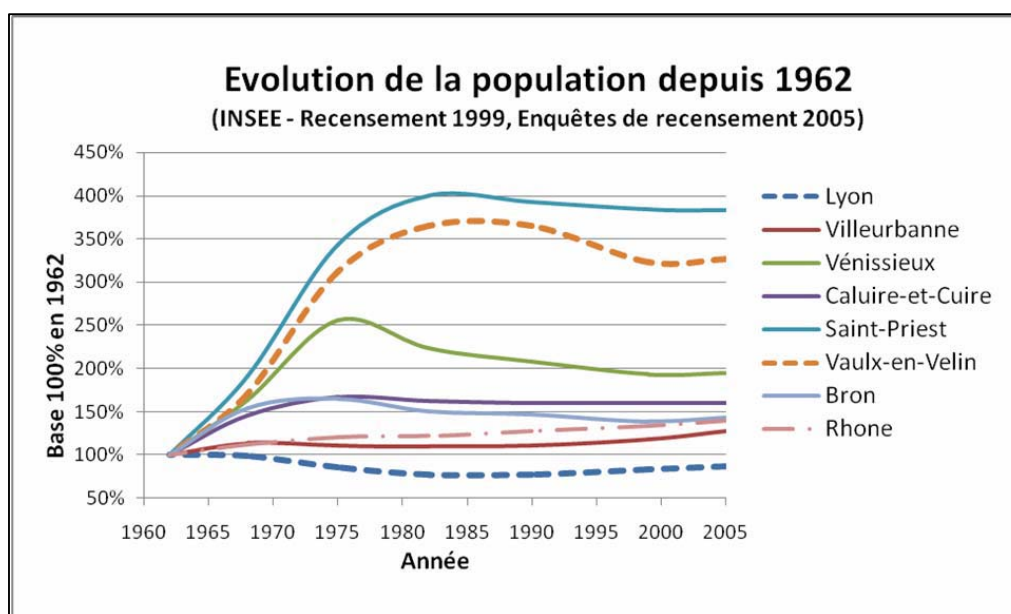
⁴ La communauté urbaine est un regroupement des plusieurs communes qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. Les communautés urbaines créées depuis la loi du 12 juillet 1999 doivent constituer un ensemble d'un seul tenant et sans enclave de plus de 500 000 habitants [INSEE, 2008].

Depuis 1999, la hausse démographique semble s'accélérer dans l'agglomération lyonnaise. La population des ménages y aurait progressé près de deux fois plus vite entre 1999 et 2005 qu'au cours de la période allant de 1990 à 1999 [Genay, 2008]. « *Le Rhône est resté largement attractive* », affirme Mossant [2005] qui explique que l'augmentation du nombre de ménages accroît la pression sur le parc immobilier, qui lentement se transforme : davantage de résidences principales, qui sont plus souvent des appartements que des maisons, mais aussi plus de pièces par logement.

Tableau 4.1 L'évolution de la population depuis 1962

Commune	Recensement						
	1962	1968	1975	1982	1990	1999	2005
Lyon	535 746	527 800	456 716	413 095	415 487	445 452	467 400
Villeurbanne	105 416	119 879	116 535	115 960	116 872	124 215	134 800
Vénissieux	29 040	47 613	74 347	64 804	60 444	56 061	56 700
Caluire-et-Cuire	25 754	37 603	43 041	41 931	41 311	41 233	41 300
Saint-Priest	10 681	20 419	36 734	42 677	41 876	40 974	40 900
Vaulx-en-Velin	12 118	20 726	37 866	44 160	44 174	39 154	39 600
Bron	26 959	41 619	44 563	40 638	39 683	37 369	38 700
Rhône	1 181 812	1 326 383	1 429 647	1 445 208	1 508 966	1 578 869	1 654 052

Source : INSEE – Recensement 1962-1999, Enquêtes de recensement 2005.



Graphique 4.1 Evolution de la population depuis 1962

En 2005, la totalité de ces sept communes ont connu une augmentation de leur population par rapport au recensement 1999, sauf la population de Saint-Priest qui a légèrement diminué, -0,2%. Depuis 1990, la population lyonnaise commence à augmenter

après une diminution de 1962 à 1982. Le nombre d'habitants de la commune centrale s'est accru de 4,9% entre 1999 et 2005. A Vaulx-en-Velin, il y avait une grande diminution de la population entre 1990 et 1999 à raison de -11,4%, mais de 1999 à 2005, le nombre d'habitants a augmenté de 1,1%. Au niveau départemental, le nombre d'habitants du Rhône connaît une hausse depuis 1962. Dès 1999 jusqu'à 2005, l'accroissement de la population rhodanienne est passé à 4,8%.

Lyon et ses banlieues restent des communes plutôt « jeunes » : les moins de 20 ans sont près de 40% plus nombreux que les 60 ans et plus. « *Le département du Rhône est plus attractive pour les 20-39 ans que pour les personnes à l'âge de la retraite qui sont traditionnellement attirées par le sud de la France* » [Mossant, 2005]. Genay [2008] indique que l'attractivité des communes pour les études et le premier emploi est montré par un flux migratoire positif pour les étudiants et élèves et pour les moins de 30 ans et souligne que « *Les habitants s'installent davantage dans l'agglomération lyonnaise, quelle que soit leur catégorie sociale* ».

Tableau 4.2 La densité de la population

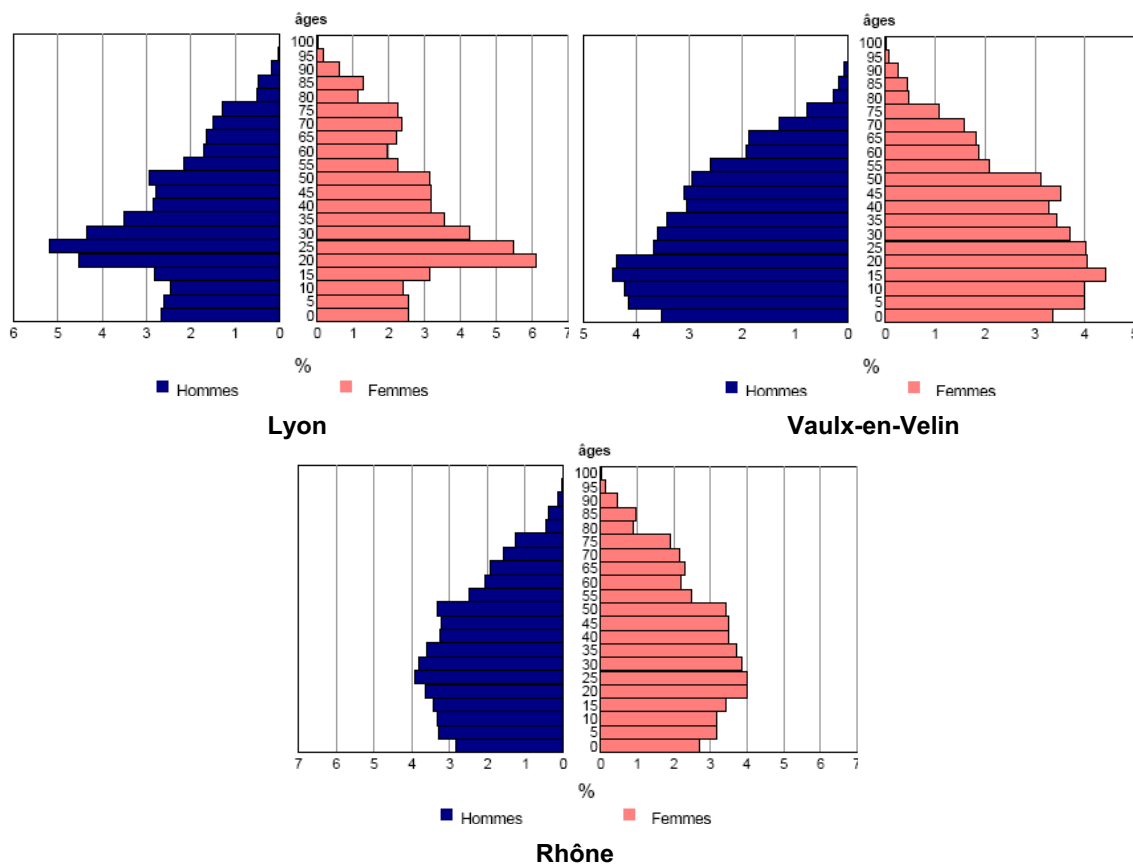
Commune	Superficie en km ²	Population Totale	Densité en hab./km ²	Population moins de 10 ans	
Lyon	47.87	445,452	9,305	46,084	10.35%
Villeurbanne	14.52	124,215	8,555	14,306	11.52%
Vénissieux	15.33	56,061	3,657	7,706	13.75%
Caluire-et-Cuire	10.45	41,233	3,946	4,553	11.04%
Saint-Priest	29.71	40,974	1,379	5,367	13.10%
Vaulx-en-Velin	20.95	39,154	1,869	5,866	14.98%
Bron	10.30	37,369	3,628	4,930	13.19%
Rhône	3,249.12	1,578,869	486	189,220	11.98%

Source : INSEE, Recensement 1999

« *Lyon correspond à la partie centrale du Rhône* » [Genay, 2008]. Sur les 293 communes que comprend le département, Lyon représente plus de 28% de la population rhodanienne (voir le tableau 4.2). La commune centrale et Villeurbanne ont la densité de la population la plus élevée du département. Lyon est 5 fois plus dense que Vaulx-en-Velin même si la densité de cette banlieue est 4 fois de la densité moyenne du département. Presque 15% de la population de Vaulx-en-Velin a moins de 10 ans, le taux le plus élevé parmi les sept communes. A Lyon, le pourcentage des moins de 10 ans est plus bas que celui du département, 10,35% contre 11,98%. Les pyramides des âges indiquent que Vaulx-en-Velin est plus « jeune » comparé à Lyon ou au Rhône (voir le graphique 4.2). En 1999, la

population des moins de 20 ans à Lyon et dans le Rhône est chacune passé à 21,2% et à 26,6%, lorsqu'à Vaulx-en-Velin, ce chiffre a atteint 32,0%.

Graphique 4.2 Pyramide des âges



Source : INSEE, Recensement 1999

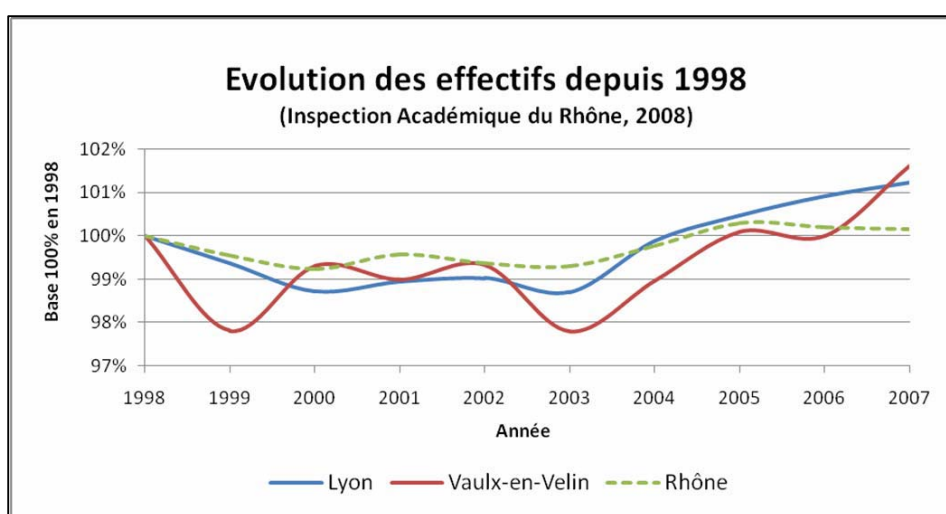
4.1.2. L'évolution des effectifs : l'école publique et l'école privée

Tableau 4.3 Evolution d'effectifs des écoles primaires depuis 1998

Rentrée	Lyon			Vaulx-en-Velin			Rhône		
	Public	Privé	Total	Public	Privé	Total	Public	Privé	Total
1998	32,681	9,950	42,631	5,407	0	5,407	148,649	31,888	180,537
1999	32,351	10,013	42,364	5,289	0	5,289	147,947	31,785	179,732
2000	31,873	10,216	42,089	5,369	0	5,369	147,068	32,096	179,164
2001	31,861	10,320	42,181	5,352	0	5,352	147,607	32,165	179,772
2002	31,896	10,319	42,215	5,371	0	5,371	147,472	31,916	179,388
2003	31,878	10,202	42,080	5,288	0	5,288	147,354	31,907	179,261
2004	32,360	10,221	42,581	5,351	0	5,351	148,324	31,801	180,125
2005	32,687	10,145	42,832	5,412	0	5,412	149,499	31,568	181,067
2006	32,782	10,241	43,023	5,407	0	5,407	149,270	31,640	180,910
2007	32,742	10,412	43,154	5,494	0	5,494	149,272	31,539	180,811

Source : Inspection Académique du Rhône, 2008

Au cours des dix dernières années, le nombre d'effectifs des écoles primaires à Rhône est stable voire connaît une légère augmentation : 0,02% par an. L'évolution des effectifs à Lyon est plus dynamique que dans le département mais elle est toute fois moins dynamique que celle de Vaulx-en-Velin (voir le tableau 4.3 et le graphique 4.7). L'augmentation moyenne des effectifs lyonnais par an est de 0,14% et le nombre des effectifs connaît une croissance régulière depuis 2003. Après une diminution à raison de -1,55% en 2002 et 2003, le nombre d'enfants scolarisés à Vaulx-en-Velin a tendance à augmenter plus vite qu'à Lyon et dans le département du Rhône : l'augmentation des effectifs de cette commune s'élève à 3,90% en 4 ans, de 2003 à 2007.



Graphique 4.3 Evolution des effectifs depuis 1998

Si l'on distingue entre l'école publique et l'école privée, l'évolution des effectifs montre des tendances différentes (voir le tableau 4.3 et le graphique 4.7). Au cours des dix dernières années, l'augmentation moyenne annuelle des effectifs des écoles publiques à Lyon (0,02%) est plus basse que dans le Rhône (0,05%) et qu'à Vaulx-en-Velin (0,19%, qui montre également le total d'effectifs car il n'existe pas d'école primaire privée dans cette commune). Mais, la progression du nombre d'effectifs des écoles privées montre une autre tendance : à Lyon, le nombre des enfants scolarisés augmente plus vite dans les structures privés (0,51% par an) par rapport aux établissements publics (0,02%) alors que dans le département, le chiffre tend à diminuer (-0,12% par an).

4.1.3. La socio économie : Logement, chômage, niveau de vie

La réduction du nombre moyen de personnes par ménage accroît la demande en logements. « En 1999, la portion des résidences principales (88,8%) dans le total des

logements augmente plus vite dans le département du Rhône au détriment des autres catégories de logements : résidences secondaires (2,0%), logements occasionnels (1,2%) ou vacants (8,1%) » [Mossant, 2005].

« Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par le ménage » [INSEE, 2008]. D'après le dernier recensement de 1999, le nombre moyen d'occupants des résidences principales dans le Rhône est de 2,4 personnes par logement (voir le tableau 4.4). A Lyon, en moyenne, chaque résidence principale est habitée par 2 personnes, taux le plus bas des sept communes. A Vaulx-en-Velin, une moyenne de presque 3 personnes habitent dans le même logement, nombre le plus élevé parmi les communes considérées.

Tableau 4.4 Résidences principales : Le nombre d'occupants et le statut d'occupation

Commune	Rés. princ.	Nbre d'occupants	Nbre moyens d'occupants	Nb rés. princ. stat. propriétaire		Nb rés. princ. stat. locataire (y compris HLM)		Nb rés. princ. stat. loué vide HLM		Nb rés. princ. stat. logé gratuit	
Lyon	216,275	430,903	1.99	68,103	31.51%	140,298	64.91%	39,071	18.08%	7,756	3.59%
Villeurbanne	55,166	118,977	2.16	20,742	37.62%	32,622	59.17%	12,867	23.34%	1,772	3.21%
Vénissieux	20,691	54,561	2.64	7,114	34.39%	13,113	63.39%	10,252	49.56%	459	2.22%
Caluire-et-Cuire	17,933	40,485	2.26	9,212	51.46%	8,147	45.51%	2,776	15.51%	544	3.04%
Saint-Priest	14,849	40,398	2.72	7,088	47.80%	7,391	49.84%	4,931	33.25%	350	2.36%
Vaulx-en-Velin	13,194	38,319	2.90	4,402	33.32%	8,512	64.42%	6,700	50.71%	299	2.26%
Bron	14,986	36,168	2.41	6,848	45.76%	7,295	48.75%	4,169	27.86%	821	5.49%
Rhône	647,190	1,537,775	2.38	299,213	46.27%	324,140	50.13%	128,283	19.84%	23,266	3.60%

Source : INSEE, Recensement 1999.

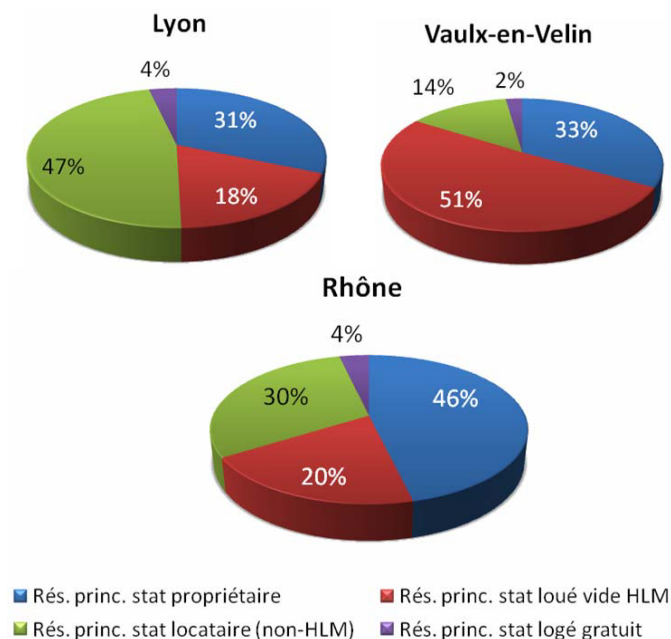
Selon l'INSEE, le statut d'occupation des résidences principales se compose de :

- Le statut de propriétaire du logement, incluant les différentes formes d'accès à la propriété ;
- Le statut de locataire ou sous-locataire, concerne les locations de logements loués vides ou meublés ainsi que les chambres d'hôtel, quand il s'agit de la résidence principale de l'individu ou du ménage ;
- Les personnes logées gratuitement sont, par exemple, des personnes logées chez leurs parents, des amis ou leur employeur.

Une des parties des résidences principales sous-locataires est l'HLM. « *Habitation à loyer modéré, qui constituent la principale forme de logement social en France, construits avec l'aide de l'Etat et de diverses collectivités* » [Merlin et Choay, 1988]. Ils expliquent dans le *Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement* que les logements construits en HLM ont trois caractéristiques communes :

- Ils sont destinés à des ménages, considérés comme éligibles d'un point de vue social, qui doivent justifier de conditions d'occupation et de ressources maximales ;
- Ils respectent des normes de surface, de prix de revient et d'équipement ;
- Les loyers, ou les annuités de remboursement, sont limités.

Graphique 4.4 Résidences principales selon le statut d'occupation



Source : INSEE, Recensement 1999

Le statut d'occupation des logements peut illustrer la situation des ménages. Il y a ainsi égalité entre le nombre de résidences principales et le nombre de ménages [INSEE, 2008]. La proportion des résidences principales à la propriété, soit à Lyon (31%) soit à Vaulx-en-Velin (33%), est plus basse que celle au niveau du département (46%) (voir le graphique 4.4). Vaulx-en-Velin est marquée par une grande proportion des logements sociaux : plus de la moitié (51%) des résidences principales dans la commune sont les HLM, taux le plus élevé parmi les sept communes. Au contraire, Lyon a le pourcentage le moins élevé de logements sociaux d'entre elles avec seulement 18% des résidences principales.

Au niveau de la population active, Lyon, qui dénombre 47,10% des actifs, est la commune la plus « active » par rapport aux sept communes (voir le tableau 4.5). Avec 42,02% de la population active, Vaulx-en-Velin a la portion des actifs la plus basse, inférieure au niveau du Rhône (46,21%). Dans cette commune, presque un actif sur quatre (23,41%) est chômeur, ce taux de chômage le plus élevé parmi les communes, et représente presque plus de double de celui du département (11,40%).

Tableau 4.5 Population active et niveau de vie

Commune	Population active	Portion de la pop.active du total	Actifs ayant un emploi		Chômage		Revenu/UC
Lyon	209,826	47,10%	183,490	87.45%	26,336	12.55%	18,570 €
Villeurbanne	57,144	46,00%	48,657	85.15%	8,487	14.85%	15,719 €
Vénissieux	24,436	43,59%	19,657	80.44%	4,779	19.56%	12,308 €
Caluire-et-Cuire	18,997	46,07%	17,241	90.76%	1,756	9.24%	20,597 €
Saint-Priest	18,936	46,21%	16,449	86.87%	2,487	13.13%	15,396 €
Vaulx-en-Velin	16,452	42,02%	12,600	76.59%	3,852	23.41%	10,339 €
Bron	16,179	43,30%	13,835	85.51%	2,344	14.49%	16,120 €
Rhône	729,623	46,21%	644,257	88.30%	83,177	11.40%	17,611 €

La population active comprend les actifs ayant un emploi, les chômeurs et les militaires du contingent.

Source : INSEE, Recensement 1999

Selon la définition de l'INSEE, le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un même ménage. « *Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1,0 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans* » [INSEE, 2008].

Avec un revenu annuel par UC égal à 18.570 €, le niveau de vie à Lyon est le plus élevé parmi les autres grandes communes du Rhône après Caluire-et-Cuire (voir le tableau 4.5). A Vaulx-en-Velin, le revenu disponible du ménage est égal à 10.339 € par UC c'est à dire moins de 60% de celui du Rhône (17.611 €) et seulement 56% du niveau de vie à Lyon.

4.1.4. La socio culturelle : Situation et origine de ménages

Selon la définition de l'INSEE [2008], « *Un ménage (ou 'ménage ordinaire'), au sens de l'enquête de recensement, désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Les personnes vivant dans des habitations mobiles ou résidant en collectivité (maisons de retraite, résidences universitaires...) sont considérées comme vivant 'hors ménages ordinaires'* ».

La diminution du nombre moyen de personnes par ménage, tendance déjà ancienne, se poursuit jusqu'en 2004 dans le Rhône [Mossant, 2005]. En moyenne, il y a dans le département 2,4 personnes par ménage. Le taux à Vaulx-en-Velin est le plus élevé parmi les sept communes, presque 3 personnes par ménage, contre 2 personnes par ménage à Lyon.

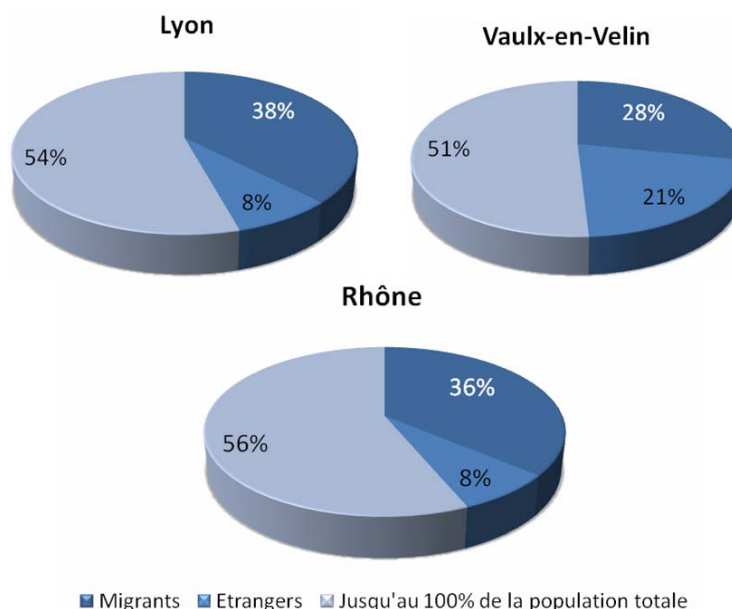
Dans le Rhône, 112.249 habitants, ou 7,30% de la population totale, sont des personnes constituant des familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans (voir le tableau 4.6). « Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant) » [INSEE, 2008]. Ce taux est un peu plus élevé à Lyon où 7,95% des habitants viennent de familles monoparentales. Parmi les grandes communes du Rhône, le taux le plus élevé est à Vaulx-en-Velin avec 11,09% de la population totale de la commune.

Tableau 4.6 Situation et origine de ménages

Commune	Nb personnes par ménage	Population totale	Nb personnes des fam. monoparental enfant moins 25 ans		Migrants		Etrangers	
Lyon	1.99	445,452	34,235	7.95%	168,108	37.74%	35,583	7.99%
Villeurbanne	2.16	124,215	10,425	8.77%	46,751	37.64%	13,202	10.63%
Vénissieux	2.64	56,061	5,684	10.43%	15,025	26.80%	8,095	14.44%
Caluire-et-Cuire	2.26	41,233	2,912	7.19%	15,037	36.47%	1,965	4.77%
Saint-Priest	2.72	40,974	3,556	8.81%	10,667	26.03%	4,829	11.79%
Vaulx-en-Velin	2.90	39,154	4,256	11.09%	11,081	28.30%	8,144	20.80%
Bron	2.42	37,369	2,896	8.01%	13,174	35.25%	4,996	13.37%
Rhône	2.38	1,578,869	112,249	7.30%	570,973	36.16%	118,954	7.53%

Source : INSEE, Recensement 1999

Graphique 4.5 Origine des habitants



Source : INSEE, Recensement 1999

Avec 118.954 étrangers (7,5% des habitants), le département du Rhône montre une population étrangère importante par rapport au niveau national où 5,6% de la population est

d'origine étrangère [INSEE, 1999]. A Lyon, le taux est plus élevé : presque 8% des habitants sont étrangers et l'autre grande proportion de la population (38%) est constituée d'immigrants (voir le graphique 4.5). Parmi les sept grandes villes du Rhône, Vaulx-en-Velin est la commune le plus « diverse » : un cinquième des résidents de la ville sont étrangers. Toutefois, la proportion d'immigrés (28%) est plus basse que celle de Lyon et du département.

4.2. Les écoles des communes

Tableau 4.7 Etablissements publics d'enseignement primaire

	Ecoles Ordinaires	Ecoles en REP		Ecoles DIF	Total
		RAR	RRS		
Maternelles					
Lyon	59	5	15	9	88
Vaulx-en-Velin	0	10	7	0	17
Rhône	220	25	59	44	348
Primaires					
Lyon	14	1	4	1	20
Vaulx-en-Velin	0	0	1	0	1
Rhône	225	8	16	7	256
Elémentaires					
Lyon	45	4	12	7	68
Vaulx-en-Velin	0	8	6	0	14
Rhône	206	21	54	37	318
Total					
Lyon	118	10	31	17	176
Vaulx-en-Velin	0	18	14	0	32
Rhône	651	54	129	88	922

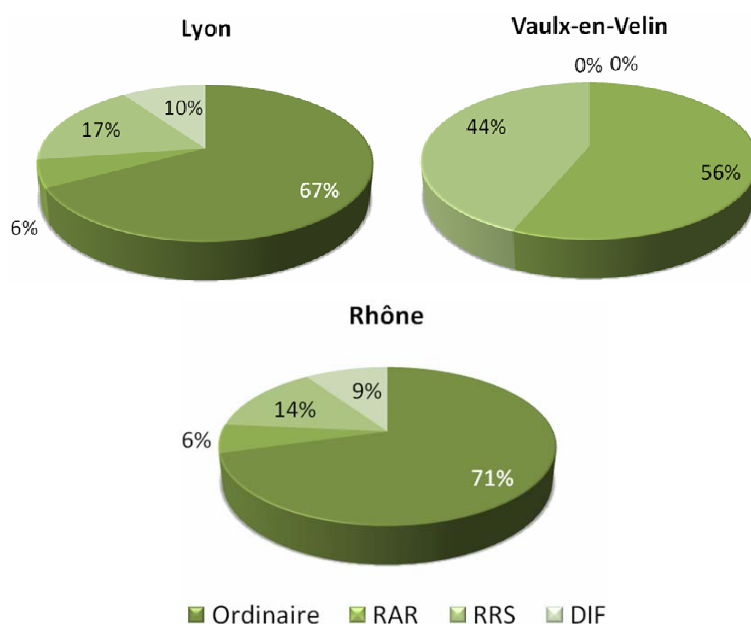
Source : Inspection Académique du Rhône, 2008

Dans la gestion des établissements scolaires à la commune et à l'Inspection Académique, la définition d'une « école » correspond à une gestion (un directeur d'école), pas un établissement. En d'autres termes, un établissement peut se composer d'une école ou plus et une école peut consister de quelques établissements. Une école primaire dans le tableau ci-dessus correspond à un groupe scolaire qui se compose d'une école maternelle et école élémentaire de la même gestion.

Sur les 922 établissements publics d'enseignement primaire du département, 651 écoles ou 71% sont des écoles ordinaires (voir le tableau 4.7 et le graphique 4.6). Les autres 29% des écoles primaires publiques sont placées dans la catégorie « difficile » dans le Rhône, à savoir soit des écoles en REP (réseaux éducation prioritaire) (20%) soit des écoles DIF (dans l'environnement « difficile ») (9%). A Lyon, la commune centrale du département, la

proportion des écoles se trouve dans un quartier « difficile » est plus élevée que dans le Rhône, 33% des 176 écoles primaires publiques au total. 23% des écoles publiques à Lyon sont classées en REP au niveau national et les autres 10% sont classées « difficile » au niveau départemental. Toutes les écoles primaires publiques à Vaulx-en-Velin sont considérées dans un quartier « difficile » au niveau ministériel. De la même manière, les plupart d’entre eux (56%) sont catégorisées des écoles en RAR (réseaux ambition réussite) qui, d’après l’Inspection Académique, ont la population scolaire la plus « difficile » parmi les secteurs en REP.

Graphique 4.6 Etablissements publics d’enseignement primaire



Source : Inspection Académique du Rhône, 2008

4.2.1. Les écoles de Lyon : Grand standard, grand choix

Le grand standard d’établissement scolaire

A l’instar des autres communes, l’objectif lyonnais pour les écoles est aussi d’ouvrir les écoles sur le quartier. L’école n’est pas seulement un lieu où les enfants apprennent, mais elle est aussi un lieu ouvert hors du temps scolaire, par exemple pour un centre de loisirs et les activités associatives qui créent des liens sociaux. « *La mairie pense que l’intervention dans l’école facilite les citoyennetés entre les enfants et aussi les adultes pour contribuer une société plus solidaire* », selon le Directeur de l’Education de Lyon.

Ce qui distingue Lyon de certaines communes est que lorsque la ville construit une école, elle ne construit pas que des salles de classe et un restaurant scolaire. Mais chaque école lyonnaise comporte aussi un gymnase, une salle informatique, une bibliothèque, un dortoir pour les petits enfants, un lieu pour les parents. Le Responsable du service de travaux de la DE de Lyon, « *ces équipements sont facultatifs selon le standard d'établissement scolaire et ce n'est pas forcément que toutes les villes font ça* ». La possibilité de le faire dépend aussi des capacités financières de la commune.

Par rapport aux écoles en REP, la Duchère, quartier situé au nord-ouest de la ville, est le seul territoire de Lyon où 10 écoles dans le quartier sont classées en RAR (6% du total des écoles publiques). Il existe quatre quartiers en RRS à Lyon : Vaise, les Pentès de la Croix Rousses, Etats-Unis et Mermoz. Les 4 quartiers se composent de 31 écoles en RRS (17% du total).

Le grand choix des écoles privées

L'accès aux écoles privées est très ouvert à Lyon. Lyon est une ville où il y a beaucoup des établissements privés : 40 écoles privées parmi 176 écoles publiques (18,5% du total des écoles primaires). De plus, d'après le Directeur de l'Education, « *même si les écoles privées sont payantes, leur coût n'est pas vraiment un obstacle pour y envoyer des enfants car c'est une obligation pour la ville de donner de l'argent aux écoles privées en fonction du nombre d'enfants de Lyon qui sont scolarisés à chaque établissement. Mais il existe aussi les établissements privés qui sont absolument chers* ».

A la rentrée scolaire de 2007, on a dénombré 10.412 inscrits dans l'enseignement privé, dont environ 25% résidaient en dehors de Lyon (dans les communes voisines, pour la plupart). Par conséquent, presque 20% des enfants résident à Lyon, soit 7.809 élèves, sont scolarisés dans le privé. Cette tendance est assez stable et connaît même une légère augmentation depuis les 10 dernières années (0,51% par an).

En fonction des villes, la situation est très différente. Il y a de ville où il n'y a pas d'écoles privées, comme à Vaulx-en-Velin, mais dans d'autres, l'école privée est aussi importante que l'école publique. Selon le Directeur de l'Education de Lyon, « *c'est la histoire de la France, il y a de région où le catholicisme avait beaucoup d'importance, comme à Lyon, mais à Grenoble, les écoles privées sont très peu développées et à Marseille, il n'y en a près que pas...* ».

4.2.2. Les écoles de Vaulx-en-Velin : Ecoles des REP...

Si certains parents essaient de distinguer les écoles dans les quartiers « difficiles » des écoles ordinaires, que se passe-t-il dans le cas où toutes les écoles primaires de la commune où ils habitent sont classifiées au niveau national comme des écoles en REP et qu'il n'y a aucune école privée ? Vaulx-en-Velin est un des exemples. Les 32 écoles primaires de la commune sont toutes des écoles en REP (voir le tableau 4.7 et le graphique 4.6). Le taux est beaucoup plus élevé par rapport au niveau du Rhône où les écoles en REP constituent seulement 20% des écoles publiques.

L'écart dans les REP

Si certains parents ont peut-être parfois tendance à différencier les écoles ordinaires des écoles en REP, qu'en est-il de l'approche de la question scolaire à Vaulx-en-Velin ? La volonté de la ville est de traiter toutes les écoles à égalité. Mais la mairie trouve effectivement qu'il y a beaucoup de demandes de dérogation pour les écoles du quartier Vaulx-en-Velin Village. Le même phénomène apparaît aussi à l'école Mistral au centre ville (la seconde école la plus vieille de la commune, édifiée entre 1932 et 1934). Mais d'après la Directrice de l'Education, « *ça ne se pose pas beaucoup des problèmes, car jusqu'à présent les écoles à Vaulx-en-Velin sont dans la capacité d'absorber les demandes de dérogation* ».

Quand les parents demandent une dérogation, ils la justifient souvent pour des raisons du garde d'enfants, soit par le système familiale soit par une nourrice qui se trouve proche d'une école. Mais, il faut savoir que pour qu'une dérogation soit acceptée il faut que les parents trouvent une excuse valable. Dans les faits, la dérogation est aussi demandée pour une question de représentation (positive ou négative) des écoles. Certains parents pensent qu'une école est mieux que l'école dans le périmètre où ils habitent. Le Responsable de la politique de l'Education affirme, « *C'est une erreur. Les écoles de Vaulx-en-Velin, toutes ont la même qualité au niveau de l'accueil et des traitements des enfants. Même si certaines écoles ont vieilles, nécessitent vraiment des gros travaux, mais ce qui se passe dans les écoles, il y a des bonnes équipes au niveau des personnels enseignants et des personnels municipales pour que les enfants soient bien traités* ».

La différence de réputation

Alors, pourquoi les écoles d'un quartier, le Village par exemple, sont-elles considérées comme mieux que les autres ? La Directrice de l'Education de la ville explique que pendant longtemps, le Village a été un endroit privilégié et le plus ancien du Vaulx-en-Velin. La

première ville de Vaulx-en-Velin était le Village, avant la création des ZUP⁵ et puis après la construction du centre ville qui est plus récente. D'après elle, « *il y a d'esprit du Village qui demeure... Dans l'esprit des gens, les enfants sont plus 'protégés' du fait que c'est encore un petit village, il n'est pas noyé dans la masse d'une ZUP* ».

Dans Village et le centre ville, la population n'est pas tout à fait la même et elle est en train de se transformer à cause des nouvelles constructions. Si l'on prend en compte la construction des logements sociaux et les accessions à la propriété dans ces quartiers, on remarque que la population est également en train de se mélanger. En revanche, dans les ZUP, il y a uniquement des logements sociaux. La Directrice indique, « *La mixité sociale est mal appliquée dans les écoles de ces zones par rapport aux écoles du Village ou du centre ville. Certaines familles n'ont pas envie que leur enfant soit scolarisé avec des enfants de parents qui habitent dans la ZUP. C'est vrai que globalement, dans la commune, il y a des familles qui ont des grosses difficultés sociales et familiales à cause du chômage, de la précarité de l'emploi...* »

4.3. Les Réseaux Education Prioritaires : Une discrimination positive ?

La discrimination selon l'Inspection Académique et la commune

Les écoles en REP ou DIF sont les écoles où l'Inspection Académique et la mairie concentrent le plus de moyens en l'heure d'enseignement et en faisant appel à un coordinateur pédagogique. « *L'importance des REP est de permettre aux enseignants de l'Education Nationale de travailler avec d'autres partenaires, qui n'ont pas la fonction d'enseignant, dans des écoles* », explique le Directeur de l'Education de Lyon. Il y a aussi un coordinateur REP qui s'occupe des réseaux à temps plein et est donc capables, selon lui, d'animer le partenariat entre les écoles et la commune et de motiver ses collègues enseignants.

⁵ Les zones à urbaniser par priorité (ZUP), créées par un décret du 31 décembre 1958, et aujourd'hui disparues (la dernière a été créée en 1969), ont constitué les antécédents directs des zones d'aménagement concerté (ZAC), dont le régime a voulu réagir contre les principales critiques que leur expérience avait suscitées.

Les constructions furent en majorité des immeubles de grande hauteur, « tours » ou « barres » desservies par des équipements collectifs, de superstructure et d'infrastructure. Quantitativement, les résultats obtenus en vingt ans ne sont pas négligeables : 803.000 logements dans 195 ZUP en France, uniquement destinées à la construction d'habitation nouvelles et en général à la périphérie du tissu urbain existant [Merlin et Choay, 1988].

Le domicile des parents conditionne l'école des enfants. D'après le Responsable de la Division de l'Organisation Scolaire de l'IA du Rhône, lorsque les parents savent qu'il y a une école attribuée à leur enfant en fonction du secteur de leur domicile, ils ne se posent pas la question de savoir si l'école (et le secteur où ils sont domiciliés) est catégorisée « difficile » par l'Etat, en général. Comme l'Etat et la commune gèrent les écoles de manière égale, on ne peut pas (vraiment) distinguer le statut de chaque école. Donc, la variation de statut entre les écoles est plutôt une définition administrative, au niveau de l'académie, qu'un statut familial pour les habitants. En plus, Le Chef du Bureau Moyen Premier Degré de l'IA marque, « *Basé sur la performance des écoles, le taux d'échec scolaire, ce n'est pas vrai que les écoles en RAR, RRS ou DIF sont moins bonnes que les écoles ordinaires* ». Même si les parents choisissent de ne pas scolariser leur enfant dans une école de leur secteur, ce choix est basé sur leur propre avis sur une école ou un quartier « difficile ». « *C'est vrai il y a des familles qui choisissent la dérogation ou même l'école privée pour éviter ce type de quartier...* », affirme elle.

Point de vue des parents

Les parents choisissent l'école en essayant de trouver le meilleur établissement pour leur enfant, mais en France il y a le système de la carte scolaire. Le Responsable du Service Travaux de la Direction de l'Education de Lyon dit, « *Les familles le plus aisées ou le plus culturellement avancées choisissent la meilleure école, mais les autres vont à l'école du quartier* ». Selon le Directeur de l'Education, les écoles de Lyon ont globalement une bonne réputation, même s'il y a une ségrégation scolaire, elle commence au collège. Il ajoute, « *Par rapport aux périmètres scolaires, les parents fonctionnent dans le système scolaire de la commune, donc le statut des écoles n'influence pas beaucoup la préférence des parents* ». A Vaulx-en-Velin, où il n'y a que des écoles en REP, cela ne veut pas dire que les parents ne choisissent pas. Même si le pourcentage n'est pas si élevé que celui de Lyon, indiqué par la dérogation scolaire, certains parents sélectionnent une école d'un « meilleur » quartier. Alors pour eux, ce n'est pas une question du statut « ordinaire » ou « en difficulté » d'une école qui influence leur choix, mais plutôt la représentation d'un quartier à leur propre avis.

Mais, il existe également les parents qui n'ont pas le choix de scolariser leur enfant à une école en REP même s'ils ne résident pas dans un quartier « difficile », par exemple les familles qui habitent au (ou près du) quartier des Etats-Unis (Lyon 8^{ème}) où la plupart des écoles sont des écoles en RRS. Le périmètre scolaire ne correspond pas au périmètre des zones d'éducation prioritaire parce que le responsable des politiques de la ville ne tient pas en

compte les ZEP pour déterminer les périmètres scolaires. Une ZEP se compose de quelques écoles publiques et chaque école a son propre périmètre qui dépasse le périmètre de la zone. Même si à Lyon quelques périmètres scolaires regroupent un groupe scolaire et une école maternelle, il n'y a pas de mélange entre une école ordinaire et une école en REP dans le même périmètre. Donc, il y a des enfants qui doivent aller à une école en REP même s'ils n'habitent pas dans un quartier « difficile » parce qu'il n'y a pas l'autre école publique rattachée au secteur de leur domicile.

4.4. Les écoles privées : Le choix

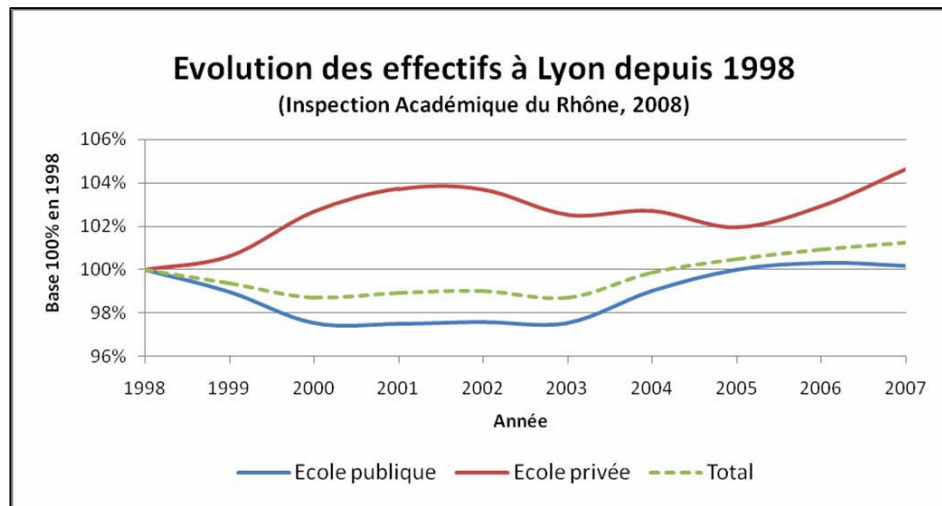
En France, l'enseignement primaire public occupe une large place : plus de 90% des établissements scolaires en 2007 [DEPP, 2007] ; il est gratuit et laïque. Pour quelle raison les parents choisissent-ils une école privée ?

Le Responsable de la Division de l'Organisation Scolaire de l'IA du Rhône explique qu'historiquement, la plupart des écoles privées sont rattachés à la religion catholique, à l'église. Comme ce qui se passe notamment dans l'ouest de la France, les parents veulent que leurs enfants accèdent à plus d'éducation religieuse à l'école, et ils choisissent donc de les envoyer dans des écoles privées puisque les écoles publiques sont laïques. A Lyon, il dit, « *il y a aussi beaucoup d'écoles privées qui sont rattachées à l'église étant donné que Lyon est une des communes où le catholicisme a eu un rôle important dans l'histoire* ».

« *La préférence des parents d'élèves pour les écoles privées peut être expliquée du point de vue culturel et social* », affirme l'un des responsables à l'IA. D'après lui, la raison de la religion est le premier motif des parents à choisir un établissement privé ; soit une école catholique, juive ou une école musulmane, même s'elles ne sont pas nombreuses. Du point de vue social, parfois les parents ne souhaitent pas que leur enfant soit scolarisé dans un quartier considéré « difficile » rattaché à leur domicile. Comme dernière alternative après la dérogation, ils scolarisent leur enfant dans une école privé de leur choix. En plus, grâce à la contribution de l'Etat dans la rémunération des enseignants, envoyer les enfants à une école privée ne coûte pas très cher, donc cette solution est largement ouverte aux familles.

Dans le cas de Lyon, la commune essaie de créer « des écoles de quartier », c'est-à-dire des écoles faites pour tous les enfants du quartier, mais cela ne marche pas tout à fait comme ca... La mairie essaie de faire en sorte que l'école publique soit pour tout le monde

mais d'après le Responsable du Service Travaux de la Direction de l'Education, il y a des gens qui ne veulent pas aller à l'école publique, même à Lyon où les écoles publiques sont considérées « bonnes ». Elle marque, « *Certains parents pensent que l'école publique n'est pas assez bien pour leurs enfants car ils vont rencontrer des étrangers, ils vont avoir des pauvres avec eux, des gens qui sont culturellement défavorisés...* ».



Graphique 4.7 Evolution des effectifs a Lyon depuis 1998

Même s'il y avait seulement 20% des élèves lyonnais scolarisés dans les établissements privées à la rentrée scolaire 2007, la croissance du nombre d'inscrits est plus élevée que celui des écoles publiques (voir le graphique 4.7). Au cours des dix dernières années, il y avait plus d'enfants dans le privé par rapport à 1998, même depuis 2005, et le chiffre ne cesse d'augmenter (2,63% en 2 ans). Dans les écoles publiques, de 1999 jusqu'à 2005, le nombre d'effectifs est inférieur par rapport à 1998. Mais entre 2003 et 2006, il y a eu une augmentation du nombre d'élèves et puis en 2007, le nombre d'enfants scolarisés dans le public a légèrement diminué (-1,0% par rapport à l'année précédente).

4.5. Le projet éducatif local

Lyon : Le Projet éducatif de Lyon

En dehors du fonctionnement des écoles, la commune s'implique de plus en plus dans l'éducation des écoles aux côtés de l'Education Nationale. Et d'après le Directeur de l'Education, « *la mise en application du Projet éducatif de Lyon place l'enfant au cœur de*

cette démarche ». Les besoins des enfants et des familles évoluent, donc petit à petit il n'y a pas seulement les temps scolaires que les services municipaux doivent gérer. A cause de leur besoin, des familles demandent des services pour leur enfant à partir de 7h30 jusqu'à 17h45 pendant les journées scolaires. Hors des temps scolaires formels, 24 heures par semaine, c'est la commune qui s'occupe des élèves le reste du temps : 1 heure le matin, 2 heures à midi, 1,5 heures le soir et 6 heures le mercredi. Ainsi, au cours d'une semaine, certains enfants passent autant de temps avec les enseignants de l'Etat qu'avec des agents payés par la commune.

C'est pourquoi, la question éducative se pose pour tout le monde : les enseignants et la ville. Le Directeur ajoute, « *Ce qui concerne la mairie est la mise en oeuvre de la cohérence éducative : d'un côté, elle accompagne les enfants dans la réussite scolaire, parce que l'objectif est que tous les enfants réussissent, et d'un autre côté, elle répond aux besoins de garde, de repas, de services, et de loisirs pour tous les enfants à Lyon.* »

Vaulx-en-Velin : Le Projet éducatif global

Au niveau municipal, il y a une volonté politique affirmée de ce que l'éducation doit être un axe prioritaire de la politique de la ville. Et même s'il y a de diminution du total du budget, selon la Directrice de l'Education, l'éducation reste le budget le plus conséquent de la ville. A Vaulx-en-Velin, la mairie a un document référence pour tous les services qui travaillent dans le domaine de l'éducation, le Projet Educatif Global.

« *Le PEG fixe la priorité en matière de l'éducation avec les valeurs éducatives. Et puis, dans chaque service, on décline cela au projet de service et au projet d'équipement* », explique la Directrice. Les valeurs éducatives du PEG de Vaulx-en-Velin incluent l'émancipation, le vivre ensemble, la solidarité comme valeur collective, la reconnaissance du rôle des parents et le partage du travail éducatif, ainsi qu'une confiance mutuelle.

4.6. L'école, le quartier et la commune

Les rôles de l'école

En plus d'être un lieu pédagogique, « *l'école primaire est également un lieu social et civil* », le Chef du Bureau Moyen Premier Degré à l'IA du Rhône l'affirme. Selon elle, l'école est fédératrice de l'association des parents parce que elle est d'abord un lieu de rencontre, de discussions, un lieu d'échange pour les parents sur des sujets qui ne concernent pas forcément l'école. Elle est également le lieu d'animation parce qu'il y a des activités sportives et

artistiques pour les enfants du quartier. Du fait que l'école est un local appartenant à la mairie, ce local peut servir à d'autres choses que l'éducation. Par exemple en période d'élections, l'école devient aussi un bureau de vote dans certains locaux. Même certaines écoles sont équipées par un centre de loisirs et une bibliothèque municipale.

Le temps scolaire à l'école est 24 heures par semaine et durant une partie de l'année seulement en raison du nombre de vacances. Donc, hors des périodes scolaires, l'école à Lyon accueille les associations et les activités sportives comme il y a de gymnase et de salles de réunion... pour les habitants du quartier. L'école sert du support à d'autres activités.

Comme une partie du Projet éducatif global à Vaulx-en-Velin, il y a une organisation sur la ville, la commission territoriale, qui agit sur chaque quartier de la commune. Cette commission rassemble tous les acteurs concernés par l'éducation dans un travail de partenariat qui n'a rien à voir avec le travail scolaire formel. Cette commission se compose d'enseignants, de travailleurs sociaux, d'animateurs, du chef du quartier, des parents... dirigée par l'élú de l'éducation et facilitée d'un point de vue technique par le service municipal.

La commission se réunit une fois par trimestre pour discuter de ce qui se passe dans le quartier et pour organiser un travail collectif tel qu'un projet répondant aux besoins du quartier, et qui peut être spécifique d'un quartier à un autre. Par exemple, elle organise un projet pour que les parents du quartier obtiennent des informations sur le fonctionnement des structures du quartier pour leur enfants : la bibliothèque, le centre des loisirs, l'atelier d'arts plastiques etc. et parfois elle organise des événements collectifs, soit à l'école, soit dans d'autres locaux dans le quartier.

Lorsqu'une classe ou une école ferme...

L'Inspection Académique du Rhône ne considère pas que le taux d'encadrement doit décider de l'ouverture ou de la fermeture d'une classe. C'est un standard pour toutes les communes. Mais parfois on peut reconsidérer la demande de la commune par rapport à la fermeture de classe avec des critères plus subjectifs, école par école. Par exemple, le Chef du Bureau Moyen Premier Degré dit, « *on permet à la commune à garder des classes car il n'y a que peu de différence avec le taux d'encadrement, et notamment si c'est une école en 'difficulté' ou l'école accueille des élèves handicapés. Dans certains cas, on attend... On verra l'évolution des élèves l'année après* ».

La fermeture de l'école est un autre cas. C'est obligatoirement une décision concertée ; tous les acteurs sont informés. Il s'agit d'une partition des compétences entre

l'Etat, la mairie et les conseils municipaux. Le Responsable du Bureau Moyen Premier Degré affirme, « *Ce n'est pas non plus une décision brutale. On attend l'évolution dans quelques années et on voit la possibilité que les enfants soient accueillis dans d'autres écoles ou un regroupement scolaire avec d'autres communes, comme c'est le cas dans les communes rurales...* ». Selon le Chef du Bureau Statistique, une chose importante est que la diminution du nombre d'écoles ne correspond pas forcément à la fermeture mais à la fusion d'écoles pour des raisons de rationalisation économique, par exemple entre une école maternelle et une école élémentaire. La « vraie » fermeture est un cas très peu fréquent.

La fermeture de l'école primaire Jean Jaurès au quartier Pré de l'Herpe, Vaulx-en-Velin en 1996 en est un des exemples. Dans le quartier, on a observé une diminution régulière des naissances de 1990 à 1995 ; un déficit de plus de 400 élèves, équivalent à 16 classes maternelles et primaires. A la rentrée 1996, l'école Jean Jaurès n'aurait plus compté que 5, voire seulement 4 classes. Avant que la décision de fermeture ne soit votée, la mairie a proposé trois solutions envisageables [Ville de Vaulx-en-Velin, 2005] :

- Laisser les choses en l'état, ce qui aurait signifié pour l'école Jean Jaurès une lente agonie;
- Modifier les périmètres scolaires de King et Vilar, deux écoles voisines, pour amener de nouveaux élèves à l'école Jean Jaurès ;
- Fermer l'école Jean Jaurès ; préparer avec les parents et les enseignants les conditions d'une bonne adaptation des enfants à leur nouvelle école (un réajustement des périmètres scolaires des 5 écoles près du quartier).

La seconde proposition aurait peut-être pu stabiliser la situation de l'école Jean Jaurès en faisant passer les prévisions d'effectif à 6 ou 7 classes, mais cela aurait supposé pour certains parents d'élèves des écoles King et Vilar d'accepter un changement de périmètres afin que certains élèves soient intégrés au secteur de Jaurès, ce qui n'était pas forcément une décision facile...

A Lyon, « *certaines écoles sont trop petites avec deux classes, 40 enfants... cela coûte trop cher à gérer* », selon le Responsable du Service Travaux. C'est pourquoi la commune essaie d'en fermer quelques unes et d'envoyer les enfants dans d'autres écoles plus grandes et qui ont des places pour les accueillir. Elle explique que c'est à cause de l'évolution démographique en France depuis l'année 1960 quand beaucoup des écoles ont été construites, y compris dans le cadre des ZUP. Par exemple à la Duchère, la mairie a fermé 2 écoles en 2004 et 2006 car il n'y avait pas assez d'enfants.

Les habitants n'aiment pas tellement quand la commune ferme une école. Mais dans le cas de Lyon, il y a beaucoup d'écoles qui sont très proches les une des autres. La mairie essaie de remplacer les activités d'une école fermée par une autre activité qui sert aussi la vie sociale du quartier : une crèche, un centre social...tout dépend de la situation. Donc pour le quartier, d'après le Responsable du Service Travaux de la Direction de l'Education, ce n'est pas vraiment différent.

Depuis une vingtaine d'années, la ville de Vaulx-en-Velin a utilisée quelques classes fermées pour répondre à des besoins sociaux pressants et importants, selon le Chef du Service Logistique Scolaire. Par exemple, en 1987, l'école maternelle George Sand a été transformée en Centre de la Petite Enfance, prémices d'un effort important pour l'éducation des mineurs. Une partie de l'école Jean Vilar au quartier Mas du Taureau a été reconvertie en ludothèque en 1990. Au cours de la même année, 3 classes de l'école Makarenko a été transformées en bibliothèque du quartier Verchères.

Périmètre scolaire : Plus qu'une répartition des élèves

5.1. La distribution des classes : Grande capacité mais pas très bien distribuée

La capacité est beaucoup plus grande

« Les capacités totales des écoles primaires sont beaucoup plus grandes que les besoins, mais le problème est qu'elles ne sont pas situées aux bons endroits. », selon le Responsable du Service Travaux de la Direction de l'Éducation de Lyon. Puis, elle explique que dans les quartiers où il y avait de grands ensembles de logements sociaux, les écoles sont beaucoup plus grandes. Par contre, sur les quartiers où sont construits les logements neufs en ce moment, il n'y a pas assez de classes. Même certains quartiers de Lyon étaient des quartiers industriels où il n'y avait pas du tout d'école. C'est pour cette raison que la mairie a décidé dans quels quartiers des écoles devraient être présentes.

A Lyon, il y a des secteurs en tension, c'est-à-dire des secteurs dans lesquels il y a un manque de capacités d'écoles, dans le 7^{ème}, 3^{ème} et le 8^{ème} arrondissement. Par exemple dans l'ancien quartier industriel Etats-Unis (8^{ème} arr.), il n'y a que deux écoles et la commune ne peut pas placer tous les enfants dans les écoles du secteur. Pour y remédier, la direction de l'éducation loue en ce moment des bâtiments modulaires pour y installer des classes provisoires en attendant d'avoir une école neuve ou d'agrandir une école.

Vaulx-en-Velin connaît un phénomène quasi-similaire. Dans les écoles des ZUP, notamment les écoles élémentaires, la capacité des classes correspond jusqu'au double des besoins actuels, ce qui ne signifie pas, toutefois, que les salles ne sont pas utilisées. Les écoles disposent de ces dernières pour d'autres activités qui à l'origine n'étaient pas prévues à la création des écoles : salle informatique, art plastique etc. Par exemple, à l'école élémentaire Lorca au quartier Thibaude, il y a 20 salles de classes au total mais seulement 9 qui sont utilisées comme des « vraies » classes. Au contraire, au quartier Village et centre ville, la mairie est en train d'agrandir les écoles afin de satisfaire la prévision de l'accroissement des besoins à cause des nouvelles constructions dans ces secteurs.

La distribution des enfants et de l'école par quartier

Dans certains quartiers, il y a beaucoup d'enfants mais la commune n'a pas assez d'écoles, pas assez de classes. Dans d'autres, il y a des écoles grandes en taille, mais il y a peu d'enfants...

La mairie essaie d'équilibrer la répartition des enfants par secteur en fonction de la capacité des écoles et de la proximité. Le Responsable du Service Travaux de Lyon : *« Il y a beaucoup d'écoles à Lyon. Par exemple, au 2^{ème} ou au 6^{ème} arrondissement, il y a des écoles seulement à 100 mètres de distance les unes des autres mais au quartier sud-est, les écoles sont éloignées, peut être de 800 mètres, donc cela pose de problèmes parce que normalement on va à l'école à pied... »*. La mairie ne va pas envoyer les enfants aux écoles à l'autre bout de la ville, donc petit à petit, d'année en année elle réajuste les périmètres scolaires.

A Vaulx-en-Velin, où la superficie du territoire par école représente moins de la moitié de celle de Lyon, il existe également quelques écoles à proximité. C'est notamment le cas dans les ZUP, par exemple l'école Vienot et Vilar sur le secteur du Mas du Taureau et l'école Makarenko et Lorca dans les quartiers Verchères et Thibaud, qui sont très proches les unes des autres. La Directrice de l'Education de la ville affirme : *« Cela est lié à l'origine de la création de ces secteurs géographiques, où il y avait une importante population scolarisable qui a nécessité d'un nombre important d'écoles »*.

En 1980, ce que la mairie appelle *« la date de l'apogée des effectifs sur Vaulx-en-Velin »*, la commune comptait environ 8.600 enfants en élémentaire et maternelle [DE Vaulx-en-Velin, 1996]. Selon l'Inspection Académique du Rhône, au cours de la rentrée scolaire 2007, il n'y avait que 5.500 enfants scolarisés à Vaulx-en-Velin, soit une baisse de 3.100 enfants (-36%) en 25 ans. D'après la Direction de l'Education de la ville, cette baisse s'explique notamment :

- Par un rééquilibrage de la pyramide des âges de la commune (Vaulx-en-Velin prend une forme de bouteille) ;
- Par une baisse de la natalité comme partout en France (voir le graphique 4.1).

« Cela nous a permis, bien entendu, d'accueillir les élèves dans de meilleures conditions, d'autant plus que la mise en place des ZEP (en 1981) par le gouvernement a abaissé considérablement les normes de créations de classes » [DE Vaulx-en-Velin, 1996]. La Directrice de l'Education explique qu'en 1980 et avant, la majorité des classes primaires avaient plus de 30 élèves, et les écoles maternelles souvent plus de 40. Aujourd'hui, dans le cadre des RAR et RRS, l'Inspection Académique du Rhône limite le taux d'encadrement dans

les écoles publiques à Vaulx-en-Velin à seulement 24 élèves par classe élémentaire et à 25 élèves pour la maternelle. C'est une des raisons pour lesquelles, selon elle, la diminution des effectifs, couplée à l'abaissement des moyennes par classe, avait amené la commune à garder dans le patrimoine scolaire la majorité des bâtiments.

Comment les périmètres scolaires fonctionnent-ils pour les écoles à proximité ? Chaque école à proximité a ses propres périmètres scolaires dans les deux communes concernées. La taille des périmètres dépend de la capacité des établissements. Un quartier qui a de petites écoles a un petit périmètre et en revanche, les grandes écoles ont un périmètre assez étendu. A Lyon, la plus petite école compte 2 classes et la plus grande 25. Et à Vaulx-en-Velin, la plus petite et la plus grande école comptent respectivement 4 et 14 classes. L'école Makarenko et l'école Lorca dans quartiers Verchères et Thibaud à Vaulx-en-Velin sont deux écoles situées à proximité. *« Makarenko est une école qui est saturée, qui n'a plus de place et dont les locaux sont très limités. Donc, en ce moment nous sommes en train de retravailler sur ses périmètres scolaires parce qu'il y a encore de place à l'école Lorca »*, explique le Chef du Service Logistique Scolaire. Pour alléger un peu Makarenko et remplir Lorca, la commune étudie la possibilité de modifier les périmètres scolaires pour que certaines rues soient rattachées aux périmètres de Lorca.

Au niveau des écoles privées, *« l'offre scolaire privé est inégalement répartie sur le territoire lyonnais »* [DAU Lyon, 2006]. Dans certains arrondissements, tel que le 9^{ème} arr., il n'y a qu'une école privée contre 16 écoles publiques avec un taux de scolarisation dans le public de 94%. En revanche, au 6^{ème} arr., il existe 11 écoles privées contre 9 écoles publiques qui accueillent seulement 56% des enfants dans ce quartier.

Les périmètres scolaires ne prennent pas en compte la capacité ou la localisation des écoles privées. Les établissements privés accueillent leurs élèves comme ils veulent et c'est surtout pour des raisons religieuses... donc c'est un autre critère, selon le Directeur de l'Education de Lyon. La ville de Lyon fournit les écoles publiques pour tous les enfants de chaque quartier. *« C'est vrai qu'envoyer un enfant au privé est aussi un moyen de ne pas aller à l'école publique qui est rattachée aux périmètres scolaires. Mais, le problème est qu'à Lyon, il n'y a plus de place dans écoles privées ; elles sont tous pleines »*, ajoute-t-il.

Construire une nouvelle école

La construction d'une nouvelle école relève d'une décision municipale. En fait, on peut dire qu'il s'agit d'un accord entre la commune et l'Etat car une nouvelle école

correspond aussi à de nouveaux postes d'enseignants. Le Responsable de la Division de l'Organisation Scolaire de l'IA du Rhône dit que « *La mairie connaît bien le développement de la ville, les nouvelles habitations par les permis de construction et l'évolution démographique, elle anticipe donc le besoin de la rentrée scolaire de l'année prochaine ou dans 2-4 ans* ».

Une nouvelle construction n'est pas une seule alternative pour répondre à l'augmentation du nombre d'élèves car cela est beaucoup plus compliqué et évidemment c'est beaucoup plus cher. La commune a un outil pour modifier ou pour « optimiser » la capacité des écoles primaires : les périmètres scolaires. Ils peuvent être redéfinis chaque année si c'est nécessaire. La redéfinition est aussi une solution lorsqu'une commune ne peut pas ouvrir de classe supplémentaire. Mais, selon le Chef du Bureau Statistique de l'IA du Rhône, « *le réajustement des périmètres scolaires est davantage possible à mettre en place dans les grandes villes pour satisfaire le besoin de place aux écoles, mais ce n'est pas le cas dans les villages où les petites écoles n'ont qu'un nombre de classes très limitées* ».

5.2. Les « bonnes » écoles et les « mauvaises » écoles

5.2.1. Choisir un quartier, choisir une école

L'éducation détermine-t-elle l'endroit d'habitation ?

« *En France, l'éducation devient de plus en plus l'un des facteurs qui détermine l'endroit où les parents choisissent de vivre* » [Halls, 1967]. Selon le Responsable de la Division de l'Organisation Scolaire de l'IA du Rhône, ce critère existe mais pour une minorité. Il n'y a pas d'élément statistique qui montre le choix du lieu d'habitation en fonction de la localisation de l'école primaire. « *La majorité des français n'a pas de liberté de choix de l'habitation. C'est un choix en fonction du travail et de leurs moyens financiers. C'est vrai qu'il y a déjà eu des parents qui ont demandé où est-ce que ils devaient acheter un appartement pour que leur enfant aille dans certaines écoles* », explique-t-il.

Le Directeur de l'Education de Lyon affirme à peu près la même chose, « *Comme il y a des périmètres scolaires, si une école n'a pas bonne réputation, les parents n'achètent pas de logement dans le quartier même si c'est rare au niveau de l'école primaire. La stratégie est plutôt au niveau du collège et du lycée* ». Mais depuis un an, le gouvernement a décidé de supprimer les périmètres de collège et de lycée, et ainsi les parents peuvent habiter dans une

commune et faire une demande pour envoyer leur enfant au collège dans d'autres communes. La difficulté, ajoute le Directeur, est que le « bon » collège a des places limitées et de toute façon donne la priorité aux enfants sur deux critères : ceux qui habitent à côté et ceux qui sont boursiers de l'Etat. Les périmètres des collèges sont différents et ne sont pas influencés par les périmètres des écoles primaires. « *Le lien pédagogique entre les écoles et le collège est uniquement dans les RAR/RRS, sinon il n'y a pas spécialement de lien pédagogique* », ajoute-t-il.

Le Responsable du Service Travaux de Lyon indique qu'il est vrai que beaucoup de personnes qui choisissent de ne pas habiter dans certaines villes en raison de l'éducation pour leur enfant. Elle remarque : « *C'est pour cela des villes avec de 'mauvais' établissements scolaires restent des villes 'difficiles'* ».

Dans le quotidien Libération du 28 mai 2007, Soule signale que les familles qui ne peuvent entrer dans ces critères restrictifs de dérogation cherchent parfois plusieurs manières pour inscrire leur enfant dans un « bon » établissement scolaire :

- Ils créent une fausse domiciliation dans une autre famille qui habite sur la zone d'affectation pour un justificatif de domicile ;
- Les parents cherchent des relations ou une bonne connaissance du système éducatif pour savoir des choix d'une option rare, par exemple ;
- Les plus prévoyants déménagent avant la rentrée scolaire afin de se trouver dans un « bon » quartier tandis que les plus « pauvres » achètent une chambre de bonne ;
- Puisque les établissements privés ne sont pas concernés par la carte scolaire, une famille peut choisir également « la meilleure » école privée pour ses enfants sans restriction de secteur.

En fait, selon le Responsable du Service Travaux de Lyon, des statistiques indiquent que ce n'est pas la « qualité » de l'école qui fait la réussite des enfants, mais c'est la catégorie socioprofessionnelle des parents, l'éducation des parents. Les parents partageant ce point de vue ne sont toute fois pas nombreux. Elle indique que « *Certains parents préfèrent que leur enfant aille à ce qu'ils considèrent comme un 'bon' établissement scolaire, ce qui d'après eux peut vouloir dire, où il n'y a pas beaucoup d'étrangers par exemple...* ».

Il y a des familles qui affirment qu'ils ont fait de choix de vivre à Vaulx-en-Velin, d'après la Directrice de l'Education, parce qu'ils savaient que la ville pouvait offrir un certain nombres d'offres, notamment en matière d'es accès aux loisirs pour leur enfant. Il y a beaucoup de structures d'animations existantes et c'est important pour eux que leur enfant

puisse bénéficier de ces types d'infrastructures. Mais, il n'y a pas des données quantitatives qui le montrent. Elle affirme, « *Il est sûr que les parents ont le souci de l'éducation de leur enfant. Quelle que soit la condition sociale et économique des parents, ils ont le souci que leur enfant réussisse* ».

Bonne école dans bon quartier

Au niveau de la réussite scolaire, l'Inspection Académique indique qu'il n'est pas facile de dire qu'existe une différence entre la commune centrale, la banlieue et le village, a fortiori entre les quartiers, car il n'y a pas beaucoup de standards d'évaluation pour les écoles primaires. Cela est donc différent des collèges ou des lycées, car il n'existe pas d'examen pour mesurer la « qualité » des écoles. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'existe pas vraiment d'écart entre des établissements scolaires au premier degré. En plus, l'Etat et la commune respectent l'égalité dans le traitement des écoles, sans distinction entre une ville et un village et entre les statuts des écoles. L'école « en difficulté » n'existe pas qu'à la banlieue ou au village, mais aussi dans la commune centrale car, selon le Responsable de la Division de l'Organisation Scolaire, « *Le statut d'école 'en difficulté' correspond à l'échelle la plus petite pour une commune : la 'sociologie' d'un quartier et la population* ».

« *S'il y a des différences entre les écoles urbaines et rurales, ce n'est qu'au niveau du nombre, de la densité de la population* », d'après le Chef du Bureau Statistique de l'IA du Rhône. Il y a plus d'écoles dans la ville que dans le village, c'est évident. Les écoles urbaines sont plus grandes, en général, avec plus de classes. En revanche, car il n'y a pas beaucoup d'élèves au village, les écoles rurales sont plus petites, certaines n'ont que peu de classes. Et puis, les écoles ont des structures différentes. « *En ville, il y aura un maître pour chaque niveau d'enseignants mais à la campagne, il n'y a qu'un seul maître pour tous les niveaux en fonction du nombre d'élèves* », explique-t-elle.

Dans la détermination des périmètres, il n'y a pas de distinction entre les statuts des écoles. Le responsable des politiques éducatives de la ville fait en sorte que les écoles soient toutes bonnes et accessibles, donc il n'y aura pas de différence entre les établissements. Mais, le Responsable du Service Travaux de Lyon indique que la limitation vient parfois de la situation géographique. Par exemple dans le seul quartier lyonnais en RAR, la Duchère qui se trouve dans le plateau, la commune ne peut pas envoyer les enfants ailleurs à cause de la distance. A l'école primaire, elle souligne, « *les enfants vont à pied à l'école donc l'établissement ne doit pas se situer très loin* ».

Il est vrai que certaines écoles emportent la préférence des habitants, qui les demandent le plus par des dérogations, surtout lorsqu'il y a quelques écoles à proximité. Selon le Chef du Service Logistique Scolaire de Vaulx-en-Velin, en fait, l'image d'une école est déterminée par les habitants eux-mêmes... « *Parfois les gens jugent une école « bonne » car elle se trouve dans un « bon » quartier, pas dans une ZUP, au milieu des belles maisons, des beaux appartements où des docteurs et des professeurs scolarisent leur enfant...* », selon elle.

5.2.2. La dérogation sortante et arrivante

Le taux de dérogation est faible

« *Le taux moyen de demande de dérogation est faible* », le Directeur de l'Education remarque, environ 5% du total d'élèves de Lyon. La tendance est stable d'année en année. Donc, pour la ville, d'après lui, les périmètres scolaires ne posent pas tellement de problème. Au niveau de l'éducation, la commune a aussi des contacts avec des collègues. La direction de l'éducation aperçoit que dans les quartiers « difficiles », une grande partie (dans certains cas 75%) des enfants qui sortent des écoles primaires ne vont pas au collège du secteur, mais ils partent ailleurs surtout dans des collèges privés. En fait, il explique « *c'est où tout le problème scolaire par rapport à la mauvaise réputation des établissements commence et ce n'est pas l'école qui a la mauvaise réputation, c'est le collège* ».

A la rentrée 2007, la ville de Vaulx-en-Velin a acceptée 271 demandes de dérogation ou presque 5% du total d'effectifs des écoles primaires, le même taux que Lyon. Ce nombre inclut la dérogation interne, c'est-à-dire d'un secteur vers l'autre secteur de la commune, la dérogation entrante et la dérogation sortante de la commune. Le premier type de dérogation domine avec 70% du total des demandes, suivi par la dérogation sortante excédant 18% du total, 6% plus que celle-ci de l'entrée.

L'écart parmi des quartiers

Dans certains quartiers, il y a quelques écoles où il y a beaucoup de dérogations pour partir et au contraire, il y a d'autres écoles qui acceptent beaucoup de demandes de dérogation pour arriver. Mais dans certaines écoles, il y a des gens qui partent et arrivent. Donc, la dérogation est assez équilibrée à Lyon et aussi à Vaulx-en-Velin.

Il est vrai que dans certaines écoles des quartiers considérés comme « difficiles » à Lyon, comme Etats-Unis, Mermoz (le 8^{ème} arr.) et les Pentès de la Croix Rousses (le 4^{ème} arr.),

les dérogations sortantes sont plus nombreuses que pour les autres périmètres, plus de 30% du nombre d'élèves de l'école [DAU Lyon, 2006]. Mais, on peut également observer le même phénomène dans les écoles des autres quartiers « ordinaires » dans le 3^{ème} et le 1^{er} arrondissement... Alors, il n'existe pas vraiment d'écart entre les quartiers par rapport aux écoles primaires car il y a aussi des raisons familiales qui influencent les dérogations.

L'école Albert Camus au quartier « ordinaire » Saint Just (le 9^{ème} arr.) est une des écoles qui comptent le plus de dérogations entrantes, plus de 30%. Et en fait, les deux autres écoles qui ont demandé le plus de dérogations se trouvent dans le quartier classifié « difficile » des Etats-Unis. Dans ce quartier, lorsque plus de 30% d'effectifs des périmètres des écoles Jean Giono et Charles Péguy veulent sortir de leur secteur, deux autres écoles à coté, John Kennedy et Louis Pergaud, sont demandées par plus de 30% des enfants domiciliés hors des secteurs. Alors, c'est justement la dérogation « interne du quartier » qui est la règle dans ce quartier...

A Vaulx-en-Velin, où effectivement tous les quartiers sont considérés « difficiles », la variation du taux de dérogation interne parmi les quartiers est plus basse qu'à Lyon. Les écoles des quartiers Vernay, Ecoin et Thibaude comptent le taux de dérogations sortantes le plus élevé, presque 5% [DE Vaulx-en-Velin, 2008] lorsque les établissements scolaires du centre ville sont la direction préférée des dérogations, plus de 4% du total d'effectifs des secteurs. En fait, les quartiers Vernay et Ecoin se trouvent juste à coté du centre ville. Si l'on analyse le sens de la dérogation, 35% des dérogations sortantes des deux quartiers vont aux écoles du centre ville et les autres 35% demandent les écoles du même quartier. Aux écoles du centre ville, la plupart des dérogations entrantes (42%) viennent de Vernay et Thibaude, suivi par les autres quartiers des ZUP, Mas du Taureau et Herpe, qui comptent 21% des dérogations.

Cette année, pour la première fois, la mairie de Vaulx-en-Velin va devoir être très attentive dans la dérogation accordée pour les écoles du Village et du centre ville parce qu'elle va avoir de gros besoins dans ces quartiers à cause des nouvelles constructions immobilières. Donc maintenant, la Directrice de l'Education affirme que, « *la commune doit limiter ou arrêter la dérogation vers les écoles des deux quartiers (Village et centre ville) parce que nous plaçons en priorité les enfants qui habitent dans ces périmètres* ».

5.3. La mixité sociale : Un choix politique de la mairie

« Pensée à l'origine comme un outil de gestion et de répartition sur le territoire de l'offre, des moyens et des flux scolaires, les périmètres scolaires sont devenus au fil du temps la principale mesure censée garantir la mixité sociale à l'école » [Oberti, 2007]. Alors, comment les périmètres scolaires jouent-ils leur rôle d'outil de la mixité sociale à Lyon et Vaulx-en-Velin ?

En général, la commune examine la taille des écoles, le nombre de classes qu'elles peuvent accueillir et le total d'élèves qu'elles peuvent accepter. En suite, elle détermine le territoire qui englobe ces écoles en fonction du nombre d'élèves dans ce territoire. Après, c'est un choix de la mairie de prendre en compte la mixité sociale dans les périmètres scolaires. Les territoires bougent d'une année sur l'autre car il y a beaucoup de constructions. La commune modifie donc un peu les périmètres en fonction du changement démographique.

5.3.1. Lyon : Périmètres scolaires sans mixité sociale

D'après le Directeur de l'Education de Lyon, la ville utilise très peu les périmètres scolaires dans un but social. *« Jusqu'à maintenant, la mairie ne définit pas les périmètres en fonction de la mixité sociale et la mixité n'est pas encore l'objectif des périmètres scolaires »*, affirme-t-il. Par exemple, elle ne scolarise jamais des enfants du quartier des logements sociaux dans un autre quartier qui a moins de « difficultés » que l'autre.

« C'est plutôt un choix politique. La ville de Lyon ne crée pas un débat politique sur les périmètres scolaires. Aujourd'hui il n'y a qu'un débat technique, par exemple sur le nombre d'enfants et la distance entre l'école et le domicile, afin de satisfaire les besoins des enfants », le Directeur explique pourquoi la mixité sociale ne devient pas un des éléments des périmètres scolaires dans la commune centrale.

C'est vrai, pour la ville de Lyon, la mixité sociale à l'école n'est pas qu'une question politique, mais aussi un problème technique. Le Responsable du Service Travaux de la DE dit, *« Les quartiers des logements sociaux ne sont pas bien répartis dans les villes. Par exemple, Vaulx-en-Velin est un gros 'quartier' des logements sociaux, mais en revanche, il y a certaines villes à l'ouest de Lyon qui n'ont pas du tout de logement social et à Lyon, il n'y en a que dans quatre quartiers »* (la proportion des HLM ne représente que 18% du total des résidences principales dans la ville).

Même s'il y a de problème technique, la volonté politique de la mairie est la raison principale qu'il fait que les périmètres scolaires ne sont pas des outils de la mixité sociale. A Lyon, selon le Responsable du Service Travaux, « *les périmètres existent pour uniquement affecter les enfants aux bons endroits, c'est tout. C'est un problème mathématique* ». Sans ces outils, la commune aura des difficultés : il y aura des écoles trop pleines et des écoles pas assez remplies en raison de la liberté de choix des écoles publiques. Aussi les périmètres ont pour seul but de répartir les enfants de façon mathématique...

Alors, comment, à Lyon, arrive-t-on à la mixité sociale à l'école ? « *La ville arrive à la mixité sociale en mettant les logements sociaux ailleurs* », selon le Responsable du Service Travaux. Ce que la mairie décide aujourd'hui est de démolir une partie des grands ensembles et de mettre des logements en copropriété (logements privés) dans le quartier. « *La commune construite les logements sociaux partout dans la ville par petites unités de 20 à 50. Il n'y aura plus de gros logements sociaux de 2.000 à 3.000 pièces comme avant. La mixité sociale est créée par les logements, pas par les écoles* », elle ajoute. Donc, il semble que la direction de l'éducation de Lyon « attend » que la mixité sociale arrive aux écoles lyonnaises en fonction de la planification des logements (sociaux).

5.3.2. Vaulx-en-Velin : Mixité sociale dans une commune « difficile »

Si la mairie de Lyon, ville où il n'y a qu'une petite partie de logements sociaux, ne touche pas la mixité sociale dans les sectorisations de ses écoles, comment cela fonctionne-t-il à Vaulx-en-Velin, où 51% des résidences principales sont des HLM ?

La Directrice de l'Education affirme, « *Chaque école de Vaulx-en-Velin a son périmètre dont chacun prend déjà en compte la mixité sociale* ». Par exemple, lorsque le premier logement a été construit dans le centre ville, deux choix s'offraient à la commune : soit de scolariser des enfants arrivant dans ces nouveaux bâtiments à l'école Makarenko (au quartier Verchères), soit à l'école Mistral (au centre ville). Quand la mairie a étudié quelle population était déjà représentée dans chacune des écoles, on a choisi de les scolariser à Makarenko pour améliorer les conditions de la mixité sociale. Elle affirme, « *la décision a été prise du fait que dans les logements du centre ville, il y a pas mal d'accession à la propriété et dans les périmètres de Makarenko, il y a surtout des logements sociaux* ». Par contre, avec le grossissement du centre ville qui a eu lieu après, selon la Directrice, la commune ne peut pas mettre tous les élèves à Makarenko parce qu'il n'y a plus de place. Donc il se pose une nouvelle question sur la répartition des élèves parmi les écoles Makarenko, Mistral et Lorca,

trois écoles voisines. En plus, « *il y a des programmes de logement qui vont amener les enfants à l'école Mistral, ce qui entraînera de gros programmes d'agrandissement et de réhabilitation des écoles* », explique-t-elle.

Un autre cas à Vaulx-en-Velin : il y a quelque temps la commune a considéré la possibilité de construire une école dans le centre ville parce qu'il y avait beaucoup de constructions dans le quartier. La décision politique qui a été prise était de ne pas construire une école dans le centre ville pour éviter justement, d'après la Directrice de l'Education, « *une école de l'élite* » parmi des écoles dans les périphéries... Actuellement, d'un côté, la ville a un gros travail de prospective pour voir comment tous les quartiers vont évoluer et pour voir, école par école, s'il faut agrandir certaines écoles ou construire d'autres. Il a pour but de répondre tous les besoins de l'avenir avec l'arrivée d'une nouvelle population qui vient de s'installer à Vaulx-en-Velin. D'un autre, la mairie a déjà décidé qu'il n'y aura pas une école dans le centre ville parce que, d'après la Directrice, « *il y a une crainte que cette école soit considérée comme pendant longtemps on a considéré des écoles du Village comme la 'bonne' école et puis les autres sont les 'mauvaises' écoles* ». Elle ajoute, « *C'est assez complexe, le problème des périmètres scolaires ; ils sont à la fois une discussion technique et politique* ».

5.4. Les débats

5.4.1. L'importance des périmètres scolaires

Alors, pourquoi la commune a-t-elle toujours besoin des périmètres scolaires ? La sectorisation scolaire permet de répartir des élèves selon les écoles publiques existantes. La mairie ne veut pas laisser une école vide lorsqu'une autre école dépasse ses capacités, en fonction de la préférence des parents. C'est également un outil pour conserver des écoles dans une commune. « *La carte scolaire a été créée en 1963, basé sur l'idée que la meilleure façon de garantir l'égalité des chances est d'uniformiser les écoles, et aussi collèges et lycées. En suite, on affecte les élèves dans les établissements de façon stricte afin de créer de la mixité sociale* » [Oberti, 2008]. Le placement des élèves dans les écoles est donc organisé de manière égale, transparente et « autoritaire » ce qui oblige théoriquement les parents à inscrire les enfants dans l'établissement de leur quartier.

Dans la commune de Vaulx-en-Velin, la mairie est en train de travailler sur la révision de l'ensemble des périmètres scolaires pour l'avenir, en tenant compte de toutes les nouvelles

constructions qui arrivent. La Directrice de l'Éducation de la ville indique, « *L'importance des périmètres scolaires est qu'ils tiennent justement compte de la mixité des élèves car l'objectif de la commune est que dans les écoles on arrive à améliorer la question de la mixité sociale* ». Les périmètres scolaires prennent également en compte la proximité en fonction des adresses des administrés et aussi de la dangerosité du trajet, surtout pour les enfants. La commune ne veut pas non plus avoir d'énormes groupes scolaires à côté de toutes petites écoles, il faut donc aussi équilibrer la dimension des écoles. Alors, les périmètres scolaires sont un outil défini et réajusté pour accommoder tous ces éléments.

Bien que ce phénomène que connaissent les écoles primaires aurait besoin d'être défini de façon plus précise, d'après Alain Madelin [1999], « *le résultat de la sectorisation scolaire qui avait à l'origine pour objet de favoriser la mixité sociale, a conduit au contraire à 'ghettoïsation scolaire' qui est le reflet d'un urbanisme ségrégatif* ». Car d'après lui, « *seuls les enfants des couches les plus favorisées ont les moyens de contourner la carte scolaire* ». Baudry, dans Le Monde du 12 septembre 2006, indique que l'écart entre les « pauvres » et les plus favorisés devient de plus en plus net : « *La carte scolaire favorise ceux qui sont déjà les plus favorisés. Plus de choix sont ouverts pour eux : acheter un logement dans un 'bon' quartier, de meilleurs opportunités grâce aux relations et une meilleure connaissance du système éducatif...* ». D'après lui, les familles peuvent même « refuser » de scolariser leurs enfants dans les écoles de leur lieu de résidence simplement pour d'éviter d'être mélangés à certaines familles ou pour éviter un établissement qui a une réputation défavorable. Mais, dans le même article dans le Monde, il affirme qu'en fait, une des raisons pour lesquelles le système est nécessaire est simple : dans chaque territoire, on a des établissements qui sont très demandés, avec des capacités d'accueil très limitées. Alors, il est nécessaire d'avoir un système de « sélection » des élèves...

5.4.2. La suppression des périmètres du secondaire

Une liberté nouvelle aux collèges et lycées

La carte scolaire a vu le jour il y a plus de quarante ans. Xavier Darcos, le Ministre de l'Éducation Nationale, souligne dans le Libération du 28 mai 2007 que « *Gérer la France avec les outils de 1963 est impossible. Cet outil de programmation d'écoles n'assure plus l'égalité des chances et ne répond plus aux attentes des familles à cause du contournement régulier* ». Dans ces conditions, le Ministre a souhaité établir une règle plus claire et plus égale pour toutes les familles. Dans le dossier de presse du MEN du 4 juin 2007, l'Etat

affirme que la nouvelle réglementation scolaire devrait rendre une liberté nouvelle aux familles respectant la diversité sociale et géographique au niveau de chaque établissement.

En mai 2007, après des dizaines d'années de débats, le Ministre de l'Education Nationale a indiqué que la carte scolaire du collège et du lycée serait supprimée d'ici la rentrée 2010. Cette suppression aurait lieu progressivement à partir de la rentrée scolaire 2007/2008. Pour la première étape, l'assouplissement de la carte scolaire autoriserait de 10 % à 20 % des parents de choisir l'établissement de leurs enfants dès la rentrée 2007 sans restriction de secteur. La transition est planifiée pendant un ou deux ans avant que la carte scolaire ne soit intégralement supprimée afin de créer une école plus « juste » [La Libération 28/05/2007].

La réussite des expériences

En décembre 2007, Xavier Darcos a confirmé la suppression de la carte scolaire. Il se dit optimiste quant à cette décision en considérant la réussite des expériences d'assouplissement menées au début de la rentrée scolaire 2007. Cette dernière est prouvée par l'augmentation de la satisfaction des parents d'élèves.

Le dossier de presse du MEN du 4 juin 2007 montre que « *Les résultats de cette première étape d'assouplissement de la carte scolaire sont très encourageants. Les taux de satisfaction des demandes des familles ont progressé en s'établissant respectivement à 77% et 67%, en hausse de 10 et 6 points par rapport à l'année précédente. Plus de 13.500 demandes d'inscription supplémentaires hors secteur ont été formulées par les familles, dont environ un tiers à l'entrée de la classe de sixième et deux tiers pour la classe de seconde* ».

Il semble que cette politique éducative soit acceptée par la société. Selon un sondage CSA-Cisco, 72% des français sont favorables à la suppression progressive de la carte scolaire du secondaire. Même, la portion d'élèves qui a déjà bénéficié de cette nouvelle liberté a dépassé le taux prévu, 10%-20%, dans certaines communes. A Paris, 40 % des élèves seraient scolarisés dans un établissement en dehors leur secteur domicile selon Le Parisien [La Libération 29/05/2007].

Après la suppression...

Grâce à l'application de l'assouplissement de la carte scolaire, le gouvernement va permettre à un plus grand nombre d'élèves d'être scolarisés avec une seule limitation : celle des places disponibles dans les établissements, sans aucune considération géographique et sociale. Comme le dit le Libération du 29 mai 2007, la suppression de la carte scolaire pourrait provoquer l'augmentation des demandes d'inscription dans les lycées les plus prisés.

Alors, comment le gère-t-on cette éventualité ? Il y aura une sélection des dossiers. Seuls les élèves ayant les meilleurs dossiers seront acceptés. Cette condition va conduire à une différenciation fort entre les « bons » établissements et les établissements qui ont « mauvaise réputation ». Mais, le ministre refuse, dans le même article, que cette décision « *installe un grand marché libéral à l'école* ».

Pendant cette transition, en raison de la mixité sociale, les élèves boursiers seront prioritaires pour s'inscrire hors de leur quartier. Pour des raisons médicales, les personnes handicapées pourront également décider du meilleur endroit des établissements en fonction de leur handicap comme par exemple une personne ayant besoin de soins lourds à proximité de son établissement scolaire [Encyclopédie de l'éducation, 2008].

Pour améliorer la programmation scolaire et être au courant aux conditions d'aujourd'hui, le Ministre de l'Education Nationale va remplacer la carte scolaire par de « *nouveaux instruments de mixité sociale* » [Dossier de presse du MEN 04/06/2007]. « *La règle générale qui permet à une famille d'inscrire son enfant dans l'établissement le proche du domicile ne disparaîtra pas totalement mais elle sera substituée...* », selon le dossier.

5.4.3. Les périmètres du primaire : Les différents intérêts

Sur les medias, la « réponse négative » à la carte scolaire au collège et au lycée est plus forte qu'à l'école. A la différence du secondaire, il n'y a pas de suppression ou même d'assouplissement des périmètres du primaire. Quelles sont les différentes caractéristiques entre les périmètres du primaire et du secondaire ?

Selon l'Inspection Académique, les parents deviennent de plus en plus exigeants dans le choix de la meilleure éducation pour leur enfant ; c'est normal. Mais, dans le choix d'une école, c'est la proximité du domicile qui compte énormément. Le Chef du Bureau Moyen Premier Degré explique, « *Les parents apprécient la proximité. Pour le collège ou le lycée, lorsque les élèves deviennent des adolescents et peuvent se déplacer de façon autonome, la famille a plus des choix d'établissement qui correspondent à leur préférence* ». Il semble que, pour les familles en général, le besoin des périmètres scolaires du primaire soit plus important que pour le secondaire. Avec la sectorisation scolaire, la commune peut « garantir » pour que tous les enfants obtiendront une place à l'école la plus proche afin de pouvoir s'y rendre en sécurité et que les parents n'aient pas de difficulté à les faire garder...

Une autre chose qui distingue l'école et l'établissement secondaire est qu'il existe un classement des collèges et des lycées basés à l'examen du deuxième degré, alors que ce n'est

pas le cas à l'école primaire. Si certains parents choisissent la meilleure école en se basant sur l'image de l'établissement et leur propre « évaluation », dans le cas du deuxième degré, ils peuvent comparer les établissements plus facilement : en évaluant la réussite scolaire ou d'autres critères. Selon le Chef du Bureau Moyen Premier Degré, « *il n'y a pas (vraiment) d'écart entre les écoles primaires. On ne peut pas remarquer de différences entre eux. En plus, c'est plutôt au collège que les parents commencent à sélectionner le meilleur établissement scolaire dans lequel envoyer leur enfant* ».

Il est évident que la suppression de la carte scolaire encourage de plus en plus les élèves à s'inscrire dans le meilleur établissement sans tenir compte de la limitation géographique, même si cela est peut-être moins marqué à l'école qu'au collège ou au lycée. Le Directeur de l'école Makarenko et la Directrice de l'école Lorca à Vaulx-en-Velin prédisent que la situation va se compliquer pour les établissements scolaires notamment en raison de la suppression des périmètres car l'écart parmi les établissements deviendra plus grand. Lorsque les établissements prestigieux doivent « refuser » une partie des élèves, les établissements « impopulaires » perdent leurs élèves. Soule, dans le Libération du 28 mai 2007, indique : « *Le grand problème est de savoir que faire des écoles ghettos plantées au milieu des cités, en périphérie des grandes villes... Comment imaginer qu'une fois la carte scolaire supprimée ils puissent attirer des élèves hors du quartier ? 10% de bons élèves de cette écoles partiraient dans de meilleurs établissements, et elles resteraient avec les moins bons, encore plus ghettoïsés* ».

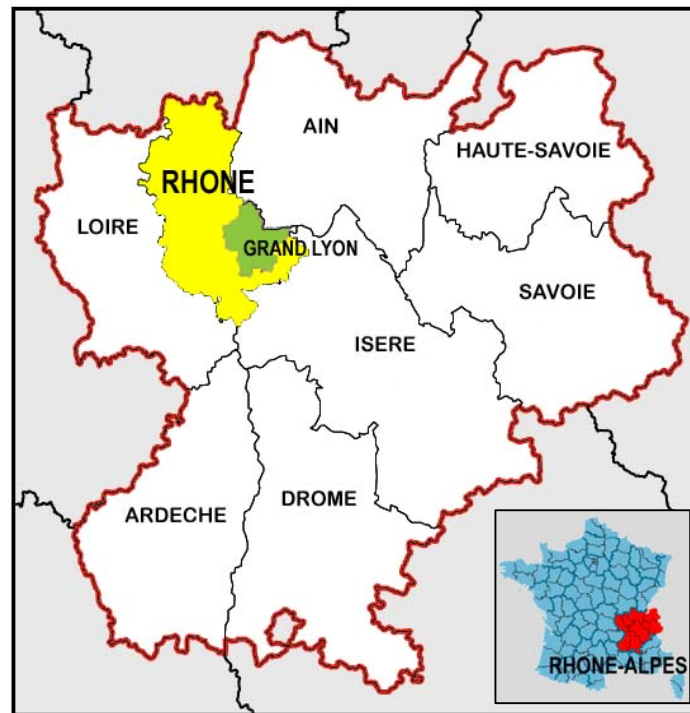
Pour la commune, la sectorisation scolaire le facilite la gestion des établissements scolaires. Comme l'affirme le Responsable du Gestionnaire Perspectives Scolaires de Vaulx-en-Velin, « *c'est sûr, sans périmètres, la rentrée scolaire et la prévision d'élèves seraient plus compliquées que maintenant* ».

5.5. Les défis dans la gestion des établissements scolaires

Il y a certains défis posés par la démographie mais il y a encore davantage de défis posés par la régulation. Par rapport au développement et à la croissance du département, selon Le Chef du Bureau Statistique de l'IA du Rhône, la démographie rhodanienne connaît une stabilisation. Depuis 1962, la population du Rhône continue d'augmenter et de 1999 à 2005, l'augmentation de la population est passée à 4,8% [INSEE, 2005]. Elle explique, « *Dans le*

Rhône il y a une grande zone économique attractive, Lyon et l'agglomération lyonnaise. Dans le cas du Rhône, l'attractivité économique conduit au développement des communes concentrées dans la partie sud-est du Rhône, dans le département de l'Isère, de l'Ain et de la Loire (voir l'illustration 5.1). On perçoit que les habitants qui travaillent dans le Rhône habitent les départements voisins en raison du prix des logements ».

Illustration 5.1 Grand Lyon en Rhône-Alpes



Source : www.grandlyon.com

Le Chef du Bureau Moyen Premier Degré de l'IA du Rhône affirme que la législation exige l'amélioration de la sécurité et que la politique éducative nationale demande plus d'accès pour les enfants à mobilité réduite aux écoles publiques. Elle explique, « *On a des établissements scolaires spécialisés pour les élèves handicapés, mais la politique indique que pour que les écoles publiques (ordinaires) devraient être en mesure d'accueillir les élèves handicapés avec les autres élèves* ». Cette législation demande donc à la commune en tant que responsable d'établissement scolaire à adapter les locaux que ces derniers soient plus accessibles. Le défi apparaît aussi du côté culturel, par exemple l'évolution de la technologie qui demande que chaque école ait une salle informatique.

Pour la commune de Lyon, le défi par rapport au développement de la ville est plutôt de construire de nouvelles écoles dans les quartiers en développement. Le Responsable du Service Travaux de la DE indique : « *Lyon a un programme de construction d'écoles neuves*

pour les dix prochaines années parce qu'il y a des nouvelles constructions de logements dans certains quartiers et donc il manque des écoles ». La prévision d'augmentation d'enfants de Lyon devrait arriver autour de plus de 4.000 enfants en 2012 par rapport à 2005 [DAU Lyon, 2006]. Parallèlement, ajoute elle, *« dans les quartiers où il y a des écoles trop grandes, la commune va les rétrécir un peu ».*

Dans le même esprit qu'à Lyon, le défi pour la ville de Vaulx-en-Velin est plutôt l'augmentation du nombre d'élèves, d'après la Directrice de l'Education. Chaque année, la ville a des créations de classe qui varient de 2 à 6 classes en fonction de la réalisation du programme de logement. Jusqu'à maintenant, les périmètres scolaires étaient (seulement) mis à jour en fonction de la réhabilitation d'un quartier qui conduisait aux changements et/ou créations des rues et d'adresses. *« En ce moment, la mairie est obligée d'aller plus loin dans le réajustement du fait que la ville évolue avec tous les nouveaux logements... »*, ajoute elle. La mairie, assistée par un cabinet privé, travaille sur la prospective à long terme d'élèves et la redéfinition des périmètres scolaires. Et puis chaque année, ils vérifient sur le terrain si la réalité est conforme aux prévisions pour décider s'ils ont besoin ou non de réajuster les périmètres scolaires d'année en année.

« La prospective est vraiment un travail par hypothèse ; la commune ne sait rien du type de familles qui vont arriver dans les logements, donc il faut bien vérifier ce qui va se passer en réalité », explique la Directrice sur le défi que présente la prévision d'élèves. A travers les travaux qui ont été menés sur les 5 dernières années à Vaulx-en-Velin, selon elle, le quota que la ville a appliqué jusqu'à présent était trop élevé. C'est-à-dire, la mairie avait projeté l'arrivée d'un trop grand nombre d'enfants par rapport à ce qui s'est passé en réalité et revoit donc son quota à la baisse.

Une autre spécificité de Vaulx-en-Velin est le choix politique de ses élus de pouvoir accueillir les tous petits, c'est-à-dire les enfants de 2 à 3 ans. Le politique est de scolariser les enfants le plus tôt que possible dans les écoles maternelles, quand des demandes viennent des familles bien entendu. *« Il y a une étude qui a été faite qui montre que la scolarisation le plus tôt possible donne plus de chances de réussite à des enfants surtout au niveau de l'apprentissage de la langue, de la socialisation etc. »*, la Directrice indique une des raisons de cette politique. Elle affirme, *« Dans la majorité des communes voisines, des enfants ne sont pas accueillis avant 3 ans, ils commencent même la scolarisation à l'âge de 3,5 ans ou de 4 ans ».*

Pour cela, le Maire de Vaulx-en-Velin souhaite que le service municipal s'occupe des inscriptions scolaires parce qu'actuellement, elles sont gérées par les directeurs d'écoles. La Directrice considère que « *pour la scolarisation des enfants de 2 à 3 ans, l'inscription est un point très sensible parce que les directeurs d'école font comme ils veulent* ». C'est-à-dire que s'il manque quelques élèves pour éviter une fermeture de classe ils vont les prendre mais s'ils ont suffisamment d'élèves ils ne vont pas accueillir des « bébés »... La Directrice affirme : « *C'est aussi pour avoir une idée précise de quels sont les demandes de scolarisation de 2 à 3 ans et 'pousser' l'Education Nationale à les accueillir* ». Il y a déjà des écoles qui les accueillent volontiers. La petite école maternelle Vienot, par exemple, qui a une classe complète des « bébés ». Mais elle remarque qu'il y a aussi des écoles qui pensent que l'école n'est pas la place des tous petits qui seraient mieux avec leur maman ou à la crèche, et donc elles les refusent. Alors, à partir de 2009, la direction de l'éducation de Vaulx-en-Velin se prépare à gérer elle-même l'inscription scolaire. Mais pour la commune, elle ajoute, « *ça ne sera pas aussi simple parce que ça sera compliqué au niveau de l'Education Nationale par rapport à la restriction des postes d'enseignants, des budgets...* »

Conclusion

L'implication de la commune française dans l'éducation ne se limite qu'à l'enseignement à l'école (l'éducation formelle), qui est l'organisation, le fonctionnement et l'entretien des établissements scolaires, mais, dans un sens plus large, elle inclut l'éducation non formelle et l'éducation informelle⁶. Avec le projet éducatif local, la mairie fait de l'éducation l'une des priorités de la politique de la commune en essayant de devenir « *une ville éducatrice* »⁷ pour tous ses habitants.

Pour la commune, l'école n'est pas qu'un endroit où les enfants apprennent. « *L'école est l'équipement collectif résidentiel qui anime un quartier* » [Merlin et Choay, 1988]. Elle est un centre d'activités pour les enfants, un endroit de rencontre pour les parents, un lieu de réunion pour les acteurs concernés par l'éducation. Depuis plusieurs dizaines d'années, « *l'éducation devient aussi de plus en plus un des facteurs qui détermine l'endroit où les parents choisissent de vivre* » [Halls, 1967]. C'est pourquoi la commune, ainsi que les habitants, a des intérêts de garder les écoles, même les classes, dans son territoire.

La prévision annuelle du nombre d'élèves et les périmètres scolaires sont des outils de gestion des établissements scolaires au niveau communal pour que la collectivité locale puisse garantir l'enseignement primaire obligatoire pour tous les enfants de la commune. La sectorisation scolaire est un système de partition clair, égal et aussi « autoritaire »... Elle sélectionne les élèves en fonction de la capacité de l'école et de la proximité.

Les politiques scolaires sont plus qu'une question de chiffres... L'éducation primaire implique plusieurs acteurs et chacun a son propre intérêt. En considérant l'égalité et la

⁶ Les trois catégories de l'éducation définies au niveau européen consistent en l'éducation formelle, l'éducation non formelle et l'éducation informelle. L'éducation formelle correspond à l'école, l'éducation non formelle correspond aux activités encadrées proposées par des structures municipales, par des associations, et l'éducation informelle se fait dans l'univers familial ou dans le groupe (quartier, commune, etc.) [Pugin et Panassier, 2006].

⁷ « *Une ville éducatrice, c'est une ville qui prend conscience qu'elle constitue une source d'éducation en elle-même, à partir des sphères multiples sur lesquelles elle intervient (la planification urbaine, le sport, la culture, la politique de la ville, etc.) et qui inscrit cette exigence d'éducation dans ses projets. C'est une commune qui s'engage à enrichir la vie de ses habitants, à les informer, à les former tout au long de la vie, à les consulter, pour leur donner les outils et les moyens de s'épanouir et de participer à la construction du monde de demain* » [Yves Fournel, 2006 in *Quand la ville devient un acteur clé de l'éducation*].

limitation du nombre d'enseignants, l'Etat (ou l'Inspection Académique) applique le même standard de déterminer de postes d'enseignants et la taille de classes selon le besoin (ou le « statut ») d'un quartier. La commune a besoin d'écoles, de classes. Elle veut qu'un quartier soit toujours animé et « intéressant » alors elle fournit des équipements publics et facilite également des activités culturelles. Les besoins des parents d'élèves évoluent et ils exigent en faisant valoir leur droit de choisir la meilleure éducation pour leur enfant. En conséquence, la commune doit s'impliquer de plus en plus dans l'éducation, même hors des temps scolaires.

Lyon et Vaulx-en-Velin sont le portrait d'une ville centrale et d'une banlieue « jeunes » [Mossant, 2005]. Après une forte population scolarisable dans les années 1980, la capacité totale des écoles primaires sur les deux communes est plus grande que ses besoins, mais le problème est qu'elle n'est pas bien distribuée dans la ville. Basé sur les données socio économiques, Vaulx-en-Velin montre une grande proportion de logements sociaux, un taux de chômage presque double, et 56% du niveau de vie de Lyon. Culturellement, les ménages à Vaulx-en-Velin sont plus divers avec 21% d'étrangers et 28% de migrants. Au niveau national, toutes les écoles à Vaulx-en-Velin sont classées « difficiles » contre 23% à Lyon.

Il n'y a pas de distinction entre des communes dans la gestion des établissements scolaires au niveau national ou académique. C'est la commune qui fait en sorte que ses écoles se distinguent de celles des autres communes. Cela dépend de son choix politique et de ses capacités financières. Lyon a son propre standard pour que chaque école lyonnaise soit bien équipée, cependant Vaulx-en-Velin a commencé à accueillir les enfants de 2 à 3 ans. A Vaulx-en-Velin, les périmètres scolaires sont également un outil pour aboutir à la mixité sociale à l'école mais pour la ville de Lyon, la mixité n'est pas encore objective des périmètres scolaires.

La dérogation scolaire aux écoles primaires ne pose pas grand problème pour les deux communes car le taux est bas et les écoles peuvent les absorber. Il est vrai que la sectorisation scolaire limite la liberté des parents de choisir le meilleur établissement scolaire parce que la mairie n'accepte pas une demande de dérogation basée sur la préférence d'une « bonne » école. Les communes gèrent les écoles également et essaient de faire toutes les écoles soient « bonnes » mais certains parents ont leur propre définition d'une « bonne » école. De plus, ce n'est pas le « statut » d'école ordinaire ou d'école en « difficulté » qui détermine vraiment le sens de la dérogation. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas d'écart entre les écoles primaires, certains parents seront toujours tentés de choisir...

Bibliographie

Académie de Lyon. *Quelques spécificités de l'académie de Lyon* [en ligne]. Disponible sur : <<http://www.ac-lyon.fr/spécificités-académie-lyon.html>> (consulté le 9.03.2008).

BAUDRY Constance. *Faut-il supprimer la carte scolaire ?* Le Monde 12/09/2006. [en ligne] Disponible sur : <http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3226,50-815579,0.html> (consulté le 03.04.2008).

BERTHELOT Alain. *Aire urbaine de Lyon : Densification au centre et attractivité à la périphérie*. La Lettre - Résultats. No. 79. Aout 2007. Lyon : INSEE Rhône-Alpes, 2007, 4 p. (ISSN 1165-5534).

BOTTIN Yves, et al. *L'école primaire, Bilan des résultats de l'école*. Paris : Haut Conseil de L'éducation, 2007, 39 p.

BOUVIER Alain. *La gouvernance des systèmes éducatifs*. Paris : Presses universitaires de France, 2007, 352 p. (ISBN 978-2-13-956570-3)

Carte Scolaire. Encyclopédie éducation. [en ligne] Disponible sur : <<http://www.e-tud.com/encyclopedie-education/?201-carte-scolaire>> (consulté le 12.03.2008).

COQUIL Thierry, LAURIOL Christophe. *Eléments pour une refonte des périmètres scolaires à Vaulx-en-Velin*. Travail Fin d'Etudes. Vaulx-en-Velin : Ecole Nationale des Travaux Publics, 1995, 119 p.

DEPP. *L'état de l'École*. No.17. Paris : DEPP/Département de la valorisation et de l'édition, octobre 2007, 82 p. (ISBN 978-2-11-095418-3)

Direction de l'Aménagement Urbain – Observatoire Urbain. *Etude prospective de démographie scolaire*. Lyon : Ville de Lyon, novembre 2006, 16 p.

Direction de l'Education de Lyon. *Le projet éducatif de Lyon 2001-2008*. Lyon : Ville de Lyon, 2007, 20 p.

Direction de l'Education de Vaulx-en-Velin. *Projet éducatif global de Vaulx-en-Velin*. Vaulx-en-Velin : Ville de Vaulx-en-Velin, juin 2004, 13 p.

_____ *Réajustement des périmètres scolaires : Proposition de fermeture de l'école primaire Jean JAURES pour sa reconversion en un établissement de statut public répondant à des besoins sociaux du Mas du Taureaux*. Vaulx-en-Velin : Ville de Vaulx-en-Velin, 1996, 5 p.

DREYFUS Bernard. *Vadémécum des collectivités locales et territoriales*. 5^e édition. Pulnoy : Arnaud Franel Edition, 10 janvier 2005, 226 p. (ISBN 2-896-030-12-3)

DURAND-PRINBORGNE Claude. *Les principes fondamentaux du système éducatif français*. Le système éducatif en France. Notice 2. Paris : La documentation française, 2003, p.13-19. (ISBN 2-11-005380-1)

GAUTHIER Pierre-Louis. *L'école primaire en question*. Revue Internationale d'Education, no. 41. Sèvres : Centre International d'Etudes Pédagogiques, 2006, p. 17-23. (ISSN 1254-4590)

GENAY Valérie. *Portrait du Grand Lyon. Périmètre en date de juillet 2006*. Lyon : INSEE Rhône-Alpes, mars 2008, 9 p.

Inspection Académique du Rhône. *L'éducation nationale dans le Rhône* [en ligne]. Disponible sur : <<http://www.ia69.ac-lyon.fr/07docpdf/chiffresensei.pdf>> (consulté le 9.03.2008).

La scolarisation des enfants : Les principaux textes de loi. Paris : Direction des journaux officiels, 2001, 123 p. (ISBN 2-11-075046-4)

La ville et l'école. Revue. Les cahiers du DSU No.7. Le 1 juin 1995.

LAMRANI Yamina. *Echec scolaire et banlieue : de la construction de représentations à une discrimination implicite*. Travail Fin d'Etudes. Vaulx-en-Velin : Ecole Nationale des Travaux Publics, 1998, 102 p.

LOUIS François. *Conduite et évaluation des politiques publiques visant à satisfaire les besoins en équipements éducatifs*. 24-27 février 2002, Guadalajara, Mexique. Programme de l'OCDE pour la construction et l'équipement de l'éducation (PEB), 2002, 6 p.

MADÉLIN Alain. *La carte scolaire conduit à une ghettoïsation*. Démocratie Libérale. Editorial 09/10/1999. [en ligne] Disponible sur : <<http://www.demlib.com/editorial/mad/discours/081099.html>> (consulté le 27.03.2008).

MERLIN Pierre, CHOAY Françoise. *Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement*. 1^{ère} édition. Paris : Presses Universitaires de France, 1988, 723 p. (ISBN 2-13-041374-9)

Ministère de l'Education Nationale. *Le système éducatif* [en ligne] Disponible sur : <<http://www.education.gouv.fr/pid8/le-systeme-educatif.html>> (consulté le 9.01.2008).

MOSSANT Philippe. *Rhône-Alpes, une région jeune et attractive*. La Lettre - Résultats. No. 40. Juillet 2005. Lyon : INSEE Rhône-Alpes, 2005, 4 p. (ISSN 1165-5534).

OBERTI Marco. *L'école dans la ville : Ségrégation – Mixité – Carte scolaire*. Paris : Presses de Sciences Po, 2007, 299 p. (ISBN 978-2-7246-1016-1)

PUGIN Valérie, PANASSIER Catherine. *Quand la ville devient un acteur clé de l'éducation*. Revue. L'Agenda Métropolitain. Automne 2006. p. 82-86.

SAFRA Martine. *L'école primaire*. Le système éducatif en France. Notice 10. Paris : La documentation française, 2003, p. 84-93. (ISBN 2-11-005380-1)

SOULE Véronique. *La carte scolaire corrigée par Darcos avant l'été*. Libération 28/05/2007. [en ligne] Disponible sur : <<http://www.liberation.fr/actualite/societe/256474.FR.php>> (consulté le 27.03.2008).

_____ *Les mille façons de contourner*. Libération 28/05/2007. [en ligne] Disponible sur : <<http://www.liberation.fr/actualite/societe/256473.FR.php>> (consulté le 27.03.2008).

TOULEMONDE Bernard. *Vers un pilotage partagé du système éducatif?* Le système éducatif en France. Notice 5. Paris : La documentation française, 2003, p. 41-46 (ISBN 2-11-005380-1)

Trois rentrées pour que la carte scolaire actuelle ait disparu. Libération 29/05/2007. [en ligne] Disponible sur : <<http://www.liberation.fr/actualite/politiques/256746.FR.php>> (consulté le 03.04.2008).

VASCONCELLOS Maria. *Le système éducatif.* 3^{ème} édition. Paris : La Découverte, 2001, 128 p. (ISBN 2-7071-35554-2)

WARZEE Alain, et al. *La place et le rôle des parents dans l'école.* Rapport au Ministère de L'Education Nationale, de L'Enseignement Supérieur et de La Recherche, No. 2006-057. Paris : IGEN, IGAENER, 2006, 87 p.

Xavier Darcos assouplit la carte scolaire. Le Ministère de l'Education Nationale. Information 04/06/2007. [en ligne] Disponible sur : <<http://www.education.gouv.fr/cid5170/xavier-darcos-assouplit-la-carte-scolaire.html>> (consulté le 03.04.2008).

Annexe

Entretien A

La Direction de l'Education de la ville de Lyon

- En tant que commune centrale, quelles sont les spécificités de Lyon qui influencent la gestion d'établissement scolaire au niveau de la commune ?
- Quels sont les différents problèmes ou défis entre la commune centrale, la banlieue, et le village dans la gestion d'établissement scolaire ?
- Est-ce qu'il y a des politiques scolaires particuliers de la ville ?
- Comment les périmètres scolaires fonctionnent-ils à Lyon ?
Chaque périmètre scolaire regroupe à peu près la même taille de territoire ?
- Il existe les différents « statuts » des écoles publiques : l'école ordinaire, l'école en RAR, RRS ou DIF. Comment les différentes gestions entre elles par la commune ?
Comment les statuts de l'école en RAR, RRS ou DIF influencent-ils la préférence des parents ?
- Combien le taux d'élèves aux écoles privées ? Comment la tendance ?
- Dans les périmètres scolaires, comment la mixité sociale est-elle évaluée ?
Pourquoi la ville ne considère pas la mixité sociale dans les périmètres scolaires ? A cause de la concentration des logements sociaux ?
Comment on arrive à la mixité sociale à l'école ?
- Est-ce qu'il y a d'autre chose pris en compte dans les périmètres scolaires ? (L'image d'une école, le « statut » des écoles : RAR, RRS, DIF et les écoles privées). Comment sont-ils évalués ?
- La ville essaie pour que l'école publique soit pour tout le monde. Qu'est-ce ca veut dire ?
- Combien le taux des parents d'élèves qui demandent la dérogation ? Comment la tendance ?
- Parmi des quartiers, est-ce qu'il y a d'écart au niveau de :
 - La préférence des parents ?
 - L'occupation des classes ?
 - Le nombre des écoles privées ?Comment les périmètres scolaires surmontent l'écart parmi des quartiers ?
- En France, l'éducation devient de plus en plus un des facteurs qui détermine l'endroit où les parents choisissent de vivre (Halls, 1967). Qu'en pensez-vous ?
- Est-ce que et comment les périmètres des écoles liés aux périmètres des collèges ?

- L'école primaire est l'équipement collectif résidentiel qui anime un quartier (Merlin et Choay, 1988). Quels sont les « rôles » d'une école pour un quartier ?
L'école est importante à part d'activité pédagogique. Comment une fermeture d'une école se passe ?
- Dans la gestion d'établissement scolaire, quels sont les défis que la commune va en faire face par rapport au développement et la croissance de la ville ?
- En ce moment, comment la capacité totale des écoles à Lyon comparée aux besoins ?
Comment ça se passe dans les quartiers où il manque de classe pour en ce moment ?

Entretien B

La Direction de l'Education de la ville de Vaulx-en-Velin

- Quelles sont des caractéristiques particulières de la commune de Vaulx-en-Velin qui influencent la gestion d'établissement scolaire ?
- Quels sont les défis entre les différents territoires de la ville (le centre ville et le village) dans la gestion d'établissement scolaire ?
- Pourquoi les écoles d'un quartier ont mieux réputation ?
Comment la commune anticipe l'écart parmi des écoles des quartiers ?
- La carte scolaire : Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les éléments dedans ? (les périmètres scolaires, la prévision d'élèves...)
Quel est la différence celle-ci pour les collèges et les lycées ?
- Les périmètres scolaires, comment sont-ils structurés/définis ?
Est-ce que l'image d'une école, le « statut » des écoles et la préférence des parents sont pris en compte dans les périmètres scolaires ?
Les périmètres scolaires sont redéfinis régulièrement. Quand on a besoin d'une redéfinition ? Quels sont les paramètres ?
- La prévision démographique d'élèves : Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les éléments dedans ?
- Quelle est l'importance des périmètres scolaires notamment pour la commune ?
- Est-ce qu'il s'agit d'autre chose à part une sectorisation de l'école ? par exemple la répartition géographique des responsabilités des services de l'éducation...
- Combien le taux des parents d'élèves qui respectent les périmètres scolaires ? Comment la tendance ?
En général, à quelle raison les parents demandent la dérogation ?
- Sur les medias, la « réponse négatif » à la carte scolaire pour le collège et le lycée est plus forte que celle-ci pour l'école primaire. Qu'en pensez-vous ?
Est-ce qu'il y a de différent importance de la carte scolaire pour l'école primaire par rapport au collège ou le lycée ? Pourquoi ?

- Est-ce qu'il y a de politique scolaire particulière de la mairie ? Comment fonctionne-t-il ?
- En France, l'éducation devient de plus en plus un des facteurs qui détermine l'endroit où les parents choisissent de vivre (Halls, 1967). Qu'en pensez-vous ?
- L'école primaire est l'équipement collectif résidentiel qui anime un quartier (Merlin et Choay, 1988). Quels sont les « rôles » d'une école pour un quartier ou une commune ?
- Il existe à Vaulx-en-Velin des écoles qui sont à proximité comme l'école Makarenko et Lorca. Comment deux écoles peuvent être si proches ?
Comment les périmètres scolaires fonctionnent-ils par rapport à la proximité des deux écoles ?
Est-ce qu'il y avait du mélange ou de la considération à mélanger des périmètres scolaires notamment pour améliorer la mixité sociale dans deux écoles à proximité ?
- Dans la gestion d'établissement scolaire, quels sont les défis que la commune va en faire face par rapport au développement et la croissance de la ville ?

Entretien C

L'Inspection Académique du Rhône

- Il existe les différents « statuts » des écoles primaires : l'école public et l'école privé, l'école ordinaire, l'école en RAR (Réseaux Ambition Réussite), RRS (Réseaux de Réussite Scolaire) et DIF. Comment les différentes gestions entre elles par l'IA ?
Est-ce qu'il y a de différent standard ?
Quel sont les différents entre RAR, RRS, et DIF ? Qui les décide ?
- Les trois types des établissements de l'éducation prioritaire (EP1, EP2 et EP3), comment fonctionnent-ils ?
- En France, l'enseignement primaire public occupe une large place : plus de 90% des établissements scolaires en 2007 [DEPP, 2007], en plus c'est gratuit et laïque. A quelle raison les parents choisissent une école privée ?
- Comment les statuts de l'école en RAR, RRS et DIF influencent-ils la préférence des parents d'élèves ?
- Quels sont les différents problèmes / défis entre les écoles dans la commune centrale, la banlieue, et le village dans la gestion d'établissement scolaire ?
- Quels sont les éléments de la prévision démographique d'élèves pris en compte ? (à part l'évolution démographique de la ville) Les périmètres scolaires ? La préférence des parents ?
- En général, quelles sont les différentes caractéristiques entre la commune centrale, la banlieue, et le village au niveau du nombre d'élèves ?
- Quand on a besoin de construire une nouvelle école ?

- Tout le monde est d'accord avec l'ouverture de classe, mais pas avec la fermeture. Est-ce qu'il y a une autre considération (à part le taux d'encadrement) pour décider d'ouverture/fermeture de classe/école ? (Par exemple l'implication pour la commune, le quartier...)
- Pourquoi on a besoin d'une sectorisation scolaire ?
- Sur les medias, la « réponse négatif » à la carte scolaire pour le collège et le lycée est plus forte que celle-ci pour l'école primaire. Qu'en pensez-vous ?
- Le MEN assouplit la carte scolaire dès la rentrée scolaire 2007. Est-ce que les périmètres scolaires de l'école primaire y compris ? Comment l'assouplissement fonctionne-t-il ?
- En France, l'éducation devient de plus en plus un des facteurs qui détermine l'endroit où les parents choisissent de vivre (Halls, 1967). Qu'en pensez-vous ?
- L'école primaire est l'équipement collectif résidentiel qui anime un quartier (Merlin et Choay, 1988). Quels sont les rôles d'une école pour un quartier ou une commune ?
- Dans la gestion d'établissement scolaire, quels sont les défis que l'académie va en faire face par rapport au développement et la croissance du département ?

LAMPIRAN C
PRESENTASI SIDANG TESIS
DALAM BAHASA PERANCIS

Les enjeux de la gestion des établissements scolaires au niveau de la commune

Étude dans les communes de Lyon et de Vaulx-en-Velin

Angga Nugraha HAFIIZ
VA Aménagement et Politique Urbains

Vaulx-en-Velin, le 4 septembre 2008

Plan de présentation



- 1 Présentation générale
- 2 Problématique
- 3 Méthodologie
- 4 Analyse
- 5 Critique
- 6 Leçon de l'étude

Présentation générale

Système éducatif en France : Les principes fondamentaux

- L'instruction est **obligatoire**. L'organisation de l'enseignement public **gratuit** et **laïque** à tous les degrés est un devoir de l'État.
- L'État respecte la **liberté** de choix et l'**égal** accès des enfants à l'éducation.

Gestion des établissements scolaires : Les acteurs et leur compétence

- **L'État** : les enseignants et les programmes d'enseignement.
- **Le Rectorat** et l'**Inspection Académique** : Représentants de l'État au niveau de l'académie et départemental.
- **La commune** : les établissements scolaires (constructions, reconstructions, fonctionnement, et entretien) et les personnels non enseignants.
- **Les parents d'élèves** : le droit de choisir et d'obtenir ce qu'ils pensent être la « meilleure » éducation.

Problématique

- Comment **la ville joue-t-elle son rôle** en tant qu'acteur de l'éducation ?
- Comment **la commune française gère-t-elle les établissements scolaires** sur son territoire ? Quels sont les outils ? Comment fonctionnent-ils ?
- **Les spécificités d'une commune** influencent-elles la gestion des écoles primaires ? Et si oui, dans quelle mesure ?
- Comment **les principes fondamentaux sont-ils réalisés** dans la gestion des établissements scolaires ?



Méthodologie



Étude bibliographique et revue de presse

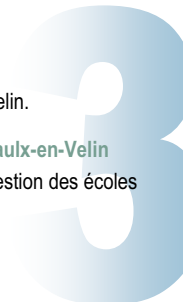
- Comprendre le système éducatif en France, l'école primaire et la commune en général.
- Familiariser avec le Français et le vocabulaire spécifique du travail.
- Préparer un plan, les entretiens et « se plonger » dans la problématique.

Entretiens semi directifs

- L'Inspection Académique du Rhône
- La Direction de l'Éducation de la ville de Lyon
- La Direction de l'Éducation de la ville de Vaulx-en-Velin.

Stage au Service Logistique Scolaire de la ville de Vaulx-en-Velin

- Comprendre les tâches du service, les outils de la gestion des écoles et de quelle façon ils fonctionnent.



Analyse

Lyon et Vaulx-en-Velin : Une commune centrale et une banlieue « en difficulté »

- Lyon et Vaulx-en-Velin sont deux communes différentes choisies en fonction de leur **diversité** (ville centrale et banlieue) afin de comprendre si et comment **les différentes caractéristiques** jouent sur la gestion des établissements scolaires.
- Les données **socio économiques** montrent que Vaulx-en-Velin indique une grande proportion de logements sociaux (51%), un taux de chômage presque double de Lyon, et 56% du niveau de vie de Lyon.



- **Culturellement**, les ménages à Vaulx-en-Velin sont plus divers avec 21% d'étrangers et 28% de migrants.
- Basé sur la condition sociale, économiques et culturelle de la population, toutes les écoles à Vaulx-en-Velin sont classées (au niveau national) dans **les quartiers « difficiles »** contre 23% à Lyon.

Analyse

Commune : « l'acteur clé » de l'éducation

- L'État et l'Inspection Académique respectent **l'égalité** entre des communes dans la gestion des établissements scolaires.
- C'est la commune qui fait en sorte que ses écoles « **se distinguent** » de celles des autres communes. Cela dépend de son **choix politique** et de ses **capacités financières**.
- La mairie de Vaulx-en-Velin voit le besoin de garde d'enfants car certains parents n'ont pas les moyens de payer une nourrice ou doivent travailler toute la journée. Alors, comme un choix politique, la commune a commencé à **accueillir les enfants de 2 à 3 ans**.
- Cependant, Lyon prend une décision plus « prestige » : elle a **son propre standard** pour que chaque école lyonnaise soit bien équipée.

Analyse

Périmètres scolaires : Le contournement

- La mairie trouve qu'il y a beaucoup de **demandes de dérogation** pour certaines écoles.
- Les familles qui ne peuvent entrer dans **les critères restrictifs** de dérogation parfois créent une fausse domiciliation, déménagent avant la rentrée scolaire ou ils choisissent l'école privée.

Est-ce que le « statut » des écoles cause l'écart entre les écoles ?

- Le « statut » l'école en RAR, RRS ou DIF est décidé au niveau national ou départemental avec un but de **corriger les effets des inégalités** sociales, économiques et culturelles aux quartiers considérés comme « difficiles ».
- L'école « en difficulté » n'existe pas qu'à la banlieue ou au village, mais **aussi dans la commune centrale**.
- De plus, basé sur le taux d'échec scolaire, **ce n'est pas vrai** que les écoles qui se trouvent dans un quartier « difficile » sont moins bonnes que les écoles ordinaires [IA du Rhône].
- En fait, on ne peut pas voir (vraiment) l'écart entre les écoles primaires car **il n'y a pas d'examen** comme celui au collège ou au lycée...
- Alors, c'est les parents qui ont **leur propre définition** d'une « bonne » école et ce n'est pas (simplement) « statut » de l'école qui crée son image dans les pensées des parents.

Critique

Distribution des classes

- Les capacités totales des écoles primaires sont beaucoup plus grandes que les besoins, mais elles ne sont **pas bien distribuées** dans la ville.
- Les capacités des écoles de ZUP ou du quartier où il y a avait de grands ensembles sont **beaucoup plus grandes**, jusqu'à double des besoins, et parfois les écoles sont très proches l'une de l'autre.
- Par contre, sur les quartiers où sont construit les logements neufs en ce moment, il n'y a **pas assez des classes**...
- Pourquoi ? Cela est lié à l'origine de la création de ces secteurs géographiques où il y avait **une importante population scolarisable**. Au cours du temps, la pyramide des âges de la commune **rééquilibre** et la France connaît **une baisse de la natalité**.

Est-ce que dans cette condition, le périmètre scolaire peut-il « optimiser » les capacités des écoles ?

- Les périmètres scolaires peuvent être modifiés, mais convaincre certains parents d'élèves d'accepter **un changement de périmètres** afin que certains élèves soient intégrés à l'autre secteur n'est pas une décision facile ... De plus, pour l'école primaire, il y a des contraintes : **la proximité**.
- En conséquence, **la construction et la fermeture** de classe (ou d'école) sont probablement le meilleur choix même si la décision va conduire à plusieurs conséquences.

Critique

Mixité sociale à l'école

- *Comme un outil de gestion et de répartition sur le territoire, les périmètres scolaires sont devenus la principale mesure censée garantir la mixité sociale à l'école* [Oberti, 2006]. Mais en réalité, c'est **un choix de la mairie** de prendre en compte ou non la mixité sociale dans les périmètres scolaires.
- A la différence de Vaulx-en-Velin, pour la ville de Lyon, la mixité sociale **n'est pas encore objective** des périmètres scolaires.

Est-ce qu'on aurait besoin d'aboutir à la mixité sociale aux écoles lyonnaise ?

- Lyon est socialement **plus favorable** et culturellement **moins diverse** que les autres communes rhodaniennes avec les « bonnes » écoles partout.
- De plus, certains logements sociaux à Lyon se concentrent dans un quartier qui donne **une limitation géographique** (la distance) pour scolariser les enfants ailleurs. Par exemple la Duchère au 9^e arr.
- La mixité sociale à l'école n'est pas une question facile. Il s'agit d'**une décision politique/ idéologique** pour la mairie en tant que responsable de politique de la ville.

Critique

Égal accès et droit de choisir et d'obtenir la « meilleure » éducation

- Le Code de l'Éducation affirme que l'État garantit l'**égal accès** de l'enfant à l'instruction et respecte le droit des parents **à choisir** et **à obtenir** la « meilleure » éducation pour leur enfant.

Est-ce que chaque enfant a la même chance et chaque famille a le même droit ?

- En réalité, choisir et obtenir la « meilleure » éducation sont **(plus) possibles** pour eux qui sont **les plus favorisés**, qui habitent dans le « meilleur » quartier, qui n'ont pas de problèmes de transport quotidien et de restriction entre l'horaire de travail et le garde d'enfants.
- Les capacités financiers, le domicile, et le travail des parents conditionnent l'éducation des enfants. L'égal accès ne veut pas effectivement dire **la même chance** à la « meilleure » éducation...



Leçons de l'étude

Rôle de l'école

- Une école française n'est pas qu'un endroit où les enfants apprennent.
- *L'école est l'équipement collectif résidentiel qui anime un quartier* [Merlin et Choay, 1988]. Elle est un centre d'activités pour les enfants, un endroit de rencontre pour les parents et un lieu de réunion pour les acteurs concernés par l'éducation.
- *L'éducation devient aussi de plus en plus un des facteurs qui détermine l'endroit où les parents choisissent de vivre* [Halls, 1967].
- Il y a **une relation proche** entre l'école, le quartier et la commune. L'école fait partie de la vie quotidienne d'un quartier. Et en principe, c'est l'intérêt de la commune pour que toutes les écoles sur son territoire soient « bonnes ».

Prévision d'élèves et périmètres scolaires : Les outils

- Dans la gestion des écoles, la commune française utilise des outils **précis** (école par école), **clairs** (standardisé et applicable), **égales** (pour tous les habitants) et aussi « **autoritaires** » qui le facilite à garantir **la place pour tous les enfants** de la commune.
- En France, l'enseignement primaire public occupe **une large place** : plus de 90% des établissements scolaires [DEPP, 2007]. Cette condition facilite aussi la mise en place de ces outils de gestion.

Leçons de l'étude

Préférence des parents d'élèves

- Quand il n'y a pas de restriction du coût (parce que les écoles publiques en France sont gratuites), **quel facteur qui influence les parents** d'élèves à choisir une école ?
- Ce n'est pas (seulement) **le facteurs physiques** : bon établissement, bon équipement et la distance, mais plutôt **l'image d'une quartier** qui compte énormément la réputation d'une école parce que le quartier détermine aussi « le milieu/la société » dans une école.

École : Un équipement durable

- Les changements dynamiques de **population** ainsi que les changements dans le **système éducatif** sont à présent continus et inévitables.
- La population et le système éducatif évoluent plus vite que la durée de vie des établissements comme on peut voir aux écoles de ZUP. Basé sur l'expérience française, l'établissement scolaire est un **investissement à long terme** et leur implantation prête **un ensemble de conséquences** pratiques, financières et aussi sociales.

Leçons de l'étude

Les défis de gestion des établissements scolaires

- **Les problèmes principales** du développement de l'éducation en Indonésie selon le ministre de l'éducation nationale sont : l'accessibilité et la qualité de l'éducation, ainsi que l'organisation et l'*accountability* de la gestion de l'éducation.

En quoi on doit penser pour faire le meilleur ?

Outil de gestion

- En Indonésie, il n'y a pas des outils aussi **précis et clairs** que la prévision d'élèves et les périmètres scolaires en France. Sans ces outils, il sera plus compliqué pour la mairie à garantir la place dans une école pour chaque enfant de la ville.
- De plus, **la proportion des écoles primaires publiques** en Indonésie est plus basse (environ 75%) donc cela pose un autre défi dans la gestion des écoles.

Leçons de l'étude

Les défis de gestion des établissements scolaires

En quoi on doit penser pour faire le meilleur ?

École du quartier

- L'école en Indonésie est plutôt limitée à **un lieu pédagogique**. Certaines sont même fermées hors de temps scolaires.
- Pourtant, les activités sportives ou culturelles à l'école peuvent créer **des liens sociaux**. Les habitants vont sentir que l'école fait **partie du quartier**... Donc ils vont « garder » leur école.



Leçons de l'étude

Les défis de gestion des établissements scolaires

En quoi on doit penser pour faire le meilleur ?

École gratuite

- Le droit de choisir et d'obtenir la « meilleure » éducation est vraiment déterminé par la **condition socio économique** de famille.
- Même si l'**éducation primaire publique gratuite** fait partie des objectifs de la ville, mais la plupart des écoles publiques sont encore payantes.
- En général, le plus une école est préférée par les parents d'élèves, le coût devient plus cher... Donc, **le coût** est encore la barrière la plus grande pour accéder la (meilleure) éducation primaire.

Discrimination positive pour école rurale

- Il y a un **écart régional** entre la ville et le village ainsi que le territoire à l'ouest et à l'est en Indonésie au niveau de l'éducation.
- D'un part, la ville offre un **grand choix des « bonnes » écoles**, un des facteurs qui attire de plus en plus des familles du village pour venir. D'autre part, le village ne peut pas fournir une « meilleure » éducation car la qualité des établissements scolaires dépend beaucoup à **ses capacités financières**.

Leçons de l'étude

Les défis de gestion des établissements scolaires

En quoi on doit penser pour faire le meilleur ?

Capacités gestionnaires de la collectivité locale

- Avant la réforme politique en 1999, la gestion de l'éducation en Indonésie a été **(très) centralisée**. C'était l'État qui a décidé et s'est occupé les programmes, les enseignants, et les établissements scolaires...
- Il y avait de **représentants de l'État** même jusqu'au niveau du district donc la collectivité locale a eu fonction de **mettre en place les politiques éducatifs** déterminés au niveau national.
- La loi de décentralisation de 2002 affirme que l'État **partage une partie de ses compétences** en domaine l'éducation primaire avec la collectivité locale. L'État ne s'occupe que maintenant le « **cœur** » de **l'éducation national** : le standard, le programme, et les enseignants.
- Le **changement rapide** qui est aussi **en train d'évoluer** pose des problèmes pour certaines collectivités qui depuis dizaines années sont « seulement » **les réalisateurs** des politiques nationaux. De plus, on ne peut pas nier qu'il manque également des **capacités gestionnaires** chez collectivités locales...

Terima Kasih

Merci
de votre attention

LAMPIRAN D LEMBAR EVALUASI TESIS



Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat
Bidang Pendidikan
Unit Pelayanan Administratif

Tanggal Ujian Tesis : 4 September 2008
Judul Tesis : **Les enjeux de la gestion des établissements scolaires au
niveau de la commune**

A. NILAI YANG DIBERIKAN OLEH JURI

Nama Mahasiswa : **Angga Nugraha Hafiiz**
Bidang Studi : APU (Perencanaan dan Kebijakan Kota)
Nilai : TB/*Trés Bien* (Sangat Baik)

B. APRESIASI JURI

Pemahaman yang baik mengenai problematika dan sistem di Perancis.
Kemampuan yang baik dalam redaksi tesis dan presentasi. Menguasai topik
dan memiliki kemampuan analisis yang sangat baik. Mahasiswa sangat
mandiri dalam bekerja.

Tim Penguji

Presiden Juri : **Yves Perrodin**
Direktur LSE (Laboratorium Ilmu Lingkungan)
Pembimbing Tesis : **Laurette Wittnerr**
Laboratorium RIVES (Riset Interdisipliner Kota,
Ruang, dan Masyarakat)
Ahli : **Géraldine Geoffroy**
CERTU (Pusat Studi Nasional Jaringan,
Transportasi, Tata Kota, dan Konstruksi Publik)

Fiche d'évaluation - Travail de Fin d'Etudes

Date de soutenance : le 4 septembre 2008

TITRE DU T.F.E. (éventuellement après reformulation par le Jury)

Les enjeux de la gestion des établissements scolaires au niveau de la commune



a) NOTE ATTRIBUEE PAR LE JURY :

NOM et PRENOM de l'élève : HAFIZ Angga
 VA : APU
 NOTE : TB

note C = nouvelle fiche à remplir après rendu travail complémentaire

b) APPRECIATION GENERALE figure sur le relevé de notes : 4 lignes maximum

Bonne compréhension de la problématique et du système français. Bonne capacité de rédaction et de présentation. Maîtrise des sujets et excellente capacité d'analyse. Elève très autonome dans son travail.

c) APPRECIATION COMPLEMENTAIRE EVENTUELLE (pour la D.E.)

[Empty box for additional appreciation]

d) DIFFUSION

exemplaire TFE (du Président) à remettre + fiche d'évaluation + CD room au Service administratif (Lionel Royer)

Diffusion numérique du TFE sur le catalogue de l'ENTPE
 OU
 Diffusion numérique à l'extérieur de l'ENTPE
 OU
Confidentiel
 Durée de confidentialité fixée à 2 ans, sinon préciser :
 Personne ou organisme habilité à lever la confidentialité :

Compléter : nom prénom et signature

Le Président : PERRODIN Yley	Le Maître de TFE:
---------------------------------	-------------------

L'expert : G. GEDFRAY	L'expert :	L'expert :
--------------------------	------------	------------

rue Maurice Audin
 69518 Vaulx-en-Velin
 Cedex
 téléphone :
 +33 (0)4 72 04 70 70
 télécopie :
 +33 (0)4 72 04 62 54
 mél :
 de.entpe@equipement.gov.fr
 http://www.entpe.fr